

INTERAKSI ANTARSUKU BANGSA DALAM MASYARAKAT MAJEMUK

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1989**

**Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan**

INTERAKSI ANTARSUKU BANGSA DALAM MASYARAKAT MAJEMUK

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
SEJARAH NASIONAL**

JAKARTA

1989

SAMBUATAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan Penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Juni 1989.

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN ..	v
DAFTAR ISI	vii
HUBUNGAN ANTAR KELOMPOK ETNIS BEBERAPA KERANGKA TEORITIS DALAM KASUS KOTA MEDAN (Oleh: Dr. Usman Pelly)	1
PEMBARUAN DI KALIMANTAN BARAT PROSPEK DAN PERSPEKTIF SEJARAHNYA (Oleh : Herlem Siahaan)	17
KOTA DAN PEMBAURAN SOSIO-KULTURAL DALAM SEJARAH INDONESIA (Oleh : Djoko Surjo)	40
KERAJAAN IHA BERINTERAKSI DENGAN SEGALA SUKU DI ABAD XVII DALAM PERJUANGAN NASIO- NAL (Oleh : Drs. Frans Hitipeuw)	51
PEMUKIMAN SEBAGAI SALAH SATU SARANA KO- MUNIKASI ANTARSUKU BANGSA DAN PEMBAURAN (Oleh : Drs. Saunsi)	108
INTERAKSI ANTARA GOA – BIMA – MANGGARAI (+ 1600 – + 1930) (Oleh : Helius Sjamsuddin)	124

INTEGRASI : SEKADAR TINJAUAN KEBAHASAN DI SUMATERA UTARA (Oleh : T.A. Ridwan)	139
CORAK INTERAKSI ANTERETNIS DALAM BIDANG EKONOMI DI MEDAN : KASUS TERSISIHNIA ORANG MELAYU (Oleh : Nani Rusmini)	162
BUDAYA MASYARAKAT JAWA DAN PERANANNYA DALAM INTEGRASI ETNIK DI SUMATERA UTARA (Oleh : Darmono)	189
MASALAH ASIMILASI ANTARA PELAJAR PRIBUMI DAN NON PRIBUMI PADA BEBERAPA SMTA DI KO- DYA MEDAN (Oleh : Sulaiman Lubis Dharmansyah).	198

HUBUNGAN ANTAR KELOMPOK ETNIS BEBERAPA KERANGKA TEORITIS DALAM KASUS KOTA MEDAN

(Oleh: Dr. Usman Pelly)

I

Ada tiga faktor yang menentukan corak hubungan antar-kelompok etnis dalam suatu masyarakat majemuk: (1) kekuasaan (power); (2) persepsi (perception); dan (3) tujuan (purpose). Kekuatan merupakan faktor yang utama (primary) dalam menentukan situasi hubungan antaretnis tersebut, sedangkan faktor-faktor lainnya ditentukan oleh faktor utama ini. Kelompok etnis yang memegang kekuasaan disebut juga sebagai *dominan-group* atau kelompok dominan yang banyak menentukan "aturan permainan" dalam masyarakat majemuk tersebut. Tetapi, kelompok ini sangat jarang merasa sebagai salah satu dari sekian kelompok etnis masyarakat di mana mereka berada (Royce - 1982:3).

Kekuasaan kelompok dominan berasal dari kombinasi: (1) kekuatan material; (2) ideologi, dan (2) hak historis. Kekuatan material meliputi kekuatan ekonomis dan demografis, yaitu penguasaan sumber hidup dan jumlah manusia (man-power). Sedangkan faktor ideologi bertalian dengan tingkat bu-

daya (civilisasi) yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu. Hak historis menentukan status kelompok etnis tersebut apakah dia dianggap sebagai tuan rumah (host pop), yang disebut juga sebagai penduduk asli, atau pendatang (migrant) dalam suatu wilayah permukiman tertentu. Paralel dengan preposisi di atas ini, Bruner (1969) seorang antropologi Amerika, berdasarkan penelitiannya di Indonesia mengungkapkan bahwa ada tiga faktor yang menentukan suatu kelompok etnis itu berstatus dominan, yaitu: (1) faktor demografis; (2) politis dan (3) budaya lokal (setempat). Dalam hubungan ini Bruner mengemukakan salah satu contoh umpamanya kelompok etnis Sunda di Kota Bandung menduduki status dominan (unggul) terhadap kelompok etnis lainnya, karena secara kombinasi orang Sunda memiliki keunggulan dalam ketiga faktor di atas dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya di kota itu. Berbeda dengan situasi di Kota Medan, karena di kota ini dari belasan kelompok etnis tidak satu pun yang secara kombinasi memiliki keunggulan di bidang demografis, politis dan budaya lokal.

Kelompok dominan dalam masyarakat majemuk mencoba berfungsi sebagai "wadah pembauran" (melting pot) kelompok-kelompok etnis lainnya. Sebagai kelompok-kelompok minoritas (sub-ordinate-group), mereka menggunakan budaya kelompok etnis yang dominan (super ordinate-group) sebagai orientasi akulturasi dalam kehidupan bersama. Dalam pergaulan sehari-hari tampak, bahwa kelompok-kelompok minoritas ini berusaha menggunakan bahasa, etiket, pakaian, sistem budaya, tipikal makanan kelompok dominan. Sebab itu, kelompok etnis yang dominan ini berfungsi juga sebagai kelompok budaya yang dominan (dominant culture). Demikianlah umpamanya orang Batak yang tinggal di Kota Bandung berusaha untuk mempelajari bahasa Sunda, bertingkah laku lebih halus seperti orang Sunda, membiasakan diri dengan makanan tipekal Sunda, agar dapat diterima dalam pergaulan masyarakat majemuk Kota Bandung tersebut. Tentu saja dalam kehidupan intern kelompok-kelompok etnis minoritas ini masih banyak yang mempertahankan

kesetiaan primordial mereka, seperti penggunaan bahasa daerah masing-masing, adat dan kebiasaan lainnya yang dianggap perlu untuk mempertahankan identitas etnis mereka. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa di kalangan generasi kedua atau ketiga dari kelompok ini terdapat semacam "erosi" (menipisnya) pengetahuan mereka terhadap "isi" dari kesetiaan primordial tersebut, walaupun keadaan ini bukan otomatis berarti "pengingkaran" terhadap identitas etnis mereka. Pengalaman di negara-negara multi etnis lainnya seperti di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kelompok-kelompok etnis di luar kelompok dominan White Anglo Saxon Protestant seperti Itali, Polandia, Yahudi atau Irish, walaupun dalam kehidupan nasional telah mempergunakan budaya WASP tetapi kebanggaan mereka terhadap identitas kelompok asal mereka tetap tinggi. Hal ini dapat terlihat dalam kehidupan intern sehari-hari, dari makanan tipekal yang dipilih, sistem kepercayaan (gereja) sampai kepada kecenderungan dalam memilih pasangan hidup (Glazer & Moynihan 1963). Tetapi, kebudayaan WASP telah berfungsi sebagai "wadah pembauran" secara nasional. Bahasa Inggris dialek Anglo Saxon, etiket tata pergaulan dan aspek-aspek kebudayaan lainnya telah dijadikan tolok ukur (standard) di sekolah-sekolah untuk diajarkan kepada generasi baru, maka secara nasional generasi tersebut tumbuh bersama kebudayaan WASP. Walaupun kemudian kebudayaan WASP tersebut telah tumbuh dan berkembang sendiri, yang akhirnya berbeda jauh dari kebudayaan Anglo Saxon asli yang sekarang masih didapati di Eropa. Sama halnya dengan perkembangan bahasa Indonesia yang dahulunya berasal dari bahasa Melayu. Sekarang bahasa Indonesia telah tumbuh sebagai bahasa yang berdiri sendiri, jauh berbeda dari bahasa Melayu yang dahulu menjadi sumber utamanya.

II

Di masa kolonial orientasi akulturasi nasional kelompok-kelompok etnis Indonesia, termasuk kelompok Cina perantaraan ialah kepada kebudayaan Belanda. Tidak ada satu kelompok et-

nis bangsa Indonesia pun saat itu yang dapat menjadikan dirinya sebagai kelompok dominan, sebab kekuasaan politis dan ekonomis tidak berada di tangan bumiputera, sebab itu pula orang Cina di Pulau Jawa, umpamanya dalam proses akulturasinya tidak berorientasi kepada kebudayaan Jawa, karena kebudayaan Jawa pada saat itu berada dalam status inferior.

Dalam kaitan ini, asumsi yang menyatakan bahwa keenganan kelompok Cina perantauan berasimilasi dengan bangsa Indonesia semata-mata disebabkan karena hendak memonopoli bidang akupasi tertentu (perdagangan) tidaklah sepenuhnya benar. Skinner (1960) dalam penelitian komparatifnya mengenai masyarakat Cina perantauan di Thailand dan Jawa telah mempertanyakan masalah ini. Mengapa orang Cina di Thailand dapat menjadi orang Thai sedang di Jawa orang Cina tetap menjadi Cina, sedangkan di kedua negeri itu orang Cina perantauan sama-sama memonopoli perdagangan anak negeri? Skinner akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa di samping faktor lain yang memperlancar asimilasi orang Cina ke dalam Thai, seperti struktur etnik Thai yang terbuka, "anyone who used a Thai name, spoke the language and behave as Thai was accepted as Thai, regardless of ancestry (Skinner 1960:89), sedangkan struktur etnik Jawa tertutup (hanya dapat dianggap orang Jawa kalau dilahirkan oleh kedua atau salah seorang orang Jawa asli), ialah perbedaan kedudukan antara orang Thai dan Jawa pada abad ke-18 dan ke-19 itu, dianggap oleh Skinner sangat menentukan lancarnya proses asimilasi orang Cina ke dalam bangsa Thai dari pada orang Cina ke dalam kelompok etnis Jawa. Orang Thai sebagai kelompok dominan mempunyai konfidensi etnis yang kuat. Kepercayaan atau konfidensi ini didasarkan kepada kedudukan politis mereka sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, sedangkan di pihak lain orang Jawa ketika itu mengidap perasaan rendah diri (inferior) karena berada dalam penjajahan asing.

Seperti telah dikemukakan, pendatang (kelompok minoritas) dalam proses akulturalisasinya selalu berorientasi kepada

budaya yang **dominan**. Sebab itu arena akulturasi orang Cina perantauan di Thailand adalah kaum elite Thai sendiri, sedangkan di Jawa pada waktu itu adalah orang Belanda. Setelah kemerdekaan, kelompok-kelompok etnis di Indonesia termasuk orang Jawa telah menjadi tuan di tanah airnya sendiri. **Perubahan** situasi ini telah turut mengubah orientasi akulturasi orang Cina perantauan di Indonesia. Ternyata di Jawa dewasa ini orang-orang Cina perantauan, terutama generasi kedua yang lahir di Jawa telah lebih banyak berorientasi ke kelompok elite (priayi) Jawa, terutama tampak dalam pemakaian nama, bahasa, dan sikap atau tingkah laku dalam pergaulan.

Kelompok-kelompok etnis dalam masyarakat majemuk di perkotaan sesudah kemerdekaan sebagian besar berorientasi kepada kelompok yang berstatus sebagai "dominant culture", seperti Semarang, Jogja, Surabaya kepada kelompok etnis Jawa, Makasar kepada Bugis, Bandung kepada Sunda. Keadaan ini disebabkan karena "kebudayaan nasional" sebagai wadah asimilasi yang ideal untuk seluruh kelompok etnis belum ada (kecuali bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan).

Kedudukan Kota Medan setelah kemerdekaan memperlihatkan suatu gambaran masyarakat majemuk yang agak unit. Keadaan unit ini disebabkan karena tajamnya pergeseran beberapa kelompok etnis dari masa sebelum dan sesudah kemerdekaan.

Tabel di bawah ini memperlihatkan pergeseran tersebut.

Kelompok Etnis	Persentasi (%)	
	1930 ⁺)	1980 ⁺⁺)
1. Jawa	24,36	29,41
2. Minangkabau	7,29	10,93
3. Melayu	7,06	8,57
4. Mandailing/Tapsel	6,42	11,91
5. Sunda	1,57	1,90
6. Batak Toba	1,07	14,11

7. Karo	0,18	3,99
8. Cina	35,63	12,84
9. Asia Timur Asing	4,87	—
10. Eropa	5,60	—
11. Suku Batak Lainnya	1,55	1,09
12. Suku Indon. Lainnya	3,82 = 100%	3,04 = 100%

+) N = 76.584 (Milone 1964)

++) N = 1.294.132 (Pelly 1982)

Dari tabel di atas dapat dilihat beberapa perbedaan presentasi kelompok etnis yang mencolok. Kelompok etnis Toba setelah kemerdekaan bertambah hampir 14 kali lipat dibandingkan dengan tahun 1930, begitu juga dengan kelompok etnis Karo bertambah lebih dari 22 kali lipat, Mandailing/Tapsen bertambah hampir 2 kali lipat. Sedangkan orang Cina dari segi presentasi menjadi berkurang hampir dua pertiganya. Kelompok-kelompok etnis lainnya bertambah tidak begitu mencolok, sedangkan orang Eropa setelah kemerdekaan hampir seluruhnya meninggalkan Medan, terutama setelah terjadi pengambilalihan perkebunan-perkebunan maskapai Belanda dan perusahaan asing lainnya.

Pada masa kolonial kelompok suku Melayu telah berusaha untuk menempati kedudukan dominan dalam masyarakat Kota Medan terutama untuk kelompok suku-suku Indonesia, dengan menempatkan kebudayaan Islam Melayu (Melayu-Moslem Culture), sebagai basis ideologi "pembauran" (melting pot). Masuk Melayu pada saat itu berarti juga masuk Islam. Banyak anggota-anggota kelompok etnis pendatang seperti dari Mandailing, Karo dan Sipirok melakukan asimilasi dengan kelompok Melayu. Mereka hidup sebagai orang Melayu, berbahasa Melayu sehari-hari, memakai adat resam Melayu dan menanggalkan pemakaian marga Batak. Tetapi setelah kemerdekaan kekuasaan politis kesultanan Melayu berakhir. Ternyata dewasa ini banyak

di antara mereka yang telah menjadi Melayu tadi kembali memakai marganya, menelusuri silsilah keluarganya ke gunung. Proses ini dikenal sebagai proses re-tribalism. Setiap kelompok etnis di Kota Medan membutuhkan usaha untuk mengekspresikan identitas etnisnya lewat berbagai media, idiom dan simbol-simbol kehidupan budaya. Pengungkapan identitas ini sering dilakukan secara aktif dan sadar, seperti memakai pakaian adat, perhiasan, bahasa dan tingkah laku tertentu, agar orang dari kelompok etnis lainnya mengetahui identitas dan batas-batas (boundaries) antara mereka dan orang lain, (Barth 1969). Ekspresi identitas etnis ini dibutuhkan pertama untuk dikenal oleh kelompok lainnya dan dengan demikian kelompok lain tersebut dapat menempatkan posisi kelompok tersebut di tengah-tengah kehidupan masyarakat majemuk, minimal sebagai tanda bahwa mereka masih "survive". Kedua, untuk mengukuhkan kesetiaan anggota kelompok etnis tersebut. Ekspresi identitas etnis ini juga dapat berfungsi ganda, pertama memberikan pengukuhan dari luar (maintenance from out-side) dan pengukuhan dari dalam (maintenance from inside). Dalam acara perkawinan umpamanya, masing-masing kelompok etnis mencoba memperlihatkan identitas etnisnya masing-masing..

Upacara adat yang megah adalah salah satu contoh ekspresi ini. Dengan demikian mereka ingin mendapatkan tempat di tengah masyarakat majemuk di mana mereka berada dan sekaligus pula dapat mempersatukan kesetiaan anggota kelompok etnis itu.

III

Di atas telah disinggung mengenai faktor kekuasaan yang telah melahirkan penjenjangan kelompok etnis dalam masyarakat majemuk yaitu menjadi kelompok etnis dominan dan non-dominan. Kekuasaan ternyata tidaklah langgeng dimiliki oleh satu kelompok etnis, seperti terlihat dalam kasus suku Melayu sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pada bagian lain kelak kita akan melihat bahwa faktor kekuasaan ini dapat dinegosia-

sikan antara dua atau tiga kelompok etnis, berdasarkan kepentingan atau interes yang sedang berkembang.

Faktor kedua yang harus diperhatikan dalam hubungan antaretnis ialah faktor persepsi (pengamatan), baik dalam jangka waktu yang panjang maupun dalam situasi yang insidental. Masalahnya adalah, bagaimana kelompok etnis yang satu mengamati dan memandang kelompok lainnya. Bagaimana mereka memandang masyarakat secara keseluruhan. Kita sangat jarang mengamati sesuatu tanpa bias (kesalahan), karena orang mengamati sesuatu seperti apa yang diinginkanya dan membutuhkan mata terhadap apa yang tidak diharapkannya. Persepsi antar-etnis mengambil bentuk konkrit dalam simbol (lambang-lambang) dan stereotypes (generasi yang keliru). Simbol dan stereotype terbentuk dalam pergaulan antaretnis, jadi bukan hasil dari proses satu arah, dan bukan pula terjadi dalam situasi yang terisolasi. Persepsi suatu kelompok terhadap kelompok lain mungkin cocok pada suatu situasi, tetapi mungkin pula bertentangan pada situasi yang lain, karena kedua manifestasi pengamatan ini (lambang dan stereotype) dasar operasinya bergerak antara mitos dan realitas.

Kelompok etnis tertentu dapat dikenal dari lambang-lambang yang dipergunakannya, seperti bentuk rumah, pakaian, warna yang digemari, dialek, gaya hidup dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari. Lambang-lambang ini merupakan "cap" (hallmark) suatu kelompok etnis yang diwariskan berketurunan. Dari sisi lain orang juga memberikan "cap" kepada suatu kelompok etnis dalam bentuk stereotype, seperti "cap" *pancilok* kepada orang Minangkabau, *kasar* kepada orang Batak, *lamban* kepada orang Melayu, *penipu* kepada orang Aceh, *tukang berkelahi* kepada orang Bugis, penurut kepada orang Jawa dan lain-lain. Stereotype ini akan berubah berangsur-angsur apabila kontak antaretnis telah lebih banyak didasarkan kepada realita daripada mitos. Tetapi, dia akan muncul kembali apabila terjadi ketegangan atau konflik. Kedua belah pihak akan mendasarkan kesalahan pihak lain kepada stereotype di atas.

Akhirnya bentuk hubungan antaretnis ditentukan pula oleh *tujuan* dan *interests* (kepentingan-kepentingan) tertentu dari masing-masing kelompok etnis. Kelompok etnis, sebagaimana juga kelas, merupakan kelompok interes (interest group). Pengamatan ahli-ahli ilmu sosial dewasa ini banyak membuktikan adanya kecendrungan menyatunya kelas dan kelompok etnis, karena kedua kategori sosiologis ini merupakan kelompok interes (Cohen 1974, 1976, Glazer & Moynihan 1976, Parsons '76). Usaha untuk meraih kepentingan kelompok etnis ini dalam masyarakat majemuk banyak dilakukan atas nama kepentingan lain, seperti kepentingan agama, pembangunan daerah, golongan ekonomi tertentu dan lain-lain. Usaha untuk menutupi kepentingan etnis dalam masyarakat majemuk diperlukan agar tidak kelihatan atau dituduh "exclusive", "extrem", "daerahisme" dan lain-lain, atau juga agar tidak terjadi bentrokan langsung dengan kepentingan kelompok etnis lainnya atau dengan kepentingan nasional.

Kepentingan Muhammadiyah di tahun 1930-1940-an, banyak yang identik dengan kepentingan kaum perantau Minangkabau di Kota Medan. Bukan hanya karena Muhammadiyah didirikan oleh pedagang-pedagang Minangkabau (walaupun Ketuanya H.R. Mohd. Said seorang Sipirok bermarga Harahap), dan sebagian besar anggota-anggotanya adalah orang Minangkabau, tetapi karena orang Minangkabau telah menggunakan Muhammadiyah sebagai "mekanisme adaptasi" dengan kehidupan urbanisme perkotaan. Kelompok-kelompok pengajian Muhammadiyah hampir seluruhnya merupakan kelompok-kelompok pertemuan orang Minangkabau. Sebab itu pula tidak jarang kalau pengajian diberikan oleh untaz (yang juga kebanyakan orang Minang) dalam bahasa Minang. Pengajian-pengajian tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat membicarakan masalah agama, tetapi di luar itu, orang-orang sekampung itu membicarakan masalah perantauan, menyampaikan pesan ninik mamak dari ranah Minang, atau memungut derma untuk pembangunan kampung halaman. Demikian juga dengan organisasi

Washlijah yang lahir tahun 1930, yaitu tiga tahun setelah kelahiran Muhammadiyah di Kota Medan (Mu'thi 1957, Sulaiman 1958). Washlijah pada masa kolonial telah berfungsi ganda pula untuk orang-orang Mandailing, sama seperti Muhammadiyah untuk orang-orang Mandailing, sama seperti Muhammadiyah untuk orang-orang Minangkabau. Demikian juga dengan HKBP (Huria Kristen Batak Protestan). Gereja-gereja HKBP telah turut serta mengorganisir perantauan dan permukiman kelompok etnis Batak Toba di Kota Medan atau di pedalaman Sumatera Timur (Cunningham 1958, Bruner 1959). Apabila bertemu tiga orang yang masing-masing mewakili Muhammadiyah, Washlijah dan HKBP, maka hampir dapat dipastikan bahwa ketiga orang itu terdiri dari seorang orang Minangkabau, seorang Mandailing dan seorang lagi Batak Toba. Modus pembicaraan ketiga tokoh ini pun dapat diramalkan akan berpola kepada tiga kepentingan dari ketiga kelompok etnis tadi. Dalam bentuk yang lebih modern kelompok-kelompok ini (sesudah kemerdekaan) berafiliasi kepada partai-partai politik. Tindak dan prilaku partai-partai politik ini pun tidak dapat menghindar diri dari perjuangan kepentingan dan interes kelompok-kelompok etnis yang berafiliasi kepadanya (Liddle 1970). Tetapi, karena kegiatan organisasi agama yang didirikan oleh kelompok-kelompok etnis ini didasarkan kepada agama yang universal (Islam dan Kristen), maka keanggotaannya pun kemudian tidak dapat dimonopoli oleh satu kelompok etnis. Batas-batas etnis akhirnya mengabur, identitas agama dan aliran menjadi lebih mengkristal. Demikianlah Muhammadiyah, Washlijah atau HKBP berangsur-angsur meninggalkan perjuangan dan kepentingan satu kelompok etnis secara exclusive, dan karena kemajemukan keanggotaannya, dewasa ini telah pula berperan sebagai 'wadah pembauran' (melting pot).

IV

Hubungan antaretnis di Kota Medan ternyata lebih kompleks jika dibandingkan dengan kota-kota lain seperti Bandung,

Surabaya, Semarang. Yogya atau Ujung Pandang. Pertama, seperti telah disinggung di atas, karena ketiadaan kelompok etnis yang dapat berperan sebagai "dominant culture", seperti kedudukan orang Sunda di Bandung, Jawa di Semarang atau Yogya, Bugis di Ujung Pandang. Keabsenan kelompok dominan seharusnya segera melahirkan modus budaya baru yaitu "budaya nasional" sebagai suatu "wadah pembauran" ke arah integrasi nasional. Tetapi, jalan ke arah itu tampak masih cukup panjang dan berliku-liku. Masalahnya bukan hanya karena konsep kebudayaan nasional yang berdasarkan Pancasila itu belum banyak merekat kehidupan bersama di Kota Medan, tetapi juga disebabkan karena masih adanya keinginan sementara kelompok etnis untuk maju menduduki posisi "dominant culture". Keadaan ini menimbulkan perpacuan yang sengit antarkelompok etnis. Konflik-konflik terjadi dari mulai stasiun bus, shopping centres, kantor-kantor pemerintah dan swasta, sampai ke universitas. Konflik-konflik ini bila ditelusuri tidak terlepas dari benturan-benturan kepentingan kelompok-kelompok etnis untuk memperebutkan "posisi dominan" dalam berbagai lapangan hidup tersebut. Koalisi-koalisi kekuatan antarkelompok etnis sering terlihat dalam arena pertarungan ini, dan kadang-kadang hampir merupakan "dagang sapi" dalam pembentukan kabinet di zaman orde lama. Dalam setiap penyusunan tim kerja umpanya yang dipentingkan terutama adalah representasi kekuatan kelompok-kelompok etnis dalam team tersebut, bukan refleksi dari kemampuan tokoh atau pribadi-pribadi yang ditempatkan.

Perpacuan ini menimbulkan suasana kehidupan yang segregatif. Di samping itu, pola permukiman Kota Medan dan akupasi tidak banyak membantu mencairkan kehidupan yang segregatif ini. Kelompok etnis Cina mendiami lokasi-lokasi pusat perdangan dan pusat kota, dengan toko-toko bertingkat yang sekaligus dijadikan rumah kediaman. Berdampingan dengan pusat-pusat permukiman ini berkelompok-kelompok pula permukiman orang Minangkabau dalam bentuk fisik yang sa-

ngat berbeda. Kedua kelompok etnis ini sering didapati hidup dalam permukiman yang "berdampingan", seperti Kampung Lok A Yok dan Sukaramai, Sei Rengas dan Kota Maksom, karena kedua kelompok ini punya preferensi yang sama di bidang akupasi yaitu di bidang basaar ekonomi. Demikianlah dapat ditemukan pula kampung-kampung Mandailing di Bandar Selamat, Sungai Mati dan Silaas, orang Karo di Padang Bulan, Titi Rante dan Simalingkar, kampung Jawa di Siti Rejo, Sukaramai I, Sei Agus dan Helvetia, dan kampung Batak Toba di Sei Putih Barat dan Timur serta di Teladan (Pelly 1982: 393-403).

Demikianlah konflik antar kampung di Kota Medan dapat menjadi konflik antarkelompok etnis, begitu juga konflik antar kelompok etnis, begitu juga konflik antarakupasi, seperti baca dengan supir motor/Sudaco dapat merembet menjadi konflik antarkelompok etnis. Karena tukang beca sebagian besar adalah orang Minangkabau sedang supir motor orang Karo atau Batak Toba. Padahal, semua lapangan hidup itu satu sama lain dari segi makro saling bergantung. Dari perspektif ini sebenarnya diperlukan suatu kebijaksanaan permukiman dan akupasi baru. Umpamanya, pusat-pusat kota sebagai sentra perdagangan sebaiknya dinyatakan sebagai *daerah bebas permukiman*, dengan demikian permukiman orang-orang Cina akan tersebar ke pinggir kota, dan sekaligus di samping terjadi pemekaran kota, interaksi antara orang Cina dengan penduduk kota lainnya frekuensinya akan semakin tinggi. Secara teoritis, kontak antarkelompok etnis yang semakin tinggi frekuensinya akan turut melunturkan kecemburuan sosial dan berbagai stereotype di antara sesama mereka.

V

Hubungan antarkelompok etnis di Kota Medan tidak direkat dan diwarnai oleh salah satu kelompok dominan yang dapat berfungsi sebagai "dominant culture". Kelompok dominant culture ini dapat memainkan peranan sebagai wadah pembauran

(melting pot) ke arah integrasi nasional. Kebudayaan nasional sebagai suatu konsep ideal yang berlandaskan Pancasila masih dalam proses perwujudan, dan belum siap tersedia guna dijadikan arena akulturasi (seperti kebudayaan WASP di Amerika Serikat). Kolonialisme Belanda dapat dianggap sebagai suatu kecelakaan yang telah memutus kesinambungan pengembangan kebudayaan nasional.

Untuk Kota Medan, proses integrasi nasional akan langsung mencari wujud akhir, yaitu kebudayaan nasional, tanpa melalui perantara yaitu proses pengintegrasian ke salah satu budaya kelompok etnis yang dominan. Proses ini mungkin akan lebih sulit dan mungkin pula memakan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan proses integrasi yang diperlukan untuk masyarakat majemuk di Kota Bandung, Semarang, Surabaya atau Ujung Pandang, di mana terdapat kelompok etnis yang berstatus sebagai "dominant-culture".

Tetapi, proses integrasi nasional masyarakat majemuk Kota Medan dapat pula berjalan lebih cepat dan lebih mudah dari kota-kota tersebut di atas, antara lain apabila semua pranata sosial "dinasionalisir" (tidak dibiarkan untuk dimonopoli oleh salah satu kelompok etnis). Terutama pranata sosial di bidang pendidikan, unit-unit perkantoran pemerintah, pranata ekonomi dan lapangan hidup (akupasi). Hal ini tentu menghendaki kebijaksanaan pemerintah untuk menjalankan suatu *management of conflict and disagreement* di antara kelompok-kelompok etnis yang satu sama lain merasa "sama besar", agar perpacuan di antara mereka dapat melahirkan dinamika yang dibutuhkan untuk pembangunan bangsa dan integrasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Barth, Frederik

- 1969 Ethnic Group and Boundaries. Boston: The Little Brown and Company

Brunr, Edward M

- 1959 Kondship Organization Among the Urban Batak of Sumatra, Transaction of the New York Academy of Sciences 22 (2). 118-125

Cohen, Abner

- 1974 "The Lesson of Ethnicity, Introduction," In Urban Ethnicity, A. Cohen (ed) ASA Monograph Berkeley: Tavistock Publication
- 1976 Two Demensional Man: An Essay on the Anthropology of Power and Symbolism in Complex Society, Berkeley: University of California Press

Cunningham, Clark E

- 1958 The Postwar Migration of Toba Batak to East Sumatra, Cultural Series, Yale University Southeast Asia Studies

Glazer, Nathan and Daniel P. Moynihan

- 1963 Beyond the Meliting Pot, The massachusetts Institute Technology Press, Cambridge

- 1976 "Why Ethnicity?," In Annual Editions Reading in Sociology, Sluice Dock: The Dushkin Publishing Group
- Liddle, William
- 1970 Ethnicity, Party, and National Integration: an Indonesian Case Study, New Haven: Yale University Press
- Milone, P.D.
- 1964 Contemporary Migration in Indonesia, Asian Survey 4 (8):1000-1012
- Mu'thi, Abdul
- 1957 Tiga puluh tahun Muhammadiyah Daerah Sumatera Timur, Medan: Panitia 30 tahun Muhammadiyah
- Parsons, Talcott
- 1975 "Some Theoretical Considerations on the Nature and Trends of Change of Ethnicity," In Ethnicity: Theory and Experience, N. Glazer & D.P. Moynihan (eds), Cambridge: Harvard University Press
- Pelly, Usman
- 1980 Ethnicity and Religious Movement: A Study of Urban Adaptation Among the Mandailing Batak and Minangkabau, and their Role in Washliyah and Muhammadiyah in East Sumatra, M.A. Thesis Dept. of Anthropology University of Illinois at Urbana-Champaign
- 1982 Urban Migration and Adaptation in Indonesia: A Case Study of Minangkabau and Mandailing Batak Migrants in Medan, North Sumatra, a Ph.D. Dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign
- Pelly, Usman dan Ratna R. dkk
- 1983 Sejarah Sosial Kota Medan, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, IDSN
- Royce, Anna Peterseon
- 1982 Ethnic Identity: Strategies of Diversity, Bloomington: Indiana University Press

Skinner, William G

1960. "Change and Persistence in Chinese Culture Overseas: A Comparison of Thailand and Java, Journal of the Southeast Asia Society 16

Sulaiman, Nukman

1955 Seperempat Abad Al-Djamiatul Washliyah, Medan: Panitya Seperempat Abad Washliyah.—

PEMBAURAN DI KALIMANTAN BARAT PROSPEK DAN PERSPEKTIF SEJARAHNYA

(Oleh: Harlem Siahaan)

Masalah Minoritas Cina di Indonesia

Kebanyakan bahkan hampir semua negara di Asia Tenggara menghadapi masalah minoritas Cina. Latarbelakang kausalnya terutama adalah: (1) hubungan historis berupa migrasi, kontak-kontak politik dan perdagangan yang terjalin sejak lama antara Asia Tenggara dengan Tiongkok, (2) jumlah dan persentasi penduduk Cina perantauan yang relatif cukup tinggi,¹ (3) posisi dan dominasi ekonomis etnis Cina atas kelompok bumiputera, serta (4) pengelompokan dan status sosial Cina yang khas.

Masalah Cina ini semakin memuncak lagi pada masa post kolonial ketika negara-negara yang merdeka di Asia Tenggara termasuk Indonesia menemukan harga dirinya, dan merasa perlu merealisasikan nasionalisme dan integrasi nasional bukan saja dalam bidang politik, tetapi juga sosial, ekonomi dan kebudayaan. Namun, seperti ternyata dan disadari kemudian, masalahnya sangat *crucial*, kompleks dan berdimensi banyak.

Sementara integrasi politik relatif jauh lebih mudah dan sederhana penyelesaiannya, integrasi sosial ekonomi kebudayaan lebih sulit dan lebih lama realisasinya. Di beberapa lokalitas bahkan tampak gejala sebaliknya, yaitu proses yang tidak secara konsisten menuju integrasi, tetapi perpecahan dan diskriminasi. Bukan semakin mewujudkan pembauran, tetapi pengelompokan dan eksklusivisme rasial. Kecenderungan ke arah pembentukan *imperum in imperio* seperti di Siam dan Malaya,² atau pembentukan komunitas tersendiri di daerah dan distrik-distrik Cina (Pecinan) di kota-kota Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia yang memperkuat dualisme sosial ekonomi dan kultural, serta meningkatkan dan mengaktualisasikan masalah Cina ke permukaan.

Para ahli mencoba melihat dan mengamati gejala ini dari sudut pandangan yang berbeda. Dicoba dicari faktor-faktor yang melatarbelakangi dan meletupkan sentimen-sentimen, gerakan dan aksi-aksi anti Cina atau *sinophobia*. Wertheim,³ umpamanya menyebut bahwa konflik sosial serta diskriminasi rasial antara bumiputera dengan Cina merupakan konsekuensi kompetisi ekonomis. Dengan mengemukakan paralelisme posisi Cina yang disebut sebagai "*the trading minoritas*" di Asia Tenggara dengan posisi Yahudi di Eropa Tengah dan Timur, disimpulkannya bahwa kompetisi ekonomi *lies at the root of the tensions , is at the root of our problems*

Skinner mengutarakan pendapat yang hampir sama dengan bahasa yang berbeda ketika dia menyebutkan bahwa posisi ekonomi Cina yang dominan di atas bumiputeralah yang melahirkan nasionalisme ekonomi di Indonesia, yang semakin meluap ketika bumiputera mengambil alih kekuasaan politik dari tangan pemerintah kolonial (asing).⁴ Dominasi ekonomi itu pula yang dianggap oleh Somers mempunyai hubungan kausal dengan ketegangan sosial. Lebih tegas Somers menyatakan bahwa: " *for the economic problems have lain at the base of much Indonesia resentment of the Chinese*".⁵ Peranan ekonomi yang khas dan dominan inilah yang melatarbelakangi

penamaan "*a mighty wholesale dealer*" oleh Coen terhadap golongan Cina⁶, ataupun "*a pest to the country*" oleh Raffles.⁷ Dengan membeberkan tingkah laku, penindasan, monopoli ekonomi, keuletan, kerajinan dan kemanfaatan Cina, Raffles juga meramalkan golongan Cina sebagai bangsa yang berbahaya yang merusak perdagangan Melayu. Lagi pula kecenderungan Cina perantauan untuk menggunakan bahasa dan cara hidup yang khas, serta pembentukan komunitas dan masyarakat tersendiri (terpisah) di mana pun mereka bermukim, telah memberi kepada para imigran keunggulan bersaing dan keuntungan dalam rangka monopoli dagang. Dalam kerangka inilah Raffles memandang perlu merangsang semangat usaha di kalangan bumiputera Melayu dan juga Jawa.⁸

Interpretasi dan generalisasi mengenai hubungan Cina dengan bumiputera dengan demikian berintikan asumsi tentang superioritas dan dominasi ekonomis serta eksklusivisme rasial (sosial). Bahwa keduanya – sejauh hal itu memang faktual – tentulah menjadi faktor utama yang merintang dan memperlambat pembauran dan integrasi nasional tidaklah perlu dipersoalkan. Namun masih perlu dicek seberapa jauh segi-segi sosial ekonomis merupakan *determinants*, dan bagaimana kedua faktor itu beroperasi sehingga menjadi faktor yang kausal dan menentukan hubungan Cina–Bumiputera, masih perlu dijelaskan. Oleh karena salah satu cara memberi *explanation* adalah dengan jalan mencari dan mengemukakan hubungan atau relasi (*relationship*), maka masalah ini akan lebih mudah didekati melalui penjelasan historis. Artinya perlulah mengembalikan permasalahan serta melihatnya dalam kerangka sejarah dengan memperhitungkan *setting* tempat, dan dimensi waktu.

Masalah Cina di Kalimantan Barat

Hampir dua ratus tahun sejak abad ke-18 sejarah Kalimantan Barat diwarnai oleh aksi dan konflik yang rasialistis. Konflik menjadi gejala yang selalu berulang dengan interval kurang lebih 25 tahun. Secara kronologis adalah :

1. Tahun 1770 konflik Cina – Dayak.
2. Tahun 1795–1796 konflik intern kongsi (Cina) di Sambas.
3. Tahun 1818 konflik Cina–Sultan Sambas.
4. Tahun 1819 insiden candu yang melibatkan Cina, sultan dan Belanda.
5. Tahun 1823 pemberontakan Cina (Kongsi Thaikong).
6. Tahun 1824 pemberontakan Cina Mampawah dan Pontianak.
7. Tahun 1850–1856 pemberontakan Thaikong dan Sam Thiao.
8. Tahun 1884 pembubaran kongsi oleh Belanda.
9. Tahun 1914–1916 pemberontakan Sam Tian.
10. Tahun 1942–1944 aksi-aksi anti Jepang Sie Min Hui.
11. Tahun 1944–1945 kerusuhan-kerusuhan imigran Cina.
12. Tahun 1965 gerakan-gerakan PARAKU PGRS.
13. Tahun 1967 aksi-aksi anti Cina oleh Dayak.

Kronologi ini, dan sebenarnya masih terdapat sejumlah kerusuhan kecil-kecil lainnya menunjukkan betapa imigran dan kongsi Cina selalu terlibat, dilibatkan, atau terkena akibat setiap kali konflik atau kerusuhan yang menjadi gejala latent dan traumatis itu meletus.

Konflik dan kerusuhan yang selalu berulang ini tidak boleh tidak menunjukkan betapa lebih dari pada di lokalitas lain di Indonesia, masalah dan faktor Cina di Kalimantan Barat tentu-lah merupakan masalah yang menonjol. Malahan dapat dikatakan faktor Cina sudah menjadi semacam determinan yang formatif dan spesifik. Jumlah besar buku, artikel, dan karangan serta laporan-laporan yang menyangkut Cina yang dibuat oleh orang Belanda dan asing lainnya menjadi bukti nyata.

Bahwa faktor Cina menjadi determinan yang formatif dan spesifik terutama diakibatkan oleh kekhususan berikut. *Pertama* menyangkut faktor geografis yaitu fakta bahwa imigran praktis menemukan daerah baru yang hampir kosong sehingga memung-

kinkan mereka terlibat dalam kegiatan agraris dan menguasai pertambangan serta mendirikan perkampungan.

Kedua menyangkut jumlah dan persentasi Cina yang cukup tinggi. Tahun 1770 buruh tambang Cina sekitar 10.000 orang, tahun 1810 32.000 orang, tahun 1829 32.925 orang, dan 41.400 orang pada tahun 1900. Sejak pergantian abad ini baik jumlah maupun persentasinya, selalu meningkat secara konstan.⁹

Angka-angka menunjukkan pertambahan imigran Cina yang jauh lebih pesat dibanding penduduk bumiputera (Dayak, Melayu, Bugis, Jawa dan lain-lain). Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa dalam tempo 65 tahun sejak 1905 imigran Cina meningkat 700 persen sedang bumiputera bertambah kurang dari 400 persen, atau dari 10,75 persen (1905) menjadi 17,40 persen pada tahun 1970.

Tabel I
Pertambahan Penduduk di Kalimantan Barat 1905–1970¹⁰

Tahun	Pribumi	Cina	Total Penduduk	% Cina
1905	400.322	48.348	450.929	10,75
1920	535.516	67.787	605.402	11,20
1930	689.585	107.998	802.447	12,50
1950	1.000.000	175.000	1.175.000	14,90
1960	1.328.413	252.621	1.581.034	16,00
1970	1.564.688	329.433	1.895.907	17,40

Ketiga menyangkut komposisi dan distribusi penduduk yang menunjukkan adanya konsentrasi Cina di daerah pesisir terutama di Sambas dan Pontianak. Oleh karena itu daerah ini lazim disebut "Distrik Cina". Dari tabel di bawah ini tampak bahwa makin jauh ke pedalaman semakin jarang penduduk Cina. Ini merupakan indikator kecenderungan mengelompok, ser-

ta pertimbangan strategis-ekonomis yang kuat di kalangan imigran Cina dalam hal menentukan tempat domisili.

Tabel II
Penyebaran Penduduk Menurut Kewarganegaraan¹¹

Daerah	W.N. Indonesia			W.N. Asing		Total
	Pribumi	Cina	Lain-lain	Cina	Lain-lain	
Sambas	325.726	68.842	199	85.263	396	464.359
Pontianak ¹²	401.942	64.013	432	75.552	1.069	648.339
Sanggau	243.999	10.597	97	8.241	79	263.326
Ketapang	190.673	4.108	71	4.023	74	195.283
Sintang	203.211	2.902	71	2.000	58	209.499
Kapuas Hulu	99.137	2.578	42	665	43	104.329

Tendensi konsentrasi di daerah pesisir serta mengelompok di perkampungan dalam wilayah yang termasuk "Distrik Cina" juga dilatarbelakangi faktor keamanan. Pada prinsipnya, semakin jauh ke pedalaman semakin kurang terjamin keamanan. Jaminan keamanan dan hukum yang maksimal diperoleh di kota-kota pusat administrasi dan pemerintahan seperti Pontianak, Mempawah, Singkawang, dan Sambas. Dengan demikian payung hukum dan politik tampaknya ikut mempertegas pengelompokan rasial.

Keempat menyangkut faktor emas (dan intan) yang ditemukan dalam jumlah besar. Paling tidak sejak medio abad ke-18 Kalimantan Barat sudah terkenal sebagai *goudlanden* yang memikat orang-orang Eropa, dan juga Cina. *Thaiko* Lo Fong Phak yang tiba di Kalimantan Barat tahun 1772, dan mendirikan Kongsi Lanfong pada tahun 1777, serta mengepalainya hingga kematiannya pada tahun 1795 juga tertarik pada emas ini, sekalipun kongsi yang didirikannya semula bergerak di bidang pertanian. Kedatangan buruh tambang emas Cina yang ternyata lebih berhasil dibandingkan buruh-buruh Dayak men-

dorong para sultan merasa perlu memanfaatkan mereka. Corak dan arah sejarah Kalimantan Barat bahkan sangat ditentukan oleh faktor emas: pertambangan, perburuhan, perdagangan, dan perpajakannya. Konflik rasial antara sultan, imigran Cina, dan Dayak hampir selalu berkaitan dengan emas, serta perbedaan kepentingan pihak yang terlibat. Belanda sendiri pun akhirnya menyadari kesempatan mendapatkan keuntungan dan berusaha mendapat monopoli.

Otonomi, Kongsi dan Suffisiensi

Keempat keunikan yaitu: (1) kegiatan agraris, (2) jumlah dan persentasi Cina yang semakin meningkat, (3) komposisi dan penyebaran penduduk Cina serta, (4) faktor emas dan intan; merupakan empat faktor utama yang saling terkait dalam memberi corak khas atau karakteristik sejarah lokal, serta sejarah kolonisasi Cina di Kalimantan Barat. Kegiatan agraris dan pertambangan Cina saling melengkapi dan isi mengisi. Pola perekonomian yang dipilih dimaksud untuk mendukung eksistensi dan suffisiensi imigran. Pilihan ini di satu pihak memperkuat tendensi mengelompok, serta di pihak lain merongrong peranan ekonomis bumiputera dan sultan sebagai penyedia bahan kebutuhan pokok para imigran, terlebih-lebih karena:¹³

... Chinese learned to exist without foreign productions, restrictions prevented them from purchasing or importing any single thing which not absolutely necessary, live as economically as possible, collect money as speedly as possible

Keterlibatan dalam sektor agraria ini bertolakbelakang dengan larangan penguasa Melayu. Namun imigran yang sebagian besar terdiri atas orang-orang Hakka dan Hoklo yang di negeri asal adalah orang-orang petani, dan pekerja keras yang rajin itu menganggapnya penting demi eksistensinya.

Corak pedesaan Cina di Kalimantan Barat, serta kongsi-kongsi yang kemudian didirikan haruslah dipahami dari sudut kepentingan dan latar belakang ini. Penetapan koloni dan lokasi desa pertama-tama harus mempertimbangkan segi-segi praktis.

Sama seperti di Tiongkok di mana sungai berfungsi dan berperan lebih penting sebagai sarana lalu lintas perdagangan dan transportasi dibandingkan dengan jalan darat maka desa pada umumnya didirikan di dekat sungai di daerah pesisir. Penyebaran koloni dan imigran Cina menunjukkan bahwa jumlah dan kepadatannya semakin kecil semakin jauh ke pedalaman. Imigran Cina terkonsentrasi di Distrik Sambas, Mempawah dan Pontianak.

Di daerah-daerah inilah para imigran mencoba mendirikan perkampungan yang khas Cina, yang sekaligus menjadi satuan sosial-ekonomi, sebagai satu komunitas yang produktif. Kespesifikasi dari *village community* atau *dorpsgemeenschap* Cina ini terutama terletak pada otonominya. Secara sosial ekonomi, dan juga politik, desa-desa ini relatif berdiri sendiri atau hanya dengan campur tangan pusat kekuasaan politik yang sangat minimal.¹⁴ Selalu diusahakan mendapat dan mempertahankan kebebasan mengurus, mengatur serta menyelesaikan seluruh masalah intern pedesaan tanpa atau dengan campur tangan yang sangat minimal dari kekuatan luar. Bentuk otonomi seperti lazim diterapkan di Tiongkok inilah yang dicoba diterapkan oleh imigran Cina di Kalimantan Barat. Jikalau di Tiongkok kekuatan luar yang dimaksud adalah kekaisaran, di Kalimantan Barat kekuatan asing itu berupa kesultanan dan kelak juga Belanda. Usaha mewujudkan *dorpsautonomie*¹⁵ semaksimal-maksimalnya memperoleh landasan yang kokoh oleh karena perkampungan Cina bukanlah pertama-tama merupakan kesatuan dengan basis teritorial, tetapi kesatuan berdasar keturunan, klan atau hubungan darah. Diidentifikasi sebagai "*independent self governing communities*"¹⁶ atau *self governing unit* atau *the "public family"* atau *kung-chia*.¹⁷ Tcheng ki Tong mengemukakan bahwa negeri dan orang Cina adalah de vereeniging van al de familien des lands, wier leden elkaar onderling moeten helpen en samen leven,¹⁸ Dengan dan di dalam *setting* serta konteks sosial ekonomi inilah desa dan kongsi Cina harus dipahami.

Sebagai organisasi fungsional permanen, kongsi berdimensi sosial ekonomis, dimaksudkan untuk menampung, mengatur, serta menyelesaikan masalah umum (*public affairs*), dan masalah perseorangan, demi kepentingan bersama. Ini terutama menyangkut irigasi, *self defence*, perselisihan, gotong royong, saling membantu, kerja sama, rekreasi, dan soal keagamaan.¹⁹

Dengan demikian kongsi berfungsi ganda: ke dalam mengusahakan kesejahteraan bersama, ke luar mempertahankan kepentingan dan eksistensi grup. Ke dalam lebih menitikberatkan aspek sosial ekonomi, ke luar lebih mengutamakan segi keamanan dan pertahanan, semacam *defence mechanism*. Dwi fungsi kongsi ini tersirat dalam istilah *socio economic organizational framework* (Jackson),²⁰ *commanditaire vennootschappen* (Vleming)²¹, *autonomous political and economic unit* (Cator)²², *federasi sange* (Simbolon)²³, *een republikeinsche gedachte* (Meyer)²⁴, atau *petty republican communities* (Purcell).²⁵

Berbagai istilah yang digunakan untuk menyebut kongsi ini menunjukkan motif, tujuan, dan corak kongsi yang sosial ekonomis, federatif otonomis, serta juga politis. Ada kesamaan fungsi desa dan kongsi, malahan kongsi dapat dikatakan sebagai usaha institusionalisasi dan maksimisasi fungsi desa berdasar kekerabatan dan solidaritas sosial, untuk menjamin pencapaian tujuan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

Bentuknya yang masih sederhana (primitif), ikhtiar untuk *self supporting (self-sufficient)*, solidaritas berdasar kekerabatan, *defence mechanism*, kepemimpinan dan eksistensinya menunjukkan bahwa kongsi dan desa-desa Cina di Kalimantan Barat ini mirip dengan konsep kultur primitif Ibnu Khaldun.²⁶

Etnisitas dan Masyarakat Majemuk

Sebenarnya dilihat secara keseluruhan, imigran Cina hanyalah salah satu unsur saja yang menghasilkan pluraritas dan diversitas masyarakat. Berbagai kategori pengelompokan timbul berdasar ras, agama, dan etnisitas yang seringkali saling tumpang-

tindih dan paralel. Hal ini mengakibatkan semakin dipertegasnya batas-batas solidaritas dan pengelompokan. Tiga pengelompokan utama adalah:²⁷ (1) suku dan penduduk Dayak yang merupakan kelompok kekerabatan yang tinggal di desa-desa pedalaman, (2) imigran Cina yang bermukim di daerah pesisir, serta (3) komunitas Melayu-Jawa-Bugis dan Arab. Jikalau komunitas Dayak sebagai sebuah komunitas yang tertutup yang lebih menonjolkan kesamaan dan kesatuan sosio-kultural, pemukiman Cina lebih merupakan satuan sosio-ekonomis, sedang Komunitas Melayu yang pada umumnya penganut agama Islam lebih menekankan aspek sosio-historis sebagai kelompok kelas penguasa.²⁸

Kontak, percampuran dan pembauran etnis berada pada taraf minimal. Faktor "keterpaksaan" lebih menonjol daripada unsur kesukarelaan. Hubungan timbal-balik dan kerjasama terjadi sejauh hal itu merupakan keharusan yang tidak mungkin dihindarkan dalam rangka kepentingan individu dan kelompok. Pada masa permulaan umpamanya terjadi juga perkawinan campur atau amalgamasi antara Cina-Dayak. Ini terutama diakibatkan faktor kekurangan wanita di kalangan imigran. Kawin campur ini semakin berkurang ketika pertambahan penduduk (wanita) melalui imigrasi dan kelahiran terjadi.²⁹

Orang Dayak yang seringkali diartikan orang pedalaman dan digelari "anak sungai" sebenarnya terdiri atas berbagai suku yang lebih kecil. Oleh karena desakan para pendatang Melayu dan Cina mereka semakin bergeser ke pedalaman, sehingga semakin tergantung dan terisolasi. Sekalipun dari segi jumlah kelompok ini merupakan mayoritas (143.026 jiwa dari total 250.075) penduduk pada tahun 1830), namun peranan dan posisi ekonomis dan politisnya semakin *peripheral*. Pekerjaan utama adalah bertani atau berladang berpindah-pindah. Setelah menebas hutan serta menanaminya untuk beberapa musim hingga kesuburan tanah tidak memadai, mereka pindah mencari lokasi baru. Lokasi yang terutama mereka pilih adalah di tempat-tempat pinggiran sungai. Namun ada pula yang memilih

tinggal di daerah yang lebih jauh di hutan-hutan dan pebukitan. Sistem pertanian yang dikembangkan hanya mampu mendukung taraf ekonomi subsisten, dan tentu saja tidak tercapai pertumbuhan ekonomi yang mendukung pencapaian otonomi ekonomi, sebaliknya semakin memperkuat ketergantungan ekonomi pada pihak Melayu dan kemudian Cina.

Para pengunjung seringkali menggambarkan keadaan umum Dayak sebagai miskin, tidak berpakaian, suka mengembara, dan jarang muncul hingga di tepi pantai (laut). Van Berckel menyebut kelompok ini sebagai pemakan buaya. Kaum wanita hanya memakai pakaian dari daun, sedang laki-laki memakai cawat. Pencahariannya adalah memungut hasil hutan, dan religinya masih anamistis dinamistis. Kampung dan rumah panjang Dayak sangat sederhana. Alat angkutan pun demikian, hanya berupa *jeloa* yang terbuat dari sebatang kayu yang dilobanginya menjadi sebuah perahu.

Karena Dayak mengelompok dalam unit-unit kecil, maka sebenarnya lingkup pergaulan sehari-hari adalah kampung. Bila di tingkat suku kepemimpinan dipegang oleh para *domong* ataupun *demang* yang menjadi pejabat penghubung antara Dayak dengan raja maka kepala kampung disebut *pesirah* yang menjadi tangan kanan para *domong*. Pada waktu perang masih dipilih para pemimpin yang disebut *singa* atau *macan*.³⁰

Sementara itu di antara kelompok pendatang—Bugis, Jawa, Arab, dan Cina orang-orang Melayu merupakan jumlah terbesar. Pada tahun 1830 jumlahnya sudah 71.085 dari 250.075 penduduk Kalimantan Barat.

Veth melukiskan pendatang Melayu sebagai pemukim-pemukim yang tinggal di pesisir, tepi, atau muara-muara sungai. Mereka berasal dari Johor, Riau dan daratan Sumatera. Koloni atau pangkalan-pangkalan mereka akhirnya berkembang menjadi pusat-pusat kerajaan. Kedudukan mereka di pesisir, dan muara-muara sungai menjadi sumber supremasi Melayu di atas Dayak. Letaknya yang strategis karena dekat ke Malaka, Selat

Malaka, Laut Cina Selatan, dan Singapura, menguntungkan profesi dagang Melayu. Kedudukan inilah yang memberi keunggulan Melayu sehingga hampir seluruh kerajaan pedalaman tergantung ataupun menjadi satelit kerajaan-kerajaan Melayu pesisir. Orang Dayak menyebut mereka orang laut atau orang *larat*. Hubungan kurang serasi antara Dayak-Melayu tercermin dalam ungkapan yang berbunyi: "Daya' salah, daya' mati. Laut salah daja' mati."³¹

Gambaran mengenai etnisitas ini dengan demikian menunjukkan beberapa hal yaitu: (1) kemajemukan atau pluraritas sosial di Kalimantan Barat terutama berdasarkan ras dan kesukuan, (2) pluraritas etnis diperkuat oleh diversitas kultural dan agama, serta (3) pengelompokan territorial berdasar ras dan kesukuan para anak *batur* (kampung) juga berarti dan diperkuat oleh perbedaan kepentingan ekonomi. Kerangka ini dekat dengan konsep plural society Furnivall dan Redfield.³²

Prospek Pembauran Sejak 1945

Memasuki abad ke-20 terjadi pergeseran dan perluasan aktivitas ekonomi Cina dari yang semula bertitikberat pada produksi dan perdagangan emas ke arah yang lebih aneka ragam. Imigran terlibat hampir dalam setiap dan seluruh taraf, sektor dan mata rantai ekonomi: produksi dan distribusi. Artinya mereka terlibat baik dalam hal pengadaan, produksi melalui kegiatan agraris, pemrosesan, pengangkutan, penimbunan, perdagangan, penjualan, serta impor-ekspor. Kedudukan dan peranan Melayu sudah tergeser, sedang Dayak sudah sangat terkait dengan aktivitas ekonomi imigran Cina. Perluasan aktivitas dan jaringan ekonomi dan perdagangan ini otomatis membawa konsekuensi sosial. Lingkup dan regangan pergaulan Cina semakin luas, bukan hanya di kampung dan kota-kota pesisir, tetapi sudah merasuk hingga jauh ke pedalaman. Kontak langsung serta interaksi semakin meningkat dalam hal **frekuensi dan intensitasnya**. Struktur multi rasial dan multi etnis masyarakat

yang majemuk semakin mengemuka. Secara hipotetis perkembangan ini akan mendorong proses pembauran dan integrasi.

Akan tetapi hubungan simbiotik dalam bidang ekonomi ini tidaklah diikuti oleh fusi yang *reciprocal* dalam bidang sosial, politik, dan budaya. Siklus hubungan ras masih lebih (atau malahan bahkan semakin) diwarnai oleh segragasi, kompetisi, pluraritas, dan polarisasi berdasarkan etnisitas. Gejala ini perlu diterangkan dari berbagai segi.

Secara keseluruhan faktor kausal yang agaknya relevan dalam hal ini harus dicari pada sikap, orientasi, kepentingan (terutama ekonomi), solidaritas, keorganisasian serta jiwa organisasi imigran Cina di satu pihak, serta kecurigaan, penyingkiran, diskriminasi dan *sinophobia* bumiputera di pihak lain. Kebijaksanaan, sikap, dan tindakan-tindakan politik penguasa Jepang dan Belanda serta perkembangan politik keamanan pada umumnya turut serta memperkuat atau menyuburkan "*the idea of distance*" dan "*the idea of difference*"³³ baik di kalangan imigran Cina maupun di kalangan bumiputera. Konsekuensi logis dari sikap ini adalah peningkatan solidaritas berdasar ras. Kohesi dan ketertutupan kelompok meningkat sepadan dengan peningkatan rasa terancam eksistensi dan kepentingannya.

Seperti sudah disinggung, dilatarbelakangi oleh tradisi organisasi di negeri asal, serta perjuangan hidup yang relatif berat dan keras di negeri seberang (Kalimantan Barat), para imigran Cina menganggap perlu mengelompok dalam organisasi-organisasi kekerabatan dan perkampungan serta kongsi-kongsi. Dilihat dari sudut ini maka organisasi bagi mereka adalah sarana pelindung utama bersama untuk pembelaan diri (*self defence*). Mengelompok dan berorganisasi bukan hanya perlu, tetapi merupakan keharusan demi kelangsungan hidup para imigran.

Kepерluan berorganisasi dan mengelompok sebenarnya bukan saja perlu untuk mengatasi ancaman dari luar, serta mengurangi resiko dengan membagi-baginya, tetapi juga untuk dipakai sebagai alat dan mekanisme mengatur kepentingan dan

perselisihan antara imigran, untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, serta berbagai urusan lain yang dianggap perlu. Organisasi berupa kongsi, desa atau kekerabatan semakin terasa urgensinya di daerah baru di mana batas-batas wilayah belum terinci dan kepastian hukum belum ada. Lebih-lebih akan dirasakan mutlak pentingnya pada saat-saat krisis atau darurat, ketika eksistensi seluruh kelompok sedang terancam. Bahkan pada saat eksistensi organisasi Cina itu sendiri tidak diakui, selalu dicoba diterapkan bentuk-bentuk organisasi rahasia (bawah tanah).

Berbagai organisasi dan perhimpunan rahasia diprakarsai, disponsori dan dibentuk oleh para imigran Cina di Kalimantan Barat sejak kongsi dibubarkan pada tahun 1854 dan 1884.³⁴ Peranannya semakin menonjol sejak awal abad ke-20. Organisasi rahasia hidup terus hingga tahun 1940'an, terlebih-lebih pada masa pendudukan Jepang, menjelang dan sesudah Proklamasi, hingga tahun 1960'an yang memuncak pada waktu pemberontakan G.30.S/PKI serta gerakan PGRS—PARAKU. Akan tetapi harus diingat bahwa motivasinya tidak selalu sama.

Asal-usul keorganisasian ini dapat dilacak hingga sejak negeri asal. Tradisi organisasi di bidang sosial, ekonomi dan politik pada masyarakat Cina cukup lama dan mengakar. Kelompok-kelompok, desa-desa dan klan-klan di Tiongkok terbiasa saling memperkuat diri di perkampungan bertembok dengan kesadaran grup yang kuat. Selalu ada kecenderungan menolak atau setidak-tidaknya meminimisasikan pengaruh dan campur tangan kekuatan dari luar. Termasuk ke dalam kekuatan luar ini adalah dinasti asing, dan birokrasi kekaisaran, Kepemimpinan dan pengaturan komunitas lokal sebenarnya lebih dipercayakan kepada para pemimpin yang berasal dari kalangan sendiri serta dipilih oleh lingkungan sosialnya sendiri. Pada prakteknya sistem politik yang tersentralisasi yang membagi secara seimbang alokasi kekuasaan di antara pejabat dan birokrasi pemerintah pusat dan para pejabat lokal lebih disenangi. Ini yang disebut sistem politik dua arah atau dua jalur (*double track*). dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas. Sistem ini didukung

oleh kultur masyarakat yang feodalistis, filsafat politik yang berlandaskan teori *do-nothingness*, serta pembatasan kekuasaan politik administratif pemerintah pusat.³⁵

Penyimpangan dari filsafat dan sistem politik administrasi ini segera melahirkan reaksi yang luas. Terlebih-lebih jikalau yang menduduki tahta kekaisaran dianggap sebagai dinasti atau kekuatan asing. Dalam hal tidak mungkin menyalurkan aspirasi melalui organisasi resmi, maka kembali organisasi rahasia memegang peranan. Organisasi rahasia ini berfungsi utama sebagai mekanisme pengumpul dana dan militer.³⁶

Seperti telah disinggung, perhimpunan rahasia (*de geheime verbonden* atau *Chineesche geheime genootschappen*) yang terutama muncul di Kalimantan Barat setelah pembubaran kongsi pada tahun 1854 dan 1884 telah menjadi fenomena sejarah sampai dengan dekade ketujuh abad ke-20. Tokoh pertama adalah seorang *kapthai* dari Kongsi Lanfong bernama Liu-A-Sin. Tujuannya bermacam-macam, antara lain adalah untuk mengurus emigrasi dari Cina, membereskan soal tanah, menghimpun dana dan pasukan, melindungi penyelundupan (*smokkelhandel*), mendorong usaha tolong menolong dalam hal kematian, pesta, dan usaha, bahkan untuk mencoba melepaskan tahanan-tahanan dari penjara.³⁷

Pada masa pendudukan Jepang ketika imigran Cina merasa muncul ancaman yang potensial terhadap kepentingannya, dibentuklah organisasi rahasia Sie Min Hui atau Perkumpulan Rahasia Anti Jepang (PAD) yang berpusat di Gunung Pasir Singkawang. Keinginan Jepang untuk menguasai suplai bahan pangan menimbulkan konflik langsung dengan penduduk Cina. Menurut catatan, 59 proses korban pembunuhan Jepang di Kalimantan Barat adalah imigran Cina (903 orang).³⁸

Setelah Proklamasi oleh karena kevakuman kekuasaan ketegangan politik muncul oleh karena kekhawatiran penduduk Cina akan masa depan dan posisi mereka di negara yang sudah merdeka. Kecurigaan dan saling berprasangka merasuk hingga

ke dalam tubuh PKO (Penjaga Keamanan Oemoem, atau Pasukan Keamanan Oemoem). Banyak dari bekas anggota PAD masuk ke dalam PKO serta memegang kepemimpinan. Desas-desus semakin memperuncing hubungan Cina bumiputera di dalam dan di luar PKO. Klimaksnya terjadi ketika pasar dan perkampungan Cina di Pontianak dan Sambas dibakar. Bentrokan meletus di Pontianak, Jintan, Singkawang, dan Sedau.³⁹

Sejak masa itu ada usaha untuk menghimpun imigran Cina ke dalam satu organisasi tunggal. Namun pertentangan ideologis antara yang berorientasi komunis dan nasionalis mempersulit usaha itu. Pada tahun 1960 Gubernur J.C. Oevang Oeray menghapuskan jabatan pegawai Tionghoa. Sebelumnya sistem pemerintahan khusus dan distrik-distrik Cina pun sudah ditiadakan.

VI. Penutup dan Kesimpulan

Dilihat dari latarbelakang etnis dan rasialnya, Kalimantan Barat dewasa ini dapat dipandang sebagai model paling utuh dari suatu masyarakat majemuk, sehingga pembauran merupakan persoalan urgen dan esensial digerakkan menuju integrasi dalam segala bidang (sosial, ekonomi, politik dan kultural). Asimilasi sebagai proses interpretasi dan fusi orang dan grup-grup yang berasal dari beraneka ras, etnisitas, dan satuan kultural ke dalam suatu kehidupan kebersamaan di lingkungan komunitas yang lebih besar serta kehidupan kultural yang sama memang sedang terjadi dewasa ini. Akan tetapi proses itu memerlukan waktu dan perlu melalui interaksi yang lama dan kontiniu.

Dewasa ini masih tampak pluralisme yang substansial, diversitas serta heterogenitas, tetapi sekalipun pembauran total belum tercapai, namun segregasi total juga sudah tidak merupakan gejala sehari-hari. Seberapa lama waktu yang perlu untuk mencapai integrasi sepenuhnya tidaklah mungkin diramalkan. Pembauran memang dapat didorong dan dipercepat, tetapi sulit untuk dipastikan. Tidak ada jaminan bahwa akan dapat

dicapai kemajuan pembauran sesuai dengan skenario yang dirancang dan dalam tempo yang ditentukan.

Usaha dan proses pembauran di Kalimantan Barat mengalami pasang surut. Tindakan, aksi-aksi, prasangka, diskriminasi rasial, dan perkembangan politik semasa turut serta mempengaruhi laju perkembangan pembauran itu. Termasuk di dalamnya adalah kebijaksanaan politik NASAKOM Sukarno yang memberi angin kepada penduduk Cina yang komunis melakukan kegiatan dan mengkonsolidasikan diri. Demikian juga pengakuan terhadap Negara Nasional Kalimantan Utara pimpinan Azhari di Serawak (8 Desember 1962) telah berkaitan langsung dengan pembentukan Pasukan Garilya Rakyat Serawak (PGRS), dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) pada tahun 1963. Basis dan pertemuan PGRS dan PARAKU banyak dilakukan di wilayah Kalimantan Barat dan juga melibatkan banyak dari penduduk Cina setempat. Kedua gerakan ini berlangsung terus paling tidak hingga tahun 1967. Posisinya segera menjadi lemah ketika payung politik PKI dibubarkan oleh Suharto, dan setelah tercapai Jakarta Accord antara Indonesia-Malaysia pada 11 Agustus 1966.

Semenjak 1965 dengan demikian posisi penduduk Cina secara politis semakin tersudut, dan sebaliknya golongan bumiputera semakin kuat dan mendapat angin. Kebijaksanaan politik Indonesia yang anti-komunis, serta ketegangan yang timbul antara kedua kelompok, khususnya Dayak telah melatarbelakangi sikap permusuhan. Klimaksnya terjadi pada 14 Oktober 1967 ketika terjadi pengusiran, pembakaran perkampungan, dan pembunuhan penduduk Cina oleh penduduk Dayak. Anarkisme yang kemudian berhasil diatasi ini mengakibatkan gelombang pengungsian Cina dari Kabupaten Sambas dan Pontianak ke kota-kota (Pontianak, Singkawang, dan Mempawah). Di kota-kota inilah berlanjut dan terjadi proses pembauran yang sesungguhnya.

CATATAN

1. Jumlah dan persentasi Cina di Asia Tenggara berbeda-beda menurut berbagai versi. Sekitar tahun 1960 perkiraannya bervariasi antara 11-12 juta atau 5-6,8% dari total penduduk. Prosentase Cina untuk beberapa daerah dan negara sangat tinggi. Singapura 75,3%, Malaya 37%, Serawak 31,8%, Brunai 25%, Sabah 23%, Kalimantan Barat 17,4%, Muangthai 11,3%, dan Indonesia hanya 2,6%. Lihat A. Simoniya *Overseas Chinese in Southeast Asia* (New York, 1961), p.18; G. William Skinner, *Overseas Chinese in Southeast Asia* (1959), pp. 136-37, Lea E. Williams, *The Future of the Overseas Chinese in Southeast Asia* (Rhode Island, 1966); Victor Purcell, *The Chinese in Southeast Asia* (London, 1965), p.3.
2. *Ibid*, p.47.
3. W.F. Wertheim, "The Trading Minorities in Southeast Asia", dalam *East West Parallels: Sociological Approaches to Modern Asia* (The Hague, 1964), pp. 40 ff.
4. Skinner, op.cit. pp. 138-41.
5. Mary F. Somers, *Peranakan Chinese Politics in Indonesia* (New York 1965), pp. 55-56.
6. Purcell op.cit. p.456.
7. Sophia Raffles, *Memoir of the Life and Public Services of sir Thomas Stamford Raffles Vol. I* (London, 1835). p. 82.
8. *Ibid*. pp. 80-83.
9. Statistik yang agak cermat barulah ada sejak 1830. Oleh karena itu angka-angka sebelum 1830 masih merupakan perkiraan belaka. Menurut residen D. van Dungen pada tahun 1830 jumlah total penduduk Kalimantan Barat 1830 adalah 250.075 orang terdiri dari Eropa 13, Arab 955, Melayu 71.085, Bugis 2281, Dayak 143.026, dan Cina 32.925 orang. Lihat Bundel Borneo Wester-Afdeeling No. 46/16: Cf. Jans Cator, *The Economic Position of the Chinese in the Nederlands Indies* (Oxford, 1936), p.149.

10. Angka-angka yang menyangkut 1905, 1920, dan 1930 didasarkan pada LHW van Sandick, *Chineezen buiten Chine Hunne Beteekenis voor de Ontwikkeling van Zuid-Oost-Azie, Speciaal van Nederlandsch-Indie* (The Hague, 1909), p.208, J.L. Vleming, *Zakenleven (Het Chineesche) in Ned-Indie* (Weltevreden, 1926), p.279: *Volkstelling 1930 Deel V*, pp.3-4. Untuk tahun 1950, 1960, 1970 adalah hasil perhitungan berdasarkan sumber: Kodam XII/Tanjungpura *Buku Petunjuk Territorial Daerah Kalimantan Barat* (Pontianak, 1972), pp. 54-55, 333: Pemda Kalimantan Barat, *Masalah Tjina di Kalimantan Barat* (Pontianak, 1970), pp. 27,53: Pemda Kalimantan Barat, *Wajah Kalimantan Barat Tahun 1971* (Pontianak, 1971), pp.9-10.
11. Angka-angka ini diolah berdasarkan data penduduk tahun 1969, 1970 dan 1971. Lihat *Angka Sementara Hasil Sensus Penduduk 1971 Propinsi Kalimantan Barat* (Pontianak, 1971), p.239: *Buku Petunjuk Territorial, loc.cit*; *Masalah Tjina di Kalimantan Barat, loc.cit*.
12. Termasuk, baik kabupaten, maupun kotamadya Pontianak.
13. G.W. Earl, *The Eastern Seas or voyages and Discoveries in the Indian Archipelago in 1832-33-34* (London, 1937), p.244.
14. Sehingga para imigran Cina dianggap sebagai komunitas yang socially and culturally remained a people apart. Lihat Amry Vandenbosch, *The Dutch East Indies, Its Government, Problems, and Politics* (Lexington, 1933), p.32.
15. J.J.W. de Groot, *Het Kongswezen van Borneo: Eene Verhandeling over de Grondslag en den Aard der Chineesche Politieke Vereenigingen in de Kolonien met eene Chineesche Geschiedenis van de Kongsi Lanfong* (The Hague, 1885), p.163.
16. James C. Jackson, *Chinese in the west Borneo Goldfields* (University of Hull, 1970), pp. 46-47.
17. Hsiao tung Fei, *Chinas's Gentry* (Chicago, 1972), p.81.
18. P. Adriani, *Herinneringen uit en aan de Chineesche Districten der Wester Afdeeling van Borneo 1878-1882* (Amsterdam, 1898), p.148.
19. Lihat Bab IV dari Hsiao-tung-Fei. *op.cit*. pp.75 ff.
20. Jackson, *loc.cit*.
21. J.L. Vleming, *Zakenleven (Het Chineesche) in Ned Indie* (Weltevreden, 1926), p.57.
22. W.J. Cator, *op.cit*. p. 142.
23. T. Simbolon, "Masalah Assimilasi Warga Indonesia Keturunan Tjina dalam Daerah Kalimantan Barat" (Tesis tidak diterbitkan, Pontianak, 1971), pp. 42.ff.
24. J.H. Meyer, *De Westerafdeeling van Borneo* (1930), p.56.
25. Purcell, *op.cit*. p. 489.
26. Menurut Ibn Khaldun (1332-1406) kultur primitif dan kultur beradab dibedakan terutama dalam hal pola kehidupan ekonomis. Kultur primitif mengutamakan pengolahan tanah dan peternakan. Kesederhanaan, *self sufficiency* kebutuhan pokok, solidaritas sosial (*asabiah, asabiyya*) dengan *spirito do corpo, spirito di parte* atau *Eeprit de corps* yang sangat kuat karena ikatan darah menandai komunitas ini. Hampir semua relasi eksternal akan suatu proteksi (kerja sama dan *self defence*) dari semacam luar. Senenek moyang, se-

- kepentingan dan sepengalaman mempertebal dan menjadi semen solidaritas (*integral social cohesion*). Ethos dan sentimen komunal sangat kuat. Namun grup-grup masih mengenal *sub groups*. Grup dengan *inner solidarity* paling kuat akan unggul melalui kekerasan dan penindasan. Agama dapat menjadi faktor yang menghasilkan *inner cohesion* yang luar biasa kuatnya, mampu menjadi semen pengikat yang kokoh, serta sumber motivasi yang dasyat. Kesederhanaan sosial ekonomi tercermin dalam pembatasan pemenuhan kebutuhan pokok makanan, rumah dan keamanan dalam institusi hukum, peraturan, norma-norma dan nilai-nilai, sikap dan sifat, ikatan politik dan pemerintahan. Lihat Muhsin Mahdi, *Ibn Khaldun's Philosophy of History* (Chicago, 1964), pp.9 ff. Cf. Charles Issawi, *Filsafat Islam tentang Sedjarah* (Jakarta, 1962) pp. XXIV ff.
27. F.H. van Naerssen, 'Een Streekonderzoek in West Borneo' dalam *Indonesia*, vijfde jaargang 1951-1952, pp. 134-37.
 28. *Ibid.*
 29. W.H. Senn van Basel, "Een Chineesche Nederzetting op Borneo's Westkust", *TNI*, derde jaargang, I, 1874, p.390.
 30. P.J. Veth, *Borneo's Wester Afdeeling*, Deel I (Zalbommel, 1854), pp. XXX ff.
J.M. van Berckel, "Iets ober de Dajaks van Melintam en Njawan", *TBG* 1881 Deel XXVI, pp. 423-33, W.H. van basel. "Een Dajaksch Dorp op Borneo's Westkust", *TNI* Deel I, 1874, pp.1-15.
 31. Van Basel, "Een Dajaksch Drop", *ibid.*
 32. J.S. Furnivall, *Netherlands India : A Study of Plural Economy* (Amsterdam 1976), pp. 446 ff. Robert Redfield, *The Little Community* (Chicago, 1963), bab VIII.
 33. Konsep yang diambil dari Robert Redfield, *The Little Community* (Chicago, 1963), pp.113. 141-142.
 34. S.H. Schaank, *De Kongsi's van Montrado, Bijdrage tot de Geschiedenis en de Kennis van het Wezen der Chineesche Werenigingen op de Westkust van Borneo* (Batavia, 1893), pp. 498 ff.
 35. Hsiao-tung-Fei, *op.cit.* pp. 75-90. menyebutkan teori *do-nothingness* atau *do-nothingsim* atau *do-nothing policy* mencegah pusat kekuasaan politik meluaskan otoritasnya secara maksimal hingga komunitas lokal. Pemberian otonomi inilah yang melindungi komunitas lokal dari absolutisme dan tirani. Kekuasaan pemerintah pusat hanya sampai tingkat distrik (*hsien*) saja.
 36. J.W. Young, "Bijdrage tot de Kennis der Chineesche Geheime Genootschappen", *TBG* Deel XXVIII, 1883, pp. 548-52.
 37. M. von Faber, "Schets van Montrado", *TBG*, IV, 1864, pp. 477-79, M. Schaalje, "Bijdrage tot de Kennis der Chineesche Geheime Genootschappen", *TBG* Deel III, 1873 pp. 1-5 SH. Schaank, *op.cit.* pp. 587-96.
 38. Ansar Rachman, *et.al. Tanjungpura Berjuang' Sedjarah Kodam XII/Tanjungpura* (Pontianak, 1970), pp. 89-98.
 39. *Buku Petunjuk Territorial, op.cit.* pp. 324-25.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P. *Herinneringen uit en aan de Chineesche Districten der Wester-Afdeeling van Borneo 1879-1882*. Amsterdam, 1898.
- Anonim, "Munten der Chineezen in Sambas", *TBG*, 2^e jaargang, 1854.
- Arsip Nasional. "Algemeen Verslag 1829", *MS. Bundel Borneo Wester Afdeeling* No. 46/16.
- , *Laporan Politik Tahun 1837*. Jakarta, 1971.
- , *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*. Jakarta, 1973.
- Basel, W.H. Senn van. "De Maleiers van Borneo's Westkust", *TNI* 3^e jaargang, II, 1874.
- , "Een Chineesche Nederzetting op Borneo's Westkust", *TNI*, 3^e jaargang, 1874.
- , "Een Dajaksch Dorp op Borneo's Westkust", *TNI* 3^e jaargang I, 1874.
- , "Het Maleische Versterkhuis op Borneo's Westkust", *TNI*, 3^e jaargang, I, 1874.
- Berckel, J.M. van. "Iets over de Dajaks van Melintam en Njawan", *TBG*, XXVI, 1881.
- Biro Pusat Statistik, *Registrasi Penduduk Indonesia 1968*. Jakarta, 1970.

- Bodde, Derk. "Feudalism in China", dalam Rushton Coulborn, ed, *Feudalism in History*. Princeton, New Jersey, 1956.
- Cator, Writser Jans, *The Economic Position of the Chinese in Netherlands Indies*. Oxford, 1936.
- Grawfurd, John, *A Descriptive Dictionary of the Indian Islands and Adjacent Territories*. London, 1856.
- Davidson, G.F. *Trade and Travel in the Far East*. London, 1846.
- Earl G.W. *Eastern Seas, or Voyages and Discoveries in the Indian Archipelago in 1832-33-34*. London 1837.
- Faber, M. von "Scnets van Montrado in 1861". *TBG*, XXIII, 1864.
- Furnivall, J.S. *Netherlands India : A Study of Plural Economy*. Amsterdam. 1976.
- Groot, J.J.M. de *Het Kongsuwezen van Borneo : Eene Verhandeling over den Grondslag en den Aard der Chineesche Politieke Vereenigingen in de Kolonien, met eene Chineesche Geschiedenis van de Kongs Lanfong*. Den Haag, 1885.
- Gullick, J.M. *Indigenous Political Systems of Western Malaya*. London, 1958.
- Hageman, Jsz. "Bijdrage tot de Geschiedenis van Borneo", *TBG*, VI 1857.
- Hobsbawm, E.J. *Primitive Revels*. New York, 1965.
- Hsino-tung Fei. *China's Gentry* Chicago, 1972.
- Issawi Charles, trans. *Filsafat Islam tentang Sedjarah*. Jakarta 1962.
- Jackson, James C. *Chinese in the West Borneo Goldfields* University of Hull, 1970.
- Kodam XII/Tanjungpura. *Buku Petunjuk Territorial Daerah Kalimantan Barat*. Pontianak, 1972.
- Komisi Khusus DPRD. *Paper Masalah Tjina di Kalimantan Barat*. Pontianak 1972.
- Meyer, J.H. *De Westerafdeeling van Borneo*. 1930.
- Naerssen, F.H. van. "Een Streekonderzoek in West Borneo" dalam *Indonesia*, 5^e jaargang, 1951-1952.

- Ozinga, Jacob. *De Economische Ontwikkeling der Wester-afdeeling van Borneo* Wageningen 1946.
- Pemda Propinsi Kalimantan Barat. *Masalah Tjina di Kalimantan Barat*. Pontianak, 1970.
- , *200 Tahun Kota Pontianak*. Pontianak, 1971.
- , *Wadjah Kalimantan Barat Tahun 1971*. Pontianak 1971.
- Purcell, Victor. *The Chinese in Southeast Asia*. London 1965.
- Raffles, Sophia. *Memoir of the Life and Public Services of Sir Thomas Stamford Raffles*. London 1930.
- Redfield, Robert. *The Little Community* Chicago, 1963.
- Sandick, L.H.W. van. *Chineezen buiten China* The Hague, 1909.
- Sartono Kartodirdjo, ed. *Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial* Jakarta, 1977.
- Schaank, S.H. *Montrado* Batavia, 1893.
- Simbolon, Tamba Tua. *Masalah Assimilasi Warga Indonesia Keturunan Tjina dalam Daerah Kalimantan Barat* (Tesis tidak diterbitkan). Pontianak, 1971.
- Simoniya, A. *Overseas Chinese in Southeast Asia*. New York, 1961.
- Skinner, G. William, *Overseas Chinese in Southeast Asia*. 1959.
- Somers, Mary F. *Peranakan Chinese Politics in Indonesia*. New York 1965.
- Vandenbosch, Amry. *The Dutch East Indies* Lexington, 1933.
- Veth, P.J. *Borneo's Wester-Afdeeling I, II* Zaltbommel, 1956
- Vleming, J.L. *Zakenleven (Het Chineesche) in Ned. Indie* Ertelvreeden, 1926.
- Wertheim, W.F. *East-West Parallels* The Hague. 1964.
- Williams. Lea E. *The Origin of the Modern Chinese Movement in Indonesia*. New York, 1969.
- Young, J.W. "Bijdrage tot de Kennis der Chineesche Geheime Genootschappen", *TBG*, XXVIII, 1883.

KOTA DAN PEMBAURAN SOSIO-KULTURAL DALAM SEJARAH INDONESIA

(Oleh: Djoko Surjo)

Ada beberapa kelompok kota yang mendukung terwujudnya proses integrasi sosio-kultural dari masyarakat Indonesia yang majemuk antara lain ialah: (1) Kota Bandar atau Perdagangan, (2) Kota Administrasi, dan (3) Kota Pendidikan (intelektual).

Kota bandar atau kota perdagangan (market city) sering dianggap sebagai salah satu tipe kota yang telah lama tumbuh di Indonesia, di samping tipe kota lainnya yaitu kota kerajaan (city state) atau *sacred-city*.¹ Fungsi kota perdagangan (market city) ini adalah sebagai pusat kegiatan ekonomi. Faktor ekonomi merupakan unsur pokok yang mendasari tumbuh dan berkembangnya kota serta kontak-kontak sosial budaya dari berbagai golongan etnik di Indonesia melalui kota sebagai "wadahnya" (melting pot).

Faktor ini pula yang pertama mendasari terselenggaranya proses integrasi sosio-kultural masyarakat Indonesia melalui kegiatan lalu lintas perdagangan terutama pada sekitar abad ke-16. Kota-kota bandar tumbuh di sepanjang jalur lalu-lintas perdagangan, seperti Gresik, Tuban, Demak, Banten, Ternate, Tidore,

Makasar dan Aceh, tidak saja telah berperan sebagai tempat pembauran antaretnik, juga berperan sebagai agen penyebar unsur budaya ke berbagai daerah pelosok Indonesia.

Pada masa ini penyebaran agama dan kebudayaan Islam merupakan salah satu arus besar (mainstream) yang mampu menjadi sarana pembaur antar golongan etnik di berbagai daerah penyebaran, bahasa, mitos, dan unsur budaya lainnya juga merupakan media integrasi sosio-kultural.

Pusat-pusat perguruan Islam, pesantren, seperti yang terdapat pada kota-kota pantai antara Jawa Timur (misalnya Gresik), menjadi sumber penyebar tradisi besar Islam ke daerah di luar Jawa (Maluku dan Nusa Tenggara), melalui kunjungan santri-santri dari daerah itu ke pusat perguruan ini.

Jenis kota lain yang dapat menjadi sarana pembaur sosio-kultural adalah kota-kota administratif pada masa pemerintahan kerajaan, sekalipun terbatas.

Kota ini berpangkal pada istana raja sebagai pusat pemerintahan yang menjadi sumber kekuasaan politik dan pusat birokrasi pemerintahan kerajaan, melalui sistem birokrasi ini hubungan antarbagian wilayah kerajaan dapat disatukan.

Dalam kelompok ini kota kolonial juga mempunyai arti dalam memberikan konfigurasi baru dalam interaksi antaretnik dan unsur kebudayaannya. Kota ini tumbuh terutama pada abad ke-19 sebagai pengaruh penetrasi kekuasaan Barat di Indonesia.²

Selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan kolonial, kota ini juga berfungsi sebagai kota perantara ekonomi negeri induk dan tanah jajahannya. Kota kolonial umumnya sekaligus menjadi kota pengeksport barang produksi pertanian, perkebunan dan tambang, yang dihasilkan dari daerah tanah jajahan bagi pasaran dunia; dan juga sebagai pintu masuk barang impor dari negeri induk tanah jajahan. Sifat heterogen atau majemuk penduduk yang ada di dalam kota kolonial memberikan tempat bagi ter-

jadinya interaksi sosial antara golongan etnik atau golongan sosial lainnya.

Selain Kota Batavia, Semarang dan Surabaya, Kota Palembang (kota tambang) dan Kota Medan (kota perkebunan tembakau) merupakan contoh kota-kota kolonial yang memberikan konfigurasi baru bagi hubungan-hubungan antargolongan.

Tipe kota lain yang juga mempunyai kemampuan untuk mendorong terjadinya proses pembauran sosio-kultural, adalah kota pendidikan, yaitu kota yang berfungsi sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan baik dari tingkat rendah, menengah dan tinggi. Kota ini ternyata menjadi pusat berkumpulnya pelajar dari berbagai daerah yang tinggal sementara di kota itu, baik diam di rumah penduduk maupun di asrama.

Hubungan pergaulan antarkelompok sosial dan etnis ini memberikan peluang bagi terwujudnya proses integrasi sosial budaya bagi golongan yang terlibat di dalamnya.

Kota Yogyakarta sesudah kemerdekaan, mungkin dapat mewakili kategori kota ini. Kota semacam ini mungkin pula dapat disebut sebagai kota intelektual, mengingat kegiatan intelektual lebih banyak dilakukan di kota-kota ini.⁴

Di bawah ini akan disinggung beberapa segi dari interaksi antargolongan etnik terutama di dalam kota kolonial, sebagai usaha untuk memahami hubungan antargolongan di dalam masyarakat majemuk pada masa kolonial.

II

Sebagai bagian dari masyarakat kolonial hubungan pergaulan kehidupan di dalam kota kolonial, ditandai pula oleh ciri-ciri hubungan kolonial yaitu hubungan yang didasarkan atas prinsip-prinsip antara lain :

1. Garis warna/rasial,
2. Subordinasi politik,
3. Jaminan sosial terbatas, dan
4. Hubungan sosial yang terbatas.

Pemisahan kelompok-kelompok sosial di kota kolonial pada umumnya didasarkan pada unsur rasial, agama dan kultural. Pemisahan golongan masyarakat kota semacam ini telah dijumpai semenjak zaman V.O.C. Pemisahan ini tidak saja diwujudkan dalam arti fisik yaitu pemisahan lokasi permukiman, tetapi juga dicerminkan dalam hubungan hak dan kewajiban serta kedudukan dari kelompok sosialnya.

Penduduk kota kolonial biasanya terdiri atas tiga golongan yaitu:

1. Golongan Eropa (Belanda),
2. Golongan Orang Asing Timur (Vreemde Oosterlingen), dan
3. Golongan penduduk pribumi.

Golongan pertama dan kedua merupakan golongan minoritas sedangkan golongan yang terakhir merupakan golongan mayoritas sesuai dengan pemisahan yang didasarkan garis warna (colour-line), golongan pertama menempati tempat tinggal di pusat kota atau di daerah utama yang terpisah dengan golongan penduduk lainnya. Mereka menduduki yang paling atas, seperti sebagai pegawai pemerintah, pengusaha, pedagang besar, dan penguasa militer.

Golongan kedua, yaitu orang Asing Timur, terbagi atas golongan Cina, Arab dan lainnya. (Golongan Cina termasuk golongan Timur Asing yang paling besar dibanding dengan golongan Arab atau lainnya (India/Keling).

Mereka juga tinggal mengelompok pada lokasi yang secara spasial terpisah dengan lokasi permukiman penduduk pribumi. Golongan ini kebanyakan menduduki sektor kehidupan ekonomi tingkat menengah, yaitu sebagai perantara bagi orang Barat (Belanda) dengan orang pribumi. Golongan Cina umumnya bergerak dalam sektor perdagangan dan perusahaan seperti sebagai distributor atau agen usaha impor-ekspor pengusaha industri (gula), pengusaha perkebunan, pedagang perantara antara kota, pertokoan, penjaga dan *pachter* (pemborong dalam perdagangan monopoli. Candu (apiveni), syahbandar, pasar, tol

pada jalan dan jembatan, perdagangan dan sektor usaha lain yang menjadi monopoli pemerintah.

Sejak zaman V.O.C. Golongan Cina ditempatkan dalam perkampungan tersendiri yang disebut "*Wijk*" dan dikepalai oleh seorang *Wijkmeestee* (sesudah 1655), oleh pemerintah V.O.C. kepala "*Wijk*" ini diberi kepangkatan militer seperti letnan, kapiten, dan mayor.⁵

Dalam struktur perekonomian kolonial golongan ini dikenal sebagai penguasa sektor perdagangan di tanah jajahan, bahkan juga di daerah Asia tanah jajahan, bahkan juga di daerah Asia Tenggara, sesudah golongan Eropa. Kedudukannya sebagai golongan minoritas yang berkuasa dalam sektor perdagangan (trading minoritas) dan sektor perekonomian di tanah jajahan menimbulkan situasi konflik yang ditandai.

Dengan munculnya semangat "anti Cina" di kalangan penduduk pribumi pada masa pergerakan nasional,⁶ Praktek kegiatan ekonomi yang lebih menekankan usaha mengejar keuntungan menyebabkan golongan minoritas ini sering dijuluki sebagai golongan lintah darat, pemeras yang tamak dan kotor.⁷ Sebutan "Cina Mindreng" atau rentenir terkenal bagi mereka yang bergerak sebagai lintah darat di pedesaan.

Selanjutnya golongan pribumi sendiri masih dibagi dalam kelompok-kelompok etnik yang secara homogen tinggal dalam perkampungan etniknya masing-masing; oleh karena itu di luar dari lokasi golongan pertama dan kedua, tersebar perkampungan kelompok etnik pribumi seperti Kampung Melayu, Kampung Bugis dan kampung penduduk pribumi setempat hanya kota-kota (Jawa untuk kota-kota di Jawa). Keadaan di atas dapat dijumpai misalnya pada Kota Batavia, Semarang dan Surabaya. Umumnya kelompok etnik ini hidup sebagai bakul, atau pedagang kecil-kecilan, buruh pasar atau pelabuhan atau pekerja kasar, pembantu rumah tangga pada golongan pertama dan kedua. Keadaan ekonomi mereka umumnya lebih rendah.

Berbeda dengan golongan Cina, golongan Arab, lebih terbatas kekuasaannya dalam sektor perdagangan. Umumnya

mereka giat sebagai pedagang pakaian, manik-manik atau batu-batu berharga, atau barang dagangan lainnya dalam jumlah kecil.

Pemisahan kedudukan golongan juga didasarkan pada agama, terutama Agama Kristen. Bagi orang-orang Asia atau Erasian yang menganut Agama Kristen akan mendapat persamaan kedudukan seperti orang Eropa.⁸ Pemisahan bagi golongan penduduk non-Kristen (Indonesia dan orang asing Asia, terutama Cina dan Arab) sebelum lahirnya pergerakan nasional lebih didasarkan pada segi asal daerah, perbedaan bahasa, dan perbedaan adat istiadat.

Dengan demikian di kota-kota kolonial terutama pada abad ke-19 dikenal adanya segregasi sosial di samping adanya konsentrasi kekuasaan ekonomi dan kedudukan politik pada segolongan minoritas penduduk asing sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan sosial-ekonomi.

Sekalipun ada keterbatasan-keterbatasan hubungan antar golongan di kota kolonial tersebut di atas, tetapi tidak berarti tidak ada proses pembauran. Dalam batas-batas tertentu proses pembauran juga terjadi. Dapat ditunjukkan misalnya adanya proses asimilasi antara sejumlah orang Eropa (Belanda) dengan wanita pribumi yang melahirkan golongan Indo, sebagai hasil perkawinan mereka, terutama pada abad ke-18-19.

Selain lahirnya golongan *Indo* sebagai hasil hubungan kawin-marwin (konkubinat) antara pemuda Eropa (Belanda) dengan wanita pribumi itu, terjadi pula akulturasi kebudayaan baru yang dikenal sebagai kebudayaan *metizo* (mestizo culture), yang oleh Milone disebut kebudayaan *Indis* atau *Indish Culture*.⁹

Proses pembauran Eropa, pribumi atau disebut juga proses krealitas ini rupanya telah dilakukan oleh orang Portugis yang baur dengan wanita pribumi, sebelum kehadiran orang Belanda di Indonesia. Lahirnya golongan *Mardykers* di Batavia merupakan hasil pembauran mereka.

Pembauran ini juga sekaligus diikuti dengan proses adaptasi sosio-kultural dari mereka yang melahirkan tradisi kebudayaan baru, seperti tercermin dari kelahiran jenis kesenian kerongcong bagi golongan *Maraykers*, dan gaya hidup dalam berbahasa, makan, berpakaian dan gaya kerumahan bagi golongan Indo atau Peranakan (hasil perkawinan/konkubinat) orang Eropa dan Indonesia.¹⁰

Proses akulturasi budaya juga terjadi di lingkungan kehidupan, keluarga orang Belanda (Eropa). Penyesuaian mereka terhadap jenis makan, makanan Indonesia, kebiasaan sehari-hari (tidur siang, mandi dua kali dan sebagainya), masuknya istilah/bahasa setempat ke dalam bahasa mereka (Belanda) misalnya kata "rampok Partijen", tempo dulu, kesukaan memelihara burung (perkutut) kepercayaan akan hantu atau demit.¹¹

Adalah merupakan adaptasi baru yang diperoleh dari proses pembauran mereka dengan lingkungan sosio-kultural setempat. Dalam hal ini peranan pembantu rumah tangga, yaitu golongan "babu", memegang peranan penting.¹² Merekalah yang banyak mengajarkan berbagai jenis makanan, masakan, bahasa dan kepercayaan akan hantu, guna-guna, jampi-jampi dan dongeng terutama bagi anak-anak Belanda "sinyo" dari lingkungan pribumi kepada orang-orang Belanda (Eropa).

Hal yang sama juga berlaku di lingkungan orang-orang Cina. Lahirnya golongan Cina, bahasa Melayu – Cina atau Melayu pasaran, jenis masakan dan makanan baru adalah contoh adanya proses pembauran di kalangan misioritas ini. Satu segi pembauran lamanya yang patut dicatat ialah melalui ajaran teosofi dan ilmu kebatinan yang dikembangkan oleh sementara orang – Cina dari pada masa (contoh Tan Koen Swei dan sebagainya).

Hubungan Cina dan pribumi pada abad ke-19 dalam batas-batas tertentu tidak menunjukkan adanya pertentangan tajam dalam kegiatan tertentu. Mereka baur dengan orang pribumi

(misalnya dalam kegiatan penyelundupan, perdagangan gelap (candu), mereka banyak kerja sama atau melibatkan penduduk pribumi.

Munculnya semangat anti-Cina, baru tampak pada awal abad ke-20 seperti yang terjadi pada sekitar tahun 1913–1914 di Semarang dan Surakarta dan Peristiwa Kudus pada tahun 1918, yaitu setelah lahirnya pergerakan nasional terutama organisasi Sarikat Islam.

Dibanding dengan golongan-golongan tersebut terdahulu, hubungan antarkelompok etnik lebih terbuka, mengingat mereka hidup dalam status yang sama atau tingkat kehidupan ekonomi yang sama, serta dijamin dengan ikatan keagamaan dan kultur lokal yang sama.

Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa dalam batas-batas tertentu interaksi sosial di kota-kota kolonial pada masa lalu ada pula segi-segi yang mendorong terwujudnya pembauran.

Kontak-kontak sosial budaya antar golongan etnik di lingkungan perkotaan di Indonesia telah melahirkan sintesa, sintesa baru, terutama dalam konfigurasi tradisi sosio-kultural baru yang dibutuhkan oleh golongan penduduknya pada masa itu.

CATATAN

1. T.G. McGee, *The Southeast' Asian City, A. Social Geography of the Primate, Cities of Southeast Asia*, (London : 1968), hlm. 30-33.
2. Ibid, halm. 52-54.
4. Hewi Perenne antara lain juga menggolongkan kota sebagai Pusat kegiatan intelektual politik di samping kota lain yang berfungsi sebagai pusat ekonomi. Lihat Gerald Breese, *Urbanization in Newly developing countries* (N.J., 1966) hlm. 49.
5. Pauline D. Milone, *Urban Adreas in Indonesia, Administrative and cencus Concepts* (Berkeley, 1966), halm. 13.
6. W.F. Wertheim, *East - West Parallels Cociological Approachs to Modern Asia* (The Haque, 1964), hlm. 76-78.
7. Ibid, hlm. 78-79.
8. Pauline D. Milone, *op.cit*, hlm. 11.
9. Paulina D. Milone, "Indisch Culture and its relationship to urban life" dalam *Compataitive Studies in Society and History, An. International Quart erky*, jilid IX (1966-1967), hlm. 407-426.
10. Ibid, hlm. 408-411.
11. Ibid, hlm. 414-419.
12. Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

- Breese, G. *Urbanization in Newly Developing Countries* N.J. 1966.
- Cabban, J.L. "Geographic Notes, on the first Two Centuries of Djakarta" *J.M. Bras*, Vol. 44, hlm. 108-150.
- Geertz, C, *The Social History of an Indonesia Town*, Cambridge & Massachussettz, 1965.
- Leur, J.C. *Indonesia Trade and society: Essays in Asian Social and Economie History*. The Haque/Bandung, 1955.
- Liem Thian Joe, *Riwayat Semarang*; Semarang, 1931-1933.
- McGee, T.G. *The Southeast Asian City, A Social Geography of the Primate Cities of Southeast Asia*. London, 1918.
- Milone, Pauline D. *Urba Areas in Indonesia: Administrative and cencus Concepts*. Berkaley, 1966.
- "Indisch. Culture and its relationship to urban life" dalam *Comparative Saudies in Society and History, An International Quarterley*, jilid IX (1966-1967).
- Nieuwenhuys, R. *The Young Merchant in the Indies of 1863* (terj. H. Baduet) Rotterdam, 1963.
- Schrieke, B. *Indonesia Sociological Studies*, Part One, The Haque/Bandung 1955.
- Wallerstein, Immanuel, *Social Change, The Colonial Situation*, New York, London, Sydney, 1966.

Werthejnen. W.F., *The Indonesia Town, studies in Urban Sociology*. The Haque/Bandung, 1958.
———, *East - West Parallels, Sociological Approaches to Modern Asia*. the Haque, 1964.

KERAJAAN IHA BERINTERAKSI DENGAN SEGALA SUKU BANGSA DI ABAD XVII DALAM PERJUANGAN NASIONAL

(Oleh: Drs. Frans Hitipeuw)

A. MENGENAL KERAJAAN IHA

1. Letak Lokasi dan Geografis Kerajaan Iha

Kerajaan Iha adalah suatu kerajaan Islam yang terletak di Pulau Saparua (Maluku Tengah) di Propinsi Maluku. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan tua di samping Kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, di daerah Maluku Utara, Kerajaan Hitu, Alaka, Hoamoal, Sahurlau di daerah Maluku Tengah.

Kerajaan Iha sejak dahulu kala terkenal sebagai suatu kerajaan pandai-besi artinya kerajaan ini mempunyai keahlian khusus dalam membuat benda-benda tajam seperti: kapak, tombak, golok, pisau dan alat senjata lainnya yang diperbuat dari besi. Juga terkenal sebagai suatu kerajaan yang rakyatnya hampir sebagian besar pandai membuat perhiasan (pandai emas) sehingga sampai saat ini masih terkenal sebuah ungkapan di daerah Maluku: "Orang Iha pujimas padahal tembaga".

Dilihat dari udara Kerajaan Iha terletak di sebelah utara Pulau Saparua, merupakan sebuah daerah yang membujur panjang dengan daerah yang penuh hutan yang subur sepanjang pesisir pantai merupakan sebuah perahu yang terdiri dari tanah datar di pesisir pantai dan bergunung bila telah masuk ke dalam hutan rimba. Di sebelah tenggara Pulau Saparua terletak Kerajaan Sirisori (Honimoa) membujur pula ke arah timur dengan tanah yang sangat subur dan merupakan sebuah perahu pula. Itulah sebabnya Pulau Saparua kalau dilihat dari udara seperti dua perahu (perahu dua) yang saling berkaitan diselang-seling dengan gunung-gunung, maka rakyat Maluku menyebut Pulau Saparua sama dengan Sapanolua artinya sampan dua atau perahu dua yang dimaksudkan ialah Pulau Saparua mempunyai dua jazirah yang besar yang di atasnya berkuasa dua orang raja dengan tanahnya yang sangat luas itu di sebelah utara Raja Iha dengan kerajaannya dan di sebelah tenggara Raja Honomia (Sarisori dengan kerajaannya).

Sebelum datangnya Portugis dan Belanda Kerajaan Iha terletak di antara Negeri Kulur sampai dengan perbatasan Negeri Ulat yang dahulunya berbatas dengan Kerajaan Sirisori.

Di abad ke-17 sebelum Iha dihancurkan oleh Gubernur Arnold de Vlaming pada tahun 1652, letak lokasi dan geografis Kerajaan Iha meliputi seluruh bagian utara Pulau Saparua ini. Kerajaan ini memiliki tujuh buah kerajaan kecil dengan mempunyai tujuh buah negeri yang terletak saling berjauhan antara satu negeri dengan negeri lainnya tetapi mempunyai satu pusat kerajaan yang terletak persis di tengah-tengah jazirah utara Pulau Saparua itu dan berkedudukan di atas sebuah bukit karang di atas puncak gunung Amaiha-Ulupalu (gunung Amaiha Ulupaluw). Kerajaan ini adalah Kerajaan Ulilima dalam persekutuan adat di daerah Maluku. Karena ada pula kerajaan yang disebut Ulisiwa.

Kerajaan Iha disebut Ulilima karena dia merupakan satu persekutuan adat serta mengakui Sultan Ternate sebagai sultan kerajaan/kesultanan (pelopor), sedangkan kerajaan yang dise-

but Ulisiwa merupakan satu persekutuan adat yang mengakui Sultan Tidore sebagai Kesultanan Pelopor. Dengan kata lain Kerajaan Ulilima tunduk dan mengakui Sultan Ternate selaku raja atas tanah Maluku, sedangkan Kerajaan Ulisiwa tunduk dan mengakui Sultan Tidore selaku Raja Daerah Maluku. Dengan demikian tergambarlah betapa besar pengaruh Kerajaan/Kesultanan Ternate dan Kerajaan/Kesultanan Tidore di daerah Maluku.

Iha termasuk kelompok Ulilima, tunduk di bawah Sultan Ternate. Kerajaan ini beragama Islam yang sebelumnya beragama Hindu. Kerajaan Iha adalah negeri utama yang oleh Rumphius disebut "Iwa"¹⁾, yang terletak pada jazirah Hatawano (Hataewano = tanah datar yang berhutan rimba yang terletak sepanjang pesisir pantai utara Pulau Saparua itu. Di sebelah barat kerajaan Iha berbatas dengan laut Seram, sebelah timur berbatas laut Banda, sebelah utara berbatas dengan Sirisori/Honimoa (kini ditempati oleh perbatasan negeri Ulat), di sebelah selatan berbatas dengan kota Saparua, sebelah tenggara berbatas dengan Kerajaan Sirisori.

2. Asal Usul Masyarakat Iha

Masyarakat Iha menurut Buku Tembaga Kerajaan Iha, dikatakan bahwa masyarakat Iha berasal dari Nunusaku (Pulau Seram), kemudian berpindah ke Pulau Saparua dan mendirikan Kerajaan Iha di Pulau Saparua.²⁾ Pemindehan orang-orang Iha ke Pulau Saparua ini sampai sekarang masih merupakan sumber ceritera rakyat turun-temurun sehingga masyarakat Iha bila ditanya, mereka akan menyatakan bahwa mereka berasal dari Nunusaku Pulau Seram. Menurut sumber lain masyarakat Iha ini berasal dari Kerajaan Ternate.³⁾

Masyarakat Iha ini menurut Rumphius sifat dan tabiatnya berlainan dengan masyarakat lain yang mendiami Pulau Saparua, sehingga kemungkinan mereka berasal dari Ternate sehingga berbeda dengan masyarakat Saparua lainnya yang berasal dari Pulau Seram.

Walaupun demikian hal ini perlu diselidiki secara mendalam. Namun dari data-data sejarah yang ada misalnya nama kerajaan Iha sebagai Kerajaan Ulilima, struktur pemerintahan Kerajaan Iha, adat istiadat di Kerajaan Iha, agama Islam yang dianut secara bersama-sama dengan Ternate memerangi Portugis, istilah-istilah adat seperti kata Soa, Pumatau, Hena dan Aman mirip seperti apa yang terdapat dalam struktur pemerintahan maupun adat istiadat yang ada di Ternate. Dengan demikian mungkin saja orang Iha itu berasal dari Ternate.

Selain itu Valentijn menulis bahwa masyarakat Iha itu sudah sejak dahulu berada di Pulau Saparua dengan kerajaannya yang terkenal dengan nama Kerajaan Iha, yang menurut dia Raja Iha dikisahkan oleh masyarakat Iha keluar dari sebatang pohon Kelapa Emas.⁴⁾ Menurut Rumphius Raja Iha keluar dari sebatang pohon Kelapa Raja yang berbuah Kelapa Emas yang sangat lebat yang terdapat di Aijlatoe (tempat ini sekarang disebut Kupalatu = Taman Bunga Raja) suatu tempat yang terdapat di dataran rendah di bawah lereng gunung Amaiha. Itulah sebabnya lambang Kelapa Emas sebagai lambang kerajaan ini sampai sekarang masih disimpan di rumah Raja Iha.⁵⁾ Raja Iha pertama bernama Latu Sopacua, Latu mempunyai 8 orang putera. Putera pertama bernama Latusali dan dia inilah yang memerintah sebagai raja pengganti ayahnya. Putra kedua bernama Latuwaji dan putera ketiga bernama Latupikaulan. Turuntemurun Latusali sekarang masih ada dan memerintah Negeri Iha di Pulau Seram bagian barat dengan nama Latukaisupi. Keturunan Latuwaji sekarang memerintah Negeri Ihamahu di Pulau Saparua. Sedangkan keturunan putra ketiga Latupikaulan menikah dengan keluarga Amahoru dan sekarang memerintah Negeri Iha (di pulau Saparua sebagai keturunan raja) yang memerintah atas puteri Raja Latu Pikaulan.⁶⁾

Putra raja yang keempat sampai dengan yang kedelapan mempunyai keturunan-keturunan yang walaupun tidak memerintah, tetapi mereka masuk dalam keluarga-keluarga keturunan Raja Iha dan selalu bergabung dalam satu Soa yang disebut Soa

Raja, yang mereka ini masih ada sampai sekarang dan berdiam di Negeri Iha (Pulau Seram), di Negeri Ihamahu maupun di Negeri Iha di Pulau Saparua. Mereka merupakan satu persekutuan adat tersendiri dan saling bantu-membantu dalam bermacam-macam acara adat misalnya acara pernikahan, pembuatan rumah, masohi (gotong royong) ataupun tolong-menolong antara sesama mereka dalam segala bentuk kegiatan.

3. Struktur Pemerintahan dan Interaksi dengan Segala Suku Bangsa dalam Kaitan Nasional

Struktur pemerintahan berkaitan erat dengan pelapisan masyarakat Iha yang sudah ada sejak zaman dahulu, sebagai akibat dari perkembangan-perkembangan baru selalu mengalami perubahan-perubahan setelah masuk dan berpengaruhnya Agama Islam dengan kebudayaannya maupun datangnya bangsa-bangsa Eropa dengan pengaruh perkembangan Agama Kristen. Walaupun begitu ciri-ciri khas atau sifat-sifat hakiki dari pada kehidupan masyarakat Iha seperti kekeluargaan, kesetiaan dan ketaatan terhadap para pemimpin, tolong-menolong, masohi (gotong royong) bersahabat dengan segala suku bangsa tetap hidup terpelihara serta tetap dipertahankan oleh masyarakat Iha. Jika terjadi perubahan-perubahan selalu disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Perubahan-perubahan yang terjadi lebih banyak menyangkut struktur pemerintahan dan kepemimpinan sedangkan pola-pola pelapisan sosial masih tetap dipertahankan dalam bentuk adat-istiadat, misalnya sifat toleransi kekerabatan dan kekeluargaan serta kegotongroyongan dengan segala suku bangsa. Hal ini disebabkan karena Kerajaan Iha merupakan satu kerajaan yang subur yang kaya akan rempah-rempah sehingga menjadi pusat perhatian dan tujuan pelayaran serta perdagangan nasional. Itulah sebabnya masyarakat Iha telah berinteraksi dengan suku Jawa, Bugis dan Makasar maupun para pedagang nasional lainnya dalam perdagangan rempah-rempah, sehingga pelabuhan Iha di awal abad ke-17 sangat ramai dilayari oleh para pedagang nasional yang datang untuk tukar-menukar rem-

pah-rempah dengan bahan-bahan pakaian, barang porselin maupun alat-alat senjata tajam.

Interaksi dengan segala suku bangsa dalam kaitan nasional ini begitu intim dan akrab sehingga menyebabkan Portugis dan Belanda kalah bersaing di dalam perdagangan. Hal ini menyebabkan timbul usaha-usaha Portugis dan Belanda untuk membuat kontrak-kontrak perdagangan dengan Raja Iha dan masyarakat kerajaannya, agar mereka secara aman dapat menguasai perdagangan rempah-rempah kerajaan Iha ini. Hal ini sudah tentu akan merusak persatuan dan kesatuan rakyat Kerajaan Iha dengan para pedagang nasional yang sudah lama bersahabat dengan masyarakat Iha, di pihak lain akan sangat merugikan masyarakat Iha yang ingin bebas dalam perdagangan rempah-rempah dengan segala suku bangsa dari pada terikat dengan kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian dengan Portugis dan Belanda.⁷⁾ Selain itu masyarakat Iha lebih senang bersahabat dengan suku Jawa, Bugis, Makasar dan Buton karena masalah kebutuhan sehari-hari masyarakat Iha dipenuhi oleh para pedagang nasional ini. Orang Iha senang berdagang dengan para pedagang nasional karena tidak terikat di dalam membatasi harga rempah-rempah serta tukar-menukar barang kebutuhan sehari-hari itu.

Dalam struktur pemerintahan masyarakat Kerajaan Iha diperintah oleh seorang raja. Raja Iha dibantu oleh 7 orang Kepala Soa, yaitu :

1. Soa Raja
2. Soa Patij
3. Hahuan
4. Peletula
5. Soa Maligehukum dan 2 Soa lagi, yaitu Soa ke-6 dan Soa ke-7 kurang dikenal.

Menurut Raja Iha Abdul Gawi Latukaisupi 2 Soa yang kurang dikenal itu bernama Sia Pia dan Soa Kulur.⁹⁾

Raja Iha diangkat dan diberhentikan oleh Badan Saniri Besar yang merupakan suatu Badan tertinggi dan dapat diumpamakan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ke-

anggotaannya terdiri dari anggota-anggota Badan Saniri Raja Pattih, Anggota-anggota Badan Saniri lengkap, Kepala-kepala Rumah-tangga/Keluarga dan semua orang lelaki yang sudah dewasa. Badan ini bersidang setahun sekali, akan tetapi sewaktu-waktu Badan ini dapat bersidang jika kerajaan mendesak seperti antara lain bila Raja telah meninggalkan garis adat-istiadat, terjadinya persengketaan batas-batas tanah atau penyerbuan suku liar atau orang dari lain negeri secara mendadak dan mengganggu keamanan ataupun kepentingan Kerajaan Iha sendiri.

Persidangan Badan Saniri Besar ini bertempat di Balairung (rumah adat) di mana dilaksanakan rapat terbuka atau demokrasi langsung. Selain itu terdapat juga Dewan Saniri Raja Pattih yang dapat dikatakan sebagai suatu Dewan Eksekutif yang melaksanakan tugas sehari-hari dan keanggotaannya terdiri dari Raja, Kepala Soa, Panglima Perang (Kapitan), Kepala Kewang (Latukewano) atau Polisi hutan dan lautan, dan Mariyo (pesuruh kerajaan).

Selain dua Badan tadi terdapat pula sebuah Badan Saniri lengkap, dianggap sebagai Badan Legislatif yang mempunyai tugas membantu dan memperlancar tugas-tugas Raja dalam melaksanakan pemerintahan serta mengadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Keanggotaan Badan Saniri lengkap terdiri dari anggota-anggota Badan Saniri Raja Pattih, Kapitan, Kepala Adat (Maueng) dan Tuan Tanah (Tuan Negeri).

Struktur pemerintahan Iha ini sampai sekarang tetap dipertahankan oleh masyarakat Iha. Kepangkatan raja dan seluruh slagorde pemerintahan dilaksanakan berdasarkan sistem keturunan. Walaupun demikian setelah zaman kemerdekaan kadang-kadang struktur pemerintahan Iha ini berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, namun bila terjadi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan Iha ini maka rakyat menjadi kecewa dan membuang kesalahan itu kepada Badan Saniri Besar serta mendesak agar cepat-cepat diadakan Sidang Badan Saniri

Besar untuk menggantikan raja, karena dianggap bukan berasal dari keturunan raja.

Demikian juga halnya bagi staf pemerintahan lainnya baik yang duduk sebagai Kepala Soa, anggota Badan Saniri Raja Pattih maupun anggota Saniri lengkap tidak segan-segan diberhentikan oleh rakyat kalau memang terbukti bahwa anggota Badan Pemerintahan tersebut bukan berasal dari keturunan yang sudah selayaknya harus duduk sebagai anggota dalam staf pemerintahan Iha ini.

Begitu ulet masyarakat Iha mempertahankan struktur pemerintahannya sehingga pelapisan sosial masyarakat Iha sejak dari dahulu teratur rapi, sehingga pada saatnya datang bangsa Belanda dengan konsep struktur pemerintahan baru menimbulkan tidak senangnya masyarakat Iha dan hal ini merupakan salah satu penyebabnya timbul perang Iha melawan Belanda, karena Belanda mau merusak pelapisan masyarakat Iha dan interaksi dengan segala suku bangsa dalam kaitan nasional, dengan ingin membuat perjanjian-perjanjian ataupun kontrak-kontrak yang membatasi ruang lingkup gerak masyarakat Iha.¹⁰⁾

B. PERLAUTAN KERAJAAN IHA MENENTANG KOLO- NIALISME BELANDA

1. Berkobarnya Semangat Perjuangan.

Masyarakat Iha termasuk masyarakat Leiase (Pulau Saparua, Haruku dan Nusalaut) tidak mudah diperintah oleh Belanda.

Penulis-penulis Belanda dan para residen dalam laporan mereka mengakui sendiri bahwa kerajaan Iha merupakan satu kerajaan yang hitam, keras kepala serta "Lastig" (memusingkan) "Weolig" (bergolak) dan "Geneigd tot Vezet" (cenderung untuk berontak).

Rakyat Iha di Pulau Saparua "Spant de Kroon" artinya paling berkepala batu paling sulit dengar-dengaran paling sulit

menuruti perintah. Maka kerajaan Iha ini oleh Belanda disebut kerajaan hitam (Bleck Lijst)¹¹⁾

Hal ini disebabkan oleh karena usaha-usaha Belanda (VOC) untuk menghancurkan Kerajaan Iha telah menimbulkan suatu peperangan yang maha dahsyat dan berlangsung terlalu lama serta berlarut-larut antara Belanda dengan masyarakat Iha dengan sekutu-sekutunya.

Masyarakat Iha sebenarnya sudah sejak awal abad ke-17 telah memusuhi Belanda. Hal ini jelas terbukti karena masyarakat Iha turut terlibat dalam perang Koa Moal, perang Hitu maupun peperangan lain sebelumnya dalam menghancurkan Belanda. Dengan demikian orang Belanda sangat tidak senang terhadap raja dan rakyat Iha, karena dianggap suka melawan dan sukar untuk ditaklukkan. Itulah sebabnya Belanda berusaha untuk mengikat raja dan masyarakatnya dengan membuatkan kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian perdagangan rempah-rempah.¹²⁾

Bagi Belanda kontrak-kontrak itu tidak saja digunakan untuk mengatur soal-soal perdagangan tetapi juga untuk mengatur tata-tertib kehidupan masyarakat Iha. Jika diteliti secara mendalam jelas kontrak-kontrak ini merupakan permainan politik Belanda yang mengandung maksud tertentu yaitu memonopolikan rempah-rempah Kerajaan Iha.

Dengan kontrak-kontrak ini, raja Iha dan masyarakatnya hanya boleh berdagang dengan Belanda, dan dilarang berdagang dengan pedagang Jawa, Bugis dan Makasar maupun pedagang nasional lainnya. Sudah tentu kontrak-kontrak ini menimbulkan semangat perjuangan rakyat Iha melawan Belanda karena mereka merasa terdesak selain dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga masyarakat Iha yang menganut paham kegotong-royongan, kekeluargaan tidak ingin merusak perhubungan persahabatan dan persekutuan hidup dengan suku-suku bangsa lainnya seperti orang Jawa, Bugis, Makasar dan Buton yang sudah lama bersahabat dengan penuh kerukunan. Kon-

trak-kontrak ini jelas merugikan rakyat Iha dan menimbulkan kemarahan penduduk Iha, yang sejak lama telah dalam suatu hubungan dagang yang bebas dengan para pedagang lainnya itu, jelas tidak menyetujui tindakan-tindakan Belanda ini. Rakyat Iha tidak peduli dengan tindakan Belanda itu, mereka mulai melawan dan melanggar isi kontrak-kontrak tersebut serta menentang semua instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Belanda.

Dengan demikian timbullah perang Iha melawan Belanda. Di pihak Belanda Raja Iha dan rakyatnya harus dihukum karena dianggap melakukan penyelewengan terhadap instruksi-instruksi VIC. Di pihak Raja dan rakyat Iha Belanda harus dihancurkan karena tindakan Belanda meng-Kristenkan orang Islam Iha merupakan tindakan yang sangat biadab yang tidak dapat ditoleril.¹³⁾

Masyarakat Iha yang menganut Agama Islam menganggap Belanda orang kafir yang tidak takut akan Tuhan, harus dimusnakan. Timbul peperangan yang maha dahsyat dan berlarut-larut disebabkan karena kedua belah pihak masing-masing mempertahankan prinsip yang saling bertentangan itu.

Pecahnya perang Iha pada tahun 1632 yaitu pada saat pertama kalinya orang Iha menyerang Belanda yang datang untuk menyerang Kraton dan pertahanan keamanan Benteng kota Iha yang terletak di atas bukit karang Gunung Amaiha Ulupaluw (bekas-bekas Benteng Kraton ini masih ada sampai sekarang)¹⁴⁾

Pada waktu itu yang menjadi Gubernur VOC di Ambon adalah Artus Gysels yang memerintah tanah Maluku dari tahun 1632 s/d 1634. Dia merupakan Gubernur Ambon yang ketiga menggantikan Gubernur Philip Lucass.¹⁵⁾

Pada waktu itu rakyat Iha dipimpin oleh panglima perang/kapitan besar Iha yang bernama Tobias atau yang dipanggil TOBO oleh penulis-penulis Belanda maupun dalam laporan para residen Belanda.¹⁶⁾ Untuk menghancurkan rakyat Iha dengan sekutu-sekutunya maka Gubernur Gysels dan pihak Be-

landa mendatangkan tentara Belanda yang dibantu oleh orang-orang Hutumeseng, orang-orang Tamilouw, dan orang-orang Alipuru dari Pulau Seram.

Pada tanggal 21 Nopember 1632 ekspedisi tentara Belanda ini tiba di pantai Kerajaan Iha yang pada saat itu terkenal dengan nama pantai Tobo. Begitu ekspedisi ini tiba pengepungan terhadap Kerajaan Iha segera dimulai. Rakyat Iha yang tinggalnya terpecah-pecah di 7 buah negeri (7 buah Soa untuk menjaga batas-batas tanah kerajaannya) serentak berkumpul di pusat Kerajaan Iha yang berkedudukan di Gunung Amaiha Ulupaluw itu.

Begitu tentara Belanda mencoba untuk mendaki Gunung Amaiha Ulupaluw untuk menyerbu pusat Kerajaan Iha maka semua pintu-pintu benteng dan Keraton Iha ditutup. Belanda sangat sukar untuk mengepung pusat kerajaan Iha ini oleh karena letak lokasi geografisnya sangat sulit karena terletak pada satu bukit karang yang curam sekali sukar untuk didaki dan hanya ada satu jalan raya yang harus didaki menuju Kraton Iha. Dari segi lain keadaan ini sangat membahayakan Belanda oleh karena rakyat Iha telah menyiapkan batang-batang kayu besar untuk digulingkan dari puncak ini ke lereng-lerengnya bila Belanda mulai menyerang serta berusaha mendaki gunung ini dari segala penjuru untuk mendekati pusat kerajaan.

Karena pertahanan rakyat Iha cukup kuat dan sulit dicapai oleh Belanda, maka tentara Belanda tidak berani menyerang apalagi mendekati Benteng Iha tersebut. Tentara Belanda hanya bisa menembak dengan tembakan-tembakan meriam dari jarak jauh. Begitu tentara Belanda berusaha mendekati pusat Kerajaan Iha dengan jalan mendaki Gunung Amaiha pada jalan raya masuk Benteng Iha, maka rakyat Iha mulai menyerang dengan menggulingkan kayu-kayu besar, batu-batu besar tembakan-tembakan, senjata-senjata tajam, parang (golok), tombak, panah dari puncak gunung Iha ke arah lerengnya serta menghamburkan debu panas bercampur cabai, sehingga Ekspedisi Gysels

seluruhnya tewas terbunuh, dan hampir-hampir tidak ada yang kembali. Dalam perang Iha ini, masyarakat Iha mendapat bantuan senjata dan alat mesiu dari Jawa, Bugis dan Makasar lewat kontak-kontak perdagangan.¹⁶⁾

Selain itu para pedagang nasional ini memberikan bantuan besar sebagai penghubung masyarakat Iha dengan sekutu-sekutu Iha yang pernah berperang melawan Belanda dalam "Hongi Tochten" (pelayaran Hengi) di daerah Maluku, seperti terungkap dalam kapata-kapata/lagu-lagu tua yang berbahasa daerah Maluku berjudul: "*Kumpanyia Kuraing Hongi*".

Nusa ina Laihalat Ria Huanualo,
Lawaloto Hatawano Kuraing Ama Ihalo,
Hatuhaha Amarima Lounusa Loto Alaka,
Lawa Hale Kapahaha Halenusa Hituo,
Yami pana Nono Upu Lahato,
Isi pa-la-ne Waayami Lahono,
Kupunya Larai Kuraing Hongi Ale,
Puna Leka rahamate sioh,
Puna Leka Huamual Rahato,
Amaihal kapahaha lahanao,
Puna titi basudara ale
Isi lawa hari nusa sioh,
Lawa hanu hiti were,
Bala-bala Kuraing Kapitang,
Tombak kura salawaku tantang ia kumpanyia
Kimpunya kuraing Hongi Irai mala lokono
Aha Toone upa palame wayami".¹⁸⁾

Lagu tua tersebut di atas mengisahkan "perang melawan VOC dengan Hongi Tochatennya" yang diterjemahkan sebagai berikut:

"Sebelah barat Pulau Seram di jasirah Hoamoal,
Di Jasirah Hatawano dengan kerajaan Iha-nya,
Lima negeri di Hatahaha yang terpusat di bukit alaka,
Begitu di Kapahaha yang terletak di Jasirah Hitu,

Mang terdiri dari balah rakyat dan Kapitan,
Semuanya angkat tombak perang dan Salawaku menentang
Kompani,
Kompani yang datang dengan pelayaran Honginya,
Semuanya dimusnahkan oleh kami,
Karena membawa malapetaka,
Dihancurkan Hoamual, Keranaan Iha, Hatuhaha dan Kapahaha,
Memutuskan persaudaraan kami sehingga kami harus tinggalkan
kampung halaman,
Lari bangun bangkit berdiri, penduduk negeri dengan pemim-
pinnya,
Angkat tombak perang dan salawaku usirlah VOC,
Karena VOC dengan Hongi Tochten-nya mendatangkan kemela-
ratan,
Demikian para Leluhur bercerita kepadakami”.

Lagu tua ini menjelaskan betapa hebatnya peranan Iha de-
ngan saudara-saudaranya di Pulau Ambon, Seram dan Haruku
menentang Belanda dengan Hongi Tochtennya sebelum pecah-
nya perang Iha yang maha dasyat itu melawan Belanda. Itulah
sebabnya sementara Gubernur Gysels memusatkan seluruh ke-
kuatannya dalam mengepung Kraton Iha, maka raja Iha dan
masyarakatnya mendapatkan bantuan dari sekutu-sekutunya
misalnya yang pertama Gimelaha Luh. Dia menyusun suatu
kekuatan laha menyerang VOC di Luh dan daerah-daerah
sekitarnya.

Sebuah kapal VOC yang sedang berlabuh di perairan Luh
diserangnya, sehingga daerah Huamual sekutu Iha menjadi tidak
tenang, dengan demikian VOC tidak dapat menguasai keadaan
di darat maupun di laut Huamual.

Selain itu dalam rencana Gubernur Gysels untuk menye-
rang Kerajaan Iha secara besar-besaran tiba-tiba ia menerima se-
pucuk surat dari Sultan Ternate yang bunyinya berisikan la-
rangan untuk mengembalikan meriam dan hasil-hasil cengkih
yang dirampas VOC dari Gimelaha Luh. Selain itu ada larangan

untuk menerima orang-orang Bugis, Makasar dan perintah Sultan Ternate untuk membuat sebuah benteng VOC lagi di Luhuh. Perintah itu tidak dihiraukan dan dijalankan oleh Gimelaha Luhuh, malahan ia berbalik menyerang VOC di daerah Huamual sehingga menimbulkan konflik baru antara Luhuh dan VOC.

Sementara itu pedagang-pedagang Bugis dan Makasar yang bersekutu dengan rakyat Iha mencegat kapal-kapal VOC di Laut Sulawesi, laut Banda maupun laut Maluku, karena sakit hati terhadap monopoli perdagangan rempah-rempah oleh VOC. Hal yang sama terjadi di Laut Jawa antara pedagang-pedagang Jawa sekutu Iha dengan VOC. Oleh karena itu sering timbul pertempuran-pertempuran laut antara pasukan-pasukan Jawa, Bugis, dan Makasar melawan VOC.

Hal ini sungguh-sungguh dimanfaatkan oleh Raja Iha dan masyarakatnya yang memusuhi VOC untuk meminta bantuan orang Bugis, Makasar dan Jawa untuk membantu perjuangan mereka, dan sebagai balas jasa akan diberikan cengkik.¹⁹⁾ Tindakan ini merupakan ancaman besar bagi VOC di daerah Maluku. Dengan demikian Gubernur Gysels dihadapkan pada dua alternatif yaitu apakah akan terus bertahan mengepung Kerajaan Iha dan membiarkan bencana besar yang mengancam seluruh kehidupan VOC di Maluku ataukah menyelesaikan terlebih dahulu bencana besar yang datang dari Jawa, Bugis dan Makasar ini. Gubernur Gysels mengambil keputusan untuk tetap menghancurkan Kerajaan Iha.

Sementara Gysels berada di Kerajaan Iha memimpin ekspedisi pengepungan Iha terjadilah perampokan besar-besaran di Negeri Mamala (Pulau Ambon). Keadaan di darat maupun di laut sekitar Pulau Ambon menjadi tidak aman dan membahayakan kedudukan VOC di kota Ambon sebagai Ibu kota Propinsi Maluku. Mau tidak mau perhatian VOC harus dialihkan ke Ambon untuk menanggulangi segala keamanan di kota Ambon dan sekitarnya karena hal ini mempunyai pengaruh besar bagi kepentingan perdagangan, pemerintahan maupun sosial politik

VOC. Dengan demikian Gubernur Gysels terpaksa harus menarik pasukannya dan membatalkan semua rencana pengepungannya terhadap Kerajaan Iha.²⁰⁾

Tindakannya ini menurut dia sangat tepat, oleh karena kalau seluruh daerah Huamual (Seram Barat) dan Hitu (Pulau Ambon) telah dapat diamankan sehingga rakyat di daerah-daerah itu mengakui kekuasaan pemerintah Belanda kembali maka dengan sendirinya ketahanan Kerajaan Iha pasti menjadi lemah. Untuk itu dialihkan seluruh perhatian Belanda ke Pulau Ambon, Seram dan sekitarnya.

Penyerangan terhadap Kerajaan Iha dihentikan. Pemerintah Belanda di bawah pimpinan Gubernur Gysels tidak dapat mengalahkan Kerajaan Iha. Masyarakat Iha menjadi tenang kembali, karena tidak ada lagi pertempuran maupun gangguan keamanan dari pihak Belanda. Walaupun demikian para pemimpin kerajaan Iha beserta rakyatnya tidak tinggal diam. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk lebih memperkuat Benteng pertahanan Amaiha, dan lebih mempererat lagi hubungan kerja sama dengan sekutu-sekutunya.

Setelah kurang lebih 15 tahun, Kerajaan Iha hidup tenang dan tenteram kembali maka pada saat itu Pulau Ambon, Seram dan sekitarnya dapat dikuasai oleh VOC. Gubernur Gysels diganti dengan Gubernur Demmer. Pada tahun 1647, Gubernur Demmer mulai menaruh perhatian besar kepada Kerajaan Iha.

Ia mulai memerintahkan agar semua orang Iha turun mendiami tempat tinggal yang baru di pesisir pantai yang diberi nama negeri Rarakit. Perintah Demmer supaya orang Iha meninggalkan Kraton Iha di puncak gunung Amaiha Ulupaluw turun ke pesisir pantai ini sama sekali tidak digubris oleh raja, para pemimpin dan seluruh lapisan masyarakat Iha. Orang Iha lebih senang tinggal di keraton Iha di daerah pegunungan dengan Benteng Amaihnya yang telah terkenal keutuhan dan keuletannya dalam menggagalkan pengepungan Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Gysels 15 tahun yang lampau. Selain

itu Kraton Iha ini telah lebih diperintah dan diperkuat dengan benteng pertahanan sehingga orang Iha yakin bahwa benteng mereka yang gagah perkasa dan Kraton Iha yang indah itu tidak akan mungkin dapat dikalahkan oleh Belanda dengan kekuatan senjata mereka. Selain itu di dalam Kraton Iha ini terdapat rumah-rumah adat dan sebuah mesjid raya Malakey (diumpamakan dengan kabah di Mekah) dan 7 buah mesjid hak milik 7 buah kerajaan kecil atau 7 buah Soa yang rakyatnya hidup menjaga 7 buah negeri di sekitar wilayah Kerajaan Iha. Baik mesjid raya Malakey maupun 7 buah mesjid kecil itu semuanya dibangun dengan biaya yang mahal, kuat dan megah dan merupakan kebanggaan umat Islam Kerajaan Iha,²¹⁾ di samping Kraton Iha yang megah dengan lambang kerajaan pohon kelapa emas dengan buah-buahnya yang lebat.²²⁾ Keadaan ini sukar dilupakan apalagi mau ditinggalkan oleh masyarakat Iha dan para pemimpinnya. Mesjid raya Malakey merupakan salah satu bangunan mesjid yang mempunyai persamaan bentuk dengan Mesjid Agung di Banten dan Mesjid Baitulrahman di Aceh.²³⁾

Dengan keras kepalanya orang Iha melawan perintah Demmer maka Demmer menjadi marah. Segera dipersiapkan oleh Demmer suatu pasukan tempur Belanda untuk menyerang dan merebut Benteng Amaiha dengan kekuatan senjata, walaupun begitu masyarakat Iha yang tidak pantang menyerah itu memainkan peranan penting lagi, sehingga cita-citanya Demmer ini tidak tercapai. Keadaan ini disebabkan karena permainan politik raja Iha dengan semua sekutu-sekutunya di Hitu dan Huamual dengan mendapatkan bantuan orang-orang Jawa, Bugis dan Makasar mulai bergerak lagi sehingga timbul kembali gangguan keamanan di daerah sekutu-sekutu Kerajaan Iha. Selain itu raja Iha mulai melaksanakan politik yang agak lunak terhadap Belanda. Dengan demikian sampai berakhirnya pemerintahan Gubernur Demmer di daerah Maluku, Belanda tetap tidak berhasil menghancurkan kerajaan Iha.

Pada saat Gubernur Demmer diganti dengan Gubernur Arnold de Vlaming maka sekali lagi masyarakat Iha bangkit

dengan semangat yang berkobar-kobar melawan Belanda pada tahun 1647. Dengan bengis dan kejam de Vlaming bertindak menumpas perlawanan Iha ini. Dengan segala kekuatan Belanda dan semua masyarakat Maluku yang telah berhasil ditaklukkan Belanda dikumpulkan secara masal serta diberangkatkan ke Jazirah Hatawano tiba di pantai Kerajaan Iha. Tentara Belanda yang langsung dipimpin oleh Gubernur de Vlaming ini segera menyerang Benteng Amaiha dengan mendapatkan bantuan orang-orang Ulat, Sirisori, Paperu, Saparua maupun orang-orang Nolothe maupun masyarakat sekitar perbatasan Kerajaan Iha, dengan menjanjikan pembagian tanah-tanah Kerajaan Iha kepada mereka yang berjuang membantu Belanda mematahkan ketahanan Kerajaan Iha dan bila Kerajaan Iha ini sudah hancur sama sekali. Hal ini menyebabkan de Vlaming dan tentara Belanda menjadi kuat.

Namun kekuatan senjata Belanda ini dengan mendapatkan bala bantuan dari masyarakat Pulau Saparua yang begitu banyak namun mereka tidak mudah mengalahkan Kerajaan Iha. Dengan bantuan seorang spion yang bernama Sasapoe (Sasabone) untuk menunjuk jalan rahasia masuk ke dalam Kraton Kerajaan Iha dan dengan saran Sasabone agar tentara Belanda menembak sekerat tulang babi ke Mesjid Raya Malakey kebanggaan masyarakat Iha ini maka orang Iha tidak dapat bertahan di dalam Benteng Amaiha, karena merasa Mesjid mereka yang diagungkan itu telah kena "haram" oleh karena bagi umat Islam Iha babi merupakan binatang yang dilarang oleh agama.²⁴⁾ Umat Islam Iha sangat marah terhadap Sasabone karena mesjid mereka telah dinodai dengan tindakan Sasabone yang tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Setelah masyarakat Iha mengetahui secara jelas bahwa rumah ibadah mereka telah ditembak dengan tulang babi itu akibat penghianatan Sasabone maka mereka bersumpah serta mengutuki Sasabone dengan suatu sumpahan yang sampai sekarang masih terkenal dengan "Kutuk Nitalake, Sasabone

Kutuke, Kutuke-kutuke Sasabone Kutuke, sama bawang puti 7 turunan Kutuke, Sasabone Kutuke.²⁵⁾

Sumpahan atau Kutuk Nitalake terhadap Sasabone ini dinyanyikan dengan menumpahkan air mata, masyarakat Iha secara berduyun-duyun keluar dari pintu Benteng Amaiha sebelah utara meninggalkan Kraton Iha menuju Pulau Ambon (negeri Mamala), kemudian pergi ke Pulau Buru mendirikan daerah Hatawano di Pulau Buru. Karena keadaan geografis Pulau Buru belum menyenangkan hati mereka, maka mereka pindah ke Pulau Seram, mula-mula ke gunung Sembilan di Piru dan terakhir mereka pindah ke daerah Huamual di pantai barat Pulau Seram dan mendirikan Kerajaan Iha baru di Seram Barat ini. Di tempat ini bila keadaan cuaca dan laut tenang, maka umat Islam Iha dapat melihat kerajaan asal Iha yang sebenarnya di mana leluhur mereka dilahirkan.

Pada saat sebagian rakyat Iha menuju ke Pulau Ambon dan terus ke Seram Barat, Raja Iha Latusopacualatu tidak berangkat meninggalkan kerajaannya dengan beberapa orang pemimpin Iha. Hal ini menyebabkan sebagian lagi rakyat Iha yang setia terhadap raja mereka dan masih cinta terhadap tanah kerajaannya lalu keluar meninggalkan kraton dengan putra raja yang kedua tinggal di dalam hutan-hutan wilayah Kerajaan Iha yang nantinya mereka ini pergi ke Negeri Sirisori dan minta 'dikristenkan' kemudian kembali ke tanah tumpah darah mereka dan mendirikan negeri baru dengan nama Negeri Ih-mahu. Sebagian kecil lagi dari masyarakat Iha pergi ke Negeri Latu di Seram Selatan yang kemudian setelah aman kembali ke tanah wilayah Kerajaan Iha dan mendirikan Negeri Iha Baru di Pulau Saparua dan tetap memeluk Agama Islam di bawah pemerintahan putra raja Iha yang ketiga.

Setelah masyarakat Iha secara berangsur-angsur pergi meninggalkan Benteng Amaiha, maka Belanda dengan beban memasuki Kraton Iha tanpa perlawanan senjata. Gubernur de Vlaming memerintahkan orang-orang Naloth untuk menawan

raja Iha dan diperintahkan untuk dibawa ke pesisir pantai pada **tanjung** pertama sebelah utara Pulau Saparua (Tanjung Hatawano) tempat mana masyarakat Noloth mendirikan Negeri Noloth atas izin Gubernur de Vlaming dan kepada mereka diwajibkan harus mendirikan Benteng Velsen di Ujung Tanjung ini. Kemudian Gubernur de Vlaming melantik pemimpin masyarakat Naloth dengan jabatan "Orang Kaya".

Kepada orang kaya Raja Noloth diberikan kewenangan dan kepercayaan yang besar sekali untuk membagi tanah-tanah wilayah Kerajaan Iha yang meliputi tujuh buah negeri kecil (7 Soa) Kerajaan Iha dengan tanah-tanah adatnya di dalam wilayah Kerajaan Iha itu sesuai dengan rencana Gubernur de Vlaming yang akan memberikan tanah-tanah Iha kepada sekutu-sekutunya yang membantu Belanda sebelum penyerangan Kerajaan Iha terhadap de Vlaming ataupun rencana de Vlaming memusnahkan Kerajaan Iha itu.

Rencana de Vlaming membagikan tanah Iha itu kepada sekutu-sekutunya terdapat dalam buku harian Gubernur de Vlaming yang dikutip dari Amboinas buku harian tertanggal 16 Mei 1653 sebagai berikut:

1. Tanah Soa Raja (Soa Iha) diberikan kepada masyarakat negeri yang pindah ke tanah Iha dan mendirikan negeri baru Itawaka.
2. Tanah Soa Patty (Soa Mahu) diberikan kepada masyarakat Paperu.
3. Tanah Soa Hahuhan (Soa Hatala) diberikan kepada masyarakat Saparua.
4. Tanah Soa Matalete (Soa Malige Hukum) diberikan kepada masyarakat Ulat yang pindah ke tanah Iha dengan mendirikan Negeri baru Tuhaha.
5. Tanah Soa Peletula (Soa Pia) diberikan kepada Sirisori (Honimua) dengan instruksi Gubernur de Vlaming dalam tempo 2 bulan masyarakat-masyarakat sekutu Belanda ini

harus segera memindahkan tempat tinggal mereka dan pergi ke tanah-tanah pembagian mereka di Kerajaan Iha untuk menjaga tempat-tempat yang telah ditunjuk itu dalam rangka menjaga serta mencegah kembali masyarakat Iha menduduki tempat-tempatnya lagi sehingga dapat bersatu kembali dengan sekutu-sekutu mereka yang bisa mengakibatkan perlawanan kembali terhadap Belanda. Kepada masyarakat Naloth tidak disebut-sebutkan tanah Soa Iha yang mana yang diberikan de Vlaming kepada mereka. Namun dalam kenyataannya masyarakat Noloth mendapatkan/menduduki sebagian besar wilayah Kerajaan Iha.²⁶⁾

Dengan tindakan Ggbernur de Vlaming merampas serta membagi-bagikan tanah-tanah wilayah Kerajaan Iha ini kepada sekutu-sekutunya yang tidak berhak, menyebabkan Iha menjadi daerah berdarah artinya dari tahun ke tahun sejak zaman Gubernur de Vlaming sampai saat ini bahkan mungkin akan sampai kiamat tanah Kerajaan Iha yang dibagi-bagikan kepada yang tidak berhak itu selalu menimbulkan api peperangan, pertumpahan darah dari satu generasi ke generasi berikutnya karena Belanda meninggalkan suatu bom waktu dalam sejarah bangsa Indonesia yang tidak dapat diselesaikan sepanjang zaman.

2. Iha Menjadi Daerah Berdarah

Setelah raja Iha mati dibunuh oleh orang kaya Noloth dan masyarakatnya, dan orang-orang yang bersekutu dengan Belanda telah pindah ke tanah Iha dan mendirikan negeri-negeri baru seperti Itawaka, Kampung Mahu, Tuhaha, dan Negeri Pia dalam wilayah Kerajaan Iha, maka masyarakat Negeri Ihamahu yang telah menjadi Kristen (mengaku takluk kepada Belanda) kembali pulang dari Negeri Sirisori ke tanah asalnya dalam wilayah Kerajaan Iha dan mendirikan Negeri Ihamahu di Pantai Kota Hitu persis di bawah Benteng Imaiha yang terletak tepat di tengah-tengah Jazirah Hatawamo yang oleh Belanda disebut

negeri baru Rarakit.²⁷⁾ di bawah pemerintahan Pattih Yeremias Djumat Patiiha atau disebut Patiamalo.²⁸⁾, turunan putra Raja Iha Awal yang kedua.

Orang Ihamahu pertama yang datang menghadap Gubernur de Vlaming untuk meminta tanah bernama Lisapaliy yang oleh Gubernur de Vlaming diperintahkan untuk memeluk Agama Kristen dan diberi nama Arnold de Vlaming Van Oodshorn Watyemena Lisapaliy, dan kepadanya diberikan sebidang tanah sisa yang belum terbagi yang disebut tanah Lounusa (tanah sisa).²⁹⁾ Sesudah itu Pattih Yeremias Djumat Patiiha berangkat menuju Benteng Victoria di Ambon untuk menghadap Gubernur de Vlaming, minta dibaptiskan serta meminta tanah untuk masyarakat Negeri Ihamahu.³⁰⁾

Gubernur de Vlaming mengatakan kepadanya bahwa tanah Iha sudah habis terbagi-bagi. Masyarakat Negeri Ihamahu terpaksa tidak menerima sama sekali pembagian tanah dari de Vlaming, karena sudah tidak ada tanah. Untuk memiliki tanah bagi kelangsungan hidup Negeri Ihamahu, mereka harus membeli tanah kepunyaan Sekretaris Gubernur Guanatudi yang terletak di sebelah selatan lereng Gunung Amaiha yang berbatas dengan tanah Lonusa (tanah Lisapaliy). Kemudian mereka membeli pula tanah Hatala yang telah diberikan kepada Negeri Saparua melalui masyarakat Negeri Tuhaha, dan mereka membeli juga sebidang tanah milik Parera yang berbatas dengan Negeri Tuhaha.

Selain itu masyarakat Negeri Ihamahu ini membeli tanah Mahuputi dari Negeri Noloth dan tanah Amaritang dari Negeri Paperu.³¹⁾ Sementara itu sebagian kecil masyarakat Iha yang pindah ke Negeri Latu di Seram Selatan kembali pulang ke tanah asalnya dan mendirikan Negeri Iha kecil di Pulau Saparua yang terletak dekat Negeri Ihamahu (Negeri Saudaranya), sampai sekarang tidak memiliki sebidang tanah pun dari wilayah Kerajaan Iha asalnya. Mereka ini sampai sekarang hanya bisa hidup sebagai nelayan-nelayan yang hidupnya tergantung pada

mata pencaharian di lautan, dan masih meneruskan usaha-usaha leluhurnya sebagai pandai besi dan pandai emas. Masyarakat Iha kecil di Pulau Saparua ini diperintah oleh seorang raja, keturunan dari putra raja, Iha Awal yang ketiga. Bagi masyarakat negeri Ihamahu maupun Negeri Iha kecil di Pulau Saparua yang kedua-duanya merasa berhak atas tanah leluhurnya (tanah wilayah Kerajaan Iha) tentu merasa sakit hati karena tidak memperoleh pembagian tanah dari Gubernur Arnold de Vlaming. Di pihak lain masyarakat yang menjadi sekutu de Vlaming untuk menghancurkan Kerajaan Iha dan telah menduduki tanah/tanah Kerajaan Iha selalu memusuhi masyarakat Negeri Ihamahu dan masyarakat Negeri Iha turunan asli masyarakat Kerajaan Iha secara juridisformal itu, malah dibenci diburu-buru dan didesak-desak oleh masyarakat negeri-negeri sekutu Belanda ini.

Keadaan ini menyebabkan selalu timbul gangguan keamanan di Jazirah Hatawano Pulau Saparua yang semula menjadi wilayah Kerajaan Iha. Hampir setiap tahun terjadi perkeltahan, bunuh-membunuh bakar-membakar negeri antara masyarakat di wilayah Kerajaan Iha ini sehingga selalu terjadi pertumpahan darah. Itulah sebabnya Iha dengan Jazirah Hatawononya dikatakan menjadi daerah berdarah.³²⁾

3. Akibat-akibat Perang Iha

Setelah de Vlaming berhasil menawan serta membunuh raja Iha dan para pemimpinnya maka seluruh masyarakat Iha dan wilayah kerajaannya dianggap telah tunduk dan takluk kepada VOC. Dengan demikian VOC bertindak sebagai pemegang kekuasaan mutlak atas Kerajaan Iha dengan semua hak miliknya termasuk masyarakat Iha sendiri. Raja Iha dianggap sudah tidak ada dan sama sekali Belanda tidak mengakui kekuasaan raja Iha dan seluruh masyarakat Iha dianggap sudah tidak ada lagi dan dikategorikan sebagai rakyat yang takluk kepada VOC. Kepemimpinan dan kemerdekaan masyarakat Kerajaan Iha hilang

lenyap, bahkan masyarakat Kerajaan Iha dikatakan Belanda dalam laporan Gubernur Belanda dan para residen sebagai kaum pelarian. VOC menciptakan suatu sistem pemerintahan baru yang kekuasaannya secara langsung berada di bawah VOC atas segala sesuatu yang menyangkut Kerajaan Iha baik di dalam maupun di luar hukum. Bahkan segala hukum yang diterapkan di Wilayah kerajaan Iha ini adalah hukum VOC, sehingga semua negeri-negeri sekutu Belanda yang mendapat pembagian tanah Iha maupun Negeri Ihamahu dan negeri Iha kecil di dalam bekas wilayah Kerajaan Iha ini diatur oleh VOC, sehingga mereka ini betul-betul dijajah oleh VOC.

Mereka sama sekali tidak mendapat kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Negeri Ihamahu dan Negeri Iha betul-betul mendapat tekanan dari VOC sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. VOC mulai mengatur tata pemerintahan maupun masyarakat Negeri Ihamahu dan Negeri Iha serta masyarakatnya sesuai selera VOC. Bahkan struktur pemerintahan Negeri Ihamahu dan Negeri Iha diubah sama sekali oleh VOC dengan mengangkat para pemimpin Negeri Ihamahu dan Negeri Iha yang sama sekali tidak mempunyai hubungan keturunan dengan Raja Iha Awal.

Pola hidup masyarakat Iha Awal yang semula bersifat kekeluargaan tolong-menolong dan gotong-royong yang masih dimiliki oleh masyarakat Negeri Ihamahu dan Negeri Iha diubah oleh VOC menjadi pola hidup kapitalis materialis. Namun pola hidup ini tidak bisa berjalan sebagai mana mestinya karena masyarakat keturunan Kerajaan Iha ini telah memiliki dan menghayati pola hidup leluhurnya dan telah membudaya, walaupun kehidupan mereka menjadi sangat sukar. Masyarakat Ihamahu dan masyarakat Iha hidup menderita karena selain semua harta benda telah dirampas atau dimusnahkan oleh VOC, kehidupan mereka selalu terganggu, dan tidak lagi menikmati kesenangan hidup sebagai mana pada masa jaya kerajaan Iha akibat tindakan biadab VOC dengan sekutu-sekutunya merampas dan menduduki Kerajaan Iha pada tahun 1652, yang oleh Belanda Kerajaan Iha dinyatakan kalah perang.³³⁾

C. PENUTUP

1. Saran-saran.

- a. Kerajaan Iha yang menggalang persatuan dan kesatuan serta berinteraksi dengan segala suku bangsa dalam perjuangan nasional menentang kolonialisme Belanda perlu ditulis dalam Sejarah Nasional.
- b. Pola hidup masyarakat Iha yang bersifat kekeluargaan, tolong menolong dan kegotong-royongan serta hidup bersahabat dengan segala suku bangsa dalam kaitan nasional perlu dicontoh dan diteladani oleh generasi penerus.
- c. Sikap patriotisme, heroisme dan militansi serta teguh dalam perjuangan perlu dibina, dipelihara dan dikembangkan serta dihayati oleh generasi muda.
- d. Kapitan Tobo/Panglima perang Kerajaan Iha yang tidak pernah menyerah dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara merupakan sikap kepahlawanan yang sudah sepatutnya mendapatkan penghargaan pemerintah sebagai Pahlawan Nasional.
- e. Untuk memperingati serta mengabadikan sejarah perjuangan Kerajaan Iha menentang kolonialisme Belanda, sudah sepatutnya bekas benteng dan Kraton Amaiha yang masih ada itu perlu dipugar kembali dan dipelihara sebagai benda peninggalan sejarah dan purbakala, sedikit banyaknya perlu ada satu monumen di tempat peninggalan sejarah ini yang dapat melambangkan sejarah perjuangan Kerajaan Iha.
- f. Untuk menghilangkan luka derita, azab sengsara serta air mata masyarakat Kerajaan Iha yang hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan akibat tindakan Belanda perlu diimbangi dengan perhatian serius pemerintah agar pembangunan nasional dapat dinikmati oleh

warga masyarakat bekas Kerajaan Iha yang tertindas ini.

- g. Perlu diadakan peningkatan pendidikan di daerah ini dengan jalan membangunkan sekolah-sekolah kejuruan agar masyarakat yang telah memiliki bakat sebagai pandai besi dan pandai emas dari leluhurnya bisa berkembang dengan cara yang lebih baik.
- h. Untuk menghindarkan percekocokan dan konflik yang mengakibatkan pertumpahan darah secara terus menerus, perlu dibangun di daerah ini pabrik-pabrik misalnya pabrik ikan kaleng, pabrik minyak kelapa pabrik minyak cengkih dan usaha-usaha perindustrian lainnya sehingga masyarakat bekas kerajaan Iha maupun sekutu-sekutu Belanda yang hidup saling membenci dapat hidup bergandengan dan bekerja sama di dalam menyukkseskan pembangunan nasional sehingga dengan sendirinya akan tercipta suatu pola hidup baru yang sesuai dengan jiwa UUD 45 dan Pancasila.
- i. Struktur pemerintahan peninggalan kolonial secara perlahan-lahan harus dapat diubah, disesuaikan dengan hukum maupun undang-undang no. 5, yang menyangkut pemerintahan daerah serta keputusan menteri dalam negeri yang mengatur tata pemerintahan.
- j. Penataran P4 ciptaan pemerintah Orde Baru, perlu dilaksanakan sebagaimana mestinya bagi masyarakat yang menghuni bekas wilayah Kerajaan Iha ini, agar mereka dapat memiliki sikap "teposeliro" atau tenggang rasa, saling menghormati dan saling menghargai, berjiwa Pancasila sejati dalam mengisi dan meneruskan kemerdekaan.

2. Kesimpulan

- a. Perang Iha menyebabkan kemiskinan, kemelaratan dan kebodohan bagi rakyatnya, sehingga perlu men-

dapatkan perhatian serius pemerintah Republik Indonesia.

- b. Pola hidup masyarakat diobahsuaikan, sehingga masyarakat di daerah ini memiliki kembali martabat serta rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka.

CATATAN

1. Georgius Everhardus Rumphius, Deel I, De. Generale Land Beschrijving Vannet Ambonsche Gouvernement, Beschrijving der Nagul Boomen van het Comptoir Hila, Anno 1805, halaman 82.
2. Latupikaulan, Hikayat tanah Iha, "Buku Tembaga Kerajaan Iha" ditulis dengan huruf Arab, terjemahan Abdul Gawi Latukaisupi, Raja Iha Seram Barat.
3. Rumphius, Georgius Everhardus, Deel I, *op.cit.* hal. 82.
4. Valentyn, Francois, Beschrijving van Amboina, verbatenda, Een wydluftge Verhandeling van het zelve, en van alle de Eylanden, daar onder behoorende, te weten, van't groot Eiland, Cerama, Boero, Amboina, Honimoa, Noessa Laoet, Oma, Manipa, Bonoa, Kelang, Tweede Deel, hal. 87.
5. Rumphius, Dell, I *ibid* lambang kerajaan Iha berupa kelapa emas ini sampai sekarang masih ada dan disimpan secara baik oleh keturunan putra I raja Iha, Abdul Gawi Latukaisupi raja Iha Seram Barat.
6. Latupikaulan, Hikayat tanah Iha, "Buku Tembaga Kerajaan Iha, *Ibid*, dan ditulis pula oleh Rumphius, Deel, I. *Loc. cit.*
7. Colenbrander, HT, DR, Dag Register Gehouden int

Casteel Batavia, vant passerende daer ter plaetse aks over geheel Nederlandts India, Anno 1643-1644 s-gravenhage, Mart Imus Nijhoff 1902, hal. 93.

8. Colenbrander, HT, Dag Register Ge houden int casteel Batavia, Anno 1643-1644 *ibid*, hal. 93.
9. Rumphius, Deel I, *op.cit*, hal. 83.
10. Latupikaulan, Hikayat tanah Iha, "Buku Tembaga Kerajaan Iha" *ibid*. yang ditulis juga oleh Rumphius, Deel I hal. 83.
11. De Graaf, H, I, DR, Een oude en een nieuwe negorii, (Kerajaan Iha) selaku salah satu kerajaan tua berpusat di Gunung Amaiha dan kemudian mendirikan salah satu negeri baru Ihamahu "Negeri Rarakit" setelah turun ke pesisir pantai.
12. Mes, Fruin, V. Dag Register, gehouden int Casteel Batavia, II Anno 1682, hal. 1202, dan Colenbrander, HT, Dag Register, Gehouden int Casteel Batavia, Anno 1643-1644 hal. 93.
13. Colenbrander HT, DR. Dag Register, gehouden int casteel Batavia, Anno 1637 hal. 172.
14. De Graaf H,I,DR, Een oude en een nieuwe negorii, *ibid*.
15. Rumphius, Deel I. *op.cit*. hal. 83.
16. Colenbrander HT,DR.Dag Register, gehouden int casteel Batavia, Anno 1637, hal. 93.
17. -----, *ibid*;
18. Frans Hitipeuw, Drs. Karel Sadsuittubun, Depdikbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Jakarta 1982/1983. *op.cit*. hal. 10.
19. Van Der Chijs, J.A. Mr. Dag Register gehouden int casteel Batavia Anno 1640-1641, *op.cit*. hal. 296, 297.
20. Valentyn, Francois, Beschrijving van Amboina, II Deel, *op.cit*. hal. 86 dan Van Der Chijs, J.A. Mr. Dag Register, gehouden int casteel Batavia, Anno 1640-1641 *ibid*, hal. 296, 297.

21. Latupikaulan, Hikayat tanah Iha, "Buku Tembaga Kerajaan Iha" *op.cit.* hal. 3.
22. Valentyn, Francois, II Dell *op.cit.* hal. 87.
23. Latupikaulan, Hikayat tanah Iha "Buku Tembaga Kerajaan Iha". *log.cit.*
24. -----, *op.cit.* hal. 87.
25. -----, *ibid.* hal. 317 dan ditulis juga oleh Nn. Martha Sapulete, dalam makalahnya yang berjudul Iha zaman purbakala, Ambon 1989.
26. Rumphius, I Deel, *op.cit.* hal. 83, dan "Kutipan dari Aboinas buku harian tertanggal 16 Mei 1653 dan keterangan J. Selane, orang kaya Nolothe pada Team Research Sejarah Pahlawan Nasional Pattimura, Nolothe, 21 Mei 1967.
27. De Graaf, H.I. DR. Een oude en een nieuwe negorii, *ibid.*
28. Mess, Fruin W. Dagh Register, gehouden int casteel Batavia, Anno 1682, *ibid.* hal. 1202.
29. Afschrift, Apunctement voor Gobis Sijbrant Lisapali (Kutipan) dari Tuan De Vlammig Van Oudshoorn Gubernur Ambon, tanggal 16 Mei 1653, nomor 7 dan nomor 16, serta copie collationnee dari keluarga Lisapali yang disalin dari arsip Nasional Batavia, 11 Oktober 1937.
30. Mees, Fruin W, Dagh Register, gehouden int casteel Batavia, Anno 1682, *op.cit.* hal. 708.
31. Surat pembelian tanah Mahuputi, Amaritang, Hatala, Guatudi dari Baltasar Gomes, tersimpan selaku dokument Negeri Ihamahu, masih ada sampai sekarang.
32. Sopamena, M.S. Hatawano berdarah suatu skripsi untuk mencapai gelar Sarjana Muda pada IKIP Ambon.
33. Arnold de Vlammig Van Oudsheron, laporan Gubernur Ambon kepada Gubernur Jenderal di Batavia tertanggal, Ambon, 16 Mei 1653, dan De Graaf, H.I. DR. Een oude en een Nouwe negorii, pada akhir tulisannya.

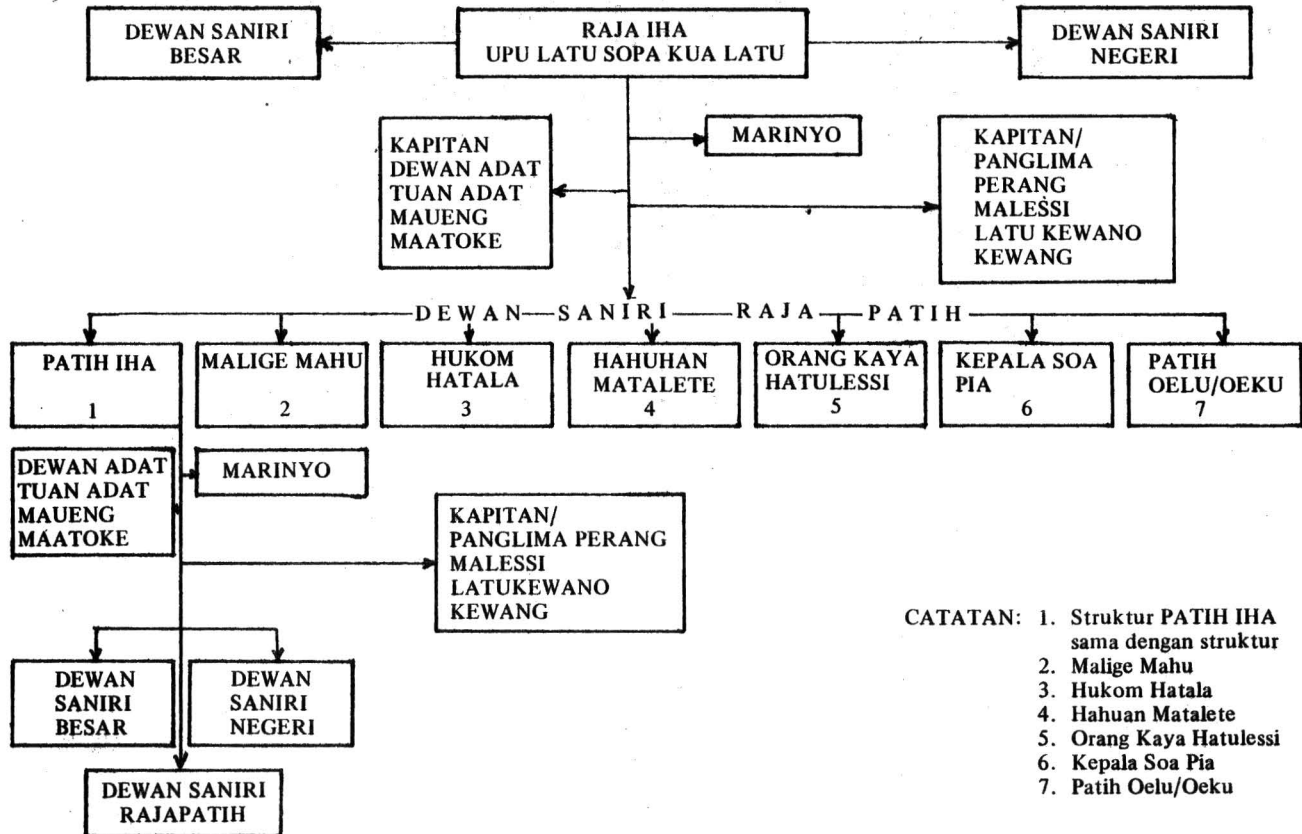
DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Arnold de Vlaming Van Oudsharon, *Laporan Gubernur Ambon kepada Gubernur Jenderal di Batavia* tertanggal Ambon, 16 Mei 1653.
2. *Afschrift, Apuncttement Voor Golis Sijbrant Lisapali*, Arsip Nasional Batavia, 11 Oktober 1937.
3. Colenbrander, MT, DR. *Dagh Register Gehouden Ints Cesteel Batavia, Anno 1643-1644*", agravenhage, Marthinus Nijhoff 1902.
4. De Graaf, H.I. Dr. *Een oude en een-nieuwe negorri*.
5. Drs. Frans Hitipeuw, *Kerel Sadsuitubun*, Depdikbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Jakarta 1982/1983.
6. Latupikaulan, *Hikayat Tanah Iha*, "Buku Tembaga Kerajaan Iha".
7. Mees, Fruin, W. *Dagh Register Cehouden intscasteel Batavia I*, Anno 1982.
8. ———, *Dagh Register Gehouden ints casteel Batavia, II*, Anno 1643-1644.
9. Rumphius, Georgius Everhardus, I, *Deel de Generale Land Beschrijving Vannet Ambonsche Gouvernement, Beschrijving der Nagul Boomen Van het Comptoir Hila*, Anno, 1805.

10. Sapulete, Martha, *Iha zaman purbakala*, Skripsi Sarjana Muda IKIP Ambon.
11. Sopamena, M.S. *Hatawano Berdarah*, Skripsi Sarjana Muda IKIP Ambon.
12. *Surat-surat pembelian tanah Mahuputi Amaritang Hatala Guanatudi (Dokumen Negri Ihamahu)*.
13. Van Der Ohijis, J.A. Mr. *Dagh Register Gehouden ints Casteel Batavia Anno 1640-1641*.
14. Valentyn, Francois, *Beschrijving van Amboina, Verbatende, Een Wydluftge Verhandeling van het zelve, en van alle de Evlenden, daar ouder behoorende te wetén van't groot Eiland Grarama, Boero, Amboina Noessa Laoet Oma, Manipa, Bonoa, Kelang, II Deel 1805*.
15. Team Research *Sejarah Pahlawan Nasional Pattimura*, Ambon, 20 Juli 1967.
16. Rumphius, Georgius Everhardus, *De Ambons ohe Historie*.
17. Latukaisuoy, Abdul Gawi, *Terjemahan Hikayat Tanah Iha*.
18. *Afschrift, Apunctement voor Gobis Sijbrant Lisapali (Kutipan) dari Tuan De Vlammig Van Oudshoora Gubernur Ambon, tanggal 16 Mei 1653 No. 7 dan No. 16, serta cappy Collation nee dari keluarga Lisapali yang disalin dari Lands Archief, Batavia, 11 Oktober 1937*.
19. Drs. Frans Hitipeuw, *Sejarah Perjuangan Pattimura di Maluku*, Ambon, 1971.
20. ———, *Tokoh/Provil Pattimura*, Jakarta, 1980.
21. Nanulaita, I, O. Kapitan Pattimura Depdikbud Proyek Biografi Pahlawan Nasional, Jakarta 16 Desember 1976.

Lampiran 1.

**STRUKTUR KEPEMIMPINAN KERAJAAN IHA
(MALUKU TENGAH)
DI ABAD KE-XIV**



- CATATAN: 1. Struktur PATIH IHA sama dengan struktur
2. Malige Mahu
3. Hukom Hatala
4. Hahuan Matalete
5. Orang Kaya Hatulesi
6. Kepala Soa Pia
7. Patih Oelu/Oeku

BESCHRYVING
VAN
AMBOINA,

VERVATTENDE

Een volledige Verhandeling van het zelve, en van alle de Eylanden, daar
onder behoorende, te weten, van 't groot Eiland

CERAM, BOERO, AMEDINA, HONIMO, NOESSA-LAOET;
OMA, MANIPA, BONO, KELANG,

En meer andere EYLANDEN, in het Werk voorkomende;

Behelzende een treffelyke

LANDBESCHRYVING van alle die EYLANDEN,

Volgens zeer nette Kaarten; omgelyden een verhaal van de Gewoonten, Zeden,
en Plegtigheden van de Inwoonders der zelve.

En een omstandig Verhaal van de oudste

WERELDYKE GESCHIEDENISSEN,

En ZAAKEN, in AMBOINA,

En in alle de voorschreven EYLANDEN, tot nu toe voorgevallen.

Met zeer veel nette Treenverbeeldingen versiert, en opgeheldert

DOOR

FRANÇOIS VALENTYN,

Onlangs Bedienaar des Goddeliken Wards in AMBOINA, BANDA, etc.

TWEEDE DEEL



Te DORDRECHT, by JOANNES VAN BRAAM,
Te AMSTERDAM, by GERARD ONDERDE LINDEN, Drukker.

M D C C X X V
MET PRIVILEGIE



Lampiran 3. B E S C H R Y V I N G E V A N

Strand
van Ha-
toewana.

Oen daar buiten de Ootler-waleenige katskoppen, gelyk ook op den Noord-Oofthoek zelf. Den laatflen hock pas om zynde, wint men het vermakelyk ftrand van Hatoewana, daar van ouds al een Hoofd plagt te leggen, oin aan die kan van 't eiland een vakend oog op alles te houden.

Men heeft een fraaje vlakke ontrent dat ftrand, en daar op een fchoonen boom in 't midden, die ontrent het huis van den Korporaal een friffche ichaduwe en aangename zit-plaats geeit, alzo men na de zee-kant een fchoon gezigt, zoo na de zee, als na 't Land van Ceram, heeft, dat zeer hoog is, en 'er ontrent twee mylen af legt.

De Vef-
ting 't
Huis te
Vellen.

Hier plagt in oude tyden ook een fteene Vefting te leggen, 't Huis te Vellen genaamt, met vyf ftukken gefchut, een Sergeant, en z0 zoldaten voorzien. Nu is 'er maar een Pagger van Pallifladen, die men ouk Vellen noemt, waar in een Korporaal over viet man 't gezag hecft, die mede over al de inlanders daar intrent, onder 't hoger gezag van 't Opperhofft, gebied. Op dit Hatoewana, en zoo vervolgens ontrent dat ftrand, en ten deele een weinig landwaard in na den korten weg, die na siritori dwars over het land loopt, hecft men verfcheide Chriften-dorpen.

Toeha-
ha 'sou-
de en te-
gen-
woor-
dige
plaats.

Eerft ontmoeten wy daar het dorp Toehaha. Dit lag wel eer tuffchen Itawacka (toen 't nog aan de Zuid-zyde dezès lands lag) Oelat en Siritori, midden in 't land op een klip, ontrent een finel afvlietende ftroom, dog is daar na op 't land van Hatoewana, ter plaats daar het nu nog is, verlegt. Het flaat onder een Pati, die 446 zielen, 143 weerbare mannen, en 89 Dati's flerk is.

Naaft'er aan Weft op, heeft men Paperoe. Dit lag wel eer op een hooge berg agter Boy en Haria, dicht by de bogt van Tigouw, dog is nu mede op Hatoewana geplaatft. Het flaats onder een koning, die de tweede in rang der Orangkaja's is, hebbende nog een Pati onder zig, behalven welke men hier nog eenen Latoe Mahina, dat is koning der vrouwen, plagt te hebben, zoo genaamt, om dat hy altyd van de dochter van dezen koning gefproten moest zyn, en omdat hy, als de vrouwen iets te verzoeken hadden, hare mond en voorfpraak was, hoewel hy over lang al om zyn misflagen afgezet is. Zulke vrouwekoningen waren op meer andre plaatzen in Amboina, en met name op Titaway, en Porto. Dit dorp is al vry vermogent, zynde 550 zielen flerk, waar onder 153 weerbare mannen, en 76 Dati's zyn.

Paperoe,
met ba-
ren
vrou-
wen-ko-
ning.

Na dit dorp, dicht daar aan, volgt't dorp Itawacka, 't geen wel eer een halve myl benoorden Oelat lag, maar nu al mede hier op Hatoewana geplaatft is: haande onder een Pati, die over 449 zielen, 140 weerbare mannen, en 9; Dati's, 'sgezag voert. Een fchoon dorp, leggende al mede in die ftreek op den korten weg, na de over zyde des lands.

Itawacka

Het dorp Nollot legt daar dicht aan, flaande onder een koning, die onder zig 970 zielen, 462 weerbare mannen, en 138 Dati's, heeft. Zy plagten wel eer wat nader na de Ooft-zyde van dezen hock op 't itrand van Iha, daar zy nog wonen, geplaatft. Zy zyn in de tyd van *Madjira's* oorlog aan onze zyde gebleven, en voegden zig by die van Oelat, tot dat de wederfpanningen na Ceram vlugttten, na welke tyd zy van die van Oelat weer afgecheiden, en hier gelegd zyn.

Nollot.

Alle
welke
dorpen
nu Chri-
stenen
zyn.

De Ve-
fing, 't
Huiste
Vellen.

Oude
dorpen
hier wel
eet.

*Ihama-
hoe.*

Her is het vermogenfte dorp aan dezen kant, en wel eens zoo flerk, als een van de andre, die by 't zelve leggen. Ook plagten alle deze dorpen, (gelyk *Iha*, en *Ihamahoe*,) *Oelilima* 's te zyn, dog dese gelyk ook de vorige dorpen, zyn nu Chriftenen. In dit dorp is in 't jaar 1655 de voorname Velling het Huis te Vellen, op een zeer fteenachtige gront gelegd. Een weinig Zuidelyker aan 't eerife riviértje, *lag het dorpje Hataja*, (dat is halfwegen) en nog wat Zuidelyker het groot dorp Mahoe (zoo na de Javaanen, die daar gewoont hebben, alzo Mahoe in 't Amboinees Java betekent, genaamt) en een kleen myltje Zuidelyker, aan het Caymansgat, had men het dorp *Wattelette*, en op de Noordzyde van het middelfte land was *Pia*, en wat meerna 't *Weften Oehoe*, of *Koeloer*. Dog alle deze dorpen, zyn al ten tyde der Portugeefen, na den berg Ockoe Kaloe, die boven vlak, en van alle bergen daar ontrent afgezondert is, uit eigen beweging verhuift, en daar gebleven, tot dat zy ten tyde can de *Heer de Vlaming* na Ceram gevlugt zyn, alwaar zig die van *Iha* en Mahoe, een mylbeooften het dorp Latoe, recht tegen haar oud land van Coeloer en Pia, welkers volk nu op Ceram nog anderhalve myl Weftelyker legt, nedergezet hebben, gelyk zy'er nog zyn. In dit door hun verlaten land, woonen die van(*Toehaha*, *Papero*, *Itawacka*, en *Nollot*, nu al te zamen *Chriftenen*, daar'er voorheen niet dan *Mooren* plagten te leggen.

Een quart myl van Nollot na 't Zuiden toe heeft men het dorp *Ihamahoe*, beftaande mede uit Chriftenen, leggende aan het ftrand *Patah Hitoe*, onder cen *Pati*, die 1260 zielen, 380 weerbare mannen, en 175 *Dati's*, onder zig heeft. De

Lampiran 4.

**TERJEMAHAN
SALINAN
LAMPIRAN
Nomor : TIGA**

-----Dihadapan saja, JACOB, JOHAN, GEORGE KRUSEMAN, Controleur dari onderafdeeling *Saparoea* dan sesuai djawatan saja fungeerend Notaris di *Sparoea* menghadap bersama dengan saksi-saksi jang namanja kelak disebutkan dan jang saja fungeerend Notaris kenal Tuan HERMANUS, CORNELIS, WATTIMENA, Berdjabatan Regent dari negeri *Itawaka* pulau *Saparoea*, kini untuk sementara berada di *Saparua* dan jang saja fungeerend Notaris kenal.

Jang mana menundjuk kepadaku satu salinan diatas kertas bermeterai dari harga lima puluh sen, dari padanja tanda tangan jang dibubuh mengelilingi materai tidak dapat dibatja disertakan klad dari akte ini pada aslinja dengan permintaan untuk tempatkan isinja dalam protocol saja, supaya setiap waktu dapat dipergunakan, tulisan jang mana berbunji dari kata ke kata seperti berikut :

' untuk radja paperu *saparua*----- ' Kutipan dari AMBOINAS
' untuk tuaha djuga pattij ----- ' buku harian tertanggal 16
' itawaka. ----- ' Meij tahun 1653. -----

----- Sebagai jang telah diperbuat
----- Jang dipertuan Besar telah
----- membagi segala tanah dari
----- orang-orang pelarian kepada
----- penduduk-penduduk dan di-
----- serakan -----

kepada masing-masing satu -----
AKTE TERTULIS dari dalam -----
akte jang mana jang berikut ini adalah tanah-tanah itu, jang
mana kepada Orang Kaija houlijselang -----

kiranja telah diberikan, dengan pemberian jang mana semua orang terutama sangat setudju. -----

----- Tanah Mahu untuk Paperu dan Saparua tanah Hatala Matalete kepada Tuhaha tanah Iha kepada Itawaka dan tanah Pia kepada Honimoa dihadiahkan djikalau mereka semua dengan negerinja dengan menjetjualikan Honimoa dalam tempo dan bulan memindahkan tempat tinggal masing-masing dan berdiam pada benteng kami jang baru di negeri Iha, untuk mendjaga sebegitu tanah itu pada tempat, jang ia harus didjaga dan untuk membebaskannja dari pemasukkan musuh dan memperadabkannja, dimana sekarang semua tanah dari orang-orang pelarian dengan menjetjualikan.

dengan duka tjita telah dibagi, sehingga mereka jang tadinja kurang mampu tetapi sekarang mendapat satu kehidupan yang lebih menjenangkan dapat memikirkan, bahwa djangan mereka oleh kepaksaan bersatu kembali dengan kawan-kawan mereka yang melawan. -----

Dikutipkan dari Amboinas buku harian tertanggal diatas dan diserahkan ketangan radja Paperu sekarang bernama DOMINCOS SOEKAMAHNA kutipan untuk mendjadi keterangan sebab akte pada bapanja tentang tanah Mahu jang dihadiahkan sebegitu buruk keadaannja sehingga tidak dapat dibatja dan tidak dapat dimengerti dan djuga akte itu pada buku harian tiada ditempatkan.----- Onderstond Amoina 18 Maret 1782.---

----- Lager Good Attester (w.g.d.) Balthazar Bolle Job. ---
nog Lager (Disampaikan disetudjukan Amboina Victoria d.40 fobij 1688. -----

(wagd) Pieter Rooselaar Secretaris. -----

----- Disetudjukan -----

Amboina Victoria 27 Mei 1720 -----

(wsgd) E.G. SOSTMAN. -----

----- S E C R E T A R I S -----

Sesudah disamakan dengan surat jang sama bunjinja ditundjukan kepada saja oleh PAULUS LATUMARISSA radja Paperu sekarang, telah disetudjukan dengan surat itu. -----

----- Amboina, 20 Mei 1826, -----
 ----- De Secretaris dari Gubernemen -----
 ----- P A A P E -----
 ----- Dari padanja -----
 ----- Akte dalam salinan dibuat -----
 ----- Dikerdjakan di Saparua pada hari Kamis tanggal
 tiga belas D=anuari tahun seribu sembilan ratus tiga belas ber-
 hadapan DIRK, BENJAMIN, POETIRAIJ dan WILHEIM,
 MARCUS PICAULIJ keduanya berdjabatan Djuru tulis pada
 kantor Controleur di Saparua dan berdiam disana sebagai saksi-
 saksi. -----
 Segera sesudah dibatja dan diartikan dalam bahasa Melaju, akte
 ini lalu ditanda tangani oleh jang menghadap, saksi-saksi dan
 saja fungeerend notaris. -----
 ----- Dibuat tanpa tjoretan : -----
 ----- Telah ditanda tangani M.C. WATTIMENA, telah
 ditanda tangani D.B. POETIRAIJ, telah ditanda tangani W.
 PICAULIJ, telah ditanda tangani KRUSEMAN fungeerend
 Notaris -----
 ----- Diberikan untuk salinan -----
 ----- De fgd. Notaris -----
 ----- ttd. -----
 ----- K R U S E M A N -----
 ----- Salinan sesuai dengan aslinja -----
 ----- Kepala Pemerintah Setempat -----
 ----- t.t.d. F. N A N L O H I J -----
 ----- Salinan atas salinan jang benar -----
 ----- Kepala Ketjamatan Lease -----
 ----- t.t.d. L. W A I R A T A -----

Ambon, 20 Agustus 1969.

Disalin kembali oleh :

ttd.

(Drs. Frans Hitipeuw)

Sekretaris Kantor Perwakilan
 Departemen P dan K Propinsi
 Maluku.

Lampiran 5.

IHAMAHOE
HET OUDE

In 't Noorden van dit eijland lagen seven negorijen, dog een heel ander slag van menschen als de voorgaande, alle zijnde Ulilimas en Mahometanen, eertijds onderdanen van ternaten, dog door een portugeesen Gouverneur Gansalvo Parera met geweld der wapenen onder 't portugeese gesag gebragt, maar zijn daar na met die van Hitoe tegens deselve wederom gerebelleert, invoegen Andrea Fortado mede voorgenomen had de andermaal deselve aan te tasten en onder zijn gehoorsaamheijjt te brengen, heeft daar in niet vermogt ter oorzak deselve uijt natuiren een sterke plaats besaten en haar ter weer stelden; zoo dat gen: fortado met zijn aanzienlijke magt ganoedzaakt vierde de belegeringe op te breken en mwet verlies van veel volks confuselijk at te trecken, 't zedert welken tijt zij seer trots en vermeten geworden zijn, allen schuijn van menschen en verlooppende rappalje zig tot dese te samen rottinge begevende waren omtrent 14 a 1500 mannen sterk hebben verscheijde maal den eed van getrouwigheijt aan onsen staat gedaan, en insonderheijt op den generalen land dog door den generaal COEN geconvooseert, dog hebben tot geen hoof dienst willen verstaan en hebben in kakialis tijden 's Comps bondgenooten versheijde moetijten aanggedaan, dezen moetwille heeft men moeten met oogluikinge aansien tot in den madjiraschen oorlog, dat hun het vuur wat nader gelegd wierde door den admiral VLAMING, alas wanneer zij gedwongen wierden af te komen, en hare koningen in onse handen over te geven maar hebben strax daar na haar land vrijwillig verlaten en zijn overgelopen naar Ceram, alwaarse nog woonen, behalven

NOLLOT en eenige kleine gehugten van de bovenstaande seven negorij die op Sirri sorri gebleeven en namaals Christen geworden zijn.

Iha de hoofd negorije bij de onze Iwa genaamt, lag op den strand Hatuana aan de noordlijkste hoek van dit eijland daar nu de reduijt Velsen staat onder een Radja.

IHA.

Nollot lag mede op den zelven hoek, dog een halve mijl oostelijker, op den hoek also gen, staan mede onder een radja dese negorije in madjiras oorlog heeft zig van here rebellige naburen afgezondert, kiesende de zijde van de E:Comp: en begaf zig bij die van Ulat tot dat here landsleijden na Ceram gevlugt waren en A^c 1655 wierdense geplaatst op Ihas strand, al waarse nog woonen, en hebben eerst daar na de Christelijke religie aangenomen hedendaags onder den orangkajj Adriaan Passalbessij sterk 459 mannen 962 zielen 135 datijs, op voorschr:plaats in 't zelfste jaar is gebouwt de reduijt het huijs te Velsen, na den steenigen grond daarse op leijd, alzoo gent versien met ses stucken een sargt en 15 soldaten, een weijnig zuijdelijker aan eerste rivierte lag het negorijtje Hattola, nog zuijdelijker de grooter negorije Mahu, en een klein uurtje zuijdelijker aan 't Caijmans gat lag de negorije Mattelette, op de noordzijde van 't middelste landt lag Pia, en wat westelijker Oeloe off Koelur.

NOLLOT.

REDUIJT
VELSEN
GESTIGT.

HATTELA,
MAHU,
WATTELET
TE, PIA.

dog aale deze negorijen zijn al lange bij de portugeese tijden te samen gerukt en hun begeeven op den berg Uckukalu een berg van naturen vast, van anderen afgesendert, en boven vlak alwaarse gewoond hebben, gelijk gezegt is, tot de tijden van den Admiraal VLAMING, dat se afgekomen en naar Ceram gevlugt zijn, hebben de Iha en Mahulun

ULUPALUW,
UCKUKALU,
VASTEN
BERG.

nedergeslagen een half uur bewesten de negorije Latoe regt tegen over haar oude land Coelor en Pia leggen ander half uur westeliker omtrent Roemakaj en haar verlaten land is ingeruijmt aan de 4 Christen negorijen Paperoe, Tuaha, Nollot en Hawacka alle vier geplaatst rondom deselfde reduijt, zonder eenige hoope te laten, oijt haar oud land weder in te krijken, zoo dat dit eijland van 't noorsche gespuis gesuijvert zij, behalven eenige weijnige op Sirri Sorri, die als gezogt mogendeels Christen geworden zijn en naderhand omtrent A^c = 1680 hebben sig meer van Ihamahu daar bij gevoegt en woonen hedendaags bij malkander op den strand Patihiton onder den pattij Jeremias Djoemat het Christengeloof aangenomen en scheppen een corre-correezijnde sterk 316 mannen 1219 zielen, 165 datijs, heteijgentlijke Iha hadde 7 soas, de late onder den radja, 2de onder den pattij, 3de onder Hahuhan, 4de Polotoela, 5de Malike des hoekoms son, dog dese is in de eerste soa gesmolten en nog 2 andere min bekende.

den Radja zegt dat zijne voorouders gesproten zijn uijt een kelapa radja boom staande op de plaats Aijlatoe, en dat den eersten radja gehad heeft 8 zonen van den eersten Latusali zijn de radjas gesproten uijt den 2de Latuwaijl de partijs 3de Latupika oelan is uijtgestorven.

Het bovenstaand is een afschrift van slechts een gedeelte van in mijn bezt zijnde afschrift van het boekje genaamd "*RUMPHUIS*", hetwelk door den Landsarchivaris te Batavia aan mijn grootvader wijlen *Ali bin ASMA* werd uitgereikt ddo. 10 Augustus 1925 en aangeboden door den Gouverneur der Molukken wijlen den Hoogadel Gestrenghe Heer *L. van SANDICK*.

Dit afschrift is afgegeven op verzoek van de Saniri Negeri NOLLOT bij monde van den Heer M.A. Hitijahubessy, Regent van die negorij en stel ik mij niet verantwoordelijk voor het gebruik van bedeed afschrift.

De Heer M.A.F. Hitijahubessij verklaarde mij, dat de Saniri Negeri Nolloth dit afschrift uitsluitend te zullen gebruiken om de grenzen en de ligging van haar negorij ect, te kunnen bewijzen bij een door haar eventueel in te dienen rechtsvordering.

Afgegeven te AMBOINA, den 25sten Mei 1940,
door mij M.T. ASMA, kleinzoon van wijlen
ALI bin ASMA.
ttd.

M.T. ASMA

Salinan sesuai dengan aselinja.
Kepala Ketjamatan Lease,
L. WAIRATA

Ambon, 20 Agustus 1969
Disalin kembali untuk dokumentasi ilmiah,
ttd.

(Drs. F. HITIPEUW)
Sekretaris Kantor Perw. Dep. P.& K.
Propinsi Maluku.

A F S C H R I F T
Apunctement voor Cobis Sijbrant Lisipala

LANDSARCHIEF JAKARTA

No. 7

Den E. president gedraagt zig bij het ingediende
Rapport de voorm: gecommiteerdens
Den ged^e bekent schuld en verzoekt gratie.

Ad idem Requirant
op ende Jegens

DOMINGOS LATULAUWT Inlander van Ihama-
hoe ged^e om reden en motiven als voren Etc^a
Den Raad de moedwilligheijd van den ged^e ten
naauwsten bespeurt hebbende, vind goed densel-
ven, niet alleen in de betaaling van 2 omgevelde
Zagoeboomen a 2: rd^s ider te kosten deser instan-
tien

Quat Attestor

H.v. Wieringen
g: scriba.

den E. president legt over d'aan zijn E. door den ged. Silapa bij voorige sitting van p^{mo} deser overhandige papieren en documenten dewekke de Eijss^{rs} indeesen pretendeerende hunne te weesen, met communicatie dat Zijn Ed.

deselve reeds met aandagt doorlessen had versoevende dat de vergadering het selve insgelijks wilde doen, het welk ook geschiede, waar na zij alle eenpariglijk verklaarden dat gem: documenten niet den ged^e maar de Eijss^{rs} van regts weegen toekoomen, te meer wijl, de Radja van Tuhaha volmondig quam te betuijgen, wel te weeten dat gem: papairen de Eijss^{rs} hadden toebehoord en van den overleeden Pattij van Ihamahoe bij leven verstaan had dat den ged: Silapa deselve door slinkse streeken is magtig geworden.

N: 9

EXTRACT uijt het Rollboek
der gehuodene Landvergadering tot
Saparoua ter fortresse Duursteede
op

Donderdag den 8 September Ao. 1768

Present

Den coopman en opperhoofd deses districts d'heer Jan Willem van Blijdenbergh mitag^s De Radja en Pattijs van Honimoa en Nussalaut.

Excepto

Den Radja van Ameth, de Pattijs van Tiouw, Aboe-boe en Akoon den orangkaij van Nolloth neevens den gesaghebbende oudsten van Ihamahoe, alle mits in dispositie

DE:Heer Jan Willem van Blijdenbergh coopman
en opperhoofd deses districts requirant.

contra
Paulus Pieter Sahetapij en Cobis Sijbrand Lisapalij
beijde van Ihamahoe Eijss^r ter eenre

mitsg^s
Isaac Silapa meede van Ihamahoe ged. ter andere
zijde, thans alle geriquireerdens, omme het besluit
weegens de in questij zijnde doussong Louwnoesa
en Waijwonno te vallen, te aanhooren met de
kosten.

Den E. president dit alles vernoomen hebbende
quam ini plene vergadering den ged^e Silapa zulk
voor te houden om als het waare den selven, te
overtuijgen en berouw over dit zijn malitieus
gedoete te doen hebben, dog denselven quam daar
en tegen fort et ferm alles te regeeren met bijvoe-
ging van dese malajids *Expresse Radja Tuhaha, dia
storie banja, dia tauw apa dia ada pattij Ihamahu
punya kodok*; welke vermatele expressie zijn E.
verklaarde al meermalen iutj de mond van den
ged. gehoord te hebben en onder andere nog deese
morgen eeven voor het aangaan deser sitting en
waar over Zijn E. denselve gerepremedeert had,
met verdere waarschouwing aan denselven van
nooijt meer diergelijke termen ann een negorijs
en voornamèntlijk die teffens een meedelid deser-
vergadering is toe to voegen ten zij hij zig aan een
gevoelige correctie wilde bloodstellen, hij ged: na
het scheen eevenswel zig weijnig aan die waars-
chouwing bekreunde, met zig niet te ontzien in
plene vergadering arrogant aan te stellen.

N: 10 Den Raad de billijkheijd van dess Radja versoeck ten
deesen belange aanhoord hebbende wind na rijpe
deliberatie goed den gedaagde te condemnieren

om na het eijndigen deser vergadering op de Bassar
gebragt te worden en aldaar ten overstaan van twee
leeden deeser landvergadering midsgaders den
Radja van Tuhaha verseld van den scriba, tot af-
schrik van andere aan een paal gebonden zijnde
met lange rottings onder uijtroeping van de vol-
gende Maleijdsde woorden *he tamang, djangan*
bekin sala sama beta silapa Jang soedah maki, kata
Radja Tuhaha ada pattij Ihamahoe punja kodok,
door de marinjos strengelijk afgestraft te woorden,
vervolgens te betaalen de somma van 202: rd^s aan
de Eijss^{rs} in deesen over het moedwillig omver-
kappen en kloppen hunner sagoe boomen, midsgaders
in de gevalle kosten deser instantie; me(t)
recommendatie aan denselven van zig voortaan te
wagten, ooit ofte eeniger tijd meer pretenties op
ge(n) landerijen te maken dan wel de Eijss^{rs} in
hun goed regt door slingse weegen te stoore(n)
op poene van correctie bovemen b(e)halven een
pucu () niele amende na het goed vinde (n) deser
vergadering

N: 11

N: 12

N: 13

Accordeert
W.g.- W. de Bourghelles
G. Scriba.

(Vermoedelijk copie door de Bourghelles)

villeneuve

N: 14

ZATURDAG den 5 Februarij Ac. 1718

Vergadering

van den E. Agtb: Landgerigte deses Casteels Victoria in Ambonina, de leeden Present, Excepto den Manhafte Capitain Jacobus van den Busschem mits indispositie, Johannes De Silva Radja can Soija, Haaman Pattij van Alang, en Theunis Pieterse. orangkaij van Hoetoemoerij.

NA HET AFLOOPEN VAN DE ROOL

N: 15

Verschijnende in raade Anthonij Saramat Inlander van Ihamahoe, woonende in het campon Hatala te kenne gevende hoe hij door den mede Inlander Abraham Sablet woonagtig in het naast bij gelege dorp off buurschap Sampakkij, in zijn vredige possessij geturbeerd wrd op zijn land off doesongs genaamt Lounoessa, dat waarlijk zijn eijgen sijnde als bij het Rapport van den 15: October Ao. 1713: op Honimoa in Raade gediend en door de daar zijnde gecommiteerde overgegeven is, egter van zijn nabuerige volkeren daar niet rustig woonen, kan, versoekende daarom op zijn de moedigste maintainue van dese Wel-Edele Agtbaare Raad leggende met een over een Copij appointment dato den 5e. October 1699 gevallen in vergadering ten fortres Duursteede tot Honimoa waar bij geinsiereerd is een maleide Extract van de heer De Vlaming (L:M) v. Oudshoorn, zijnde van woord tot woord als volgt,

N: 16

ARNOLD DE VLAMING VAN OUDSHOORN
Raad ordinaris van India Superintendent, Admiraal Generaal, mitsgad^s Commissaris over de provintien Ambon, Mollucco, an Banda, benevens Willem van Der Beek Raad Extra ord^s van India, en Gouverneur van Ambon

Doen te weten aan de Inlanders van Ihamahoe dewelke door onse wapenen gedwongen zijn van 't gebragte na de strand van Iha af to komen, dog tegendwoordig sig op de vlucht begeven hebben nae Latoe Hoalloij, en Roemakaaïj, en de wapenen opgeven tegens D'E.Comp. en den Coning over de Moluccus, en derselver onderdanen, hoe eenen Lissapallij van 't dorp Hatala nevens Mattelette, Baloenaija en Makaiijlipessij woonagtigh met haar drien.

N: 17

Enige luijden, want zoo haest zij sagen en hoorden, dat die van Iha wilden vlugten, vergaderden zij en clommen op na de negorij ----- en den Oom heeft er ook gewoond met den Radja van Tuhaha om welke reden wij dit geschrift aan deselve verleend hebben, op dat wanner haarl: iemand wil onrust of moeijte aan doen, zij hetselve mogen cunnen vertoonen, als hebbende wij zulx aan haarlieden geve(n) voor ons mitsg^s alle die geene, die na ons van wegene D'E.Comp. Ambon zullen comen te besturen, op dat zij haar luijden behulpsaam zijn en main tineeren in haare Regtvaardige (besitting) Nademaal wij dat land, en desselfs nagulzagoe en clappus plantagies aan haarl: in eijgendom toegestaan en geschonken, en dit alles ten dienste van D'E.Compe. en desselfs onderdan(e) billijk g'oordeelt hebben, op dat de goede Inwoonders dewelke in stille en rust leven mogen welvaaren en in tegendeel het "snoode gespijs voorvlugtig ----- in 't jaar 1653 den Maij (was getekent) A:D:v: Oudshoorn

N: 18

Den Raad na leesing van het Evengem^t copij Appointement en het daar bij zijnde Extract bevond(en) en ontwaart hebbende dat den suppliant zijn voorouders ten tijde van de heer

D'Vlaming haar domicilium aldaar gehiuden hebben staen deselve(n) ... toe, om als voor en vredig en gerust te wonnen te continueeren en zig genot uijt desselfs doussonsLoun (oes) sa gelegen op de landerijen van Hato (ea) in sodanigen voegen als bij het ge ... de Rapport bovengem^t komt te zooals zijn suppl^{ts} voorouders desselvs broeders van ouds altijt be hebben dierhalven hem niemand daarin zal mogen turbeeren maar in vredigen besitting hem compt zullen hebben laeten woonen om reeden als gesegd expres te dicteeren, onder correctie en penaliteijt zoo imand van zijn nabuurige volkeren de suppt.

ANTHONIJ SARAMAT, in en op zijn land of doussong Lounoessa komt lastig valle gestraft zal werden na exigentie van zaaken.

N: 20

onderstond) Aldus gedaan gepasseert m gearresteerd ter ordre Raadcamer tot Ambon aan 't Casteel Victoria dato voorsz.(lager) dit Getuijgd (was geteekend) B. Liefhoud Secretaris van Commissarissen, bij absentie die van de landraad (nog lager) g'collationeerd Accordeert den 4 October Ao. 1745 (was geteekend) Cs. Anroek Secretaris

Donderdag den 5 9 ber: 1722 gadering gehouden tot Saparou(a) ter fortresse Duursteede, presen (+)

(De)n E.E. Agtb. heer Gouverneur	
an Directeur deser Provincie	Hendrik Boerius
Luitenant	Jan Lamprecht
Onderchirurgijn	Jan Wolf Kriekeboom
Vaandrig	Cornelis van Lievenaaldal

Opperchirurgijn. Abraham Oilbars
 Boekhouder en dispencier. . . Eduart Ravensbergh
 (d)^o . . . en fiscaal der
 presente (hon) gijvloot Jan Kleijn
 do. orangkaijen landraaden off Cameras
 do. do. deses dicticts en
 do. verdere hoofden der presente Corcorren

(De)n Req^t gerdraaght sigh aan Anthonij Saramat,
 Inlander de presente. met bijvoeging, van Ihamahoe
 req^t

dat zijn voorouders, en hij,	contra	
het land voorsz. vredig heb	Jeremias Alij van	
ben gepossideerd, sonder	voorsz. negorij gereq:	
door imant daarin geturbeerd,	om versoeck 't aan-	
als nu 't sedert (en) ige	horen over dat hij	
jaaren, dat den gereq ^t hem	den req ^t in zijn vree-	
req ^t tragten te bedisputeer-	dig possessie van 't	
ren	land Lounoessa ge-	
	turbeert heeft met	
	de	

N: 21

en legt, tot bewaarheden van sijn seggen, een
 appointment van dato 5 landraad tot landraad
 tot Amboina gevallen waar bij blijk dat hem gem:
 land is toegeweesen, onder correctie en penaliteit,
 dat soo imand hem daar in, en op voorm: duossong
 Launoessa komt lastig te vallen, na gelegentheijd
 van saaken sal gestraft worden nog tot meorder
 verseekering, Exhibeerd hij req^t twee Rapporte
 als ... een van 20 8ber : 1718 door d'Espresso
 gecommitt Hans Latukarij Radja Oelat, Pieter
 Annakotta, do, paperoe, Isaac Pattinaja, Pattij
 Itawacka, en Pieter Sawajitoe, Rad Radja Sapar
 en d'ander van 22 8ber: 1721 door bovengent.
 Radja Oelat Saparoua, en den Pattij Itawacka
 aan 't subalthern hoofd deses districts Honimoa

overgegeven waarbij voorsz. gecommitt^{ns} in 't
eijnde van gem: hunne rapporten uijt drucken
't land Lounoessa voorm:, waarlijk den req^t
toebehoord uijt welk 't een en 't ander dan
req^t eerbiedigheijh handhaving van desen E.
Agtb: raad is versoekende.

Den greq : voor antwoord, seght dat 't land,
niet den req^t alleen maar met de heele negorij
toebehoord, en dat 't selve niet Lounoessa maar
Hatala is gen^t

Parthijen persisteeren

Den Raad, na genome Lectura van 't overgelegde
appointement Rapporten mitsgaders gelet
hebbende waar op te letten staat, renovverd
Appointement van den 5 Feb^{rii} 1710, van d' E,
Aghtb : landraad tot Amboina gevallen, scodanig
't legth, confirmeerd sig wijders me(t) het gevoelen
van de gecommitts. in 't eijnde van hunne Rapporten
uijtgedrukt, en condemn(eert) den greq : uijt
hoofde van dien, om voortan(n) afstand van 't
land Lounoessa te doen, 't se(l) ve aan den req^t
in een vreedige possessie: so als sijn voor ouders
beseeten hebben) over te geven met recomman-
datie van in toekoomende wanneer hij greq^t
dan req^t wederom komt te turbeeren, in een boete
van vijff en twintig Rijxd^s te sullen vervallen
wijders in de costen deses. (onderstond) Aldus
Gedaan en gepasseert ter plaatse in dato voorsz.
(Lager) Dit get bij overlijden, van den gem:
Sees van de Ho(n) gij Samuel Jacobusz. (was
geteekend).

J. De Ree Secretaris van den Landraad.

Derij Nama tuwan Tuwan koejang (m)ha tertinggi
Jang maha terhormat tuwan ko Adriaan van
der Stol mantri darij bawa hangin lagi pon Gouver-

nadoor dan Uirecteur jang mamangan parenta dari alam Ambon, soeda menjoeroe soerat pada tuwan-koe Hendrik Wolfraad fetor dan capala kamij di poelo Honimoa maca soeda menjoeroe pada ka orang artinja Hans Latukari radja oelat Pieter Annakotta radja roe, Isaac Pattinaja patti Itawacka Pieter Sawaitoe radja Saporoe akan pergi di tanna Hattala, pada malihat Anthonij Zaramat Silapallij poenja sipa Zabab dauloe ada basipat Dengan negerij Tuhaha, hanja secarang soeda djatoe pada Jeremias Allij dengan ... poenja campon.

Zampaka derij negrij Ihamahoe sebab itoe lah Cami Committeer ampat orang j(ang) terseboet speda plagie dengan Antjonij Leut pesij Pattij Ihamahoe, sebab dia tauw dan dia ada capalla di attas dia orang samoa, maca camij Committeer soeda tanja dia manjan katanja ini sipat jang Anthonij Saramat Lisapallij soeda batondjok ada benar sa salatang pada Zampake artinja Jerem de Allij dengan Campon Sampake;

N: 24

ka sabla utara, pada Louwnoessa, art Anthonij Saramat dan campon Lounoessa derij sitoe camij Committeer soeda moelaj tanam satoe tiang di p(ing)gir djalang Comp. sampe ka goenoeng ada enam tiang Zampe basipat dengan tanna Nolloth itoe lah djoega jang camij soeda lihat dan tauw dengan benar zabab itoe lah camij mengakoe dan batanda di bawa surat ini (onderstond) Ihamahoe 20 harij 8ber : 1718 (was geteekend) Hs. Latoe-karij radja oelat, Pieter Annakotta radja Paperow, Isaac Patinaja pattij Itawacka, en Pieter Sawitoe radja Saporoea (lager) G'collationeerd Accodeert Amboina Victoria dan 16 Junij 1723 (was geteekend) S Jacobusz : Secret^s.

N: 25

N: 26

Derij Nama Tuwan Tuwankoe Hendrik Wolfraad fetor dan capala ka(mi) di poeloe Honimoa, soeda menjoeroe pada kamij tiga orang artinja Hans Latukarij Radja Oelat Isaac Pattinaja pattij Itawacka, Pieter Sawaitoe radja Saparoea, akan pergi liat Anthonij Zaramat derij Ihamahoe poenja sipat di tanna Hatalla, jang kamij tiga orang dan Pieter Annakotta radja Paperoe soeda tanam 6 tiang dari itoe Zipat, Zebab camij soeda dapat order dari tuwan heer Gouvernadoor dan Directeur Adriaan van der Stel dan tuwan fetor Hendrik Wolfraad maka camij soeda tanam itoe 6 tiang pada 21 : 8ber: 1718 derij sitoe Anthonij Saramat soeda datang mengadoe pada tuwan fetor Jeramias Allij derij negerij tersebut soeda soeroe diapoenja manussia deri Soa attawa campon Hatalla soeda tsjaboe dan boewang itoe anam tiang jang cami ampat Committeer soeda tanam, zeban itoe lah camij tiga orang jang bertanda di bawa soeda sampe di itoe Zipat pada 21 harij 85er: 1727 maca cami berdjallang di pinggir djallang comp. jang camij soeda tanam itoe tiang, zampe di goenoeng bersipatbtanna Nollot (camij) Liat ada benar, maca itoe tiang soeda tsjaboe dan boewang, lagij dia orang soeda masoek dan hariboe, Antonij Zaramat poenja pohon zagoe dan pohon tsjingke dan Zegalla boahan dalam dia poenja tanna Lounoessa zabab itoelah sekarang camij tanam 6 tiang combali dalam itoe zipat, zeperti soeda djadi pada tahun 1718 lagi camij soeda larang pada Jeremias Allij dengan dia poenja Campon Hattalla agar djangan dia orang masoek haribittoe di dalam Anthonij Z(ara)mat poenja tanna Lounoessa, Ze(te)lah kamij mengacoe dan batanda di (bawa) (onderstond) Ihamahoe 22 8ber: 1721 (was geteekend) Hs. Latoekarij

N: 27

radja Oelat, Isaac Patinaja patij Itawacka, en Pieter
Sawaitoe Radja Sap(aroëa) (larger) g^ocollationeerd
Acc(ordeert) Amboina 16 Junij Ao. 1723 (was
getekend) S¹ Jacobusz: Secretaris.

Donderdag.

Voor copie conform
Voor eensluidend afschrift
Batavia, 15 December 1937
De Landsarchivaris,

Cap/ttd.

VERHOEVEN

GECOLLATIONNEERD UITTREKSEL

No. 16

Extract van de heer De vlamming (L.M.) v. oudshoorn, -----
Zijnde van woord tot woord als volgt, -----

Arnold De vlamming van oudshoorn Raad ordinaris van India, Superintendent, admiraal Generaal, mitsgad^s commissaris over de Provintien Ambon, Molucco, en Banda, benevens willem van Der Beek Raad Extraord^s van India, en Gouverneur van Ambon -----

Doen teweten aan de Inlanders van Ihamahoe dewelke door onse wapenen gedwongen zijn van 't gebragte na de ----- strand van Iha aftekomen, dog tegenwoordig sigh op de vlugt begeven hebben na latoe Hoalloij en Roemakaaïj, en de wapenen opgeven tegens DE Comp^e en den coning ----- over de Moluccus en derselver onderdanen, hoe eenen ----- Lissapallij van 't dorp hatala nevens mattelette, Baloenaija en makaijlipessij woonagtigh me haar drien ----- Eenige luijden, want zoohaest Zij sagen en hoorden, ----- dat die van Iha wilden Vlugten, vergaderden Zij en ----- clommen op na de negerij ----- en den oom heeft er ook gewoond met den Radja van ----- Tuhaha, om welke red wij dit geschrift aan deselve verleend hebben, op dat wanneer haarl: ismand wil onrust of moeijte aan doen, Zij hetselve mogen cunnen vertoonen, als hebbende wij Zulg aan haarlieden gegeve voor ons mitsg^s alle die geene, die n ons van wegens D E ----- Comp^e Ambo zullen comen te besturen, opdat zij haar ----- luijden behulpsaam Zijn en m tineeren in haare Regtvaardige (:besitting:) Nademaal wij dat ----- land en desselfs nagul-Zagoe en clappers pla tagies aan haarl: in eigendom toegest en geschonken, en dit alles ten dien van D E Comp^e, en desselfs onderdan billijk geoordeelt hebben, opdat de geode Inwoonders dewelke in stille en rust leven mogen welvaeren en -----

integendeel het snoode gespijs voortvlugtig -----
----- in 't jaar 1653 den 16 majj (:was getekend:)
A:D:v: oudshoorn. -----
----- Den B -----
Den Raad (enzoovoorts) -----

UITGEGEVEN voor woordelijk
gelijkluidend uittreksel van
vorenghemeld stuk, hetwelk na met
dit iuttreksel te zijn vergeleken
is teruggegeven, door mij, Meester
Johannes Franciscus Verlinden,
notaris te Amboina, op heden,
Woensdag den twintigsten Januari
negentien honderd zeven en
dertig.

Tajp/t.t.d.

Mr. J.F. VERLINDEN
Notaris Amboina.

PEMUKIMAN SEBAGAI SALAH SATU SARANA KOMUNIKASI ANTARSUKU BANGSA DAN PEMBAURAN

(Oleh: Drs. Sanusi)

Pendahuluan

Di dalam perjuangan bangsa Indonesia telah merupakan suatu yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sejak dari dahulu menginginkan suatu persatuan di kalangan suku-suku bangsa yang banyak terdapat di Indonesia. Kenyataan ini dapat tercermin dari beberapa fakta sejarah. Perpecahan yang terjadi sesama kita sering mengundang intervensi pihak asing yang sangat merugikan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dalam sejarah bangsa Indonesia, timbulnya penjajahan di Indonesia adalah akibat kerapuhan yang terjadi setelah Majapahit mengalami kepudarnya. Sejak masa itu mulailah lahir kesadaran betapa pentingnya persatuan dalam kehidupan antar-suku-bangsa di Indonesia ini, apalagi pada kurun waktu abad-abad ke-16 sampai pada akhir abad ke-19, perlawanan menghadapi penjajahan Belanda yang bersifat daerah atau lokal, patriotisme tidak mencapai keberhasilan.

Bertolak dari kenyataan inilah maka pada tahun 1928 yang terkenal dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober, pemuda-pemuda Indonesia menyatakan kebulatan tekadnya dengan pernyataan satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air yaitu Indonesia. Dengan modal tersebut, maka bangsa Indonesia mampu untuk menggerakkan segala kekuatan yang dimilikinya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Walaupun persatuan yang lahir dari Sumpah Pemuda telah menghasilkan kemerdekaan bangsa, tetapi persatuan yang kokoh masih harus dibina terus di antara suku-suku bangsa Indonesia. Di dalam GBHN mengenai wawasan Nusantara jelas dikemukakan "Bahwa Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa harus merupakan satu Kesatuan Bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya". Pernyataan ini jelas bahwa persatuan bangsa itu merupakan suatu titik tolak untuk melaksanakan dan mencapai cita-cita bangsa.

Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia jelas yaitu mencapai suatu masyarakat adil dan makmur yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut maka kita sekarang melaksanakan pembangunan melalui tahap demi tahap yang disebut Repelita. Pembangunan itu sendiri hanya dapat berhasil bila didukung oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali.

Faktor dukungan tersebut dapat tercapai bila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau merupakan suku majemuk, terdapat kehidupan rukun dan harmonis. Kerukunan dan kehidupan yang harmonis sesama suku bangsa akan menjadi landasan yang kuat bagi terciptanya perasaan senasib sepenanggungan dan akan merupakan modal yang tangguh dalam keberhasilan pembangunan bangsa.

Kehidupan yang harmonis itu biasanya dimulai dari tempat kediaman atau pemukiman. Pemukiman adalah suatu ben-

tuk masyarakat di mana setiap anggota masyarakatnya berhubungan dengan yang lain atau dengan perkataan lain melakukan interaksi. Suatu interaksi itu sangat rapat hubungannya dengan struktur sosial masyarakat itu sendiri. Bila struktur sosial masyarakat itu telah mantap maka interaksi antara anggota masyarakatnya akan membentuk suatu kehidupan yang harmonis. Di desa-desa di mana sistem kekerabatan yang telah demikian berurat berakar, dan hubungan anggota masyarakatnya diatur oleh struktur sosialnya, maka kehidupan di desa terdapat harmonis. Desa dapat dibangun atau penduduk desa dapat digerakkan sesuai dengan irama pembangunan. Kenyataan ini dapat tercermin dari keberhasilan desa-desa dalam pembangunan dewasa ini. Mereka dapat membangun sarana jalan, meningkatkan produksi pangan, dan lain-lainnya, demi kesejahteraan masyarakatnya. Keberhasilan ini bukan karena masyarakatnya yang homogen saja tetapi juga dapat terjadi pada masyarakat yang heterogen. Dalam penelitian yang kami lakukan di Desa Kandungan Kabupaten Simalungun di mana penduduknya yang terdiri dari suku bangsa Jawa dan Batak berhasil mencapai peningkatan hidup desanya. Penduduk di desa ini dapat hidup saling hormat-menghormati, bekerja bersama-sama dan memecahkan persoalan dan masalah desanya secara bersama-sama pula.

Walaupun mereka mempunyai perbedaan dalam adat istiadat, tetapi kemudian mereka dapat menerima suatu kebersamaan untuk meningkatkan taraf hidup mereka maka kerjasama yang harmonis dapat tercapai. Jadi dalam hal ini jelas pula bahwa pemukiman merupakan salah satu sarana yang penting untuk menciptakan suatu masyarakat yang idial sebagaimana diharapkan oleh pembangunan dewasa ini. Pemukiman yang baik memungkinkan di antara anggota masyarakatnya berkomunikasi satu dengan yang lainnya, sehingga segala permasalahan yang sulit dapat terpecahkan. Selain dari itu sikap-sikap saling tertutup dan berprasangka yang merupakan ketegangan dalam masyarakat dapat pula dihindarkan.

Permasalahan

Setiap anggota masyarakat mempunyai keinginan untuk hidup aman dan damai dan ingin mencapai kebahagiaan. Demi untuk mencapai tujuan tersebut mereka membentuk rumah untuk kediaman keluarga dan desa tempat pemukiman. Dengan sarana tersebut mereka dapat saling berkomunikasi dan membantu bila menghadapi kesulitan-kesulitan. Ini semuanya karena manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup bermasyarakat atau berkelompok. Kehidupan seperti ini terdapat pada masyarakat yang masih tertutup dalam pengertian sarana dengan dunia luar terbatas sekali.

Tempat-tempat pemukiman seperti ini biasanya anggota masyarakatnya masih terikat oleh hubungan kekerabatan yang erat karena ikatan darah maupun oleh perkawinan. Karena itulah maka ikatan solidaritas antara para warganya sangat besar sekali seperti kesetiaan kelompok. Gangguan anggota kelompoknya juga menjadi gangguan terhadap kelompok seluruhnya. Keadaan ini sering mengakibatkan bentrokan antara kelompok yang satu dengan yang lain yang berdiam pada daerah pemukiman lain pula. Perang antarsuku dalam hal ini tidak dapat dihindarkan dan melahirkan bencana-bencana. Kebiasaan seperti ini masih sering terjadi pada suku-suku bangsa yang hidupnya terisolasi dan jauh di pedalaman.

Pemukiman seperti tersebut di atas sekarang telah mulai langka. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, dibarengi dengan perluasan sarana komunikasi seperti jalan raya, lalu lintas laut dan udara, maka bentuk pemukiman dalam model tersebut telah berubah. Kemajuan industri dalam hal ini cukup besar pula peranannya. Perubahan-perubahan bentuk pemukiman seperti ini sangat terasa sekali di Indonesia pada kurun waktu abad ke-20 di mana bentuk kehidupan modern telah memasuki Indonesia. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat, demikian pula dengan arus laju penduduk, menyebabkan kehidupan penduduk dan desa yang terisolasi berubah. Penduduk desa yang satu pin-

dah ke desa yang lain, atau mereka pindah ke kota-kota, di mana mereka memperoleh lapangan hidup yang lebih baik. Suasana tempat-tempat pemukiman dengan sendirinya berubah. Ia tidak merupakan tempat pemukiman dari satu kelompok manusia yang homogen dalam pengertian sama adat-istiadatnya tetapi telah heterogen, dan banyak sekali perbedaannya. Di tempat pemukiman seperti ini mulai timbul bentrokan-bentrokan karena ciri-ciri dari tempat pemukiman asalnya masih dibawanya serta ke tempat pemukiman yang baru. Pada umumnya penduduk tersebut masih berorientasi kepada tempat asalnya yang lama, dan hidup berkelompok-kelompok pula. Segala kebiasaan mereka dalam hidup berkelompok pada tempat asal mereka tetap mereka lakukan. Sikap solidaritas yang bersifat kerdil sering melahirkan perselisihan dengan suku-suku yang lain dan melahirkan bentrokan-bentrokan fisik. Situasi ini tentunya melahirkan gangguan-gangguan bagi stabilitas keamanan dan dengan sendirinya memperlancar gerak pembangunan sendiri. Sebenarnya tiap-tiap suku itu menginginkan cara kehidupannya seperti mereka berada di desa tempat asal mereka, tetapi mereka tidak mengetahui dan mengerti bahwa perkembangan sarana modern telah menimbulkan pergeseran-pergeseran nilai-nilai budaya.

Ketidakkpahaman dari masyarakat atau warga masyarakat itulah yang menjadi permasalahan sehingga pembauran dalam setiap pemukiman tidak berjalan dengan baik. Sebenarnya masalah tersebut dapat dipecahkan bila pengelolaan pada setiap pemukiman seperti di desa, kota dapat memberikan sarana-sarana baru seperti kegiatan olah raga, taman bacaan, tempat ibadah dan balai pertemuan sehingga anggota-anggota masyarakat tersebut dapat saling bertukar pikiran. Selain dari itu harus pula setiap wilayah pemukiman disusun secara harmonis dan tidak didominasi oleh satu suku saja.

Pembahasan

Seperti telah disinggung di dalam penguraian di atas, tempat-tempat pemukiman yang banyak terdapat di Indonesia me-

nurut kondisi yang ada, belumlah sesuai dengan harapan seperti yang dicita-citakan. Situasi ini terjadi dan lahir mempunyai kaitan sangat erat hubungannya dengan perkembangan sejarah pemukiman tersebut. Oleh karena itu maka dalam pembahasan masalah tersebut tidaklah dapat kita memahaminya bila pertumbuhan secara historis tempat pemukiman tidak diuraikan terlebih dahulu. Dalam menguraikan pertumbuhan suatu tempat pemukiman itu tentu penulis mengambil sebagai percontohannya ialah tempat-tempat pemukiman yang terdapat di kota-kota sekitar Sumatera Timur seperti Medan, Tebing Tinggi dan Pematang Siantar. Dengan percontohan tersebut maka pola pembentukan tempat pemukiman itu dapat dikatakan banyak persamaannya pada beberapa tempat lain. Di dalam pembahasan ini penulis lebih banyak menyorot kota sebagai tempat pemukiman, karena desa dalam pembahasan di sini tidak sesuai dengan pokok persoalan. Kenyataan ini dapat tercermin dari kutipan "Desa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti ' tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran" (Suparno; Mengenal Desa, hlm. 15). Jadi jelas di desa hanya terdapat sekelompok suku bangsa saja dan bersifat homogen. Sebaliknya di kota terdapat berbagai suku bangsa, dan di antara mereka itu tidak ada yang demikian.

Kota-kota di Indonesia Sebelum Penjajahan Belanda

Sebagaimana telah diuraikan dalam mengemukakan gambaran tentang kota-kota di Indonesia, penulis menggunakan sebagai contoh atau sampel adalah kota-kota yang terdapat di Sumatera Timur. Kota-kota di Indonesia dalam pembentukannya sangat jauh sekali berbeda dengan kota-kota di Eropa. Di Eropa kota-kota itu diciptakan oleh para pedagang-pedagang. Kota adalah tempat-tempat pemukiman para pedagang dan tukang-tukang. Karena pertumbuhan perekonomiannya demikian pesat mereka dapat melepaskan diri dari kekuasaan raja-raja setelah mereka membeli atau mengganti rugi dalam sejumlah uang kepada raja. Dengan cara itu kota dapat bebas

mengatur segala sesuatu yang berada dalam wilayahnya. Di kota lahir hukum yang baru, tata-tertib masyarakat sesuai pula dengan ketentuan kehidupan kota yang bersendi kepada perdagangan. Seluruhnya itu ditentukan oleh pemerintahan kota yang mengatur masyarakat para pedagang. Tempat-tempat tersebut disebut dengan Bourgs di Prancis, Boroughs di Inggris dan Burg di Jerman. Karena pertumbuhan kota-kota tersebut begitu cepat sesuai dengan pertumbuhan perekonomiannya maka nilai-nilai yang tumbuh di kota tersebut berkembang meluas ke seluruh wilayah dan menggantikan nilai-nilai lama yang tidak sesuai dengan keadaan.

Di Indonesia keadaannya sangat berlainan sekali. Kota-kota bukanlah merupakan tempat para pedagang, tetapi tempat kediaman raja-raja dengan para bangsawan dan petugas kerajaan. Dalam masyarakat Indonesia tidak terdapat pedagang, karena masyarakat Indonesia itu pada umumnya masih tertutup dan bersifat agraris, di mana kebutuhannya dihasilkan sendiri. Kalaupun ada perdagangan pada waktu itu hanyalah berupa barang-barang yang dibutuhkan untuk kebutuhan kraton atau lingkungan kerajaan, dan ini dipertukarkan oleh para penguasa pantai dengan barang-barang dari hasil pajak natura penduduk. Oleh karena itu penggunaan mata uang tidak banyak ditemukan. Jadi raja-raja itu juga berfungsi sebagai pedagang, dan tidak heran bila orang-orang Eropa yang kemudian sampai di Indonesia pada abad ke-16 berhubungan tidak dengan pedagang tetapi dengan raja-raja.

Kota Medan berdiri sejak Kesultanan Deli berpusat di Medan pada akhir abad ke-19. Kotaitu pada mulanya hanya merupakan desa kecil yaitu Desa Kesawan dan dipimpin oleh seorang datuk yang disebut datuk Kesawan. Penduduknya sebagian adalah suku Melayu, dan suku-suku bangsa lain baru datang kemudian. Desa atau kampung Kesawan itu cepat berkembang karena sungai Deli dapat dijadikan sarana lalu lintas bagi perahu-perahu ke hilir dengan kota pelabuhannya Labuhan Deli.

Kesawan itu dahulu sebagai tempat penumpukan hasil-hasil lebih dari petani yang dipertukarkan dengan barang kebutuhan yang tidak dihasilkan seperti garam, kain-kain dan lain-lain. Karena peranannya sangat pesat sebagai tempat pemasaran barang sehingga terbentuk pasar atau pekan di tempat ini dan kemungkinan sekali tempat itu yang sekarang disebut dengan Medan Pasar. Dari istilah ini mungkin lahir istilah Medan sekarang. Kegiatan perdagangan itu memberikan peluang bagi pemerintahan Kesultanan Deli untuk memusatkan pemerintahannya di Kota Medan, karena datuk Kesawan berada di bawah naungan Sultan Deli.

Keadaan seperti ini juga berlangsung atas Kota Tebing Tinggi, di mana kota ini yang mulanya hanya merupakan desa petani, kemudian setelah lahir Kerajaan Padang dan Bedagai maka ia berkembang menjadi kota. Kota Pematang Siantar tumbuh setelah di daerah ini terbentuk Kerajaan Siantar yang semulanya hanya merupakan desa yang dihuni oleh petani-petani sekitarnya.

Jadi dari uraian di atas jelaslah bahwa pada mulanya kota di Indonesia itu adalah suatu perkampungan yang dihuni oleh para petani, dan dipimpin oleh pimpinan sukunya. Jadi desa itu terdiri dari penduduk yang homogen. Kepala suku itu kemudian karena perkembangan perekonomian di tempat tersebut bertambah pesat dan berdatangan pula suku lain maka ia menabal-kan dirinya sebagai raja. Situasi kota-kota seperti ini berkembang terus sampai kota itu kemudian berada di bawah naungan penjajah Belanda.

Kota-kota pada Masa Penjajahan Belanda

Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia sejak abad ke-16 yang dimulai mereka dengan mengadakan perdagangan, kemudian karena keinginan mereka untuk menguasai perdagangan itu, maka terjadilah penguasaan wilayah. Dalam penguasaan wilayah itu mereka memulai menguasai wilayah perkotaan atau

tempat-tempat kediaman para penguasa bangsa Indonesia yaitu raja-raja. Setelah mereka berhasil menguasai wilayah Indonesia dan membentuk serta mengembangkan kekuasaannya situasi perkotaan itu tidak mereka lakukan suatu perubahan, tetapi mereka lakukan pula pengembangan sesuai dengan kepentingan mereka. Untuk memudahkan pelaksanaan pemerintah jajahan, terapat pula perkampungan-perkamungan yang terdiri dari kelompok-kelompok suku bangsa dan pola ini mereka biarkan demikian.

Seperti kita ketahui bahwa perkampungan tersebut bertambah sejak kegiatan perekonomian di kota itu mengalami kemajuan. Di Sumatera Timur sejak pembukaan kebun-kebun oleh pengusaha-pengusaha Belanda mengundang banyak tenaga-tenaga pekerja berdatangan ke Sumatera Timur. Ada yang datang dari Jawa, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Minangkabau dan lain-lain. Banyak pula yang berdatangan dari Negeri Cina, India. Di kota-kota seperti Medan, Binjau, Tebing Tinggi, Pematang Siantar mereka-mereka diberikan pula tempat pemukiman sendiri sesuai dengan kelompok-kelompok sukunya itu. Keadaan ini menyebabkan tumbuh perkampungan seperti Kampung Jawa, Melayu, Bantan, Batak, Cina, Keling dan banyak lagi yang lain sesuai dengan jumlah suku yang terdapat di kota-kota itu.

Keadaan ini sengaja dibentuk demikian karena bagi pihak Pemerintah Belanda memudahkan pelaksanaan pemerintahan karena petugas pemerintah cukup berhubungan dengan pimpinan kepala sukunya saja dan segala sesuatu dapat selesai. Selanjutnya memang hal tersebut sengaja dilakukan demikian sehingga antarsukubangsa itu tidak terjadi pembauran yang akan membahayakan bagi kelangsungan hidup penjajahan Belanda di Indonesia. Dengan corak pemukiman seperti ini di antara suku-suku itu mereka masih tetap mempunyai ciri-ciri kehidupannya sendiri. Perasaan sukuisme tetap menebal dan demikian pula kesetiaan kelompok, jadi persatuan membentuk satu bangsa seperti yang diharapkan oleh pergerakan bangsa Indone-

sia pada masa itu tidak mudah tercapai. Malahan ketegangan-ketegangan di dalam tempat pemukiman seperti itu sering terjadi yang menyebabkan batas pemisah antara suku-suku itu semakin menebal, malah satu dengan lainnya bertentangan. Kadang-kadang lahir pula pemeo atau sindiran-sindiran seperti "Lagak Padang, Omong Betawi, Gurindam Barus", karena suku-suku ini barangkali yang banyak meninggalkan kampung halamannya. Demikian pula di Sumatera Timur ini sering terdengar pepatah yang berbunyi "Bukan kampak sembarang kampak, - kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak telah menjadi Melayu". Kenyataan ini menunjukkan proses pembauran yang harmonis di antara suku bangsa Indonesia tidak ada, walaupun ada sangat kecil sekali. Dengan bangsa Asing - Cina dan India keadaannya lebih buruk lagi karena mereka diatur oleh pimpinan mereka sendiri dengan cara sendiri pula. Mereka hanya takluk kepada petugas-petugas Belanda. Kepada mereka oleh Belanda diberikan hak yang seakan-akan otonomi. Misalnya mereka dipimpin oleh petugas mereka yang disebut Letnan, Kapten dan Mayor dan kedudukannya ini tergantung kepada luas daerah yang dikelolanya. Situasi ini tentunya tidak menganggap mereka berada di negeri lain tetapi di negerinya sendiri. Segala kebiasaannya terus berlangsung di tempat kediamannya yang baru seperti perayaan Imlek, upacara kematian, perkawinan dan lain-lain, yang jauh berbeda dengan kebiasaan penduduk bangsa Indonesia. Dengan situasi seperti ini tentu mereka tidak mengenal kebudayaan penduduk setempat sehingga keaslian mereka seperti di daerah leluhurnya tetap berlangsung. Keadaan ini banyak terjadi di kota-kota besar di mana mereka berdiam dalam jumlah yang banyak. Di desa-desa yang jumlahnya kecil dan mereka harus berhubungan dengan penduduk karena usaha dan kegiatannya, mereka terpaksa mempelajari kebudayaan penduduk setempat. Di tempat seperti ini terjadi pembauran malahan mereka dapat turut serta dalam kegiatan penduduk setempat. Di Tapanuli Utara seperti Tarutung umumnya penduduk Cina telah menggunakan marga

Batak dan kawin dengan penduduk setempat. Hal ini terjadi karena mereka tidak mempunyai wilayah khusus atau wijk seperti disebut masa lampau.

Dari gambaran tersebut jelaslah pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia proses pembauran di kota-kota tidak terjadi malahan sebaliknya perselisihan dan saling kecurigaan lahir di antara suku-suku yang banyak itu. Bagi mereka tentunya masalah pembauran itu adalah suatu yang harus dicegah sejalan dengan politik penjajahannya.

Pemukiman Sesudah Masa Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan saja mengubah struktur pemerintahan dari pemerintahan jajahan kepada pemerintahan Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, tetapi lebih dari itu. Di dalam pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 tercantum segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan seterusnya, maka hal ini merubah segala sendi kehidupan dan masyarakat. Desa-desa yang terdapat di kota-kota yang dahulunya bersifat homogen maka kini mulai berubah di mana pimpinan dari desa itu sekarang dipilih atau diangkat. Pimpinan itu tidak lagi harus dari kelompok masyarakat setempat karena setiap warga Indonesia berhak menduduki jabatan yang sama. Demikian pula setiap warga negara dapat saja berdiam di mana saja tidak harus dalam kelompoknya. Hal ini terjadi karena kesadaran akan rasa kebangsaan yang telah mulai memasyarakat sehingga pembauran mulai berlangsung. Walaupun demikian proses pembauran itu tidaklah sebagaimana yang diharapkan. Ciri-ciri kehidupan kelompok masih terus berlangsung pada setiap desa sehingga mayoritas yang berdiam pada tempat pemukiman itu tetap salah satu suku yang telah terdahulu. Pada pemukiman orang-orang India dan Cina keadaannya tetap seperti sediakala hanya mereka sekarang diatur oleh petugas bangsa Indonesia. Pembauran di sini tidak terjadi karena suasana pemukiman

yang jauh berbeda dengan pemukiman dari suku bangsa Indonesia lainnya terutama dalam adat istiadatnya.

Pemukiman seperti di atas itu berlangsung terus, masing-masing kelompok meneruskan kebiasaan-kebiasaan lama dalam kelompoknya masing-masing. Sifat-sifat kesukuan atau kelompok tidak terkikis, walaupun kemerdekaan Indonesia bertujuan mempersatukan seluruh bangsa dan mengikis sifat-sifat tersebut karena situasi pemukiman yang tidak harmonis.

Pada daerah pemukiman orang-orang Cina dan India lahirnya kemerdekaan dan lenyapnya peranan orang Belanda dalam kegiatan perekonomian mereka dapat mengubah kehidupan sosial mereka lebih baik. Dengan ketekunan dan kerajinan dan sifat wiraswasta yang merupakan warisan dari kebudayaan leluhurnya, dari kedudukan pedagang pengecer mereka tumbuh menjadi pedagang menengah. Keadaan ini tentu menyebabkan jurang pemisah dengan penduduk Indonesia yang berada di sekitarnya bertambah besar. Karena pertumbuhan perekonomian mereka yang lebih baik maka mereka melakukan perubahan tata kehidupan mereka sesuai dengan perkembangan ekonominya.

Seluruh kenyataan yang terlukis di atas menyebabkan saling curiga-mencurigai dari satu kelompok dengan kelompok yang lain semakin menebal. Sedikit saja terjadinya kesalahpahaman di antara kelompok-kelompok tersebut dapat menerbitkan bentrokan-bentrokan berdarah. Tentu saja hal tersebut bangsa dan juga pembangunan. Situasi pemukiman seperti yang terlukis di atas masih tercermin dalam kehidupan beberapa kota-kota di Sumatera Timur ini di mana sistem pengelompokan bagi suatu suku atau kelompok masih berkembang tanpa ada suatu suku atau kelompok masih berkembang tanpa ada suatu usaha memperkecilnya.

Situasi itu sebenarnya dapat diatasi kalau seluruh aparat yang mengelola wilayah pemukiman dapat melakukan suatu perencanaan yang terpadu, di mana setiap kelompok dalam masyarakat itu dapat saling berkomunikasi satu dengan lainnya me-

lalui sarana yang tersedia. Dengan perencanaan yang matang dan terarah pembauran di antara suku bangsa itu akan menjadi suatu kenyataan.

Pemukiman sebagai Sarana Komunikasi Antarsukubangsa dan Pembauran

Dewasa ini masyarakat Indonesia berada dalam pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusianya. Peningkatan taraf hidup atau mengubah masyarakatnya ke arah kemajuan-kemajuan sering disebutkan dengan modernisasi. Jadi modernisasi itu tiada lain adalah suatu kemajuan-kemajuan atau progres dan dalam hal ini bukanlah kemajuan dalam peningkatan kebutuhan saja tetapi juga perubahan sikap mental manusia untuk menerima pembangunan itu sendiri. Di dalam pembangunan Indonesia di mana tujuannya juga membangun manusia Indonesia seutuhnya, maka perubahan sikap mental manusianya sehingga pembauran mencapai keserasihan dan persatuan bangsa dapat tercapai perlulah sarananya disempurnakan.

Menurut hemat kami sarana yang ampuh dalam hal ini ialah pemukiman penduduk. Di dalam pemukiman ini setiap orang saling berhubungan satu dengan lainnya karena berbagai kepentingan. Apakah kepentingan dalam ekonomi, budaya, sosial dan lain-lain, di mana setiap warga yang tinggal di daerah pemukiman itu, dapat saling memberikan informasi. Untuk menciptakan suasana yang demikian ini perlulah terdapat keterbukaan dari setiap warga yang mendiami pemukiman tersebut. Hal ini dapat tercapai bila tempat-tempat pemukiman dapat menyediakan sarana untuk hal tersebut dan setiap pemukiman tidak lagi merupakan tempat kediaman mayoritas dari salah satu suku bangsa.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut menurut hemat kami tidak perlu melakukan perombakan pada pemukiman yang telah ada, tetapi pada daerah pemukiman yang baru perlu dilakukan suatu perencanaan yang baik, terpadu dan harmonis.

Tempat-tempat pemukiman baru seperti yang dibangun oleh perusahaan perumahan harus tidak hanya memikirkan keuntungan saja, tetapi juga harus menyediakan sarana untuk pembauran. Misalnya penjualan rumah-rumah atau pertokoan harus diberikan tidak saja kepada golongan yang disebut ekonomi kuat, tetapi juga kepada golongan ekonomi lemah. Perbandingannya harus seimbang, demikian pula masalah tersebut dapat pula dijadikan pedoman dalam pembangunan perumahan rakyat. Seterusnya sarana yang memudahkan komunikasi di antara penghuni perumahan itu harus ada. Misalnya lapangan olah raga, balai pertemuan, perpustakaan dan rumah-rumah ibadah, sekolah-sekolah dan lain-lain.

Dengan adanya pemukiman seperti di atas maka para penghuni pemukiman itu dapat saling bertukar informasi satu dengan lainnya. Mereka dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap suku bangsa apalagi terhadap warga negara keturunan asing sehingga akan terjadilah suatu masyarakat yang terbuka. Tentu saja proses ini tidak dapat berlangsung dalam waktu yang singkat, tetapi dalam masa suatu perubahan sikap. Kenyataan ini dapat tercermin dari tempat-tempat di mana bentuk pemukiman seperti yang dikemukakan di atas telah ada. Para warga negara turunan Cina telah meninggalkan sebagian kebudayaan leluhurnya dan mengadopsi kebudayaan Indonesia. Mereka telah menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya malahan di desa-desa di mana bahasa daerah menjadi dominan dalam pergaulan sehari-hari mereka telah pula memahaminya dan menggunakannya.

Dengan sarana lapangan olah raga para remaja dapat pula berkomunikasi satu dengan lainnya, sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang sama. Lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan manusia dan pemukiman telah memberikan sarana untuk ini. Demikian juga sarana untuk ini. Demikian juga sarana-sarana yang lain dapat berfungsi sebagai alat pembauran. Selama ini dicoba melalui sara-

na pendidikan untuk menciptakan pembauran, tetapi sering tujuan tersebut tidak tercapai karena tempat sekolah itu suasana lingkungan tidak mendukung tujuan tersebut. Lingkungan yang mayoritas terdiri dari salah satu suku bangsa menyebabkan mayoritas muridnya juga terdiri dari suku bangsa itu pula, sehingga sifat-sifat kesukuan itu tetap tidak lenyap.

Pemukiman yang harmonis di mana lingkungannya terdiri dari berbagai suku bangsa dapat melahirkan suatu kebersamaan, di mana rasa senasib sepenanggungan dan tanggung jawab bersama dapat lahir. Semuanya ini dapat merupakan landasan yang kuat dalam menciptakan suatu bangsa Indonesia seperti yang di-cita-citakan pada Sumpah Pemuda 1928. Selanjutnya adanya persatuan itu akan memberikan suatu dukungan yang erat bagi lancarnya pembangunan bangsa, masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kesimpulan

Dari uraian-uraian tersebut di atas akhirnya sampailah penulis kepada kesimpulan-kesimpulan yang merupakan pokok-pokok pembahasan. Kesimpulan itu antara lain ialah:

1. Desa atau kampung merupakan bentuk pemukiman di Indonesia dan biasanya dihuni oleh satu suku bangsa saja. Karena pertumbuhan perdagangan dan perekonomiannya maka tempat tersebut menjadi pusat pemerintahan raja seperti Medan. Desa itu kemudian membentuk desa-desa lainnya yang dihuni oleh kelompok suku lain. Jadi kumpulan desa-desa itu merupakan kota, yang dihuni oleh berbagai-bagai suku bangsa yang tetap melaksanakan berbagai kebiasaan dan adat aslinya.
2. Di tempat pemukiman ini tidak terjadi interaksi antar-sukubangsa itu sehingga pembauran juga tidak berlangsung. Pengelompokan tersebut sengaja berlangsung demikian, demi untuk memudahkan pengaturan para warga kota itu sendiri.

3. Pemerintahan jajahan Belanda melanjutkan situasi pemukiman tersebut, malahan memperluasnya. Tujuan pemerintah Belanda selain memudahkan pelaksanaan administrasi pemerintahan, juga untuk menghempang gerakan maju dari pergerakan kebangsaan Indonesia yang menghendaki persatuan di kalangan suku bangsa Indonesia. Dengan cara ini persatuan antara suku bangsa di Indonesia tidak berlangsung, malahan perpecahan akan terus terjadi dan pemerintahan jajahan akan selamat.
4. Situasi pemukiman tersebut setelah lahirnya kemerdekaan terus pula berkembang dalam bentuk pola yang sama. Keadaan ini sering melahirkan ketegangan-ketegangan dan perselisihan antar-kelompok yang sangat merugikan persatuan dan kesatuan bangsa. Sering pembangunan menjadi terhalang karena situasi ini dan hal ini merupakan salah satu masalah yang harus ditanggulangi demi keberhasilan pembangunan.
5. Permasalahan itu lahir karena situasi pemukiman yang tidak harmonis, di mana sarana komunikasi antarsuku tidak ada atau sangat minim sekali, sehingga pembauran tidak berlangsung. Keadaan ini lebih buruk lagi terhadap daerah pemukiman orang-orang Cina, karena mereka seakan-akan memisahkan diri, sehingga sering lahir tindakan yang bersifat rasialis terhadap mereka.
6. Semuanya ini dapat diatasi bila tempat-tempat pemukiman yang ada dapat diciptakan sesuai dengan tujuan pembauran dan perpaduan antarsukubangsa dan warga negara turunan asing. Untuk ini sarana-sarana yang dapat menjadi alat komunikasi harus tersedia, dan pemukiman itu sendiri akhirnya akan menjadi alat untuk melaksanakan pembauran.

INTERAKSI ANTARA . GOA – BIMA – MANGGARAI (+ 1600 – + 1930)

(Oleh: Helius Sjamsuddin)

Pendahuluan

Kajian interaksi antara Gowa, Bima dan Manggarai ini adalah mengenai hubungan segi tiga antara tiga kelompok etnis yaitu Makassar, Bima dan Manggarai. Ketiganya berasal dari rumpun etnis yang sama yaitu "ras Melayu".¹ Hanya dalam perjalanan sejarah yang lama masing-masing telah tumbuh dan berkembang sendiri-sendiri dalam ruang tempat dan ruang waktu yang terpisah. Dalam perkembangan kehidupan lokal (local life) pada masa-masa tradisional dan kolonial kemudian, antara ketiga kelompok etnis itu telah terjalin interaksi. Bentuk-bentuk interaksi itu silih berganti dengan intensitas yang tidak selalu sama antara kooperasi, kompetisi, konflik dan akomodasi, akan tetapi tidak pernah menuju kepada integrasi. Kehidupan lokal yang eksklusif kuat telah menutup segala kemungkinan dalam interaksi di antara mereka untuk menuju kepada suatu integrasi sebagaimana yang sedang berlangsung dalam kehidupan nasional (national life) seperti sekarang, terutama seperti sejak kemerdekaan.

Dalam interaksi antara ketiga kelompok etnis itu antara tahun + 1600 – + 1930, orang-orang Makassar dan Bima lebih merupakan subyek dari pada obyek, sedangkan orang Manggarai sebaliknya; mereka menjadi obyek dominasi orang-orang Makassar dan Bima, terutama kemudian oleh yang terakhir. Hanya seberapa jauh dominasi itu dilakukan oleh orang-orang Makassar dan Bima, dan sejauh mana dominasi itu dirasakan sebagai beban yang sama sekali tidak menyenangkan bagi orang Manggarai, inilah yang perlu dipertanyakan. Sebab hal serupa bisa kita pertanyakan, misalnya, sejauh mana Majapahit dapat mendominasi Nusantara tahun 1365, atau Ternate mendominasi Bima, atau orang Makassar terhadap orang Bima sebelum Perjanjian Bungaya tahun 1667, atau dominasi orang Bugis sejak Arung Palakka dan pasca Arung Palakka di Sulawesi Selatan dan daerah-daerah "bondgenootschap" seperti Bima dan Sumbawa sesudah Perjanjian Bungaya.² Inilah antara lain salah satu pokok dan maksud kajian ini sebab dominasi adalah suatu pengertian yang mempunyai implikasi kekuasaan (power) dan penggunaan kekuasaan itu serta dalam penggunaan kekuasaan menyangkut bentuk-bentuk interaksi.

Unit-unit politik: Goa, Bima dan Manggarai

Sebelum membicarakan interaksi, ada baiknya kita mengkaji lebih dahulu bentuk-bentuk dengan ciri-ciri khusus masing-masing unit politik yang didukung oleh masing-masing kelompok etnis di atas. Sejak abad ke-16, terutama sejak agama Islam dipeluk resmi oleh Raja Goa yang kemudian diikuti oleh seluruh rakyatnya pada awal abad ke-17, maka Goa menjadi kekuatan politik terbesar dan terkuat di Nusantara bagian timur dan mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Hasanuddin.³ Perang Makassar akhirnya menjadi antiklimaks bagi Kerajaan Goa. Posisi Hasanuddin dengan Kerajaan Goa dan kelompok etnis Makassar digantikan oleh Arung Palakka dengan orang Bugisnya yang mendapat dukungan kompeni Belanda (VOC). Orang-orang Makassar terpaksa berdiaspora meninggalkan Goa

menjadi pelarian-pelarian politik ke seluruh Nusantara di mana kekuasaan Arung Palakka dan Kompeni berada di periferi. Di tempat-tempat baru yang mereka datangi mereka melakukan beberapa kemungkinan: atau mereka menjadi bajak laut, atau mereka membantu perjuangan pemimpin-pemimpin setempat yang sedang melakukan perlawanan terhadap VOC, atau mereka menjadi salah satu komponen etnis pendatang dalam konglomerat penduduk dari unit-unit politik kerajaan lain dan karena jumlahnya kecil tidak merupakan ancaman bagi tuan rumah, atau mereka berhasil menjadi semacam kelompok penekan (*pressure group*), naik sebagai kelas penguasa dan duduk sebagai penguasa tertinggi.⁴ Adapun mereka yang masih tinggal di Goa sendiri, meskipun keturunan raja-raja Gia masih ada yang memerintah, namun kekuasaan mereka praktis di bawah payung kekuasaan Arung Palakka atau pewarisnya.⁵

Unit politik Bima mempunyai asal, pertumbuhan dan perkembangan yang agak berbeda. Unit politik terkecil semula adalah kelompok-kelompok lokal yang dipimpin masing-masing oleh seorang *primus inter pares* yang disebut *Ncuhi*. Ada banyak *Ncuhi* yang nama-namanya lebih menunjukkan keterangan tempat asal dari pada nama diri. Meskipun ada di antara mereka yang menjadi lebih dikenal, akan tetapi para *Ncuhi* itu tidak berhasil membentuk suatu unit politik dengan sentralisasi kekuasaan pada seorang penguasa tertinggi. Baru unit-unit politik "asli" ini mengalami perubahan dan perluasan setelah ada pengaruh dari Jawa yang dibawa oleh seorang tokoh mitos-legendaris Sang Bima. Ia memperkenalkan bentuk kerajaan dan ia sendiri menjadi *Sangaji* (Raja) dan pendiri dinasti raja-raja Bima selanjutnya.⁶ Tampaknya pengalihan kekuasaan dari para pemimpin setempat kepada pendatang dari luar pulau berjalan damai tanpa gejolak sedikit-tidaknya sebagaimana kesan yang tersirat dari *Hikayat Sang Bima*.⁷ Sikap ini cukup menarik karena kemudian berubah; orang-orang Bima di kemudian hari menunjukkan kesan "agresif" dan "represif" sebagaimana yang kita lihat dalam menghadapi Manggarai. Demikianlah dengan Sang Bima, maka

nama asli *Mbojo* kemudian diubah menjadi *Bima*, suatu sebutan semula untuk kelompok etnis (*dou Mbojo*), bahasa *nggah Mbojo*) dan wilayah unit politik (dana Mbojo). Terlepas dari kapan semua ini persis terjadi, perubahan politik dengan Hindu sebagai kemungkinan agama yang dipeluk ketika itu setelah lepas dari "kekafiran" (heathens), menyebabkan struktur politik-sosial dengan jaringan-jaringan birokrasinya semakin relatif canggih (sophisticated). Selanjutnya, pada bagian pertama abad ke-17, hampir seperti "pola Goa" dalam proses islamisasinya yaitu raja memeluk Islam kemudian diikuti seluruh rakyatnya, maka Bima pun memeluk agama Islam. Dengan pengaruh Makassar ini maka ke dalam birokrasi tradisional sebelumnya diperkenalkan gelar-gelar baru seperti *Bicara* untuk mengkubumi dan *Galara* (Galarang) untuk kepala desa. Sebenarnya untuk fungsi dan peran ini sudah ada dalam birokrasi Bima pra-Islam yaitu *Tureli Nggampo* dan *Ncuhi*.⁸ Jadi jika dari Jawa Hindu, Bima mengenal bentuk kerajaan dengan Sangajinya, maka dari Goa Islam, Bima menggunakan gelar-gelar *Bicara* dan *Galara*. Goa dan Bima yang telah memasuki "great tradition" inilah nanti berhubungan dengan Manggarai yang ketika itu masih dalam tahap "little tradition".⁹

Manggarai mempunyai unit-unit politik terkecil yang masing-masing dipimpin oleh *Dalu*. Fungsi dan peran para Dalu di Manggarai dapat disejajarkan dengan para Ncuhi di Bima. Nama-nama Dalu pun lebih menunjukkan keterangan tempat mereka berasal dari pada nama asli mereka. Dan seperti di Bima pada masa Ncuhi, meskipun di antara para Dalu ada yang lebih menonjol perannya, terutama misalnya karena kharismanya, namun mereka tidak berhasil membentuk suatu unit politik semacam federasi, atau konfederasi, apalagi sentralisasi dengan seorang pemimpin tertinggi sebagai pemuncak.¹⁰ Ini saya kira salah satu kelemahan Manggarai dalam menghadapi Makassar atau Bima. Terutama Bima menggunakan situasi ini dengan sebaik-baiknya yaitu menggunakan Dalu yang satu menghadapi Dalu yang lainnya. Rahasia dominasi Bima selama bebe-

rapa abad di Manggarai adalah dengan cara ini. Apalagi dibandingkan dengan Makassar, distansi geografis lebih menguntungkan karena Bima lebih dekat dengan Manggarai sehingga Bima relatif lebih cepat dan mudah melakukan pengawasan. Bima tidak memperlakukan Manggarai sebagai suatu daerah dari kelompok etnis yang setingkat melainkan sebagai daerah feudum yang pada waktu-waktu tertentu telah ditetapkan untuk menyerahkan upeti. Rupanya dengan alasan yang sama maka Bima tidak melakukan pengislaman di Manggarai meskipun Bima ketika itu dalam posisi yang memungkinkannya. Peranan ini justru kelak dilakukan para missionaris sehingga Agama Katholik berkembang di Manggarai.¹¹ Ketika Goa atau Bima berkuasa di Manggarai, kedua-duanya mempertahankan sistem politik dan sosial tradisional yang masih relatif sederhana itu. Kalau pun ada jabatan-jabatan *Galarang* atau *Karaeng*, maka jabatan-jabatan ini sebenarnya setaraf dengan Dalu, hanya dengan perbedaan Karaeng atau Galarang itu dijabat oleh orang-orang Makassar atau Bima asli ataupun keturunannya, sedangkan Dalu oleh orang Manggarai asli. Jabatan-jabatan ini mungkin dimaksudkan untuk mengimbangi disangsikannya kesetiaan kepada Makassar atau Bima. Selain dari pada ini, Bima juga memperkenalkan jabatan-jabatan *Naib* (wakil) yaitu wakil sultan Bima di Manggarai dan *Bicara* yang mendampingiya. Perangkat Nain dan Bicara ini terdapat baik di Reo maupun di Pota sebagai pusat-pusat pemerintahan. Bima mengklaim menguasai seluruh Manggarai dengan melalui para Naib dan Bicara Reo dan Pota. Pada gilirannya Naib dan Bicara itu memerintah secara tidak langsung melalui sejumlah Dalu, Karaeng atau Galarang yang mereka koordinasi.¹²

Hubungan Bima – Goa

Sejarah hubungan Bima dengan Goa mungkin saja lebih tua dari pada apa yang telah dicatat oleh Kronik Makassar ataupun Kronik Bima yang ditulis abad ke-17 dan sesudahnya.¹³ Orientasi Bima yang semula ke barat (Jawa) semasa Majapahit,

kemudian beralih ke utara (Goa), terutama setelah Islam masuk ke Bima. Selain ikatan keagamaan dan budaya di semua lapisan kelompok etnis ini, ikatan itu dipererat melalui perkawinan-perkawinan politik di lapisan atas yaitu antara raja atau bangsawan Bima dengan putri-putri Goa atau sebaliknya.¹⁴ Namun ikatan-ikatan ini tidak membuat Bima menerima sepenuhnya dominasi Goa sebagaimana ternyata beberapa kali Goa mengirim ekspedisi perangnya ke Bima untuk menghukum Bima yang tidak patuh,¹⁵ sebagaimana yang kemudian dilakukan oleh Bima pada abad ke-18 terhadap para Dalu Manggarai yang dianggap membangkang.¹⁶ Kerjasama Goa dengan Bima benar-benar baik ketika Goa di bawah pemerintahan Sultan Hasanudin, bahkan dalam Perang Makassar, sultan Bima ikut serta berperang dan ikut memikul akibat dari bantuannya itu. Perjanjian Bungaya tahun 1667 memuat pasal khusus mengenai beban yang harus dipikul Bima.¹⁷

Kekalahan Goa dalam Perang Makassar telah melepaskan sama sekali keterikatan politik formal antara Bima dengan Goa. Jika ada hubungan antara Bima dan Goa kemudian hari, maka hubungan itu lebih tampak di kalangan para aristokratnya dari pada rakyatnya. Perkawinan membuat para aristokrat Bima dan Makassar masih saling berhubungan. Ketika seorang putra sultan Bima kawin dengan seorang putri Goa pada tahun 1727, maka Bima menerima hadiah perkawinan dari Goa berupa tanah Manggarai.¹⁸ Ketika kemudian hubungan Goa dan Bima memburuk, maka para penguasa Goa tidak mau mengakui pertuanan Bima atas Manggarai dengan alasan bahwa pemberian hadiah perkawinan tidak dilakukan secara tertulis. Tetapi sementara itu Bima telah kembali melanjutkan orientasinya ke timur (Manggarai), terutama sejak mundurnya kekuasaan Goa setelah Perang Makassar. Beberapa kali terjadi konflik bersenjata antara Bima dan Makassar karena soal Manggarai.¹⁹

Hubungan Bima – Manggarai

Sumber-sumber Bima tidak ada yang membenarkan atau membantah tentang ada tidaknya hadiah kawin Manggarai itu

dari Makassar. Kronik Bima hanya memberikan kesan bahwa hubungan antara Bima-Makassar sudah menjadi "adat turun-temurun yang harus dihormati dan dilanjutkan". Kemudian Kronik Bima lebih jauh lagi mencoba menegaskan bahwa Manggarai sebenarnya hanyalah salah satu saja dari daerah-daerah di timur dalam rencana ekspansi Bima. Tokoh yang bertanggung-jawab dalam realisasi rencana "gerak ke timur" ini ialah seorang mangkubumi Bima, Tureli Nggampo. Ia telah menanggalkan jabatannya hanya untuk dapat memimpin sendiri laskar Bima. Hasilnya ialah dengan diabadikan nama pada gelarnya kemudian yaitu *Rumata Ma Kapiri Solo* (Tuan Kita Yang Telah Menjelajah Solor) setelah ditundukkan Komodo, Manggarai, Sumba. Alor dan Solor.²⁰ Tentu saja kita masih skeptis apakah penguasaan ini nominal atau real.

Rupanya reaksi Makassar atas dominasi Bima terhadap Manggarai itu telah mendorong Bima untuk mencari "legalitas sejarah" dengan mundur jauh memasuki ruang waktu "mitos". *Hikayat Sang Bima* dan *Caritera Manggarai* adalah dua sumber yang mengarah ke situ. Terlepas dari "Dichtung" yang terdapat dalam kedua cerita ini, tersirat, kalau tidak tersurat, keinginan untuk menunjukkan bahwa Bima telah mempunyai hubungan yang sangat tua dengan Manggarai. Diceritakan dalam *Hikayat Sang Bima* bahwa setelah tokoh legendaris dari dunia pewayangan, Sang Bima, kawin dengan putri naga (manusia yang dikutuk Sang Guru) di Nisa Satonda (sebuah pulau di Sumbawa), maka ia lebih dahulu meneruskan perjalanannya ke timur sampai ke Reo, Manggarai, baru ia kemudi lagi ke pulau Sumbawa.²¹ Kemudian dalam *Caritera Manggarai* yang ditulis dengan huruf Arab dan bahasa Melayu yang tersimpan di KITLV Leiden, meskipun hanya terdiri dari dua halaman, tetapi isinya memuat esensi sejarah penguasaan Bima atas Manggarai.

Tanah Manggarai diperhambakan oleh tanah Bima dari memang dahulu kala kemudian kuasa Tuhan Allah maka datanglah seorang dewa-dewa' bernama Sang Bima dengan beberapa temannya bersama-sama maka segala orang Manggarai melihat lalu takut tun-

duk semuanya kepada maharaja Sang Bima dari ujung timur tanah Manggarai Syahdan kemudian daripada itu datanglah maharaja dewa Sang Bima di tanah Bima maka beranaklah laki-laki dinamai maharaja Anidar Termeruk (Indra Zambrut) serta diwasiatkannya segala hal ihwal tanah Manggarai kepada anaknya Anidar (Indra) Zari rut itulah mulai menjadi raja dalam tanah Bima. Setelah sudah beberapa turun temurun dranak cucu turunannya sampailah ke bawah seorang raja Kepala Bicara dalam tanah Bima bergelar raja Mikir Sulu (Ma Kapiri Solo). Itulah raja Kepala yang pergi mengunjungi dan melihati hintru (seantero?) keliling tanah Manggarai dan Sumba. Dengan sebagaimana kuasa Tuhan Allah kebiasaan dan kesaktian akan membaharui dan meneguhi perihal perjanjian maharaja dewa Sang Bima dengan tanah Manggarai dan Sumba. Syahdan kemudian daripada itu setelah sudah tanah Bima menerima Agama Islam serta berdiri nama Raja Sultan bernama Abdul Qohar almarhum disuruhnya lagi dua orang menteri pergi di negeri Manggarai dan Sumba mengunjungi dan membaharui. Demikian lagi sudah beberapa raja Sultan turun-temurun Sultan Abdul Qohar anak cucunya memperhubungkan yang tiada berkeputusan yang berulang-ulang daripada seorang nama Sultan-Sultan yang pergi mengunjungi membaharui lagi perihal perjanjian raja-raja yang dahulu itu adanya. Syahdan setelah sampai Sri Sultan Abdul Qohar ibnu Sultan A'lauddin sudah berdiri atas tahta kerajaan atas tanah Bima itulah yang pergi memukulnya dengan perang beberapa tahun dengan beberapa rakyat dan kepala-kepala di tanah Manggarai serta diusirkan semuanya beberapa jenis-jenis orang yang ada tinggal duduk di Manggarai yaitu bernama Karaeng Balu dan Daeng Makuli dan Daeng Mamaruh dengan beberapa anak buahnya dan sanak saudaranya dan Papu Daeng Mangimbing dan Daeng Malajar sampai Papu Daeng Malajar balik ke mari di Bima Pada hari Senen waktu dhuka enam hari bulan Rabiul Akhir sanah (tahun) 1176 (Hijrah) (=26 Oktober 1762), itulah Sri Sultan Abdul Qodim pergi berperang di tanah Manggarai.²²

Kronik Bima yang terhimpun dalam Koleksi Held yang juga di dalamnya memuat Hikayat Sang Bima, memberikan uraian panjang lebar tentang ekspedisi perang Sultan Abdul Kadim, sehingga Carita Manggarai tidak lagi semata-mata sebuah

fantasi melainkan dalam batas-batas tertentu mendapat dukungan fakta sejarah. Dengan kedua cerita ini, Hikayat Sang Bima dan Caritera Manggarai, Bima ingin menunjukkan bahwa penguasaannya atas Manggarai adalah "legitim", bukan hanya karena sekedar hadiah perkawinan antara seorang pangeran dari Bima dan seorang putri dari Makassar di kemudian hari.

Hakekat Interaksi Bima – Manggarai

Kronik Bima Koleksi Held memuat perumpamaan mengenai hakekat hubungan Bima – Manggarai melalui suatu dialog yang akan kami kutip di bawah ini. Pada tahun 1762, Tureli Bolo, panglima perang Bima yang ditugaskan oleh Sultan Abdul Kadim untuk memimpin ekspedisi memerangi orang-orang Makassar dan menghukum para Dalu yang membangkang dan membantu orang-orang Makassar di Manggarai itu, pada suatu kesempatan di Manggarai bertanya kepada Dalu Wila dan Dalu Wantu yang datang menghadapnya mengenai tradisi hubungan yang telah berlangsung.

Tureli bertanya: "Bagaimana perkataan ditinggalkan oleh orang tua-tuamu?"

Maka jawab Dalu: "Hamba ingatt semua tanah Bima jadi tuan dan tanah Manggarai akan menjadi hambanya".

Maka kata Tureli: "Adakah engkau mengetahui tanah Bima jadi nya-wa, tanah Manggarai jadi tubuh, Bima jadi angin, Manggarai jadi daun kayu".

Jawab Dalu: "Hamba sekalian masih ingat, juga seperti titah tuanku itu".²³

Penguasaan Bima atas Manggarai sampai dengan abad ke-18 tidaklah semudah di atas kertas. Manggarai ketika itu merupakan nama dari seluruh teritorial yang ditempati oleh kelompok etnis Manggarai (ata Manggurai = orang Manggarai). Mereka menganggap diri dari Makassar pada masa silam.²⁴ Le Roux menggambarkan: "They are a kind herted sort of people, with peaceful natures".²⁵ Van Bekkum melihat mereka sebagai

orang yang kurang agresif dan cinta damai.²⁶ Mengenai asal Hamerster menyebutkan: "The original inhabitants of the Manggarai district livedd along the coast but eventually they were forced to retreat to the highlands to protect themselves against vicious slave-hunter Bima and Celebes".²⁷

Seperti yang sudah dikemukakan di muka, Manggarai tidak merupakan suatu unit politik bulat dengan seorang penguasa sentral. Secara politis Manggarai merupakan jumlah seluruh kedaulan yang tidak terintegrasi. Tidak semua kedaluan dengan pada Dalunya dapat dikuasai oleh Bima dalam waktu yang sama. Tetapi Bima menguasai dahulu Dalu-Dalu yang terkemuka seperti Dalu Tode, Dalu Bajo atau Dalu Ciba. Para Dalu yang telah tunduk dan mengakui dominasi Bima, jika merasa bahwa tekanan-tekanan Bima mulai mengendur, mereka mulai membangkang ataupun berontak. Apalagi dengan adanya juga pemukim-pemukim Makassar yang berhasil memasukkan dan menanamkan pengaruhnya di kalangan para Dalu tertentu. Karena tenaga manusia bersenjata dari Bima tidak cukup banyak untuk menjaga benteng-benteng, apalagi harus meninggalkan keluarga dalam waktu lama sedangkan transportasi teramat sulit ketika itu, ditambah pula kesungkanan orang Bima sendiri berbaur dengan penduduk asli, maka terjadi kekenduran di atas. Sejauh tidak atau belum merupakan ancaman yang gawat, maka Bima tidak mengambil tindakan. Tetapi begitu dianggap pemberontakan-pemberontakan itu dapat melepaskan sama sekali kendali Bima, maka Bima mulai bertindak. Beberapa ekspedisi perang dikirim ke Manggarai untuk menuntut kepada para Dalu penguasaan atau pengukuhan kembali dominasi Bima. Salah sebuah contoh misalnya pada tahun 1762 Sultan Bima Abdul Kadim membentuk sebuah ekspedisi besar terdiri dari beberapa puluh perahu yang mengangkut para bangsawan perang (pasukan elit) dan 1500 laskar Bima yang dipimpin oleh Turelo Bolo berangkat ke Manggarai. Dengan modal Bajo dan Dalu Todo yang masih setia, ekspedisi itu terikat selama beberapa tahun di Manggarai dan pada akhirnya berhasil menundukkan para Dalu

yang berontak serta orang-orang Makasar yang masih terus melawan.²⁸ Dengan demikian abad ke-18 dan selanjutnya Bima berhasil mengkonsolidasi kekuasaannya di Manggarai, sehingga ketika Bima hampir compang-camping karena letusan besar Gunung Tambora tahun 1815, ditambah pula perairan dan pantai-pantai Pulau Sumbawa selama abad ke-19 tidak aman karena dijarah bajak laut Tobelo yang bersarang di Riung (Flores), namun Bima masih dapat menempatkan wakil-wakilnya para Naib dan Bicara di Reo dan Pota sampai tahun 1929.²⁹ "Bij G.B. 20 April 1929 no. 12 op het eiland Flores gelegen deel van het landschap Bima, bekend onder de benaming van Manggarai, met inbegrip van de z.g. eilanden, gerekend van 1 Maart 1929 efgescheiden van het landschap Bima en gesteld onder een afzonderlijken bestuurder"³⁰

Seperti sudah dikemukakan di muka, dalam interaksi antara Bima dengan Manggarai, Bima telah menjadikan Manggarai sebagai daerah feudum. Pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan, Manggarai via Naib menyerahkan upeti ke Bima. Upeti-upeti itu berupa hasil bumi, hasil hutan, hasil ternak dan tenaga manusia berupa budak. Tiga produk yang pertama sebenarnya masih dihasilkan oleh Bima sendiri. Akan tetapi yang terakhir, yang telah menumbuhkan perbudakan dan perdagangan budak, adalah bagian yang terpeka dalam interaksi antara Bima dan Manggarai, serta memberikan citra buruk tentang Bima pada masa lampau. Bima telah menjadi salah satu penguasa lokal yang ditakuti sekaligus paling tidak disukai ketika itu. Hanya di sini Bima tidak berperan sendiri. Pasaran budak di Batavia semasa itu mendorong VOC membenarkan adanya perbudakan dan perdagangan budak yang asalnya dari mana pun. Salah satu sumber adalah Bima, dan Bima pada gilirannya, melalui para Dalu di Manggarai mengadakan budak-budak itu. Ketika pada abad ke-18 VOC menuntut pada Bima untuk menyediakan 100 budak, maka itu segera disanggupi oleh Bima.³¹

Penutup

Sampai tahun 1930, terentang suatu jarak waktu hampir tiga setengah abad sejarah hubungan antara tiga kelompok besar etnis Makasar, Bima dan Manggarai. Dalam waktu yang panjang ini tergambar secara garis besar bentuk-bentuk kerjasama, bersaing, konflik dan akomodasi sehingga memberikan warna dinamis dalam hubungan di antara ketiganya. Kehidupan lokal yang teramat dominan pada masing-masing kelompok etnis, membuat mereka sama sekali belum membayangkan untuk membentuk bersama suatu kehidupan yang lebih luas lagi dalam suasana persamaan dan tanpa prasangka. Masa tradisional yang berjalan bersamaan dengan masa kolonial tidak memberi kesempatan untuk suatu integrasi. Meskipun demikian, dinamika karena proses interaksi membuka jalan ke arah perubahan-perubahan dan menerima perubahan-perubahan itu dengan kritis. Kemerdekaan adalah suatu perubahan besar yang mendasar bagi setiap kelompok etnis di Indonesia. Tiga kelompok etnis yang menjadi obyek kajian ini tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus ikut dalam integrasi untuk memasuki kehidupan nasional yang sebelumnya tidak terbayangkan. Proses ini tidak mudah, akan tetapi langkah-langkah sudah dilakukan.

CATATAN

1. Mengenai Goa, lihat A.J.A.F. Eerdmans, "Het Landschap Gowa", *VBG*, 50, 1897, halaman 28, mengenai Bima, lihat Gerhanrd Heberer dan Welfgang Lehman, *Die Inland-Malaien von Lombok und Sumbawa*, Gettingen: "Muaster Schmidt" KG, Wissenschaftlicher Verlag, 1950, mengenai Manggarai, lihat J.W. Meerburg, "Proeve eener beschrijving van land en velk van Miden Manggarai (West-Flores), afdeeling Bima, Gouvernement Celebes en Onderhoordigheden", *Tijd*, 34, 1891, halaman 459. Bandingkan dengan Ch.Le Roux, "Impressions of the land and people of Flores", *Shuyter is Monthly East Indian Magazine*, 1920, halaman 446, atau P. Simon Buts, "Het Mahomedanisme op Flores", *De Katholieke Mission*, Agustus 1925, halaman 177.
2. F.W. Stapel, *Geschiedenis van Nederlandsch Indie*, Deel III, Amsterdam: N.V. Uitgeversmaatschappij "Joost van den Vondel", 1939 halaman 464.
3. Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka, A History of South Sulawesi (Celebes) in the seventeenth century country*, The Hague: Martinus Nijheff, 1981, halaman 45-72.

4. *Ibid.* halaman 73-99, 137-155, 208-227: 302.
5. *Ibid.*, halaman 156-207.
6. Helius Sjamsuddin, "Sumbawa: Hubungan antar pulau dan interaksi antar suku bangsa", *Komunikasi Antar Daerah Sukubangsa dan Pembauran*, Seminar Sejarah Lokal, IDSN, 1983, halaman 3-5.
7. *Hikayat Sang Bima* ini terdapat antara lain dalam Koleksi Held no. Or. 506 (a en b) di KITLV Leiden.
8. Helius Sjamsuddin, *op.cit.* halaman 5-6.
9. Istilah-istilah ini dari Robert Redfield, *Peasant Society and Culture. An Anthropological Approach to Civilization*, Chicago: The University of Chicago Press, 1958, hal. 70: 83.
10. Helius Sjamsuddin, *op.cit.* halaman 6-7.
11. *Lihat De Katholieke Mission*, 1925, halaman 177, Juga dapat dibaca P. Piet Heerkens, *Flores. De Manggarai*, Uden: Missiehuys, 1930. Juga lihat M. Hamerster, "Flores from East to West", *Inter-Ocean*, Vol. 8, No. 1, January, halaman 420.
12. Helius Sjamsuddin, *loc.cit.*
13. A. Ligetvoet, "Transcriptie van het dagboek der vorsten van Gowa en Tello, met vertaling en aantekeningen", *Tijd.* 1980. Adapun Kronik Bima terdapat seluruhnya dalam Koleksi. Held di KITLV Leiden, Oosterse Handschriften no. Or 506 (a en b). Semula Kronik Bima (BO Mbojo) ditulis dalam huruf Arab gundul (Jawi) dalam bahasa Melayu. Transkripsinya dibuat atas permintaan Prof. Held ketika ia mengadakan penelitian di Bima pada tahun 1955-1956. Selanjutnya yang kami maksudkan dengan Kronik Bima ini ialah Koleksi Held ini.
14. W. Ph. Coolhaas, "Bijdrage tot de kennis van het Manggaraische volk (West-Flores)", *TNAG*, 59, 1942, *halaman* 165.

15. Antara lain Karaeng Mandalle (1616), Karaeng Marowanggang (1618/1619), lihat Ligtveet, *op.cit.* halaman 87-93.
16. Or. 506 (a en b).
17. Andaya, *op.cit.* halaman 101. 103-105:
18. Coolhaas, *loc.cit.*
19. *Ibid.*
20. Or. 506 (a en b).
21. *Ibid.*
22. *Tjaritera Manggarai* terdapat di KITLV Leiden no. Or. 86.
23. Or. 56 (a en b).
24. H.B. Stapel, "Het Manggaraische volk (West-Flores). Een en ander over afkomst, geschiedenis, zeden en gewoenten, godsdienst, enz." *Tijd.* 56, 1914 halaman 149.
25. Le Roux, *op.cit.* halaman 446.
26. W. van Bakkum, "De machtsverschuivingen in Manggarai West Flores), tengevolge van de Geaneesche en Bimaneesche invleeden", *Cult. Indie*, 1946 halaman 124-124.
27. Hamerster, *op.cit.* halaman 418.
28. Or. 506. (a en b).
29. Periksa H. Zollinger, "Verslag van eene reis naar Bima en Soembawa en naar eenige plaatsen op Celebes, Saleijer en Floris, gedurende de maanden Mei tot December 1847", VBG, 13, 140, 1850. Mengenai daerah Bima di Manggarai periksa D.F. Van Braam Morris, "Nota van toelichting behoorende bij het contract gesloten met het landschap Bima op den 20 sten October 1886, aan de Regeering ingediend door den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden, *Tijd.* 34, 1890.
30. *Kolonial Verslag*, 1929-1939 halaman 27-28.
31. Or. 506. (a en b).

INTEGRASI : SEKADAR TINJAUAN KEBAHASAN DI SUMATERA UTARA

(Oleh: T.A. Ridwan)

Pendahuluan

Bahasa memainkan peranan yang sangat penting dan menentukan dalam kehidupan manusia. Kemungkinan disebabkan keadaan yang sudah familia dengan bahasa, manusia hampir-hampir tidak menyadari nilai, peran dan kedudukan hakiki dari bahasa. Bahasa begitu saja hadir dan berfungsi dalam kehidupan manusia, seperti layaknya kehadiran kaki, tangan atau nafas pada manusia. Padahal bentuk, aspek, unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa kadangkala sederhana namun dapat pula kompleks, pemilihan penggunaan kedudukan maupun fungsinya justru membedakan manusia dari seekor hewan.

Sungguh bukanlah merupakan sesuatu yang mudah dan sederhana untuk menarik suatu garis umum mengenai bentuk, unsur maupun ciri yang terdapat pada satu atau beberapa bahasa. Bloomfield umpamanya antara lain mengatakan satu-satunya generasi bermanfaat yang dapat ditarik adalah generalisasi induktif (1961:20).

Ciri-ciri yang dapat dikategorikan universal kemungkinan tidak terdapat pada sesuatu bahasa tertentu. Ciri-ciri seperti umpamanya, distingsi antara kata "mirip-kata-kerja" dengan kata "mirip-kata-benda" sebagai bagian yang terpisah dalam susunan jenis kata terdapat pada sebagian bahasa, karenanya bersifat universal. Tetapi ciri umum seperti ini tidak terdapat pada sebagian bahasa lainnya.

Fakta mengenai beberapa ciri kebahasaan sangat berguna dalam membuat catatan dan dalam memberikan penjelasan. Apabila telah terkumpul sebagian besar data mengenai seperangkat bahasa sebaiknya dilaksanakan orientasi kembali pada pokok permasalahan kebahasaan yang tercakup dalam problema gramatikal dalam arti luas, berusaha memperlihatkan dan menjelaskan korespondensi maupun divergensi, sehingga analisis kebahasaan akan mempunyai sifat induktif bukan spekulatif.

Pengkajian mengenai sesuatu bahasa pada taraf awal sering terasa agak sukar. Pendekatan saintifik terhadap bahasa maupun masalah-masalah kebahasaan kini telah membuktikan bentuk atau peninggalan lama, preskripsi dari ujaran, pembicaraan kurun waktu dan lain sebagainya. Pembicaraan mengenai kesusasteraan umpamanya tidak mungkin terpisah dari pembicaraan mengenai segi kebahasaan, dengan segala bentuk dan jenis metode, konsep dan teori pendekatan dan penganalisan.

Pembicaraan untuk mencari bentuk bahasa yang tepat, kurang tepat atau tidak tepat banyak kaitannya dengan masalah kemasyarakatan. Diskriminasi mengenai ucapan yang tepat atau elegan banyak ditentukan oleh kondisi sosial. Barangkali sudah tepat atau sampai waktunya untuk tercapainya kesepakatan bahwa bahasa jika tidak dipelajari secara teratur dan sekama bukanlah sesuatu yang terlalu mudah untuk tiba pada sasaran yang akan dicapai.

Dari sudut pandangan teoritis ciri-ciri kebahasaan seringkali mengandung kompleksitas. Variasi bahasa demikian luasnya, ada yang bersifat sistematis (variasi *internal*, yang merupa-

kan variasi dalam sistem bahasa itu sendiri, atau *eksternal*, sesuatu yang berhubungan dengan luar) demikian pula yang terdapat dalam bahasa itu sendiri. Penentuan variasi bahasa berdasarkan dasar geografis hasilnya adalah sebuah dialek, dasar sosial dikenal sebagai sisiolek, variasi individu dikenal sebagai idiolek, fungsional dengan hasil fungsiolek, keonologis dengan hasilnya kronolek, sedangkan berdasarkan diakronis/temporal dengan hasilnya tempolek.

Batasan mengenai kebudayaan sudah sering dibicarakan, ditulis, dibaca dan di dengar. Bahwa bahasa merupakan bagian dari kebudayaan atau sering pula disebut sebagai faktor dominan dari kebudayaan, haruslah benar-benar dipahami. Pembicaraan mengenai bahasa, bahkan hidup matinya atau maju-mundurnya atau berkembang atau statisnya sesuatu bahasa, mempunyai aspek yang pembicaraannya banyak berhubungan langsung dan terikat pada kebudayaan.

Dalam konteks komunikasi, kehidupan manusia dapat dilihat sebagai suatu spektrum yang luas dari kejadian-kejadian komunikasi. Memahami dengan cepat atau lambatnya suatu pesan "message" yang dikirimkan banyak tergantung pada perbedaan dan pemanfaatan waktu. Tinjauan psikologis dari seorang individu dalam kedudukan sosial atau kultural memperlihatkan kegunaan perhitungan waktu atau kultural memperlihatkan kegunaan perhitungan waktu atau pemahaman mengenai kejadian atau ketepatan maksud/tujuan pada waktu tertentu. Beberapa contoh dapat dikemukakan sebagai berikut.

Seorang suami pulang ke rumah setelah selesai bertugas di kantor. Karena sudah terlalu penat dan penuh dengan masalah berat dan pelik yang dihadapi, ia hanya mampu mengatakan pada sang isteri tercinta tidak lebih dari sepotong kata "hai". Perkataan yang tunggal dan pendek tersebut tidak sampai harus diinterpretasikan oleh sang isteri dengan hanya sebuah tutur sapa tanda telah kembali berada di rumah. Tetapi harus lebih luas pengertiannya, seperti tolong sediakan secangkir kopi

manis, tolong segera sediakan makanan, atau
tolong pijitkan bagian badan yang pegal-pegal karena lelah bekerja.

Contoh lain, ialah seorang pedagang menghubungi seseorang untuk mempromosikan barang dagangannya. Mesti tawarannya tidak akan demikian saja dapat disetujui atau dilakukannya pemesanan pada saat berakhirnya berkumandang kata-kata, ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang diujarkan. Persetujuan untuk menerima tawaran tersebut kemungkinan baru akan tercapai setelah melampaui beberapa waktu sesudahnya, dapat hari, minggu, bulan atau tahun.

Fakta di mana komunikasi dapat mempunyai efek dalam jangka waktu tertentu berhubungan erat dengan faktor atau situasi keragu-raguan, kejelasan maupun ketepatan seperti yang selalu diperhitungkan dalam keadaan "cross-culture". Bicara selanjutnya mengenai "cross-culture" dalam konteks kebahasaan harus pula turut diperhitungkan struktur dialektisasi "divergent structure" dan struktur de-dialektisasi "convergent structure".

Pengantar masalah kebahasaan di atas membawa kita pada pembicaraan mengenai keadaan di Sumatera Utara. Kotamadya Medan yang kini merupakan pusat kegiatan Provinsi Sumatera Utara dan provinsi yang bertetangga dengannya, merupakan pusat kegiatan dari Sumatera Timur sebelum perubahan administrasi setelah kemerdekaan Indonesia. pada waktunya Sumatera Timur dihuni oleh tiga suku bangsa "asli" yang dominan pada waktu itu yaitu Melayu, Karo dan Simalungun.

Dengan dibukanya perkebunan (sekitar tahun 1880?) mulailah berdatangan suku bangsa lainnya atau bangsa lainnya dari luar Sumatera Timur. Orang Cina datang (didatangkan?) mula sekali sebagai pekerja kasar (kuli), kemudian disusul pula oleh orang Jawa. Dengan semakin baiknya dan berhasilnya usaha perkebunan kemudian meningkat menjadi perdagangan, berdatanglah pula suku bangsa lainnya dari daerah-daerah

sekitar Sumatera Timur yang pada awal kedatangan mempunyai tujuan dan harapan yang berbeda. Orang Mandailing dari Tapanuli Selatan datang untuk bekerja sebagai pengawal istana pada kerajaan-kerajaan Melayu pada waktu itu, orang Batak Toba untuk bekerja sebagai juru tulis (klerk), dan orang Minangkabau sesuai dengan ciri khasnya untuk berdagang dari satu perkebunan ke perkebunan lainnya. Kedatangan yang mula-mula bersifat temporer kemudian diubah menjadi menetap. Barangkali inilah yang menjadi titik awal perkembangan Sumatera Timur (kemudian setelah digabungkan dengan Tapanuli menjadi Sumatera Utara) menuju heterogen.

Masalah kebahasaan pada dasarnya tidak merupakan hambatan atau gangguan sosial. Tidak pula terdapatnya bukti mengenai konflik sosial disebabkan masalah kebahasaan. Walaupun terdapat perbedaan ciri-ciri kebahasaan umpamanya dalam cara ucapan, gaya bahasa, intonasi dan lain-lainnya bahasa Melayu berperan sebagai bahasa pergaulan yang cukup efektif. Hubungan timbal balik yang terdapat sebelumnya, umpamanya antara Karo dan Melayu di Sumatera Timur dalam memperkaya bahasa berkembang di antara suku bangsa yang mendiami Sumatera Timur. (Contoh: kata *anak beru*, *semenda* dan lain-lainnya terdapat dan dipergunakan dalam acara adat pada suku bangsa Melayu dan Karo). Keharmonisan dalam pergaulan, dilandasi rasa persaudaraan, saling menghargai, dan saling menjunjung tinggi adat kebiasaan serta hak dan kewajiban masing-masing, mendukung keadaan di mana bahasa Melayu mampu berperan sebagai bahasa pergaulan dan salah satu unsur pemersatu.

Dalam ruang lingkup Sumatera Utara sekarang ini, dengan dilengkapi bahasa-bahasa daerah yang masih dipergunakan dan dipelihara oleh penduduk Sumatera Utara berasal dari daerah tetangga Sumatera Utara, demikian pula warga Sumatera Utara asal bangsa asing, Sumatera Utara mempunyai susunan bahasa daerah sesuai dengan dasar distingsi geografis sebagai berikut:

- a) Melayu
- b) Karo
- c) Simalungun
- d) Batak Toba
- e) Mandailing
- f) Pakpak/Dairi
- g) Pesisir Sibolga/Tapanuli Tengah
- h) Nias.

dengan berbagai variasi untuk masing-masingnya.—

Bahasa dan Budaya

Kedudukan dan peran bahasa dalam budaya tidak perlu diragukan lagi. Namun membicarakan hubungan antara bahasa dan budaya bukanlah sesuatu yang sederhana karena mengandung problematika, seperti apa yang dikatakan oleh Gumperz dan Hymes, (1972) antara lain :

"The relation betusen cultural categories and language is problematic a language services as a sort of metalanguage, a cultural way of communicating about much, but not all, of the culture. Thus, the modified question to what extent and in what ways is a language an index of its associated culture, should be of considerable interest".

Alat yang paling penting dan kerap digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi adalah bahasa. Hal ini bukan berarti bahwa alat-alat lainnya tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam berkomunikasi seperti lambaian, siulan, tepukan, atau isyarat lainnya, namun komunikasi demikian tidaklah begitu lengkap dan sempurna untuk semua keperluan dan tujuan komunikasi.

Alat komunikasi yang terpenting ini bukanlah suatu fenomena yang asal jadi saja, sebaliknya harus dipelajari dan dikuasai untuk mengisi dan memenuhi keperluan sehari-hari. Mempelajari atau menguasai suatu bahasa itu bukanlah dengan hanya

menguasai tata bahasanya saja, tetapi jauh lebih kompleks karena turut melibatkan soal-soal "luar-bahasa" (extra-linguistic). Hal-hal seperti latar belakang kebudayaan demikian pula sejarah pribadi mencerminkan pentingnya peranannya dalam penggunaan bahasa.

Kebudayaan sesuatu masyarakat sangat erat hubungannya dengan bahasa yang dipergunakan penutur. Malahan ada yang berpendapat di dalam sesuatu bahasa akan terjalin dan terpaparnya suatu organisasi fenomena kelakuan ("patterns of behaviour") kebendaan, ide (kepercayaan dan pengetahuan) serta sikap dan norma ("sentiments") sesuatu masyarakat (White, 1949). Kenyataan ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa lebih merupakan suatu *communion* perhubungan antara pribadi dan nilai-nilai sosial budaya. Koentjaraningrat (1975: 2-7) antara lain mengatakan bahwa bahasa yang mengkonsepsikan ke dalam lambang-lambang yang berwujud nyata seluruh isi dari alam fikiran manusia merupakan satu unsur sokoguru dalam tiap kebudayaan.

Malahan ada ahli yang berpendapat atau lebih cenderung mengapresiasi keaslian dan perkembangan sesuatu kebudayaan itu di atas aspek bahasa, yakni dengan menggunakan bahasa sebagai pencerminan pengkajian kebudayaan.

Setiap kelompok manusia mempunyai kebudayaan, maksudnya cara hidup yang diamalkan dan diwarisi dari satu generasi lainnya. Sesuatu konsep atau cara hidup dalam sesuatu kelompok masyarakat dapat didukung oleh kata, ungkapan dan lain-lain dalam bahasa. Jika tidak, komunikasi di antara individu dalam masyarakat tidak akan lancar atau akan terganggu, yang mengakibatkan terhalangnya aktivitas masyarakat tersebut.

Hubungan yang terjalin erat antara bahasa dan budaya dapat pula tercermin pada kata-kata yang dipergunakan oleh masyarakat penutur bahasa. Hal tercermin umpamanya dalam sistem kekerabatan terdapatnya seperangkat kosa kata yang mungkin hanya terdapat dalam masyarakat tertentu saja dan belum

tentu sama dengan yang terdapat pada kelompok masyarakat penutur bahasa lainnya.

Dalam masyarakat penutur bahasa Inggeris umpamanya terdapat kata-kata atau istilah-istilah kekerabatan seperti: *son, daughter, sister, mother, father*. Dalam masyarakat penutur bahasa ini penambahan *younger* atau *eldest* umpamanya pada kata *son* hanyalah untuk menunjukkan derajat menurut usia, namun dalam susunan adat kebiasaan tidak terlalu malahan tidak dibedakan yang termuda dan tertua.

Dalam masyarakat Melayu Pesisir Timur Sumatera sistem kekerabatan membedakan pula kedudukan hirarki dalam susunan maupun tata cara adat istiadat. Urutan usia yang langsung berkaitan dengan kedudukan dalam adat istiadat ditandai dengan kata-kata: *sulung* (tertua), *ngah* (=tengah), *bungsu* atau *ou* atau *cik* (=termuda). Putra-putra dalam keluarga sering disebut dengan *si ulung, si ngah, si ucu*, atau *si cok*. Dalam keluarga bangsawan yang memakai derajat kebangsawanan *tengku*, mempergunakan panggilan *ku, cu, ku, ngah*, dan *ku lung*. Sistem yang sama dapat berlaku untuk kata kekerabatan lainnya seperti untuk *nenek(nek)*, *atok* (untuk nenek atau kakek) dalam keluarga istana) dan lain-lainnya.

Dalam masyarakat penutur bahasa Melayu kata penunjuk jenis laki dan perempuan (*jantan* dan *betina*) mempunyai variasi penggunaan menurut kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Pada umumnya untuk anak jarang dibedakan antara laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan pada masyarakat Melayu umumnya yang dipentingkan adalah anak, kurang dipersoalkan apakah laki atau perempuan. Hal ini berbeda dengan masyarakat penutur bahasa Arab (Ingat: masyarakat Melayu dalam adat dan kebiasaannya banyak dipengaruhi oleh Arab) di mana terdapat kata *binton* untuk anak perempuan dan *ibnun* untuk anak laki-laki. Pembedaan ini dalam masyarakat penutur bahasa Arab mempunyai latarbelakang sejarah, di mana pada zaman jahilliah anak laki-laki dipandang lebih mulia dan dike-

hendaki, dari pada anak perempuan yang selalu dipandang sebagai tanda-tanda bahaya atau sial.

Hal-hal di atas membuktikan bahwa terdapatnya hubungan kausalitas antara leksikon yang digunakan dengan kebudayaan masyarakat penutur bahasa. Leksikon yang digunakan dapat menggambarkan kebudayaan atau sebagian dari aspek kebudayaan masyarakat penutur bahasa tertentu.

Leksikon bukan hanya dapat digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek kebudayaan, malahan susunan kata di dalam sesuatu bahasa pun dapat juga menggambarkan pandangan atau sikap masyarakat. Masyarakat penutur bahasa Inggris umpamanya memulai sesuatu pidato dengan *Ladies and gentlemen*, sedangkan masyarakat penutur bahasa Indonesia memulai dengan *Bapak-bapak* dan *Ibu-ibu*.

Penggunaan susunan dengan urutan serupa ini umpamanya oleh masyarakat penutur bahasa Indonesia, walaupun kemungkinan suatu ekspresi dari pencerminan adat kebiasaan, jika kurang hati-hati dapat menimbulkan interpretasi yang salah bahwa di Indonesia laki-laki dipandang lebih tinggi dan mulia dari wanita, dan sebagainya. Susunan dan urutan serupa ini sering pula tidak sama dalam keadaan lainnya. Sebagai contoh adalah *ibu-bapak* (orang tua), tetapi dalam *suami-isteri* kembali susunan dan urutan pertama:

Urutan pertama untuk jenis kata jantan sebelum diikuti dengan kata jenis betina dalam masyarakat penutur bahasa Melayu, seperti kata *Tuan-tuan* dan *encik-encik*, paralel dengan adat dan kebiasaan. Dapat diberikan dua buah contoh sebagai berikut:

- a. Duduk di pelaminan, laki-laki selamanya berada di sebelah kanan, sedangkan perempuan berada di sebelah kirinya. Hal ini demikian pula keadaannya dalam berjalan.
- b. Dalam suasana *nasi hadapan*, (acara makan bersama pada hari bersanding) pengantin perempuan menyampaikan (BM: *menyulangkan*) makanan ke mulut pengantin lelaki.

Berarti lelaki harus lebih dahulu merasakan yang lezat barulah kemudian perempuan.

Kata-kata ataupun konsep yang didukung oleh sesuatu kata itu tidak selamanya kekal dan abadi atau statis. Ada kata yang hilang atau lenyap dari perbendaharaan sesuatu benda. Keadaan ini berlaku apabila kebudayaan masyarakat itu berubah ataupun berkembang, atau beberapa kata yang terdapat di dalam bahasa itu tidak lagi dapat berfungsi memenuhi tuntutan kebudayaan dengan lain kata, tidak lagi dapat mendukung konsep yang hendak disampaikan.

Di dalam masyarakat Melayu, terutama dalam menyambut tamu yang dihormati, sering tadinya dihidangkan makanan atau minuman seperti *kekaras*, *lempeng*, *torak*, *lenggenang*, *peniaran*, *tumpur janda*, *dadih* (susu lembu yang diasamkan sejenis *yogurt*). Mungkin karena sudah hampir tidak ada lagi orang yang trampil membuat makanan lezat-bestari seperti: *kekaras*, *lempeng*, *torak*, *lenggenang*, *peniaran* dan *tumpur janda*. bersamaan dengan itu mulailah pula menghilang kata-kata tersebut dari perbendaharaan kata khazanah budaya bangsa dan negara Indonesia.

Kasus serupa ini tidak pula berarti bahwa setiap perubahan atau perkembangan kebudayaan sesuatu bangsa itu menyebabkan sirnanya semua daftar kata yang mendukung konsep yang sudah tidak ada lagi. Dalam keadaan tertentu kata-kata itu dikekalkan, hanya konsep yang didukungnya harus disesuaikan dengan kehendak kebudayaan. Dalam masyarakat Melayu, misalnya terdapat kata-kata lama yang telah mengalami perubahan konsep sesuai dengan perkembangan maupun perubahan kebudayaan. Sebagai contoh: dalam masyarakat Melayu dahulu yang masih mempunyai bentuk pemerintahan kerajaan frekuensi pemakaian kata-kata seperti *patik*, *ayapan* (makan), *santap* (makan), *gering* (sakit untuk raja atau keluarga raja), dan sebagainya sangat tinggi frekuensi pemakaiannya.

Dalam situasi dan kondisi sekarang, frekuensi pemakaian menurun, dan hanya ada atau terdengar pada kelompok tertentu.

tu itupun hanya atas dasar adat-istiadat pada kelompok tersebut. Dengan tidak bermaksud untuk membangkitkan feodalisme kembali dalam alam sekarang ini kata-kata tersebut perlu dicatat dan teliti, karena bagaimana pun kata-kata tersebut merupakan bagian dari khazanah budaya bangsa.

Selain merupakan pencerminan sesuatu kebudayaan, bahasa dapat juga berfungsi sebagai transmisi kebudayaan. Aspek-aspek sesuatu kebudayaan itu harus dilestarikan dari satu generasi ke generasi lain. Konsep-konsep yang ada di dalam sesuatu kebudayaan harus diwariskan kepada generasi pendatang. Bahasa adalah alat yang penting yang dapat digunakan. Antara bahasa dan kebudayaan itu terwujud satu pertalian yang sangat erat.

1. Bahasa dan Tatalaku Pemutur

Bagian ini berusaha memperbincangkan hubungan antara bahasa, kebudayaan dan pemikiran. Dapat diambil sebagai hipotesis bahwa antara bahasa dengan kebudayaan dan pemikiran terdapat hubungan secara timbal balik.

a. Bahasa martabat, dan harkat bangsa

Ungkapan dalam bahasa Indonesia yang berbunyi "Bahasa menunjukkan bangsa" seyogianya diartikan "budi bahasa yang halus alamat orang baik, dan perangai serta tutur kata yang tidak senonoh menunjukkan asal bukan bangsawan" (K. St. Pamuncak, dkk. 1961 : 52). Dengan kata lain, bahasa dapat mencerminkan tingkah-laku dan budi pekerti seseorang. Orang yang tutur katanya lemah lembut, sopan dan santun, menggambarkan tingkah laku dan pribadi baik. Sebaliknya orang yang bicaranya kasar, tanpa sopan-santun, menggambarkan pribadinya yang kasar atau kurang beradab. Orang yang bertutur kata selalu tidak tentu arah, berubah-ubah menunjukkan pula sifatnya yang berubah-ubah dan kurang dapat dipercaya.

Sampai batas kurun waktu tertentu ungkapan ini dapat dipertahankan kebenarannya. Tetapi dalam masyarakat modern

dewasa ini kurang lagi seratus perseratus benar. Kita sering menjumpai orang-orang yang tutur katanya lemah-lembut, sopan dan santun, tetapi ternyata dia adalah seorang penipu. Sifat sopan-santun dan lemah-lembut : digunakannya sebagai penutup untuk melakukan sesuatu kejahatan atau tindakan tercela.

Fungsi utama bahasa di dalam masyarakat adalah sebagai alat interaksi sosial. Bahasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan budaya manusia, karena antara bahasa dan budaya ada semacam hubungan timbal balik. Bahasa merupakan salah satu hasil budaya manusia, sedangkan budaya manusia banyak yang dipengaruhi oleh bahasa. Sejarah bahasa memang telah mengemukakan adanya dua pandangan atau pendapat yang saling bertentangan (lihat selanjutnya hipotesis Sapir Whorf).

Pandangan Sapir Whorf tentang ketergantungan kebudayaan pada bahasa adalah pandangan yang kontroversial, dan pada sekitar tahun-tahun lima puluhan banyak menarik perhatian sarjana dalam berbagai bidang. Pandangan ini kini memang sudah banyak ditinggalkan orang, walaupun masih banyak dibicarakan orang.

Pandangan lainnya, dan yang nampaknya lebih dapat diterima, adalah kebalikan dari pada hipotesis Sapir Whorf. Pandangan kedua ini menyatakan bahwa kebudayaan atau masyarakatlah yang justru mempengaruhi bahasa. Pandangan inilah yang pada gilirannya kemudian melahirkan konsep bahwa bahasa merupakan cermin masyarakat penggunaannya.

Dengan kata, kebudayaan sesuatu masyarakat tercermin di dalam bahasanya. Kita lihat, misalnya, dalam kebudayaan Inggris (dan kebudayaan Eropa) hubungan kekerabatan di antara orang-orang yang dilahirkan oleh ibu yang sama dilihat dari jenis kelaminnya, sehingga di dalam leksikon bahasa Inggris kita temui istilah *brother* "saudara laki-laki", dan *sister* "saudara perempuan". Tetapi di dalam masyarakat Indonesia hubungan kekerabatan itu dilihat dari usia, sehingga di dalam sistem leksikon Indonesia yang ada adalah istilah

kakak "saudara yang lebih tua" dan *adik* "saudara yang lebih muda". Tetapi dalam leksikon Melayu Istana, kemungkinan karena diwarnai oleh budaya Arab pada kerajaan Melayu di Indonesia, dibedakan saudara tua dengan jenis kelamin: *akang* (untuk perempuan) dan *aban* (untuk lelaki).

Pengaruh bahasa terhadap kebudayaan atau sebaliknya, dapat diambil sebagai contoh dalam hubungan dengan masalah *tabu*. Umpamanya pantang menyebut *harimau* terutama jika berada di pinggir atau di dalam rimba, dan menukarnya dengan nenek atau *datu*. Pada sebagian orang Melayu dianggap agak pantang atau kurang terhormat menyebut nama suami oleh isteri, dan menukarnya dengan kata *dia*.

2. Masyarakat dan Variasi Bahasa

Keanekaragaman masyarakat menghasilkan pula keanekaragaman bahasa. Harimurti Kridalaksana menegaskan bahwa variabel-variabel bahasa adalah sebagai cermin struktur sosial, (1982:12). Dalam penggunaan bahasa daerah sesama penutur bahasa daerah tertentu adalah hal yang wajar hampir keseluruhan kosa kata maupun kaidah bahasa daerah tertentu yang diacu.

Dalam kasus seperti sering terdapat di daerah Sumatera Utara khususnya di Kota Medan terjadi beberapa hal yang tidak mudah dielakkan.

Dalam percakapan, dan tidak jarang pula dalam bentuk bahasa tulis, yang menggunakan bahasa Indonesia, pengaruh bahasa daerah masih sering terjadi. Sebagai contoh ialah kata *cakap*, yang dalam kata dasarnya (*cakap*) berbeda artinya dengan bentuk kata kerja *bercakap-cakap* (berbicara). Penutur bahasa Melayu tidak jarang mengatakan "tak boleh (*ber*) *cakap* demikian" malahan "usah cakap begitu" sekalipun dalam situasi komunikasi bahasa Indonesia, sebagai akibat pengaruh bahasa daerah. Penutur bahasa Melayu sering secara tidak sadar mengucapkan lemari dengan /lembali/ di mana /b/ terucap di antara /m) dan /a/.

Pembauran Bahasa, Integrasi, Sosialisasi

1. *Pembauran Bahasa: Proses Sosialisasi*

Setiap individu sejak lahir berada dalam kelompok di mana ia hidup, dibesarkan dan berkembang. Setelah seseorang dewasa melalui pergaulan, sering kali berada di luar kelompoknya sendiri, lingkungan akan banyak mempengaruhinya. Kelompok selain mempunyai bentuk, ciri, identitas tersendiri, juga mempunyai bahasa "asuhan kelompok". Apabila seseorang hidup dan berada dalam kelompok bahasa yang dipergunakan dan berkembang adalah bahasa dari kelompoknya. Keberadaannya di luar kelompok katakanlah disebabkan keperluan pendidikan atau pekerjaan, mengharuskan individu tersebut mempelajari, mengetahui dan kemudian mempergunakan bahasa di luar kelompok bahasa "awalnya".

Dari sudut pandangan linguistik perbandingan situasi di mana terjadi hubungan antara dua bahasa atau lebih, bahasa sumber dan bahasa sasaran disebut kontak bahasa ('languages in contact'). Dalam konteks Sumatera Utara kontak bahasa sering menyebabkan terjadinya interferensi bahasa itu ('mother tongue interfenrence') terhadap bahasa sasaran, umpamanya kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam bahasa daerah terbawa ke dalam penggunaan bahasa Indonesia. Keadaan sejenis ini berlumlah seberat masalah di mana terdapatnya masih anggota masyarakat bangsa Indonesia, terutama asal asing, yang masih sukar berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, walau dalam urutan kemampuan berbahasa pada tingkat sederhana sekali pun. Untuk kelompok semacam ini yang diperlukan bukanlah pemantapan bahasa tapi suatu proses sosialisasi menuju pembauran bahasa.

Seperti juga dalam budaya, proses sosialisasi bahasa seharusnya melalui interaksi sosial, hubungan antarmanusia bangsa Indonesia pemilik bahasa Indonesia, sehingga diharapkan akan terjadi proses saling mempengaruhi. Kesadaran berbahasa Indonesia harusnya terbina melalui sistem perilaku ('behaviour

system”), sistem pembentukan kebiasaan (‘habit forming”), dimana akhirnya akan membentuk watak dan sikap (‘attitude”) terhadap penggunaan, pemasyarakatan dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia yang sekaligus terhadap nilai dan aspek budaya bangsa.

Interaksi di antara individu-individu dalam kelompok maupun antar kelompok akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Proses sosialisasi akan menyebabkan perubahan struktur, perilaku, sikap dan watak sebagai hasil dari komunikasi dan saling mempengaruhi di antara individu maupun kelompok yang mempunyai peran dan kedudukan yang menentukan tercapainya keberhasilan. Keberhasilan dalam aspek kebahasaan akan menyebabkan deklamasi hambatan kesukuan, kedaerahan, rasa “aneh” terhadap bukan “asli” bangsa Indonesia dan lain-lainnya yang akan mempercepat pembauran dan penuh rasa tanggungjawab berbangsa satu.

Tercapainya kesepakatan mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bukanlah sesuatu yang dipahami atau diinterpretasikan secara sederhana. Kesepakatan tersebut mempunyai nilai hakiki menuju kesatuan bangsa yang benar-benar utuh dan murni. Kesepakatan tersebut tidak pula boleh diartikan bahwa bahasa-bahasa daerah harus dihapuskan karena eksistensi dan pemeliharaan bahasa-bahasa tersebut dijamin sepenuhnya oleh Undang-undang Dasar 1945. Penggunaan bahasa yang dimiliki sebelumnya oleh sebagian anggota masyarakat bangsa Indonesia harus diberikan kedudukan dan prioritas utama. Kesepakatan Nasional mengenai bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu juga dimaksudkan untuk peningkatan solidaritas nasional pembinaan hubungan yang erat dan menghindarkan konflik yang dapat mengganggu integrasi sosial. Integrasi sosial akan lebih lancar tercapai dengan kecilnya frekuensi konflik, atau sebaliknya.

Pencapaian sasaran pembauran sewajarnya didukung oleh usaha bersama secara sadar dan penuh rasa tanggungjawab

untuk menghindarkan konflik antarkelompok ("in-group conflict") dalam masyarakat Indonesia dalam rangka pembinaan solidaritas antar kelompok ("in-group solidarity").

Keberhasilan pembauran bangsa ditentukan oleh banyak faktor pendukung, seperti fase dalam proses integrasi (akomodasi, kerja sama, koordinasi, asimilasi), toleransi, perhitungan jarak sosial subyektif, kondisi dan konvergensi interaksi, kesadaran, kontrol sosial dan sebagainya. Proses sosialisasi menjurus kepada proses belajar dan penyesuaian diri mengenai cara hidup dan berpikir agar dapat berfungsi dalam kelompok (Susanto, 1983:104-119). Kedua proses tersebut diperlukan dalam usaha pencapaian sasaran pembauran.

2. Bahasa dan Tanggungjawab

a. Dasar dan landasan

Bahasa adalah bagian dari kebudayaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki dan menjunjung tinggi kebudayaan yang merupakan milik bersama dan mempunyai nilai leluhur dan hakiki.

Disebabkan bahasa adalah alat penting untuk komunikasi pemeliharaan, penyebaran, serta peningkatan aspek dan nilai-nilai hakiki dari budaya bangsa, maka bahasa sering disebutkan sebagai faktor dominan dari kebudayaan. Nilai-nilai dan eksistensi bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah merupakan bagian budaya bangsa, karenanya harus merupakan tugas bersama bangsa Indonesia untuk memelihara, mengembangkan, dan meningkatkannya bersama keluarga.

Bahasa atau bahasa-bahasa Indonesia yang berada di luar kelompok ini tidak dapat dipungkiri adalah bahasa asing. Bangsa Indonesia dari mana pun asal suku bangsa ataupun kelompok-kelompok etnisnya, haruslah menyadari sepenuhnya akan situasi dan kondisi kebahasaan ini. Pemerintah dan bangsa Indonesia cukup memberikan tempat yang luas bagi bahasa asing, hanya dengan satu ketentuan: tidak sampai merusak bu-

daya bangsa, di mana penerimaan bahasa asing hanyalah sebagai alat untuk memperkenalkan budaya nasional dan aspirasi serta cita-cita rakyat Indonesia, serta alat dalam perubahan teknologi.

b. Sikap bahasa masyarakat asal Asing

Bagian ini mencoba mengetengahkan sikap berbahasa, berbahasa Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah keluar sendiri yang sering pula tercermin dalam sikap ("attitude, habit") sehari-hari oleh sebagian kelompok "tidak asli" yang ada khususnya di Sumatera Utara. hal ini dikemukakan sama sekali bukan dengan tujuan menimbulkan hal-hal yang negatif tetapi suatu ajakan untuk kesadaran bersama dalam memelihara budaya bangsa dan bagian-bagiannya. Menjadi warga negara Indonesia bukan hanya wajar menuntut haknya, tetapi terlebih lagi melakukan kewajibannya. Dikatakan khusus Sumatera Utara, karena sikap kebahasaan yang dikemukakan di sini terjadi di Sumatera Utara tidak di Pulau Jawa, kalau pun umpamanya ada di Jakarta kalau diselusuri dilakukan oleh kelompok dimaksud yang berasal dari Sumatera Utara.

Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan pribadi manusia Indonesia haruslah benar-benar menunjukkan nilai-nilai hidup dan makna kesusilaan yang dijiwai Pancasila. Sedangkan kebudayaan itu sendiri harus merupakan penghayat nilai-nilai yang luhur sehingga tidak dapat dipisahkan dari manusia budaya Indonesia sebagai pendukungnya.

Warga Negara Indonesia dari suku bangsa ataupun kelompok etnis manapun asalnya haruslah mempunyai tiada pilihan lain, selain mempunyai sikap kebebasan yang mencerminkan dan mengutamakan nilai-nilai luhur milik bangsa dan negara Indonesia. Hal ini seharusnya terbiasa sejak kecil di tengah-tengah keluarga masing-masing untuk kemudian terbiasa di luar lingkungan keluarga asal diri. Dari teori ilmu mendidik dipercayai hipotesis yang mengatakan sesuatu yang baik dapat dimulai sejak masa kanak-kanak. Katakanlah dalam sikap keba-

hasaan dengan menggunakan bahasa Indonesia, sebagai bahasa persatuan yang dimulai dan dibiasakan sejak kecil di tengah-tengah keluarga, akan merupakan dasar yang kuat untuk rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya bangsa. Jika hal ini sudah terbiasa sejak kecil pada tingkat kehidupan dan kedewasaan selanjutnya akan terasa aneh dan asing apabila mendengar sesuatu dalam bahasa di luar bahasa ibu yang sudah didengar dan dimulai dikuasai sejak masa kanak-kanak dan akan menyebabkan bahasa yang datang kemudian sebagai bahasa asing bukan sebaliknya. Demikian pula hubungan sesama anggota keluarga sendiri atau dalam kalangan yang lebih luas baik dalam bentuk dan gaya seperti beku ("frozen style"), resmi ("formal style") usaha ("Consultative Style"), santai ("casual style") atau akrab ("intimate style") akan terasa mesra, akrab dan lancar jika berada dalam suasana bahasa Indonesia.

Seperti dikatakan sebelumnya bahasa adalah bagian dominan dari kebudayaan. Rasa dan tanggungjawab berbudaya Indonesia antaranya dapat tercermin dari kebiasaan penggunaan bahasa Indonesia. Pembinaan kebiasaan dan ketrampilan berbahasa Indonesia sudah seharusnya sejak awal, sejak seseorang dapat memahami, mengirim dan membalas kode. Pembentukan kebiasaan ("habit forming") akan sangat terlambat apabila baru dimulai pada tingkat usia sekolah.

Kebiasaan yang tidak terbina sejak dari awal dalam hubungan kelompok keluarga inilah yang menyebabkan terjadinya "keanehan" pada sementara warga negara Indonesia turunan Cina di daerah Sumatera Utara. Dibandingkan dengan WNI turunan Cina yang lahir di Pulau Jawa terlihat situasi yang berbeda. Pada umumnya mereka ini sudah benar-benar seresam dengan adat dan kebiasaan di Pulau Jawa. Mereka ini kalau tidak melihat wajahnya dari bunyi suara bertutur kata dalam bahasa Indonesia tidak memperdengarkan identitas "leluhur" malahan seakan berbahasa Indonesia berlatarbelakang bahasa Jawa.

Sebagai contoh dari sudut perbendaharaan kata sekali pun maupun bentuk ajaran yang paling sukar, kelompok ini di Pulau Jawa tidak berbeda dengan penutur asli bahasa Jawa.

Bagaimana keadaan di Sumatera Utara, khususnya Kota-madya Medan, Pematang Siantar dan Tebing Tinggi? Proses pembauran melalui kebahasaan baru sampai tingkat aktivitas sepihak yaitu dari pemerintah. Jadi belum lagi merupakan partisipasi, kesadaran dan praktek nyata di kalangan yang berada dalam proses pembauran ini. Hal ini terutama jika diteliti dari sudut memulainya penggunaan bahasa Indonesia sejak masa kanak-kanak atau di mana tidak ada seorangpun penutur asli bahasa Indonesia artinya di antara sesama keluarga atau kelompok WNI turunan Cina.

Kejadian seperti ini sesungguhnya tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Integrasi budaya melalui pembauran dari sudut bahasa adalah untuk tercapainya persaudaraan, kekerabatan, rasa berbudaya dan berbahasa satu dan menghapuskan rasa saling curiga sesama maupun konflik sosial. Anekdote-anekdot terhadap kelompok ini yang telah ada sejak lama masih tetap disampaikan sewaktu-waktu. Hal ini membuktikan masih adanya sikap "terpisah" antara orang Indonesia "asli" dengan "tidak asli". Dikemukakan di sini beberapa contoh anekdot sebagai berikut :

- (a). Diceritakan seorang apek memasuki sebuah kampung. Dengan lidah yang kaku dia bertanya pada sekelompok pemuda di sana "*Atak, kipala kampung?*" (Maksudnya tidak lain bertanya *Apakah ada kepala kampung* (=lurah). Walaupun para pemuda di sana sesungguhnya ingin membantu tetapi disebabkan terjadinya interferensi fonologis, sang apek menerima jawaban dari pemuda di sana "*Si Atak kepala kampung sudah berhenti, dan sekarang digantikan oleh Si Amat*".
- (b). Berkumandang pula sebuah cerita di mana seorang baba berjualan di kampung yang mayoritas penduduknya adalah

orang Melayu. Orang Melayu karena sifatnya suka menetap, tidak berpindah-pindah, *mengampung*, sering disebut dengan *orang kampung*. Sang Baba dalam menjajakan jualannya menyerukan berulang kali "*Ulang kambung, bilanak kapiting*". Sekelompok orang Melayu yang mempunyai sifat agak mudah tersinggung mendengar ini dan mengira si Baba memperolok-olokan orang Melayu, karena mengira sang Baba mengatakan "Orang kampung (=Melayu) beranak kepiting", dan tanpa usul periksa menghajar sang Baba sambil mengatakan "Kalau orang kampung beranak kepiting, orang Cina beranak apa? Untunglah hal ini dapat segera diselesaikan, karena sesungguhnya yang dimaksud sang Baba tidak adalah *Udang*, *kembung* (=sejenis ikan), *belanak* (sejenis ikan) dan *kepiting*.

Kekuranghati-hatian dalam pengucapan apalagi penggunaan kata dapat menyebabkan ketergantungan harmonisasi dalam hubungan antarkelompok. Sebagai contoh pemakaian kata *lu*, *gua*, pada sementara anggota masyarakat di Sumatera Utara dianggap janggal malahan kurang sopan.

Contoh-contoh di atas dikemukakan untuk memperlihatkan bahwa hal yang sederhana sekali pun dapat merupakan faktor penghambat atau penghalang dalam pencapaian tujuan integrasi, malahan kalau tidak berhati-hati banyak faktor kecil yang menimbulkan konflik sosial. Pembauran dan pencapaian kerukunan serta stabilitas kelompok dan antarkelompok mempunyai ketergantungan pada banyak faktor.

IV. PENUTUP

Pembangunan dalam bidang kebudayaan antara lain mempunyai sasaran untuk pembentukan watak dan kepribadian bangsa Indonesia. Watak dan kepribadian yang merupakan sasaran adalah yang mempunyai nilai-nilai hakiki leluhur bangsa Indonesia.

Pembentukan watak dan kepribadian bangsa juga mencakup rasa tanggungjawab dan cinta terhadap budaya sendiri. Proses pembentukan ini menghendaki pembentukan watak, sikap, kebiasaan dan lain-lainnya. Pembentukan atau proses pembentukan melalui proses sosialisasi, integrasi dan pembauran mempunyai banyak faktor, demikian pula usaha seperti proses belajar-mengajar, adaptasi terhadap lingkungan dan keadaan, pengalaman dan evaluasi berdasarkan satu pengalaman ke pengalaman lainnya, kesadaran, kerjasama dan saling pengertian. Berhasil tidaknya usaha, lambat-cepatnya tercapai sasaran antaranya juga tergantung pada keberhasilan penghindaran konflik, di mana kontrol sosial diharapkan berperan dengan baik dan sempurna.

Rasa cinta dan tanggung-jawab terhadap bahasa persatuan, sebagai bagian dari budaya bangsa, haruslah melalui metode dan teknik pengajaran bahasa, namun harus pula memperhitungkan dan mempelajari aspek-aspek luar bahasa.

Proses pembauran melalui segi dan peranan bahasa juga memerlukan pengetahuan mengenai manusia. Hidup manusia akan terasa bermanfaat bagi dirinya sendiri atau bagi sesamanya, demikian hubungan dalam kelompok atau antar-kelompok, apabila dilandasi oleh faktor kejujuran. Sering kali kejujuran berakibat pengorbanan, karena kejujuran sering memintakan seseorang untuk mengorbankan kepentingan sendiri.

Dari segi bahasa, kejujuran harus dilandasi awal dengan pengertian bahwa bahasa sebagai alat komunikasi haruslah mudah dimengerti dan difahami, sederhana dan tidak kompleks. Bahasa sebagai alat komunikasi haruslah berdaya guna dan berhasil guna. Ketidakkompleksan bukanlah berarti bahwa dalam bahasa tidak diperlukan kaidah-kaidah bahasa. Kejujuran dalam bahasa berarti kita mengikuti aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang baik dan benar. Pemakaian kata-kata yang kabur dan tak terarah, serta penggunaan kalimat yang berbelit-belit adalah jalan untuk mengundang ketidakjujuran (Keraf, 1984: 113).

Pembauran melalui jalur bahasa tidak bermaksud untuk menghilangkan eksistensi bahasa-bahasa daerah maupun bahasa dari warga negara asal bangsa asing. Namun pada tingkat pema-hiran bahasa persatuan adalah wajar bila mendahulukan bahasa persatuan dalam komunikasi terutama dalam kelompok berba-gai penutur bahasa daerah/asing. Dalam pembentukan watak dan kebiasaan berbahasa Indonesia untuk warga negara asal asing adalah wajar, apabila dimulai pada tingkat sedini mungkin, walaupun dalam lingkungan keluarga sendiri.

Bahasa yang efektif sesungguhnya tidak akan berbentuk statis. Perubahan dan pertumbuhan berjalan terus dari waktu ke waktu, baik disebabkan faktor pengaruh lingkungan, kontak dan kebutuhan. Perubahan terjadi dari waktu ke waktu dan ti-dak mungkin dicegah disebabkan pula banyak faktor seperti kebutuhan teknologi, kekayaan budaya dan lain-lain yang me-latarbelakangi bahasa itu sendiri.

Seperti halnya persyaratan terhadap keberhasilan integrasi sosial, pembinaan memerlukan tidak terdapatnya konflik dalam hal ini konflik bahasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bloomfield, Leonard, 1961. *Language*, New York: Holt-Rinehart Winston Inc.
- Gumperz, J. & Hymes, Dell, 1977. *Direktion in Socio-linguistice*
New York : Mouton.
- Koentjaraningrat. 1974. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara
Pura
- Kridalaksana, Harimurti. 1912. *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*.
Ende : Nusa Indah
- Keraf, Gorya, 1984 *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: P.T. Gramedia
- Nababag, Dr, P.W.J. *Sosiolinguistik Selayang Pandang*. Jakarta
IKIP Negeri
- Ridwan, T.A. 1975 *A Contrastive Study between Bahasa Indonesia and Australian English Phonetics and Orthography*.
Melbourne : Monsh University
- 1976. *An Introduction to Linguistics*. Medan: Universitas Sumatera Utara
- 1981. *Language and Culture : With particular-stress on Melayu speakers in North Sumatra*. Hamburg : Universitair Hamburg
- Susanto, Dr. Phil, Astrid. S. 1983. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Penerbit Binacipta
- Weinreich, U. 1968. *Languages in Contact*. The Hague : Mouton.

CORAK INTERAKSI ANTARETNIS DALAM BIDANG EKONOMI DI MEDAN : KASUS TERSISIHNYA ORANG MELAYU

(Oleh : Nani Rusmini)

Pendahuluan

Pluralisme budaya dan masyarakat majemuk merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa. Hal ini terutama nampak dalam kehidupan masyarakat di kota-kota besar di Indonesia. Sikap pluralis dalam masyarakat perkotaan bagaimana pun akan turut menentukan corak interaksi antaretnis yang ada di kota tersebut.

Khususnya dalam bidang ekonomi, corak interaksi antar-etnis tidak selamanya menghasilkan harmoni dalam bentuk keeksistensi damai, selalu saja timbul kemungkinan adanya persaingan, saling mendesak atau saling menaklukkan di antara etnis yang ada. Persaingan seperti ini pada akhirnya akan menghasilkan kelompok etnis tertentu yang terdesak atau merasa didesak oleh etnis yang lain.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menimbulkan problematik dalam rangka proses integrasi nasional, maka

perlu dicari kecenderungan persaingan dalam bidang ekonomi antar-etnis di kota besar yang ada di Indonesia.

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia, di mukimi oleh masyarakat majemuk yang pluralistik dalam arti kata yang sesungguhnya. Fakta sosiologis yang penting dari kota Medan, sebagaimana yang diungkapkan Edward M. Bruner, adalah Kebinekaan etnisnya dan juga kenyataan bahwa tidak ada satu kelompokpun yang merupakan dalam jumlah atau posisi dominan. Hampir setiap hubungan personal berlangsung dalam kerangka jaringan antar-golongan etnis yang lebih meluas di kota Medan. Menentukan identifikasi etnis seseorang menjadi keharusan ekonomis dan politis di sini. Pembahasan berikut akan mencoba melihat dari sudut sosio-historis, sejauh mana saat ini jenis-jenis lapangan kerja tertentu di Medan telah dikuasai atau didominasi oleh golongan etnis tertentu serta latar belakang yang menyebabkannya.

Pertumbuhan Kota dan Heterogenitas Etnis: Perspektif Historis

Daerah yang sekarang ini bernama Medan, pada mulanya merupakan daerah kosong bertanah subur. Di sebelah barat daerah ini terdapat daerah pegunungan yang didiami oleh orang Batak, Karo, Simalungun sementara sebelah Timur terdapat pantai yang didiami oleh orang Melayu.

Arti penting perkembangan kota ini, adalah sejak pemerintahan kolonial Belanda mulai mendapat kesempatan membuka perkebunan tembakau di daerah ini.

Sekali pun perkembangan Kota Medan tidak dapat dipisahkan dari dibukanya perkebunan-perkebunan tembakau Belanda sejak dimulainya oleh Nienhuys, namun penanaman tembakau itu sendiri telah dilakukan jauh sebelum Belanda datang ke daerah ini.

John Anderson, sekretaris Gubernur Inggris di Penang yang mengadakan peninjauan ke daerah ini (Deli) tahun 1822

menyebutkan, bahwa tembakau merupakan hasil tanaman yang diekspor ke Penang.

Pada masa itu Deli yang diperintah oleh Sultan Deli, Panglima Mangedar Alamsyah, menurut Anderson merupakan daerah yang subur karena hasil lada dan cengkih di sini diekspor secara besar-besaran.

Di samping itu terdapat juga tanam-tanaman jenis lainnya seperti padi, tebu, jagung, kapas, nira dan pisang yang merupakan tanaman rakyat. Semua ini menunjukkan bahwa penduduk di daerah ini pada mulanya adalah petani yang mengerjakan tanah yang subur.

Selain penduduk asli daerah ini yaitu suku Melayu, terdapat juga suku Batak Toba, Simalungun, Karo serta Mandailing. Suku-suku yang disebut terakhir ini adalah berasal dari daerah dataran tinggi di daerah Tapanuli.

Ketika perkebunan Belanda mulai dibuka, masyarakat di daerah ini masih menganut sistem ekonomi pedesaan (subsistem economic) dengan pertaniannya. Tetapi setelah dibukanya perkebunan secara besar-besaran telah menyebabkan penduduk yang tinggal di daerah ini dipindahkan tanpa mendapat ganti rugi yang memadai. Dalam kontrak dengan sultan disebutkan bahwa pengusaha Belanda ini sebenarnya harus memberikan seluas 2,9 Ha kepada setiap petani untuk digarap secara tradisional, namun dalam prakteknya hal ini tidak dilakukan.

Tanah petani dengan demikian praktis hilang apalagi karena sultan menuntut bahwa dialah yang mempunyai hak atas tanah di kawasan ini dan karena itu bergantung kepada putusan-nyalah segala hal yang menyangkut masalah tanah.

Penyerobotan tanah penduduk untuk kepentingan perkebunan ini telah mengakibatkan antara lain, terjadinya hubungan yang rapuh antara pengusaha Belanda dengan masyarakat sekitarnya. Ketika pihak perkebunan Belanda membutuhkan tenaga kerja untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan, penduduk setempat tidak mau bekerja di situ.

Perkembangan perkebunan dengan demikian sama sekali tidak diikuti oleh masyarakat setempat. Hal ini mengakibatkan perkebunan mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah.

Sejak Nienhuys memulai usahanya pertama kali, tenaga kerja dari luar ini telah dimulai, yakni orang-orang Cina yang didatangkan dari Penang, Malaysia. Maka sejak itulah gelombang kedatangan tenaga kerja Cina dari Malaysia mengalir ke Perkebunan-perkebunan di daerah ini. Tenaga kerja Cina itu didatangkan ke daerah ini melalui suatu perjanjian atau kontrak kerja. Mereka menandatangani perjanjian dengan penanaman modal Belanda berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha yang mendatangkan mereka ke daerah ini dari Malaysia.

Di Malaysia sendiri telah tersebar cerita tentang kesuksesan yang bisa diperoleh golongan Cina yang bekerja di Deli. Cerita tentang kesuksesan yang bisa didapat jika bekerja di Deli merupakan penyebab lain kuatnya dorongan orang-orang Cina untuk bekerja di perkebunan tembakau Belanda itu. Padahal di Malaysia sendiri sebenarnya mereka bekerja di tempat-tempat tambang timah milik Inggeris dan terikat dengan kontrak pada perusahaan pertambangan itu yang telah mendatangkan mereka langsung dari daratan Cina.

Keadaan ini akhirnya menimbulkan sengketa. Pengusaha pertambangan Malaysia mengadakan protes dan hal ini didukung oleh Pemerintah kolonial Inggeris di sana. Maka sejak itu mulailah dilarang emigrasi tenaga Cina dari Malaysia ke perkebunan-perkebunan di Deli. Akibat tidak dibenarkannya lagi orang-orang Cina pergi bekerja di perkebunan Belanda, maka pihak perkebunan Belanda mendatangkan tenaga kerja dari Tiongkok langsung. Untuk mengurus buruh Cina ini DPA (Deli Planters Association) membentuk Immigrants Bureau for the Reception, Selection and Transportation untuk kepentingan buruh yang langsung datang dari daratan Cina langsung.

Mendatangkan tenaga kerja langsung dari daratan Cina dirasakan Belanda semakin lama semakin sukar, maka diusaha-

kanlah mendatangkan tenaga kerja-tenaga kerja baru dari Pulau Jawa untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan yang semakin berkembang pesat itu. Tenaga kerja dari Pulau Jawa ini juga menandatangani kontrak kerja di Pulau Jawa dengan akte notaris sebelum berangkat ke perkebunan tempatnya bekerja. Perkembangan kedatangan tenaga kerja Cina dan Jawa ini terus berjalan. Pada tahun 1902 saja, di 166 perkebunan yang ada di daerah ini terdapat 99.568 orang tenaga kerja dan yang terbanyak adalah orang-orang Cina.

Dengan memperhatikan gelombang tenaga kerja yang masuk ke perkebunan-perkebunan yang berasal dari luar daerah ini, maka dapat dipahami bahwa dalam tenaga kerja yang relatif singkat Deli telah menjadi tempat perantauan yang sangat menarik. Daerah ini menjadi tempat bertemunya berbagai suku dari dalam negeri dan orang-orang asing dari Asia dan Eropa. Orang Batak, Melayu, Bugis, Jawa, Banjar dan lain-lain, bergaul satu dengan lainnya, demikian juga orang-orang Asia yang datang maupun sengaja didatangkan, seperti orang-orang Cina sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu, India, Jepang, Siam dan sebagainya.

Perkembangan ekonomi, di daerah ini tidak hanya berfokus pada perkebunan belaka, karena di luar usaha perkebunan besar masih ada lapangan kerja yang lain, yaitu misalnya usaha peternakan, perkebunan rakyat, pertukangan, perdagangan dan kepegawaian.

Banyak tenaga kerja yang sesudah masa kontraknya di perkebunan habis tidak kembali ke daerah asalnya, tetapi menetap di daerah sekitar Medan ini. Di kota-kota dan di dekat perkebunan besar banyak tinggal orang asing, Cina dan India. Di samping orang-orang Indonesia lainnya.

Orang-orang Cina yang bergerak di bidang perdagangan, orang India bergerak di bidang peternakan, khususnya peternakan lembu di daerah Sunggal untuk memanfaatkan susunya di samping itu juga orang India bergerak dalam bidang transpor-

tasi: Orang Jawa bekas pekerja kontrak dan orang Batak mengerjakan/menyadap tanah milik penduduk asli, orang Banjar menjadi tukang mendirikan bangunan serta orang Melayu yang memiliki tanah yang luas, hidup dari tanaman keras yang tumbuh di atas tanah itu. Keahlian orang-orang ini begitu khusus, sehingga dapat dikatakan yang satu tidak dapat menggantikan yang lain.

Dalam perkembangan selanjutnya orang tidak memiliki tanah juga akan bertambah terus, terutama ketika hak tanah yang dahulunya mempunyai peranan kemasyarakatan kini telah berubah, jadi mempunyai peranan ekonomi.

Keadaan tersebut antara lain telah menyebabkan bahwa tenaga kerja dan lapangan kerja makin banyak tersedia di daerah ini, baik untuk pekerjaan besar sendiri maupun untuk kebutuhan lain yang perkembangannya sejajar dengan perkembangan kota ini, seperti kebutuhan untuk industri, pelabuhan, angkutan, kepegawaian dan sebagainya.

Perkembangan perkebunan besar di daerah sekitar Medan telah mengubah daerah ini dari tempat yang sepi dan jarang penduduknya menjadi tempat yang ramai, padat dan benar-benar telah menjadi daerah metropolitan baru. Pertumbuhan usaha Belanda di bidang tembakau berkembang dengan pesat dan memberikan hasil yang paling menguntungkan di dunia. Sudah jelas sesuai dengan kecenderungan perusahaan-perusahaan untuk mengadakan anak-anak perusahaan maka kegiatan Belanda itu tidak hanya di bidang penanaman tembakau saja, tetapi juga di bidang lain seperti perkapalan, perdagangan, industri, bangunan (jalan, jembatan dan gedung-gedung) dan perbankan.

Perusahaan Belanda di Indonesia termasuk di Medan, perkembangannya sejajar dengan munculnya beberapa perusahaan besar di Eropa, baik di Inggris maupun di negara Belanda. Hal ini kelihatan ketika terbentuknya beberapa bank dan perusahaan lain di sini.

Perusahaan-perusahaan yang segera bermunculan antara lain di bidang perkeretaapian (DSM = Deli Spoorweg Maatschappij), bangunan (jalan, jembatan, gedung-gedung) dan perluasan urusan perkapalan (KPM), sehingga pelabuhan-pelabuhan Belawan pun menjadi sangat ramai dengan kegiatan pelabuhan yang sangat meningkat. Kegiatan itu kemudian disusul dengan pengadaan perusahaan lain yang pemiliknya bukan hanya orang Belanda, tetapi juga orang-orang Inggris, Amerika, Jerman dan bangsa lain.

Dengan demikian jelas kelihatan bahwa perkembangan Kota Medan berkaitan erat dengan kegiatan perusahaan-perusahaan asing, terutama perusahaan Belanda yang ada di daerah ini. Hal ini dapat dimaklumi mengingat perhatian yang besar dari pemerintah kolonial Belanda kepada daerah ini, karena merupakan daerah yang memberi penghasilan 60 persen bagi Belanda dari seluruh jajahannya di Indonesia.

Di samping pertumbuhan kota yang pesat sejalan dengan kegiatan perusahaan-perusahaan Asing itu juga kota ini berkembang menjadi sebuah kota yang sebagian besar penduduknya adalah kaum imigran. Kaum imigran itu berasal dari berbagai macam etnis dengan berbagai latarbelakang kebudayaan dan asal usulnya yang berbeda dilihat dari sudut etnisitas. Kota ini jadinya merupakan sebuah kota yang benar-benar heterogen, unik dan kompleks.

Mengingat Kota Medan adalah kota yang penting sejak pemerintahan Hindia Belanda, maka ketika tentara Jepang menduduki seluruh Sumatera Timur pada tahun 1942 menduduki Kota Medan adalah merupakan sasaran utama.

Pada masa pemerintahan Jepang, situasi Kota Medan tetap seperti biasa menjalankan fungsinya, yaitu sebagai ibu kota, pusat perdagangan dan pemerintahan. Di dalam pelaksanaannya Jepang menyerahkan roda administrasi Kota Medan kepada orang-orang Indonesia dan dengan demikian pada masa pendudukan Jepang, jabatan-jabatan penting di Medan yang tadinya

oleh orang-orang Belanda berpindah ke tangan orang-orang Indonesia.

Di masa pemerintahan Belanda, Medan disebut dengan "Stadsgemeen te Medan", di bawah pimpinan seorang burgemeester atau walikota. Semasa pemerintahan Jepang, sebutan Gemeente dan Burgemeester diganti dengan nama "Medan Shi" dan "Medan Shitye" yang berarti Kota Medan dan walikota Medan.

Dalam awal masa kemerdekaan, Kota Medan dibanjiri oleh arus pendatang yang cukup besar. Hal ini mengakibatkan Kota Medan tidak sesuai lagi dengan jumlah penduduk yang terus melaju dengan pesat. Maka pada tahun 1951, Kota Medan telah diperluas menjadi 3 kali lipat dari keadaan sebelum kemerdekaan. Perluasan Kota Medan tahun 1951 tersebut menjadikan kota ini memiliki 35 kepenghuluan dengan 4 kecamatan dan penduduk lebih 300.000 jiwa.

Menurut catatan bagian pendaftaran penduduk Kotapraja Medan sampai bulan Oktober 1958 jumlah penduduk Kota Medan adalah 360.149 jiwa yang terdiri dari 276.799 jiwa warga negara Indonesia, dan 83.350 jiwa bangsa asing.

Perkembangan Kota Medan selanjutnya memperlihatkan laju penduduk yang pesat sekali. Pertambahan penduduk yang pesat ini pertama-tama adalah disebabkan oleh arus urbanisasi dari desa-desa di luar Kota Medan. Pertambahan penduduk akhirnya juga membutuhkan perluasan kota karena Kota Medan dengan 4 kecamatan sebelumnya dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan penduduknya.

Pada tahun 1971 saja, Kota Medan yang masih terdiri dari 4 kecamatan itu, telah memiliki jumlah penduduk hampir 1 juta jiwa. Mengingat kondisi itu, Kota Medan dengan 4 kecamatan tidak dapat lagi dipertahankan.

Maka pada tahun 1976 Kota Medan diperluas menjadi 11 kecamatan yang terdiri dari 116 desa dan dengan luas wilayah 265 Km². Perluasan Kota Medan ini mengakibatkan kota-kota

yang tadinya berada di luar Medan menjadi satu dan masuk dalam wilayah Kota Medan, seperti Pelabuhan Belawan yang tadinya merupakan Kota pelabuhan akhirnya menjadi bagian kecamatan dari kota Medan yakni Kecamatan Medan Labuhan. Masuknya Belawan menjadi ke dalam pusat jaringan perluasan Kota Medan, berarti menyebabkan Kota Medan memiliki sarana-sarana menjadi kota industri. Hal ini disebabkan sepanjang jalan Medan – Belawan terdapat pabrik-pabrik industri milik swasta seperti pabrik ban, assembling mobil, pabrik sabun, minyak makan dan sebagainya, sehingga kawasan Medan – Belawan tersebut dapat disebutkan merupakan kawasan industri yang paling penting dalam laju perkembangan kota ini selanjutnya. Kawasan industri lainnya yang bisa ditemukan di Medan adalah kawasan jalan menuju Tanjung Morawa dan juga jalan menuju Binjai. Kawasan pusat industri tersebut dengan sendirinya menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan merupakan daya pikat tersendiri bagi calon tenaga kerja desa untuk mengalir deras ke Kota Medan.

Menurut sensus penduduk tahun 1980, penduduk Medan adalah 1.373.747 jiwa yang berarti memiliki kepadatan 5.184 jiwa per Km².

Pengelompokan Lapangan Kerja Berdasar Etnis

Ada banyak tipe-tipe lapangan kerja non-formal di Kota Medan yang cenderung didominasi oleh etnis tertentu. Hal tersebut nampak misalnya pada tipe tenaga kerja tidak menetap.

Yang dimaksud dengan tenaga kerja tidak menetap di kota adalah tenaga kerja yang datang ke kota untuk bekerja dan kembali ke desanya pada hari itu juga. Mereka bukanlah penduduk pusat kota di mana mereka bekerja melainkan penduduk desa di sekitar kota yang biasanya merupakan ibu kota kecamatan. Tujuan utama mereka ke kota hanyalah untuk bekerja. Mereka datang dari desa atau kota asalnya pada pagi hari, lalu seharian penuh bekerja di kota dan pada sore hari atau malamnya pulang meninggalkan kota tempatnya bekerja.

Untuk Kota Medan, di mana terdapat banyak pusat-pusat industri dan lapangan kerja lainnya, kecenderungan adanya tenaga kerja tidak menetap di kota dapat dengan jelas dilihat. Hal ini terutama terdapat pada tenaga kerja harian seperti buruh pabrik, buruh bangunan, pekerja kasar di bengkel, penyapu jalan, buruh angkutan di gudang-gudang dan lain-lain.

Tenaga kerja seperti ini, di Kota Medan dapat dilihat berasal dari daerah-daerah pinggiran seperti Tembung, Saentis, Sampali, Batang Kuis, Kelambir Lima, Labuhan, Tandem, serta Tanjung Morawa yang jaraknya berkisar antara 10 sampai 25 Km dari pusat Kota Medan

Dari desa-desa tersebut, sebagian besar mereka pergi ke kota dengan menaiki sepeda secara berombongan, sehingga jika pagi dan sore hari di jalan-jalan menuju ke desa-desa yang disebutkan itu akan dapat dilihat rombongan pekerja berbaris menaiki sepeda untuk pergi dan pulang dari Kota Medan tempat mereka bekerja. Hanya sedikit yang menggunakan sarana transportasi lain seperti bus umum, maupun naik sepeda motor temannya yang juga ingin ke Medan dan diantarjemput oleh bus perusahaan di mana-mana buruh itu bekerja.

Untuk yang disebutkan terakhir, yakni mereka yang diantar jemput oleh bus perusahaan, biasanya terbatas hanya pada buruh perusahaan pabrik tertentu seperti pabrik baterai dan pabrik es.

Dapat dikatakan untuk pekerja-pekerja seperti yang telah disebutkan itu, sebagian besar adalah tenaga kerja dari suku bangsa Jawa. Adalah sukar untuk menemukan di antara mereka itu tenaga kerja dari suku bangsa lain termasuk bangsa Melayu. Tenaga kerja yang sebagian besar dari suku bangsa Jawa ini tadinya adalah tenaga yang bekerja di perkebunan-perkebunan di sekitar Kota Medan atau yang orang tuanya bekerja di perkebunan yang dikarenakan berbagai hal memilih bekerja sebagai buruh di kota.

Tenaga kerja tidak menetap lainnya di kota terdapat juga pada pegawai negeri yang karena berbagai hal belum dapat ting-

gal di Kota Medan. Mereka biasanya adalah pegawai negeri golongan rendah yang baru diangkat. Tempat mereka adalah kota-kota kecil sekitar Kota Medan, seperti Kota Binjai, Lubuk Pakam, Belawan, Pancur Batu dan beberapa kota lainnya. Sebagian besar dari mereka datang ke Kota Medan dengan menaiki bus umum, atau menaiki kendaraan bermotor lainnya. Hampir tidak ada jenis pekerjaan seperti ini yang datang dengan mengendarai sepeda.

Dilihat dari jenis suku bangsa dapat dikatakan di antara mereka bervariasi dan jenis kelamin terbesar adalah pria di samping juga terdapat wanita. Seperti pekerja buruh yang telah disebutkan di atas, mereka ini datang dari kota kecil (kota asalnya) pada pagi hari menuju Medan dan pulang petang atau sore harinya.

Selain itu ada juga tenaga kerja lain yang tidak menetap di kota, selain yang telah disebutkan yakni para pedagang buah-buahan dan sayur-sayuran, sebagian besar mereka ini datang dari daerah-daerah Karo, di samping ada juga dari daerah sekitar Medan lainnya terutama dari sekitar Binjai. Untuk pedagang buah-buahan dan sayur-sayuran dari daerah Karo, umumnya mereka datang ke Medan pada malam hari atau menjelang subuh dengan menaiki angkutan khusus yang mengangkut beberapa pedagang yang biasanya satu kelompok.

Barang dagangan yang mereka bawa langsung pada subuh itu juga mereka jual kepada pedagang eceran yang telah menunggu di Medan dan biasanya tempat-tempat transaksi tersebut adalah di pusat pasar Medan, Pancur Batu, Peringgian, Petisah dan pajak-pajak kecil lainnya yang ada di sekitar Medan. Pedagang yang datang dari daerah Karo ini tidak lagi menjual barang-barang dagangannya kepada konsumen yang membutuhkan, tetapi hanya sampai kepada pedagang perantara.

Menjelang siang, para pedagang ini pulang kembali ke daerah Karo, sorenya kemungkinan mencari buah-buahan dan sayur-sayuran pada petani dan tengah malam atau subuh besoknya kembali ke Medan membawa dagangannya.

Selain pedagang buah dan sayuran dari daerah Karo ini ada juga yang sama yang berasal dari daerah sekitar Kota Binjai, Sunggal, Kampung Lalang, Kelambir Lima, Hamparan Perak dan daerah lain. Berbeda dengan pedagang buah dan sayuran dari daerah Karo, mereka yang disebutkan terakhir ini umumnya tidak berdagang secara berkelompok, melainkan secara individu dengan membawa barang dagangannya sendiri-sendiri. Mereka datang ke Medan menjelang subuh dengan menaiki sepeda, di kanan kiri pada bagian belakang sepeda tergantung dua buah keranjang besar yang berisi buah dan sayuran. Sebagian besar dari pedagang buah-buahan dan sayur-sayuran ini termasuk pedagang daun serta tali, pisang merupakan pedagang dari suku Melayu. Mereka umumnya menjual hasil-hasil tanaman keras yang berasal dari ladang mereka sendiri, atau ladang tetangganya. Dapat dikatakan hasil tanaman yang diperdagangkan orang-orang Melayu ini adalah hasil tanaman yang hanya tinggal memungutnya atau mengambilnya dari pohon. Tidak ada di antara mereka yang mengolah tanah untuk menghasilkan tanaman yang lebih banyak dari yang bisa mereka pungut. Mereka hanya menjual hasil tanaman-tanaman yang ada di atas tanah warisan mereka dan dengan jumlah tanaman yang sama ketika nenek moyang mereka menanamnya dahulu.

Masih juga dari jenis pedagang, tenaga kerja lainnya yang tidak menetap di Kota Medan adalah pedagang ikan yang seluruhnya berasal dari daerah sekitar Kota Medan yakni, Labuhan dan Percut. Pedagang ikan ini langsung membeli ikan dari nelayan-nelayan kecil yang ada di daerah tersebut, kemudian dengan mengendarai sepeda mereka menjual ikan dari rumah- ke rumah langsung kepada konsumen yang membutuhkannya yakni para ibu rumah tangga. Pedagang ikan ini, dengan menaiki sepeda masuk ke luar lorong-lorong dan jalan-jalan yang banyak penduduknya di Kota Medan.

Seperti juga pedagang buah dan sayur-sayuran menjelang petang mereka ini kembali ke tempatnya bermukim, yakni di daerah Labuhan dan daerah Percut. Umumnya sebagian besar

dari pedagang ikan ini berasal dari suku bangsa Melayu, yang membeli ikan tersebut dari nelayan Melayu di desa mereka.

Jenis tenaga kerja lain yang menetap sementara di kota dimaksudkan adalah jenis tenaga kerja musiman (mobilitas sirkulasi), umumnya mereka datang secara berkelompok ke tempat mereka bekerja menetap untuk jangka waktu tertentu dan kemudian kembali pulang ke desa atau daerah asalnya yang merupakan tempat tinggal mereka yang sesungguhnya.

Sebagian besar dari jenis tenaga kerja seperti ini berasal dari satu daerah dengan latar belakang suku bangsa yang sama atau berlainan suku bangsa tetapi berasal dari satu desa yang sama dengan satu profesi yang sama pula.

Di kota, mereka tinggal di tempat-tempat tertentu, seperti mengontrak rumah di daerah perkampungan, menyewa kamar atau tinggal langsung di tempat mereka bekerja. Lama mereka tinggal di kota biasanya tergantung dari jenis lapangan kerja yang mereka kerjakan atau tergantung peraturan yang ditetapkan pimpinan tempat mereka bekerja. Ada yang menetap dalam waktu satu minggu, di mana kepada mereka diberi kesempatan untuk pulang ke tempat tinggalnya selama satu hari, atau ada yang menetap dalam waktu satu bulan di mana kepada para pekerja diberi kesempatan pulang pada awal bulan, atau ada juga yang menetap sampai beberapa bulan atau setahun.

Di Kota Medan, jenis tenaga kerja yang menetap sementara ini terdapat antara lain di kalangan orang Minang yang bekerja sebagai karyawan di rumah-rumah makan atau restoran. Dapat dikatakan bahwa di Medan sebagian rumah makan adalah rumah makan khas Minang dan sebagian besar pula dari rumah makan Minang ini memakai tenaga kerja dari suku bangsa Minang. Tenaga kerja yang bekerja di restoran-restoran Minang ini umumnya berasal dari daerah Sumatera Barat yang menetap untuk jangka waktu tertentu di Medan sesuai dengan perjanjian atau sesuai ketetapan dari pimpinan restoran. Tempat tinggal mereka kebanyakan di lantai atas restoran

tersebut atau pada ruang-ruang lain yang masih merupakan bagian dari tempat mereka bekerja.

Tinggal menetap di tempat pekerjaan ini adalah penting dan merupakan ciri khas restoran-restoran yang ada di Medan. Hal ini disebabkan antara lain karena para pekerja ini tenaganya setiap saat diperlukan, bahkan hampir sampai 24 jam. Tenaga kerja yang bekerja di restoran-restoran ini mengerjakan berbagai hal, baik secara spesialisasi maupun tidak, seperti pekerjaan memasak, berbelanja, mencuci piring, pelayan dan sebagainya yang berkaitan dengan pekerjaan restoran.

Agar pekerjaan di restoran tidak berhenti, maka umumnya kepada setiap pekerja diberi kesempatan pulang ke daerah asalnya secara bergiliran pada waktu tertentu. Namun secara keseluruhan sebagian tenaga kerja di restoran-restoran Kota Medan, pulang ke daerah atau tempat asalnya dengan serentak pada bulan puasa/bulan Ramadhan di mana sebagian besar restoran di Medan tidak dibuka pada siang hari. Tenaga kerja ini umumnya terdiri dari pria yang masih muda-muda dan belum berumah tangga.

Tenaga kerja menetap sementara lainnya di Kota Medan adalah karyawan pengangkutan umum atau bus-bus umum jarak jauh yang cukup banyak terdapat di Medan. Perusahaan-perusahaan angkutan jarak jauh tersebut, yang jarak tempuhnya meliputi kota-kota kecil dan besar yang ada di Pulau Sumatera bahkan sampai juga ke Pulau Jawa itu, sebagian besar memiliki kantor dan pusat perbengkelannya di Kota Medan.

Kantor dan pusat perbengkelan perusahaan angkutan jarak jauh inilah yang menyerap tidak sedikit tenaga kerja yang menetap sementara di kota dan dengan golongan suku bangsa yang beragam. Kelompok-kelompok suku bangsa dari tenaga kerja yang menetap sementara di kota ini umumnya berasal dari daerah-daerah sekitar atau kota-kota yang menjadi tujuan utama trayek perusahaan pengangkutan itu.

Demikianlah misalnya kita dengan mudah menemukan tenaga kerja dari Aceh di pusat perusahaan angkutan yang khusus mengambil trayek daerah Aceh, seperti trayek-trayek yang menuju ke Kota Banda Aceh, Lhok Seumawe, Sigli, Kota Cane, Kuala Simpang dan kota-kota lainnya di sekitar Banda Aceh.

Tenaga kerja dari daerah Tapanuli Selatan, yakni dari suku bangsa Angkola Mandailing dapat ditemukan di pusat perusahaan yang mengambil trayek ke daerah Tapanuli Selatan, seperti yang menuju ke Kota Padang Sidempuan, Sipirok, Kota Nopan, Natal, Gunung Tua dan kota-kota lain di daerah Tapanuli Selatan.

Tenaga kerja dari daerah Tapanuli Utara yakni dari suku bangsa Batak Toba dapat ditemukan di pusat perusahaan yang menuju ke daerah ini seperti yang menuju Tarutung, Balige, Pematang Siantar, Sibolga, Siborong-borong, Pangururan di Samosir dan kota lainnya di daerah Tapanuli Utara. Sementara itu tenaga kerja dari suku bangsa Karo dapat dilihat pula di perusahaan angkutan yang mengambil trayek ke daerah Karo seperti menuju ke kota Brastagi, Kabanjahe, Bandar Baru, Barus Jahe dan kota-kota lainnya yang ada di Karo.

Di samping tenaga kerja di daerah-daerah tersebut terdapat juga tenaga kerja untuk perusahaan angkutan ini dari Padang, Sumatera Barat, yakni orang-orang Minang yang bekerja di pusat perusahaan angkutan dengan trayek menuju Kota Padang, Bukit Tinggi dan kota-kota lainnya yang ada di Sumatera Barat.

Para pekerja di perusahaan-perusahaan angkutan tersebut keseluruhan adalah tenaga pria, jenis pekerjaan di perusahaan itu adalah sopir, kernet, pelayanan penumpang dan pekerja bengkel. Sebagian besar dari pekerja ini menetap di lokasi pusat perusahaan itu di mana oleh perusahaan telah dibuat ruang-ruang khusus untuk tempat menetap sementara para karyawan, sopir dan kernetnya, adalah jenis tenaga kerja di perusahaan ini yang menetap sementara atau mobilitas sirkulasi dalam arti yang sesungguhnya.

Setelah mereka membawa penumpang dengan bus yang telah ditetapkan ke kota-kota tujuan yang jauh itu yang kadang-kadang memakan waktu pulang pergi sampai satu minggu, mereka tiba kembali di Kota Medan untuk istirahat atau memperbaiki/menyervis bus yang mereka bawa itu dalam beberapa hari saja, yakni sekitar 2–3 hari. Selama masa itulah mereka menetap sementara di Kota Medan, yakni di lokasi pusat perusahaan pengangkutan itu.

Para pedagang di Medan juga banyak yang memanfaatkan hubungan patron-klien dalam usaha menyelamatkan usaha dagangnya. Seperti misalnya pedagang mie sop di Medan, sebagian besar dari mereka berkumpul di suatu rumah dalam rangka menyiapkan bahan baku dari dagangan mereka. Rumah tempat berkumpul ini merupakan tempat pimpinan dari pedagang-pedagang mie sop perkumpulan itu. Jumlah satu kelompok dari pedagang mie sop ini mencapai jumlah 20 orang pedagang. Pimpinan dari pedagang mie sop inilah yang menyediakan bahan yang akan diperdagangkan, sehingga dalam hal ini sesungguhnya si pedagang bertindak sebagai si penjual dari bahan-bahan yang telah disiapkan si pimpinan tadi.

Para pedagang seperti ini, di bawah pimpinan seorang tidak saja terdapat pada pedagang mie sop, melainkan di Medan bisa dilihat pedagang makanan yang lain, pedagang sate, martabak, pedagang es, (es krim, es doger dan es lilin), pedagang jamu dan lain-lain. Kemunculan mereka dalam kelompok menyiapkan barang dagangan, umumnya terjadi tidak dengan sendirinya secara otomatis melalui jaringan organisasi, melainkan disebabkan oleh situasi-situasi atau keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan mereka harus berkumpul di bawah satu pimpinan.

Contoh yang menarik dari terbentuknya kelompok ini adalah, bila seorang pedagang mengalami kesulitan modal, di mana oleh karena sesuatu keadaan modalnya sendiri termakan. Ini berarti usahanya tutup, maka pada saat itu ia mencari pedagang mie sop lainnya yang usahanya lebih berhasil dan minta bantuan

agar bisa menjualkan mie sop yang disiapkan oleh pedagang yang berhasil tadi.

Dengan kata lain, secara spontan telah tercipta hubungan antara si pemodal dengan pedagang secara kecil-kecilan. Dengan cara seperti inilah pedagang-pedagang tersebut berkumpul. Akibat berkumpulnya para pedagang dengan cara seperti ini maka kemudian terciptalah corak hubungan patron-klien, sebagaimana yang telah diuraikan, dimana patron dalam hal ini bertindak sebagai penyelamat, sementara klien adalah para pedagang yang telah ditolong untuk tetap bertahan sebagai pedagang.

Kesempatan kerja dan hubungan patron-klien tersebut terdapat juga pada masyarakat Batak Toba di Medan. Hubungan seperti ini dapat dilihat pada banyak penarik beca di Medan yang memiliki satu toke dari suku Batak Toba.

Di beberapa tempat di Medan, becak-becak ini adalah milik satu orang toke dan para penarik becak ini umumnya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan patron-klien dengan tokenya dalam corak hubungan yang sama sebagaimana yang telah dijelaskan. Selain penarik beca dari suku bangsa Batak Toba dan tokenya yang berasal dari suku yang sama, corak hubungan patron-klien dalam kesempatan kerja ini terdapat pada pengemudi angkutan umum seperti bemo, Bus Desa Maju, Medan Bus dan Sudako. Dapat dikatakan sebagian besar pengemudi dan kondektur pada angkutan umum di Medan dilakukan oleh tenaga kerja suku bangsa Batak Toba. Kendaraan angkutan tersebut sebagian besar adalah milik pengusaha-pengusaha Batak, sehingga dalam memperoleh kesempatan kerja untuk menjadi pengemudi ataupun kondekturnya telah terjadi kemungkinan terciptanya hubungan patron-klien antara pengusaha angkutan dengan tenaga kerjanya.

Di muka telah diuraikan bahwa dalam lapangan kerja informal khusus pada tenaga kerja yang tidak bermukim di kota, atau menetap sementara orang Melayu hanya nampak mendo-

minasi pekerjaan sebagai pedagang tanaman dan penjual ikan selebihnya, lapangan-lapangan kerja itu lebih didominasi etnis yang lain.

Dalam lapangan kerja di sektor formal di Medan, orang-orang Melayu juga tidak menduduki posisi yang dominan, sebagaimana yang masih dijelaskan dalam uraian berikut.

Mendapatkan pekerjaan di kota-kota besar seperti Medan, adalah satu kesempatan yang tidak mudah, apalagi bila menginginkan lapangan kerja yang layak, dalam arti memberinya status dan penghasilan yang cukup.

Tingginya angka pengangguran di kota-kota yang menampung arus urbanisasi yang seperti Medan ini, membuktikan bahwa lapangan kerja yang layak itu sedikit, sementara orang yang membutuhkannya cukup banyak. Tidak seimbangnyalah lapangan kerja dengan angkatan kerja yang ada di kota, telah menyebabkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan itu semakin sulit dan penuh kompetisi.

Nampaknya sepintas lalu kompetisi yang sukar itu akan menghasilkan manfaat yang besar, terutama bagi pihak yang memerlukan calon tenaga kerja, karena dalam kompetisi itu yang menang adalah tenaga-tenaga kerja yang berkualitas, siap pakai dan dapat diandalkan. Namun kesan sepintas itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini disebabkan dalam kompetisi untuk memperoleh kesempatan kerja itu, tidak berlangsung dengan ketat. Selalu saja ada faktor-faktor lain yang menyebabkan jalannya kompetisi itu tidak mulus. Di antara faktor-faktor tersebut adalah kecenderungan pihak-pihak yang berkompetisi untuk mempertahankan hidup di kota itu menempuh jalan pintas yang lebih mudah dan yang memberikan kesempatan lebih besar untuk memperoleh lapangan kerja. Di antara jalan pintas itu adalah memanfaatkan hubungan kekerabatan dan hubungan pertemanan dalam lapangan memperoleh kesempatan kerja.

Di Medan, terutama di kalangan masyarakat Batak, hubungan kekerabatan itu dapat dikatakan merupakan faktor

penentu dalam memperoleh kesempatan-kesempatan kerja. Model yang diajukan Bruner bahwa di Medan orang Batak membagi manusia dalam dua golongan, yakni "orang kita" dan bukan orang kita" untuk menyebut orang lain di luar suku bangsanya, sampai saat ini untuk hal mencari lapangan kerja masih berlaku di Medan. Tidak heran, jika di Medan dengan mudah dapat ditemukan kenyataan bila ada direktur baru suatu perusahaan instansi atau lembaga lainnya dari suku bangsa Batak, maka dalam waktu yang tidak lama akan dilihat orang-orang Batak lainnya, terutama yang memiliki hubungan kerabat dengan direktur atau pimpinan itu, berdatangan dan bekerja di instansi atau perusahaannya.

Hal ini memperlihatkan bahwa di Medan, di kalangan orang Batak, hubungan kekerabatan dalam kesempatan kerja itu benar-benar dimanfaatkan. Sekalipun pada suku-suku bangsa lainnya yang ada di Medan hal tersebut juga terjadi, namun tidak sedemikian dominan seperti yang ada pada masyarakat Batak.

Khususnya pada suku Melayu, ada kecenderungan bahwa mereka enggan untuk memakai kerabat dalam rangka memperoleh kesempatan kerja di sektor formal. Bahkan dapat dikatakan pada suku bangsa Melayu hubungan pertemanan ini lebih diutamakan daripada hubungan kekerabatan. Hal ini terjadi karena hubungan kekerabatan dalam memberikan pekerjaan dianggap orang Melayu sering mengakibatkan resiko yang besar, karena hubungan itu memiliki ikatan-ikatan lain dalam pranata keluarga atau adat. Sehingga jika terjadi hubungan yang tidak baik suatu ketika dalam pranata/adat akan mempengaruhi jalannya pekerjaan. Sedangkan hubungan pertemanan, tidak memiliki resiko yang terlalu besar.

Kesempatan kerja yang sukar di kota tidak selamanya dapat dipecahkan melalui jalan pintas dengan menggunakan hubungan kekerabatan atau hubungan pertemanan.

Hal ini terutama terjadi pada sektor lapangan kerja formal di mana keterampilan, spesialisasi dan keahlian merupakan fak-

tor penentu diterima tidaknya seseorang dalam suatu lapangan kerja formal. Dengan demikian pendidikan merupakan faktor utama dalam kesempatan kerja di sektor formal ini. Akan tetapi justru dalam bidang pendidikan inilah orang-orang Melayu jadi tersisih. Tidak begitu banyak orang-orang Melayu yang berpendidikan di Medan dibandingkan suku lain khususnya Batak Toba.

Di Medan sekalipun hubungan kekerabatan sering dimanfaatkan dalam kesempatan mencari kerja, terutama di kalangan orang Batak namun hubungan kekerabatan saja tidak cukup tanpa ditopang oleh pendidikan standar yang diinginkan oleh jenis pekerjaan yang ada. Orang tidak mungkin membantu kerabat betapa pun dekatnya, untuk menduduki suatu pekerjaan formal yang butuh keterampilan atau keahlian, jika kerabat tersebut tidak memiliki pendidikan untuk itu. Bahkan dalam lapangan kerja formal, jika ini terjadi akan sangat membahayakan orang yang akan memberikan pekerjaan, sebab kedudukannya sendiri bisa terancam jika memasukkan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan persyaratan pendidikan yang diperlukan.

Hal ini bukan berarti dalam lapangan kerja formal, hubungan kekerabatan dalam mencari kesempatan kerja itu tidak ada. Bahkan dalam sektor formal inilah sering kelihatan jelas, bahwa hubungan kekerabatan dalam kesempatan kerja di kalangan orang Batak benar-benar dimanfaatkan.

Di Kota Medan seperti kota-kota lainnya dengan mudah bisa ditemukan golongan pengangguran yang justru berpendidikan. Hal ini sebenarnya memperlihatkan bahwa jenis lapangan kerja formal yang menuntut pendidikan juga tidak seimbang dengan calon tenaga kerja yang berpendidikan. Akibatnya terjadilah lagi kompetisi yang sukar dalam sektor formal ini, dan pemenangnya sudah tentu, di Medan dapat dilihat adalah mereka yang dapat mencari jalan pintas, termasuk menggunakan hubungan kekerabatan.

Dengan kata lain hubungan kekerabatan dalam kesempatan memperoleh pekerjaan di kalangan orang Batak di Medan harus

juga ditopang dengan pendidikan. Seseorang yang hanya tamat sekolah dasar, tidak akan mungkin berani meminta pekerjaan sebagai pegawai bank, sekalipun direktur bank tersebut adalah kerabat dekatnya. Akan tetapi orang yang sama jika lulus dari Akademi Bank misalnya, akan lebih mudah diterima di bank tersebut dibandingkan dengan orang lain dengan pendidikan yang sama, tetapi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan direktur bank tempat ia melamar bekerja.

Kasus Tersisihnya Orang Melayu

Pada masa penjajahan Belanda, dapat dikatakan bahwa orang-orang Melayu di daerah ini menduduki posisi politis mereka jauh lebih baik jika dibandingkan dengan suku-suku pendatang seperti Jawa, Batak, Karo, Simalungun dan sebagainya. Secara ekonomis orang-orang Melayu ini juga berada pada posisi yang mantap di mana mereka memiliki tanah warisan yang luas beserta tanam-tanaman keras yang tumbuh subur tanpa perlu dirawat dan yang secara tetap memberikan hasil kepada pemiliknya. Suku-suku pendatang tidak dapat dengan mudah menyekolahkan tanah penduduk ini karena adanya perlindungan sultan.

Seluruh kawasan Kota Medan, yang sekarang ini dapat dikatakan adalah bekas tanah warisan orang-orang Melayu yang berasal dari atau berada di bawah kawasan sultan Deli dan sultan Serdang. Pemukiman orang-orang Melayu yang terpenting pada masa penjajahan adalah di kawasan yang sekarang menjadi pusat Kota Medan, sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar I (lampiran 1).

Pertumbuhan Kota Medan yang luar biasa pesat, di mana penambahan penduduknya tidak karena proses alamiah, melainkan karena derasnya arus urbanisasi telah menyebabkan orang Melayu tidak lagi menjadi golongan mayoritas di kota ini. Arus imigrasi ke Medan berasal dari berbagai penjuru, sebagaimana nampak pada gambar II (lamp. 2). Pentingnya arti tanah bagi kaum imigran/pendatang telah menyebabkan mereka dengan

berbagai cara juga berusaha untuk memiliki tanah dari orang-orang Melayu.

Saat ini orang-orang Melayu tidak lagi mendiami kawasan pusat Kota Medan di mana sebelumnya pada masa penjajahan merupakan pemukiman mereka. Distribusi kelompok-kelompok etnis yang ada di Medan saat ini sebagaimana yang pernah diperkirakan Usman Pelly, memperlihatkan bahwa orang-orang Melayu tidak lagi mendiami atau bermukim di pusat-pusat Kota Medan.

Gambar III Lamp. 3 memperlihatkan bahwa orang Melayu saat ini sebagian besar bermukim di daerah pinggiran Kota Medan, seperti di Medan Deli, Medan Labuhan, Sunggal, Belawan, Tuntungan serta Medan Denai, yang merupakan daerah-daerah perluasan Kota Medan.

Di daerah-daerah pinggiran kota Medan itu orang-orang Melayu ini hidup dari tanaman keras dari sisa tanah warisan yang masih mereka miliki. Sebagian lagi hidup sebagai nelayan atau pedagang ikan. Lapangan kerja di sektor informal yang begitu banyak di Medan nampaknya tidak begitu menarik perhatian orang-orang Melayu di daerah pinggiran ini. Nampaknya lapangan-lapangan kerja yang banyak itu menjadi rebutan atau telah dikuasai oleh etnis-etnis lain yang merupakan kaum pendatang di kota ini. Kalau pun ada orang Melayu yang bekerja di sektor non-formal di Medan, maka itu terbatas sebagai pedagang sayur atau buah-buahan hasil dari tanaman keras yang tumbuh di ladang mereka. Atau juga sebagai pedagang ikan keliling, sebagaimana telah diuraikan.

Dalam sektor formal hanya sedikit orang-orang Melayu yang berpendidikan serta enggannya mereka memahami jaringan kekerabatan dalam kesempatan memperoleh lapangan kerja formal.

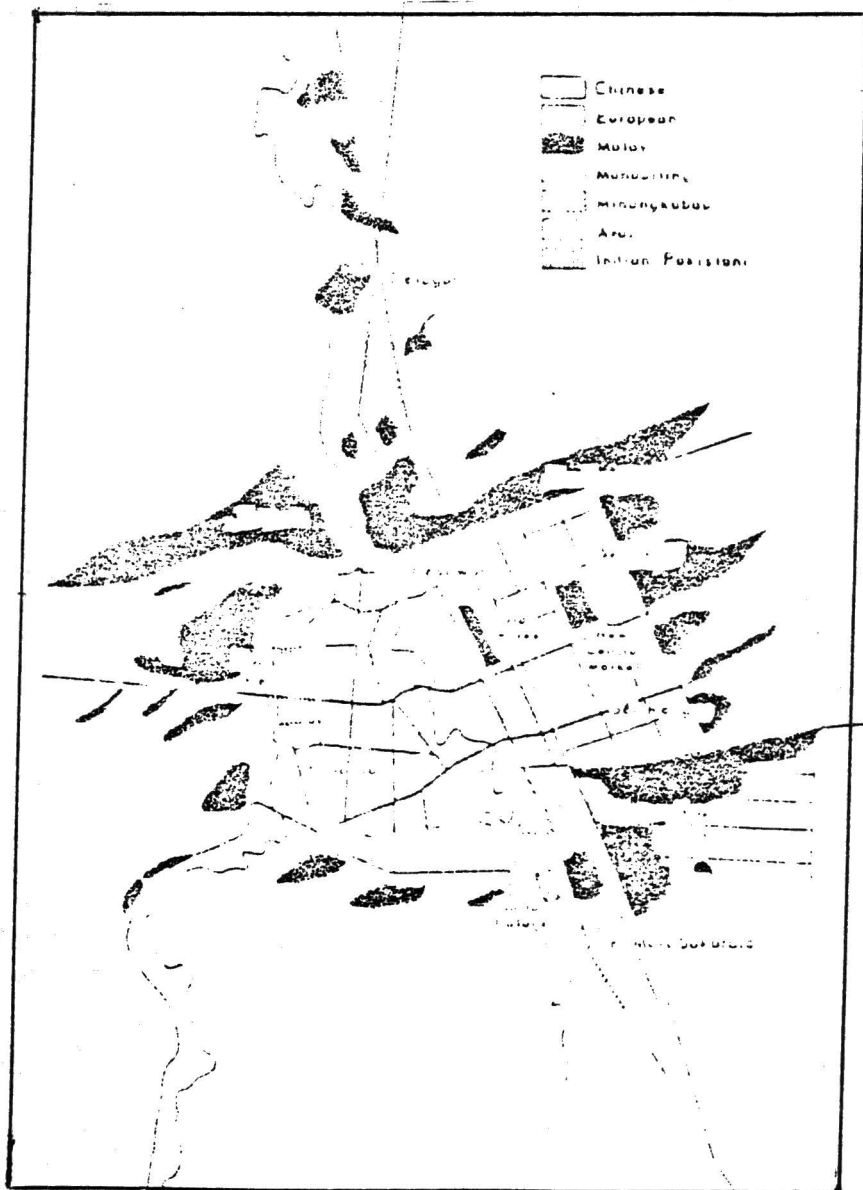
DAFTAR LITERATUR

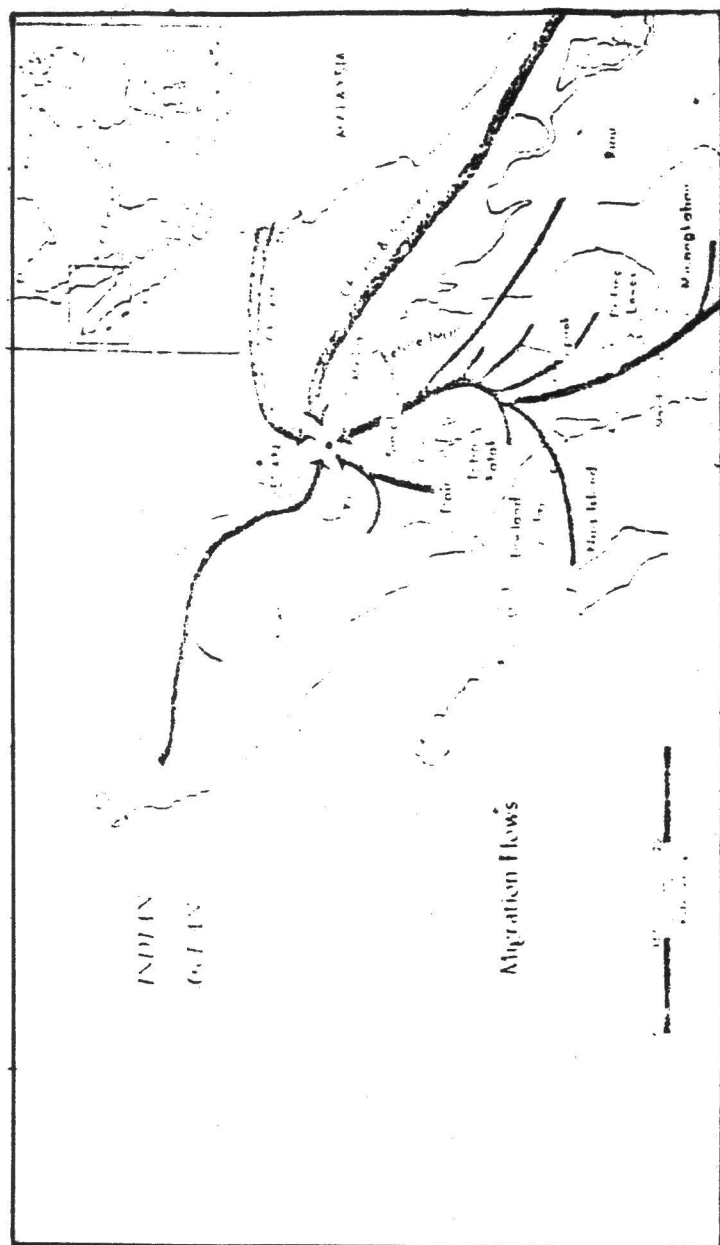
- Anderson, John — Mission to the Fasttcoast of Sumatera-
1926 London.
- Bangun, Payung — *hubungan Antar suku Bangsa di Kota Medan*
1978 Berita Antropologi - Jakarta.
- Bruner, M. Edward — *Urbanitation and ething Indentity in*
1961 *North Sumatera*
- , Medan: *The Role of Kindship in a Indonesia City*
1962
- Gunningham, Clark — *The postwar Migration of the Toba -*
1958 *Batak to East Sumatera.*
- Theromi, T.O. — *Pokok-pokok antropologi Budaya*
1980
- Said Muhammad, H — *Koeli Keontrak Tempoe Doeloe —*
1977 Medan.
- Sinar Lukman, SH — *Sari Sejarah Serdang — Medan*
1971
- Situmorang Sitor — *Medan dan Kepeloporan Kaum Pendetang.*
1980
- Van De Hall — *Monografi Daerah Perkebunan Sekitar Medan.*
1967

Pelly Usman — *Urban Migration and Adaption In Indonesia*
1983 *A Case Study of Minangkabau and Mandailing*
Batak Migrant In Medan, North Sumatera. Thesis
Urbana, Illinois.

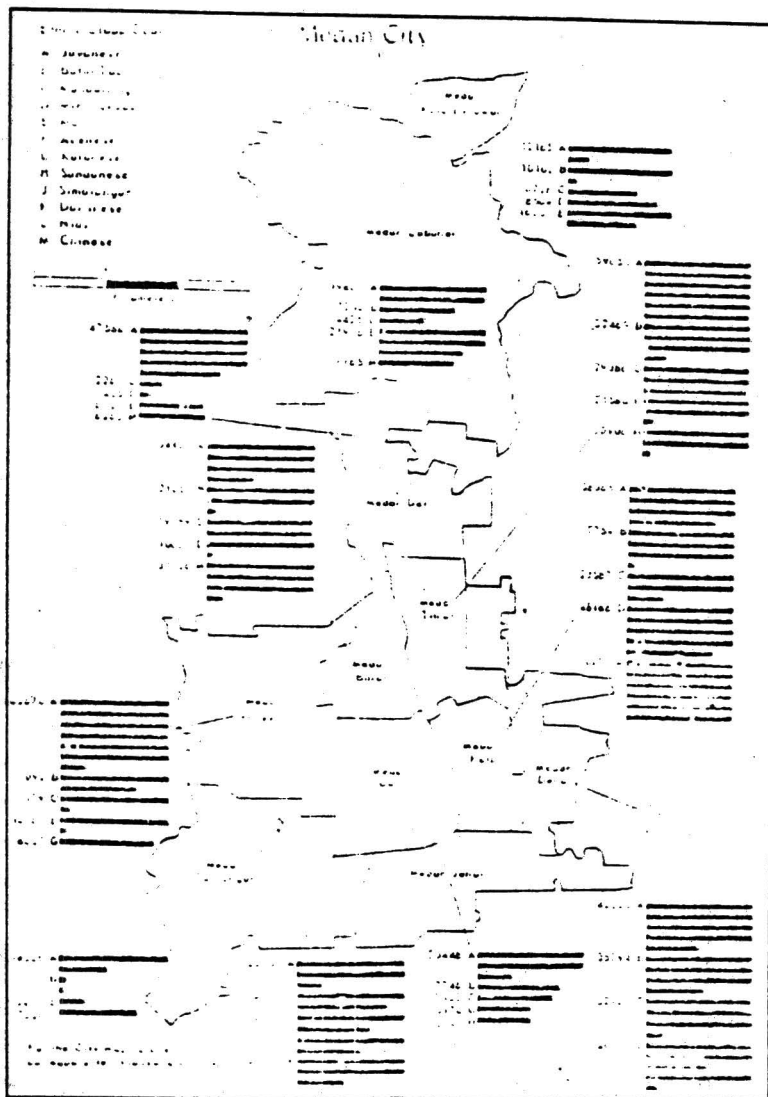
Lampiran 1

EARLY ETHNIC SETTLEMENT IN MEDAN 1909





DISTRIBUSI KELOMPOK-KELOMPOK ETHNIS DI MEDAN, 1979
SUMBER USMAN PELLY 1983



BUDAYA MASYARAKAT JAWA DAN PERANANNYA DALAM INTEGRASI ETNIK DI SUMATERA UTARA

Oleh :

D A R M O N O

I

Kehadiran orang Jawa di daerah Sumatera Utara pada masa yang lalu (sebelum Perang Dunia II) bukanlah karena mereka mempunyai jiwa merantau seperti yang dijumpai oleh orang Minang ataupun orang Batak. Kedatangan mereka ke daerah ini adalah akibat terikatnya mereka dengan janji-janji yang akan diberikan oleh para pengusaha perkebunan (bangsa Belanda) pada waktu itu. Terkadang kepergian "merantau" mereka juga karena paksaan yang tak dapat mereka elakkan.

Perantauan mereka ini ternyata secara tidak langsung telah turut meng-Indonesiakan daerah-daerah lain di Indonesia ini. Sebab kehadiran orang Jawa ke Sumatera Utara berarti telah menambah keaneka ragaman suku bangsa yang mendiami daerah ini. Jadi bukan lagi dimonopoli oleh penduduk asli setempat. Kebhinnekaan suku-suku bangsa ini kelak pada saatnya akan merupakan suatu benih ketunggal ikaan suku-suku tersebut dalam menciptakan suatu integrasi etnik, yaitu bangsa Indonesia.

Orang Jawa yang datang "merantau" ke Sumatera Utara sebagai "kuli kontrak" tersebut telah membuat suatu hikmah dalam ketunggalikaan suku-suku yang ada di daerah ini. Hikmah tersebut bukanlah suatu hal yang terjadi secara kebetulan, tetapi sebagian besar didorong oleh sikap budaya masyarakat Jawa itu sendiri. Sikap budaya masyarakat Jawa ternyata mampu untuk merangkum sikap budaya suku-suku bangsa (etnik) yang lain yang ada di daerah Sumatera Utara khususnya dan Indonesia umumnya.

II

Penjajahan Belanda yang telah begitu lama membangkitkan harga diri dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku-suku bangsa tersebut merasakan suatu penderitaan yang harus diakhiri. Dalam mengakhiri penderitaan tersebut mereka harus bersatu. Tanpa persatuan Belanda tak mungkin akan dapat diusir dari bumi Indonesia.

Perlakuan bangsa Belanda terhadap para kuli kontrak benar-benar dirasakan sebagai suatu siksaan. Namun Budaya Jawa tidak mendukung untuk melakukan suatu perlawanan yang terbuka sifatnya. Mereka tidak suka suatu perubahan dilakukan secara paksa. Mereka masih tetap mewarisi suatu keyakinan bahwa "ratu adil" suatu saat akan muncul dan mengusir penjajah dari muka bumi Indonesia.

"Merantau"nya orang Jawa ke Tanah Deli pada saatnya kelak menimbulkan kampung-kampung orang Jawa. Timbulnya kampung-kampung ini adalah akibat dari keinginan orang Jawa itu sendiri untuk tetap "mangan ora mangan kumpul". Sikap menentang penjajah secara terbuka tidak disukai mereka, maka bila mereka telah habis masa kontraknya, menyebabkan mereka mendirikan kampung-kampung yang ada di sekitar perkebunan. Untuk mengatasi kekurangan tenaga buruh dalam usaha memperluas usaha perkebunan para pengusaha terus-menerus mendatangkan para kuli kontrak ke Sumatera Utara. Konsekuensi

logisnya adalah makin banyaknya kampung-kampung orang Jawa di sekeliling perkebunan.

Kehadiran orang Jawa mendirikan kampung-kampung sekitar perkebunan sangat disukai orang-orang Melayu sebagai pemilik tanah. Sebab pada dasarnya tanah-tanah tersebut adalah milik penduduk asli dan bila telah diokupasi akan menambah penghasilan orang-orang Melayu melalui bagi hasil dari pengusahaan tanah tersebut. Hal ini menyebabkan "berterimanya" kehadiran orang Jawa di sekeliling mereka di samping orang Melayu sendiri tidak hendak menjadi "kuli kontrak" di perkebunan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Di samping keuntungan materi yang dapat diperoleh dari kehadiran orang Jawa di sekeliling orang Melayu itu sendiri, juga adalah sikap hidup orang Jawa yang juga "berterima" oleh orang Melayu. Sikap hidup orang Jawa sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan konsep-konsep keagamaan. Pengalaman dan pandangan hidup orang Jawa bersifat keseluruhan, tidak memisahkan individu dari lingkungannya, golongannya, zamannya, situasi dan kondisinya, bahkan dari alam adi-kondrati (Mulder 1981 : 34-53), karena sikap hidup dan budaya Jawa yang demikian itu membuat orang Jawa mudah mengadakan suatu interaksi dengan penduduk asli.

Sikap hidup orang Jawa yang tidak perlu "ngoyo", tidak perlu harus mati-matian dalam memperjuangkan kerajaan pribadi, tetap mereka praktekkan di rantau. "Alon-alon waton kelakon" -biar pelan asal selamat-, tetap dilaksanakan. Hal ini juga membuat citra orang Jawa di rantau "baik" di mata penduduk asli. Sebab kehadiran mereka di Deli tidak menimbulkan suatu pemandangan yang kontras antarsuku di sana. Mereka lebih suka sesuatu berjalan secara perlahan, tetapi terus-menerus dan pasti. Untuk itu mereka mengutamakan ketertiban demi kedamaian (Partokusumo, 1983).

Kehadiran orang Jawa di tanah Deli tidak saja menguntungkan bagi orang Melayu tetapi juga bagi etnis yang lain, se-

perti orang Batak Mandailing dan Batak Toba. Masuknya orang Batak Mandailing dan Batak Toba ke perkebunan, yang pada dasarnya tidak disukai oleh para pengusaha Belanda, adalah melalui perembesan yang dilakukan melalui jalan melingkar, yaitu melalui "Kampung Jawa". Setelah mereka "menjawakan" diri barulah mereka masuk ke perkebunan.

Pembauran suku-suku bangsa di daerah perkebunan dan di sekelilingnya mengakibatkan dibutuhkan sarana komunikasi yang kelak merupakan suatu embrio timbulnya suatu bahasa kesatuan. Bahasa Melayu sebagai "lingua-franca" ternyata dapat diterima sebagai jalan "kompromi" dalam berkomunikasi antaretnis yang ada di daerah Sumatera Timur khususnya dan Sumatera Utara umumnya.

Karena sifat dan sikap Budaya Jawa yang pada dasarnya menginginkan suatu keharmonisan dalam lingkungannya, maka dalam berkomunikasi antara suku Jawa sendiri yang ada di perkebunan terciptanya suatu bahasa yang juga dapat dimengerti oleh suku-suku bangsa lainnya. Akibatnya, bila bahasa "Jawa" ini dibawa kembali ke daerah asalnya, ternyata dapat membingungkan para pendengarnya. Sebab dalam bahasa "Jawa-Deli", terdapat perbendaharaan kata-kata yang tidak terdapat di daerah aslinya. Dengan berbekal bahasa yang demikian itu membuat orang "Jawa-Deli" mudah diidentifikasi dari mana asalnya. Tetapi dengan bahasa "Jawa" yang demikian itu ternyata membuat orang Jawa dapat diterima di tanah Deli.

Kehadiran orang Jawa ke Sumatera Utara yang terus-menerus melalui kuli kontrak menyebabkan pada saatnya orang Jawa merupakan mayoritas di daerah ini (Pelly, 1983). Mayoritas ini ternyata tidak menimbulkan rasa kebencian di kalangan etnis yang lain. Malahan kemayoritasan tersebut telah menempatkan figur orang Jawa sebagai pemersatu antar etnis.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup rohani mereka, para buruh perkebunan tersebut juga tak hendak meninggalkan budaya asli mereka. Mereka juga merindukan sarana hiburan seper-

ti di tanah asal mereka. Namun karena perpindahan mereka tidak disertai dengan alat-alat hiburan seperti gamelan, maka mereka membuat instrumen sendiri yang mutunya tentu jauh dari yang diharapkan.

Demi memudahkan mereka melengkapi sarana ataupun instrumen tersebut, ternyata mereka tak malu untuk menggunakan alat-alat lain yang biasa dipakai dalam kesenian penduduk setempat. Itulah sebabnya maka instrumen kesenian "ketoprak" yang ada di Sumatera Utara berbeda sama sekali dengan instrumen ketoprak di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa ketoprak menggunakan seperangkat gamelan, maka ketoprak di Sumatera Utara menggunakan "Akordion" untuk menggantikan fungsi gamelan dan tambur besar untuk menggantikan fungsi kendang, dan sepotong bambu berfungsi untuk menggantikan "kecrekan".

Seperti kita ketahui bahwa instrumen yang digunakan oleh orang Jawa di Sumatera Utara dalam kesenian ketoprak tersebut adalah instrumen yang biasa digunakan oleh orang-orang Melayu. Kesiediaan orang Jawa menggunakan instrumen tersebut tentunya sangat diterima dengan baik oleh orang-orang Melayu.

Untuk menjaga hubungan baik mereka dengan suku-suku yang lain, maka bahasa pengantar dalam kesenian tersebut terkadang juga digunakan "bahasa Indonesia". Terutama dalam kesenian Ludruk yang ceritanya dapat menggunakan cerita kontemporer ataupun cerita-cerita penduduk setempat, sedang pada kesenian ketoprak dan wayang, bahasa Indonesia mereka gunakan dalam fase "goro-goro", yaitu pada waktu para Panakawan muncul dan berkomunikasi.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam goro-goro tersebut sangat disukai oleh semua pihak. Sebab isi pesan yang disampaikan melalui dialog para Panakawan tersebut biasanya adalah sentilan kehidupan sehari-hari yang timbul di masyarakat. Terkadang mereka menyisipkan pesan yang nadanya menentang Belanda sebagai penjajah. Dengan demikian kesenian Jawa yang

ada di daerah Sumatera Utara tidak hanya dapat dinikmati oleh orang Jawa saja tetapi juga oleh suku-suku yang lain yang ada di daerah ini.

Pada waktu pesta, orang Jawa juga tak segan-segan untuk mengundang "orang lain" datang ke pesta mereka. Bila "orang lain" ini hadir, maka mereka akan ditempatkan pada tempat yang terhormat. Pada waktu orang lain mendapat musibah, orang Jawa tak segan-segan untuk hadir dalam menyampaikan rasa turut berlangsungkawa. Tingkah laku yang demikian ini membuat citra orang Jawa di Sumatera Utara "baik" di mata suku-suku lain, sehingga kehadiran orang Jawa ke Sumatera Utara umumnya, Sumatera Timur khususnya, melalui para "kuli kontrak" bukan merupakan "musuh" penduduk setempat, tetapi merupakan "saudara" yang senasib sepenanggungan.

Karena pola tingkah laku orang Jawa merupakan cermin dari budaya Jawa, maka posisi orang Jawa yang ada di daerah Sumatera Utara merupakan pula unsur pemersatu antara suku-suku yang lain yang ada di daerah ini. Akibatnya benih yang ada di kalangan suku-suku yang lain yang ada di daerah ini sebagai "bangsa Indonesia" semakin subur dengan kehadiran orang Jawa di antara mereka. Rasa kebangsaan itu meledak setelah timbulnya perang kemerdekaan untuk mengusir Belanda dari daerah Sumatera Utara.

Kehadiran Pak Bejo dan Ahmad Taher sebagai pemimpin laskar dalam mengusir Belanda dari daerah ini adalah bukti diterimanya "orang Jawa" sebagai alat pemersatu di antara suku-suku bangsa Indonesia yang ada di Sumatera Utara.

Jadi diterimanya kehadiran orang Jawa di daerah Sumatera Utara bukanlah suatu hal yang kebetulan, tetapi adalah akibat dari misi budaya orang Jawa yang sedemikian rupa peranannya, sehingga mereka "berterima". Di luar sadar suku-suku yang lain ternyata budaya masyarakat Jawa tersebut ternyata berperan dalam pengintegrasian antar suku (etnik) yang ada di daerah ini yang kemudian menyatakan dirinya bangsa Indonesia.

III

Pembukaan perkebunan secara besar-besaran di daerah Sumatera Utara oleh pengusaha Belanda ternyata membawa dampak positif bagi terbentuknya nasionalisme Indonesia. Baik secara fisik maupun secara psikologis. Sebab dengan pemindahan orang-orang Jawa ke daerah-daerah luar Jawa secara fisik telah membantu terciptanya kebhinnekaan suku-suku yang mendiami suatu daerah. Perlakuan yang kejam terhadap suku-suku tersebut telah mendorong terciptanya ketunggalikaan rasa nasionalisme secara psikologis, sehingga pada saatnya yang tepat rasa nasionalisme tersebut akan terwujud dengan padu yang tidak mungkin lagi untuk dipecah-pecahkan lagi.

Terbentuknya rasa nasionalisme seperti tersebut di atas bukan semata-mata karena perlakuan yang diberikan oleh penguasa Belanda pada waktu itu, tetapi juga karena adanya integrasi antar etnik. Integrasi tersebut tercipta secara baik adalah akibat dari interaksi yang baik pula dari budaya suku-suku yang ada di daerah Sumatera Utara.

Budaya orang-orang Jawa ternyata mampu menciptakan suatu pola integrasi dengan suku-suku setempat di mana mereka berada. Itulah sebabnya maka pada kenyataannya orang-orang Jawa dapat "berterima" di tempat mereka merantau. Terkadang orang Jawa merupakan suatu mediator antara suku-suku yang satu dengan lainnya kurang dapat saling menghargai.

Peranan sebagai mediator tersebut adalah akibat dari sikap budaya masyarakat Jawa yang dapat "ngemong" sikap ngemong tersebut dapat menciptakan suatu suasana yang sedemikian rupa, sehingga merupakan suatu wadah, yang pada saatnya dapat dirasakan sebagai "melting pot" yang dapat menciptakan rasa kebersamaan yang kelak merupakan suatu kesatuan yang bernama bangsa Indonesia.

Untuk daerah Sumatera Utara rasa kebersamaan menciptakan rasa nasionalisme yang mencapai puncaknya pada waktu masa setelah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan

Indonesia. Jadi ternyata budaya Jawa mampu untuk berperan dalam masalah integrasi etnik di daerah Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardjowirogo, Marbangun, *"Manusia Jawa"*, Penerbit Idayu, Jakarta, 1982.
- Mulders, Niels, *"Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional"*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1981.
- Partokusumo, H. Karkono, *"Penggalian Unsur Kebudayaan Jawa"*, Pada Seminar Disiplin Nasional, Universitas Andalas, Padang, 1983.
- Pelly Usman, *"Urban Migration and Adaptation in Indonesia: A Case Study of Minangkabau and Mandailing Batak Migrants in Medan, North Sumatra"*, Ph.D Dissertation, University of Illinois, Urbana - Champaign, 1982.
- Pelly, Usman, dan Darmono, *"Pendangan Tentang Makna Hidup dan Transisionalitas Masyarakat: Studi Kasus Sumatera Utara"*, Pada Seminar Studi Strategi Kebudayaan, LIPI, di Banjarmasin, 1983.

MASALAH ASIMILASI ANTARA PELAJAR PRIBUMI DAN NON PRIBUMI PADA BEBERAPA SMTA DI KODYA MEDAN

(Oleh: Sulaiman Lubis Dharmansyah)

1. Pendahuluan

Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka perwujudan persatuan dan kesatuan antara warga negara Indonesia asli (pribumi) dan warga negara Indonesia keturunan asing non-pribumi.

Seperti diketahui di negara kita ada beberapa kelompok warga negara Indonesia yang berasal dari keturunan asing, seperti Cina, Arab, India dan sebagainya. Namun yang sering dibicarakan atau dipermasalahkan adalah hubungan antara warga negara Indonesia asli dengan warga negara Indonesia keturunan Cina. Hal ini dapat dipahami, mengingat jumlah mereka mayoritas dibandingkan dengan warga negara turunan asing lainnya. Pada tahun 1939 jumlah mereka kira-kira 4,2 juta, yaitu kira-kira 2,8 persen dari kira-kira 147 juta jiwa penduduk Indonesia. (DR. Leo Suryadinata : 1984). Di samping itu pada tahun 1980 juga terdapat lebih dari satu juta jiwa Cina asing

di Indonesia, di antaranya 914.111 warga negara RRC, 122.013 tanpa kewarganegaraan dan 1.907 warga negara Taiwan (tempo 1980). Selain dari pada jumlah mereka yang besar, juga disebabkan peranan mereka yang menonjol dalam kehidupan ekonomi di negara kita. Betapa besar peranan mereka di bidang ekonomi dapat digambarkan, bahwa untuk tahun 1968 saja diperkirakan ada 440 juta dollar investasi Cina dalam negeri Indonesia, dibandingkan dengan investasi Jepang di Indonesia sebesar 800 juta dollar pada tahun 1974. (Journal Kamar Dagang Cina Singapore : 1974).

Akibat kelebihan mereka di bidang kehidupan ekonomi, maka persepsi warga negara Indonesia asli terhadap mereka selalu yang bersifat negatif, karena ada anggapan bahwa mereka memperoleh kekayaan secara tidak jujur; sehingga timbulah tuduhan-tuduhan seperti: sombong, licik dalam berusaha, suka memberi hadiah/menyogok untuk melicinkan usaha, hidup secara eksklusip, tinggal di pusat kota dalam gedung tembok yang lalu berpagar besi dari luar dan dalam, seolah-olah semua warga pribumi pencuri/orang-orang nakal.

Seterusnya mereka selalu mempergunakan bahasa Cina di mana ada kesempatan (terutama hal ini untuk Cina yang berada di Kota Medan dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara). Peranan mereka yang lebih menonjol dalam kehidupan ekonomi dan prilaku kehidupan mereka sehari-hari dalam pergaulan inilah yang sering menimbulkan benturan-benturan dalam hubungan mereka dengan warga negara Indonesia asli.

Beberapa kasus dapat dikemukakan sehubungan dengan masalah benturan-benturan tersebut, seperti peristiwa di Medan (1966), Aceh (1980), Solo (1981), Jakarta, Ujung Pandang dan lain-lain. Jika dikaji penyebab dan yang lebih penting lagi akibat-akibat yang ditimbulkannya dapat merusak sendi-sendi usaha persatuan dan kesatuan bangsa kita yang ber-Pancasila itu.

Beberapa usaha memang secara terus-menerus telah dan sedang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyara-

kat untuk meniadakan atau setidaknya mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya benturan-benturan tersebut.

Ada anjuran pemerintah agar warga negara keturunan Cina mengganti nama-nama mereka yang sesuai/"berbau" Indonesia Asli. Penggunaan huruf Cina atau bahasa Cina tidak boleh diajarkan di sekolah-sekolah, peraturan mengenai jenis usaha, perdagangan, perekonomian dan sebagainya, yang kesemuanya bermaksud mengatur hubungan antara warga negara Indonesia asli dan non-pribumi.

Usaha-usaha tersebut masih memerlukan waktu untuk penyempurnaannya dan di masyarakat masih terdapat jurang pemisah (gap) antara pri dan non-pri, sehingga masih potensial untuk sesewaktu dapat menimbulkan benturan-benturan kembali.

Seperti disinggung di atas usaha untuk membenahi hubungan antara pri dan non-pri, bentuk dan caranya bermacam-macam, baik yang datangnya dari masyarakat, pemerintah maupun organisasi semi pemerintah. Salah satu dari organisasi semi pemerintah ialah melalui BAKOM PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa). Tugas pokok badan ini (K. Sindhunata, SH, 1984) ialah membantu pemerintah menyukseskan penghayatan kesatuan bangsa, antara lain sebagai wadah komunikasi antara apa yang masih dikenal sebagai "pri" dan "non-pri", melenyapkan segala prasangka timbal-balik menuju perataan jalan bagi pembauran mantap, seperti dikumandangkan dalam GBHN 1978 dan 1983. Selanjutnya badan tersebut juga memberikan penerangan mengenai masalah pembauran, yaitu di bidang hukum/kehidupan bernegara, sosial budaya, ekonomi, pergaulan sosial/pendidikan, penelitian/riset dan lain-lain.

Namun demikian sebanyak itu usaha yang sudah dan sedang dilakukan, tetapi di sana-sini kelihatan masih banyak hambatan yang ditemui dalam mensukseskan tujuan yang hendak dicapai. Salah satu hambatan ialah seperti apa yang disinyalir

oleh Tim Komisi IX DPR Republik Indonesia (H. Soedarsono Martoprawiro, 1983), beliau mengatakan bahwa pembauran keturunan China masih mengalami hambatan psikologi dan sosiologi.

Selanjutnya perlu dikembangkan kesediaan warga negara asli untuk menerima dan kesadaran warga negara keturunan Cina untuk menjadi WNI yang bertanggungjawab.

Usaha lain yang coba dilakukan pemerintah (terutama setelah masa Orde Baru) ialah melalui bidang pendidikan. Melalui bidang pendidikan diusahakan mengadakan pembauran antara pelajar-pelajar pribumi dan non-pribumi yang pada akhirnya melalui proses pembauran tersebut diharapkan akan terjadi apa yang disebut asimilasi.

Berbicara mengenai bagaimana agar asimilasi bisa terwujud, untuk itu perlu lebih dahulu dibicarakan masalah interaksi sosial/hubungan antara orang secara perseorangan atau antara kelompok-kelompok manusia. Tegasnya interaksi sosial (Gillin and Gillin, 1954) merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang perseorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perseorangan dengan kelompok manusia. Dapat dikatakan bahwa interaksi sosial (Kimball Young, Raymond W. Mack, 1959), merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa ada interaksi sosial, tak mungkin ada kehidupan bersama. Sebagai perwujudan dari bentuk-bentuk interaksi sosial ada tiga macam (Soerjono Soekanto, 1979) yaitu kerjasama (cooperation), persaingan (competition) dan pertentangan/pertikaian (conflict).

Salah satu contoh dari bentuk kerjasama (cooperation) yang paling sempurna ialah terdapatnya asimilasi (Gillin & Gillin, 1954), dimana dalam aktivitas interaksi sosial ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses mental dengan mengingat tujuan bersama.

Selanjutnya perlu dikemukakan pula pendapat dari (Koen-tjaraningrat, 1965), yang merinci bahwa proses asimilasi itu timbul, bila ada :

- a. Kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya.
- b. Orang perorangan sebagai warga kelompok-kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama, sehingga Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.

Berkaitan dengan konsep dan pengertian asimilasi seperti yang diungkapkan di atas, maka makalah ini mencoba mengkaji asimilasi dari atau melalui konsep pendidikan, khususnya mengenai asimilasi antara pelajar pribumi dan non pribumi pada beberapa SMTA pembauran yang ada di Kotamadya Medan.

2. Lahirnya Sekolah China di Medan*)

Sebelumnya secara sepintas lalu dapat digambarkan tentang sejarah kedatangan orang Cina ke Sumatera Timur sebagai berikut :

(Berdasarkan cuplikan sana sini dari artikel Tengku Lukman Sinar "The Coming of the Chinese Immigrants to East Sumatera in the 19th Century").

....."Di dalam abad ke XV, Tanah Deli dikunjungi oleh armada China, pada masa itu berkuasa Kaisar Kung Lo. Perdagangan antara ke dua negeri ini dalam bentuk barter, yaitu hasil hutan dari Tanah Deli dengan porselin, sutra dan manik-manik dari negeri China"

....." Pada tahun 1823 John Anderson pimpinan Missi Inggris dari Malaya datang ke Sumatera Timur untuk membuat perjanjian dengan raja penguasa setempat, katanya jumlah orang China sangat sedikit, perdagangan masih dimonopoli oleh Melayu Batu Bara"

*) Bahan untuk bagian ini disarikan dari: Dharmansyah, Nani Rusmini, Sulaiman Lubis dkk: "Masalah Asimilasi antara pelajar pribumi dan non-pribumi pada SMA di Kotamadya Medan", 1982.

....." Pada tahun 1872 jumlah penduduk China di Deli meningkat lebih dari 4.000 orang, yang terbanyak di antaranya sebagai buruh pada perkebunan tembakau Deli. Mji (yang sudah beroperasi sejak tahun 1869). Kemudian, pada tahun 1888 terdapat sekitar 18.352 orang China"

....." Sesuai dengan laporan tahunan "Deli Planters Vereeniging", di antara April 1915 – Maret 1916 seluruh penduduk China di pantai Timur Sumatera berjumlah 99.236 orang di antaranya 92.646 laki-laki"

....." Pada kurun akhir abad ke XIX inilah orang China menempati seluruh kedudukan di dalam sektor pengangkutan di Sumatera Timur. Pengusaha perkebunan Belanda memberikan kesempatan kepada orang China sebagai supplier bahan makanan, kontraktor dan sebagainya. Dahulu mereka sebagai kuli, sekarang menjadi pengusaha toko, industriawan kaya dan seterusnya"

Setelah mereka berhasil dalam bidang ekonomi/perdagangan, maka keberhasilan ini mendorong mereka untuk memasuki kegiatan dalam sektor lainnya, di antaranya sektor pendidikan.

Pada akhir abad ke-19 mereka membuka untuk pertama kalinya sekolah Cina di Medan dengan nama: "The Medan Boarding School". Pada waktu itu tidak satu pun sekolah yang dibuka oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk orang Indonesia. Reaksi yang timbul di kalangan Hindia Belanda adalah rasa was-was mereka akan kemajuan sekolah Cina yang mempergunakan bahasa Cina dan bahasa Inggris dengan pimpinan oleh guru-guru dari Malaya.

Untuk mengimbangi sekolah tersebut, Belanda membuka pertama kalinya "Holland Chinese School (HCS)" pada tahun 1917. Sekolah ini merupakan sekolah khusus untuk orang Cina saja. Sedangkan untuk orang Indonesia dibuka sekolah "Holland Irlander School (HIS)".

Awal abad ke-20 tahun-tahun berikutnya nasionalisme Indonesia juga merupakan saat di mana masyarakat Cina di sini semakin aktif memperjuangkan hak mereka. Mengingat akan "sinosasi" yang terjadi sebelumnya, cukup wajar kalau

organisasi-organisasi yang lahir berorientasi pada nilai-nilai lama maupun pada gagasan-gagasan yang diperjuangkan kaum pembaharuan di daratan Cina, apalagi karena pemerintah China mulai lebih memperhatikan warganya di luar negeri (Lim, 1980).

Minat orang-orang Cina sejak awal abad ke-20 ini semakin bertambah besar untuk membekali anak mereka dengan pendidikan, karena melalui lembaga ini "sinosasi" dapat lebih lancar.

Pada tahun 1906 di Medan dibuka sekolah dengan nama: "Soe Toeng School" artinya "Sekolah Sumatra Timur". Sekolah ini disponsori oleh orang-orang Cina pedagang beras dan gula. Sekolah ini berkembang pesat sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (Soe Toeng High School). Sedang sebelumnya hanya sampai Sekolah Menengah Pertama saja yaitu Soe Toeng Middle School. Kemudian oleh beberapa orang yang berasal dari pengurus Soe Toeng, dibuka sekolah dengan nama: TUN PUN yang lokasinya terletak di Chong Yong Hien Straat dahulu, sekarang persimpangan Jalan Sutomo — Bogor. Selanjutnya karena pesatnya kemajuan sekolah ini, maka lokasinya dipindahkan ke jalan Merbau sekarang dan namanya ditukar menjadi Hwa Chung (sekarang menjadi Kompleks IKIP Medan). Dalam bahasa China Hwa merupakan singkatan dari Hwa Ciau dan Cung berarti Singa. Dengan demikian sekolah ini dikelola oleh China Perantauan.

Kedua sekolah ini (Soe Toeng dan Hwa Chung) merupakan sekolah yang terbesar di Medan. Kalau Hwa Chung memperluas lokasi dan bangunannya maka Soe Toeng juga memperluas lokasinya dengan membangun sekolah yang gedungnya sekarang sudah menjadi APIPSU/CUT NYAK DIEN.

Beberapa nama sekolah yang dapat dicatat antara lain adalah: *Hang Kang School* dikelola oleh suku Thio Chiu, nama sekolahnya ini merupakan nama suatu daerah di Kanton. Umumnya donasi dari sekolah ini adalah pengusaha kedai sampah di perkebunan.

Lam Uah, nama ini adalah nama satu Sub Suku di Hokkian, lokasinya di jalan Thamrin sekarang.

Sam San School, artinya Tiga Bukit, sekolah ini dalam perkembangan selanjutnya berubah nama menjadi Perguruan Tri Bukit yang kemudian berubah lagi menjadi W.R. Supratman.

Chuen Wen dan *Luk Chai School*, yang disebut terakhir ini gedungnya sudah dirubah menjadi bekas Sombbrero Night Club di jalan Prof. H. M. Yamin, SH Medan sekarang.

Sekolah-sekolah yang dibuka oleh Zending Kristen Protestan ataupun Missi Roma Katholik antara lain adalah Methodis School dan Hwa Ink. Sekolah Methodis dibuka oleh Methodische Zending pada tahun 1922. Sedangkan Hwa Ink merupakan sekolah yang dikelola oleh Missi Gereja Roma Katholik (R.K.). Kedua Gereja yang menjadi basis (pengelola) kedua sekolah tersebut lokasinya di depan sentral pasar (Pajak Mercu Buana) Medan sekarang. Gereja Methodis ini masih merupakan bahagian dari Gereja Methodis yang berpusat di jalan Hang Tuah Medan.

3. Lahirnya Sekolah-sekolah Pembauran dan Permasalahan Assimilasi di Dalamnya

3.1. Proses dan Tujuan Sekolah-sekolah Pembauran

Pada sekitar tahun lima puluhan di Sumatera terjadi pergolakan yang dikenal dengan pemberontakan PRRI dan Sulawesi dengan pemberontakan Permesta. Situasi politik pada saat itu kurang menguntungkan bagi hubungan Indonesia—Amerika.

Oleh tokoh-tokoh Komunis yang berpengaruh dalam pemerintahan menyatakan bahwa pemberontakan ini didukung oleh Amerika dengan memberikan bantuan senjata melalui negara Taiwan. Orang-orang Komunis yang tergabung dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta mantelnya BAPERKI yaitu Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia sebagai wadah politik orang Cina terus menerus secara gencar

mengajukan tuntutananya kepada pemerintah agar mengambil alih segala sesuatu milik Amerika ataupun Taiwan.

Khusus dalam bidang pendidikan, pemerintah pada waktu itu mengambil alih gedung-gedung sekolah Cina dan gedung organisasi yang menurut penilaian pada waktu itu pemiliknya berorientasi ke Taiwan. Untuk mencegah eksekusi yang tidak baik, pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan untuk membentuk Pengawas Pembinaan Sekolah (PPS) tahun 1957 di bawah struktur organisasi Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Utara. Pada sekolah-sekolah yang di bawah PPS ditetapkan bahwa kurikulum sekolah tersebut harus kurikulum Pendidikan Nasional sebagaimana sekolah negeri ataupun sekolah swasta non-asing. Pelajaran bahasa asing, (Cina) hanya boleh diberikan maksimal dua jam seminggu. Jadi bahasa Cina di dalam sekolah ini berfungsi sebagai ekstra kurikuler saja. Seluruh murid dan guru serta yayasan pengelola sekolah harus Warga Negara Indonesia. Tugasnya pada masa ini dimulai pengarahannya sekolah-sekolah Cina agar berorientasi ke Negara Republik Indonesia sebagai negara tempat hidupnya.

Sebenarnya usaha pembauran ini sudah mulai dirintis sejak tahun 1954 dengan dibukanya Sekolah Percobaan Tionghoa Indonesia Negeri untuk tingkat Sekolah Dasar. Lokasi sekolah ini terletak di depan R.S. Methodis sekarang.

Beberapa sekolah Cina yang berada di bawah pengawas PPS pada waktu itu antara lain adalah :

- Soe Toeng School, merupakan sekolah tertua dan terbesar di Medan, untuk menyesuaikan diri dengan tujuan pemerintah maka pada tahun 1957 sekolah ini mengubah nama dengan "Perguruan Nasional Sutomo".
- Hang Kang School, untuk tujuan yang sama dengan di atas mengubah nama menjadi Perguruan Nasional Hang Kesturi.
- Sam San School, mengubah nama menjadi Perguruan Nasional Tri Bukit.

- **Hwa Ink**, mengubah nama menjadi Perguruan Nasional Budi Murni.
- **Methodis Chinese School**, mengubah nama menjadi perguruan Nasional Kristen Methodis.

Sedangkan sekolah-sekolah Cina yang lain yang dinilai tidak berorientasi ke Taiwan tetap berjalan seperti biasa dalam arti kurikulum tetap diarahkan kepada pembentukan budaya China sedang bahasa Indonesia hanya merupakan mata pelajaran tambahan saja. Murid-muridnya terbatas hanya warga negara asing terutama RRC.

Di antara sekolah-sekolah Cina yang terbesar yang tidak terkena di bawah pengawasan PPS adalah Hwa Chung Schiik dan Chun Wen. Sekolah ini jelas berorientasi ke negeri leluhurnya di Cina daratan atau RRC. Sebagian besar pengurus serta guru-gurunya adalah anggota BAPERKI mantel organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada masa itu sangat menentukan di dalam menetapkan keputusan Pemerintah. Tegasnya kedua kelompok tersebut merupakan kelompok penekan (Pressure Group) untuk membuat program partainya menjadi program pemerintah. Demikian kedua jenis sekolah ini (PPS dan Non-PPS) terus berjalan.

Dalam perjalanan ini sekolah PPS terutama Perguruan Nasional Sutomo maju pesat karena semakin banyak orang-orang Cina yang masuk Warga Negara Indonesia. Tokoh-tokoh Baperki merasa khawatir akan kemajuan ini, mereka merasa banyak kehilangan pengikut dengan banyaknya anggota mereka menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Perguruan Nasional di bawah pengawasan PPS. Untuk mengatasi masalah ini mereka mengalihkan Chun Wen School menjadi Perguruan Nasional Andalas yang statusnya sama dengan Perguruan Nasional lainnya.

Kebijaksanaan ini cukup berhasil karena dalam persaingan ini Perguruan Andalas menunjukkan kemajuan yang pesat. Ba-

nyak murid-murid dari sekolah-sekolah nasional lain yang berorientasi ke RRC pindah ke sekolah ini. Puncak dari kemajuan ini adalah dengan dibukanya universitas sebagai wadah untuk menampung tamatan SMA dari perguruan Andalas. Universitas ini jelas berada di bawah naungan BAPERKI. Nama universitas tersebut adalah Universitas Republika yang disingkatkan UREKA. Tokoh-tokoh dalam UREKA ini sebagian besar anggota Himpunan Sarjana Indonesia (HSI) organisasi mantel dari PKI.

Dengan berperannya BAPERKI di dalam pemberontakan G.30.S/PKI, maka pemerintah tak ragu lagi untuk melarang sekolah-sekolah khusus bagi anak-anak penduduk warga negara asing China. Bagi siswa yang berasal dari perguruan Andalas atau perguruan lainnya yang dinyatakan ditutup kalau kebetulan mereka sudah warga negara Indonesia masih ada penampungannya yaitu sekolah yang berada dalam naungan PPS. Tetapi sebaliknya bagi siswa-siswa yang warga negara mereka tidak mempunyai tempat penampungan. Akibatnya banyak muncul sekolah-sekolah liar yang pada lahirnya mereka menyatakan membuka kursus Bahasa Inggris, tetapi kenyataannya mereka membuka sekolah dengan kurikulum yang sesuai dengan kurikulum sekolah. terlarang tersebut yaitu penanaman budaya Cina. Guru-guru sekolah terlarang tersebut secara illegal mengadakan privat les dari rumah ke rumah. Untuk mengatasi keadaan ini pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 015/1968 tentang peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Sekolah Nasional Proyek Khusus Dalam Rangka Menampung Kebutuhan Pendidikan Dan Pengajaran Segenap Anak Penduduk Indonesia.

Sekolah ini terbuka bagi segenap penduduk Indonesia baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia dengan mengingat usaha mempercepat proses asimilasi. Pihak swasta mengatur segi-segi administratif finansial, materil dan tata usaha, dan pemerintah mengatur segi-segi tehnik edukatif. Sekolah nasional tersebut dapat diadakan oleh satu Badan Hukum Indo-

nesia yang berbentuk Yayasan Pengajaran dan harus dapat menunjukkan dengan akta-aktanya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang kemampuannya untuk menyelenggarakan segala fasilitas pendidikan dan pengajaran.

Maka dengan disatukannya pendidikan anak-anak warga negara asing Cina dengan pendidikan nasional dimaksudkan agar koloni-koloni sekolah asing di Indonesia tidak ada lagi. Tentu saja peraturan ini disambut oleh orang-orang Cina. Dengan dibukanya SNPK (Sekolah Nasional Proyek Khusus) ini, banyak pula murid-murid yang tadinya murid sekolah nasional dalam pengawasan PPS masuk/pindah ke SNPK. Mereka rupanya lebih tertarik ke sana karena merasa lebih banyak dan luas pergaulannya di antara sesama orang Cina. Karena kalau di sekolah mereka yang lama, muridnya khusus orang Cina yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia saja ditambah beberapa orang Warga Negara Indonesia asli.

Demikian SNPK ini berjalan selama 5 tahun. Dalam berjalannya sekolah ini banyak terdapat eksekse yang sangat merugikan bagi usaha mempercepat proses asimilasi. Karena pada kenyataannya Bahasa Indonesia tidak lebih hanya sebagai ekstra kurikulum saja bagi mereka. Yang berubah hanya nama sekolahnya saja, sedangkan isinya hampir sama dengan sekolah Cina sebelum adanya PPS. Orientasi masih tetap kepada kebudayaan leluhurnya di negeri Cina, baik RRC maupun Taiwan. Sulit dibedakan antara Perguruan Nasional (PPS) dengan SNPK. Murid-murid ataupun guru-guru yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia dan non-Warga Negara Indonesia pada kenyataannya sama saja yaitu masih belum berorientasi pada kebudayaan Indonesia. Malah kalau pun secara kebetulan ada dua atau tiga orang murid sekolah tersebut menjadi Cina. Tegasnya pada masa itu SNPK tersebut hanya merupakan kamuflase saja untuk dapat terus menanamkan budaya Cina.

Melihat situasi ini, WAPANGKOWILHAN I Sumatera Utara dan Kalimantan Barat (Mayor Jenderal Drs. Sumadi)

pada tanggal 17 Oktober 1973 mengeluarkan instruksi melalui Radiogram No. TR/589/KANWIL yang isinya antara lain adalah: Menutup semua sekolah SNPK dan seluruh sekolah yang murid-muridnya mayoritas keturunan asing (KA) harus dibaurkan.

Dalam rangka usaha ini sekolah-sekolah Cina dijadikan sekolah asimilasi sedang beberapa sekolah-sekolah negeri dijadikan sekolah partisipasi. Beberapa sekolah Cina seperti eks Lam Hwa (Husni Thamrin) dijadikan SMP Negeri X, demikian juga SMA eks Soe Toeng (Sutomo) dalam rangka mempercepat pelaksanaan isi instruksi ini.

Kalau di dalam SNPK pembauran fisik didasarkan pada kewarganegaraan yakni 60% murid atau guru harus Warga Negara Indonesia dan selebihnya boleh Warga Negara Asing, maka di dalam sekolah Asimilasi (Pembauran) dasarnya adalah 60% murid dan guru harus pribumi (Warga Negara Indonesia Asli), dan selebihnya dengan non-pribumi yang terdiri dari Warga Negara Indonesia Keturunan Asing (WNKA), Warga Negara Asing (WNA), dan Stateless. Tegasnya instruksi ini mempunyai pandangan "Melalui pembauran fisik akan tercapai pembauran sosial budaya".

Dengan sekolah asimilasi (pembauran) dimaksudkan adalah Sekolah Nasional Swasta eks SNPL untuk memperoleh keseimbangan memberikan sebagian muridnya (karena mayoritas WNKA) kepada sekolah partisipasi (yang seluruh muridnya WNIA). Sebaliknya sekolah partisipasi memberikan sebagian muridnya untuk sekolah asimilasi.

3.2. *Permasalahan Asimilasi Pada Sekolah-sekolah Pembauran*

Sebelum sampai penjelasan tentang pembauran fisik terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian tentang "Pembauran". Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam keputusannya No. 0170/U/1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Asimilasi (Pembauran) di Bidang Pendidikan mengemukakan :

"Assimilasi (Pembauran) adalah kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Pendidikan untuk anak didik Warga Negara Indonesia keturunan Asing dan anak didik penduduk Indonesia Warga Negara Asing guna mendapatkan pendidikan yang bersifat Nasional. Warga Negara Indonesia harus menghayati dan berjiwa Pancasila, dan anak didik penduduk Indonesia Warga Negara Asing wajib menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup di mana mereka berada".

Berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka maksud dan tujuan asimilasi pembauran ialah :

- a. Menimbulkan dan memupuk kesamaan nilai, sikap hidup dan perilaku sehingga tercapai persatuan dan kesatuan Bangsa, senasib, seperjuangan, se-Bangsa se-Tanah Air, serta mempunyai tekad bersama mencapai cita-cita Bangsa dan Negara Indonesia berdasarkan Falsafah Negara Pancasila.
- b. Menumbuhkan perasaan sebagai anggota/bagian dari masyarakat Bangsa Indonesia seutuhnya, sehingga tercipta pri kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan Bangsa".

Dari hasil data-data yang diperoleh bahwa sesungguhnya tujuan yang akan dicapai dari hasil pembauran tersebut masih belum tercapai sebagaimana diharapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat terlihat di dalam pergaulan/hubungan mereka sesama teman sekolah yaitu antara siswa-siswi: WNI-KA dengan siswa-siswa WNI-A dapat dikatakan masih renggang. Hal ini mungkin karena belum adanya kesadaran untuk membina persatuan yang kompak antara sesama teman dalam satu wadah. Baik itu pergaulan di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.

Siswa-siswa WNI-KA apabila hendak pergi ke sekolah tidak mempunyai teman yang tetap berkisar 20,5%, selebihnya dengan teman sekelas yang dekat rumah 14,5%. Sedangkan siswa

WNI-A pergi ke sekolah temannya tidak tentu sekitar 19,5% dan selebihnya ada yang pergi dengan teman lain kelas yang satu sekolah tetapi rumahnya berdekatan ataupun dengan teman sekelas yang rumahnya dekat/satu kampung.

Keadaan siswi-siswi pembauran di dalam lingkungan sekolah kelihatannya lebih condong dengan membentuk kelompok-kelompok tertentu, di mana siswa WNI-KA hanya berkelompok siswa WNI-A. Hal ini terlihat pada waktu istirahat, sebelum bel masuk dan sebagainya, dalam kelompok tersebut tentu saja bahasa yang mereka pakai adalah bahasa Cina; sehingga bagi siswa-siswa WNI-A bahasa tersebut tidak mengerti dan otomatis rasa untuk berbaur dengan kelompok WNI-A tidak ada. Jelasnya bahwa tidak terjadi komunikasi yang integratif.

Keinginan untuk berbelanja/jajan di kantin sekolah, kelihatannya lebih besar minat pembeli yang datangnya dari siswa WNI-KA, jika dibandingkan dengan siswa WNI-A. Hal ini tentu diakibatkan oleh beberapa hal, seperti: harga makanan/minuman yang relatif agak mahal; dan juga disebabkan soal menu makanan di mana kantin-kantin ini pada umumnya menyediakan masakan Cina seperti: pangsit, mie kuew tiaw, bakpau dan sebagainya yang tentu membawa pengaruh besar bagi para siswa WNI-A untuk tidak berbelanja/jajan ke kantin tersebut, terutama bagi siswa-siswa yang beragama Islam. Sedangkan untuk jajan di luar kompleks sekolah tidak dibenarkan dan pintu gerbang sekolah ditutup bila waktu bel istirahat berbunyi. Walaupun sebagian siswa ada juga yang jajan ke luar dengan melalui akal licik.

Suasana di dalam ruangan kelas, masih menunjukkan adanya pengelompokan. Pengelompokan tersebut, di mana siswa-siswa WNI-KA temannya sebangku adalah siswa WNI-KA, demikian juga dengan siswa-siswa WNI-A. Walaupun ada juga yang sebangku dengan siswa-siswa WNI-A, yang terutama bagi siswa-siswa laki-laki. Sebelumnya telah diatur oleh pihak sekolah posisi duduk para siswa pembauran tersebut, yaitu dalam satu bang-

ku diduduki oleh dua orang siswa yang terdiri dari satu orang siswa WNI-KA dan satu lagi siswa WNI-A. Hal demikian dijalankan untuk dapat terjadi pembauran oleh para siswa dalam kelas. Akan tetapi kenyataannya bahwa para siswa pembauran lebih condong untuk memilih temannya sebangku dari satu warga. Di sisi lain yaitu karena teman mereka sebangku adalah sama-sama satu warga, mengakibatkan mereka saling memakai bahasa Cina ketika sedang berbincang-bincang sesamanya. Sehingga secara tidak langsung mereka belum secara sadar untuk memakai bahasa pengantar di kelas yaitu Bahasa Indonesia, kecuali pada saat momen-momen tertentu, seperti bila sedang menjawab pertanyaan guru, berbicara dengan teman yang lain warga, baru terdengar mereka memakai Bahasa Indonesia.

Jadi untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan bahwa pada umumnya siswa-siswa WNI-KA agak kurang keinginan mereka untuk bergaul dengan siswa WNI-A. Kecuali pada saat tertentu, misalnya di dalam kelompok. Kelompok diskusi yang telah ditentukan oleh guru mereka, praktek di laboratorium, atau ketika mengadakan kunjungan-kunjungan dan lain-lain, kepala sekolah mengambil inisiatif untuk mengirimkan utusannya ke tempat tersebut. Barulah di sini dapat terlihat adanya pembauran tersebut, walaupun mungkin ini hanya bersifat sementara saja.

Di dalam bidang kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler kelihatan bahwa mayoritas para siswa WNI-KA lebih menunjukkan antusias yang cukup besar untuk turut aktif di dalamnya. Hal ini tentu didasarkan kepada kemampuan mereka (WNI-KA), sedangkan bagi siswa-siswa WNI-A agak kurang untuk turut karena berbagai penghambat, seperti: siswa-siswa WNI-A pada umumnya orang tua mereka berpenghasilan rendah dan juga karena kesibukan-kesibukan di rumah. Seperti dalam kegiatan di lapangan olah raga, di mana pada umumnya sekolah-sekolah SMA pembauran melaksanakan kegiatan bola basket, bulu tangkis, tennis meja, dan beberapa cabang atletik; prestasi siswa-siswa WNI-KA nampak lebih maju dari para siswa-siswa WNI-A.

Karyawisata, cross country, kamping, juga banyak dilaksanakan dengan harapan melalui usaha tersebut maka pembauran fisik akan semakin intensif. Kelihatannya usaha ini mulai menunjukkan hasil.

Bahasa pengantar mereka penggunaan antara siswa WNI-KA dengan para pegawai sekolah WNI-KA adalah bahasa Cina. Sebaliknya bila berhubungan dengan siswa WNI-A, guru-guru WNI-A, pegawai-pegawai sekolah WNI-A baru mereka berbahasa Indonesia.

Dari keterangan-keterangan di atas dapatlah dikatakan bahwa pembauran fisik yang diterapkan di sekolah-sekolah pembauran di Kota Medan belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan, karena interaksi antara siswa tersebut terjadi hanya pada saat-saat tertentu saja, tetapi hal ini adalah lumrah sebagai suatu gejala dalam awal proses asimilasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratanata, R.H.S., *Kebijaksanaan Baju Politik*, Prisma, April 1981.
- Dharmansyah, dkk, *Masalah Assimilasi antara Pelajar Pribumi dan Non pribumi pada SMA di Kotamadya Medan*, IKIP Medan, 1982.
- Gillin, John Lewis, Gillin, *Cuhural Sosiologi*, The Mac Millan Company, New York, 1954.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Cetakan ke II Penerbit U.I., Jakarta, 1965.
- Liem, Sioe Yoe, "*Minoritas Etnis Cina di Indonesia*" ditinjau oleh Brigitte Schennebeli dalam *Prisma*, No. 9, September, LP 38, Jakarta, Hal. 89-92.
- Sigit, Sardjono, *Assimilasi Pendidikan*, Depdikbud, Jakarta, 1983.
- Sinar, Lukman, "The Coming Of The Chinese Immigration To East Sumatra In The 19th Century", dalam *Berita Antropologi*, No. 37 April-Juni FSUI, Jakarta, Hal. 29-41.
- Soekanto, Soerjono, SH, MA, *Sosiologi*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1983.
- Tahja, Tunus, Drs. H., *Garis Rasial Garis Usang*, Liku-liku Pembauran, BAKOM PKB, Jakarta. 1983

Tan, Melly, G. (Ed), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*, Suatu masalah pembina kesatuan bangsa, LEKNASLIPI, dan YAYASAN OBOR, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta. Harian Kompas, Majallah Tempo, Prisma, Jakarta.

